



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum kepala daerah dilaksanakan serentak secara Nasional pada tahun 2024;

b. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas akan berakhir pada Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melalui aktivitas penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko serta aktivitas pengendaliannya dan melampirkan kedalam dokumen perencanaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas selaku Kepala Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
17. Arah Kebijakan adalah keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu tiga tahun.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh pejabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) RPD didasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2025, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tahap keempat, dan Isu Strategis aktual Daerah.
- (3) RPD dilampiri Dokumen Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada sasaran strategis Pemerintah Daerah yang merupakan hasil identifikasi risiko dan analisis risiko.

Pasal 4

RPD menjadi pedoman yang digunakan untuk :

- a. penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

BAB V TUJUAN DAN SASARAN;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

BAB IX PENUTUP.

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan/atau
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

Pasal 8

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Implikasi pilkada serentak Tahun 2024 sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Akhir masa jabatan kepala daerah yang bervariasi berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023

dan Daerah Otonom Baru. Dengan kebijakan tersebut Kepala Daerah yang jabatannya berakhir Tahun 2023 berkewajiban untuk:

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
2. Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026,
3. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan Perkada, paling lambat Minggu keempat Maret Tahun 2023.

Kepala Daerah Kabupaten Banyumas akan mengakhiri masa jabatan pada Tahun 2023. Sesuai Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- x. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- y. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- z. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
- aa. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025;

- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah harus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penyusunan RPD memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan regulasi terkait lainnya.

1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan RPJMN

Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara RPD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi dan mendukung pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional, arah kebijakan, target indikator makro, dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

1.3.2. Hubungan Antara RPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah secara bersamaan menyusun RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas juga harus memperhatikan RPD Provinsi Jawa sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan RPD antara lain isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan pembangunan kewilayahan, dan indikator serta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Banyumas

Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran RPJPD tahap keempat untuk mewujudkan Banyumas Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing, Serta Lestari pada Tahun 2025. Sasaran dan program prioritas RPJPD Tahap IV menjadi pedoman dalam penyusunan RPD.

1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Banyumas

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 menjadi dasar perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPD dijabarkan dalam RKPD dengan menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPD.

1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Renstra PD

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD untuk periode waktu yang sama. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.3.6. Hubungan RPD dengan Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Renstra PD, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.3.7. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait penyelenggaraan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan RPD merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi, permasalahan dan isu strategis daerah;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, serta prioritas pembangunan daerah pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD), pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. Memberikan tolak ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPD.

BAB II Gambaran Umum

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta rumusan isu strategis daerah.

BAB V Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran RPD berdasarkan visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Bagian ini juga memuat *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan output.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD, dan program-program prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah, dan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik geografi dan demografi wilayah merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia, serta memetakan potensi pengembangan wilayah guna mendukung pembangunan daerah. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis sebagai berikut: *Lokasi strategis* Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. *Wilayah relatif subur*; Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan. *Potensial bagi pengembangan wisata alam*; Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. *Rawan bencana*, kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas juga berkorelasi pada potensi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas.

Karakteristik demografi Kabupaten Banyumas yang menjadi perhatian adalah struktur penduduk menurut umur yang didominasi penduduk usia produktif dan menurunnya rasio ketergantungan, sehingga diperkirakan Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Untuk dapat meraih peluang bonus demografi berbagai upaya perlu dilakukan mulai dari saat ini untuk menyiapkan penduduk yang berkualitas, mendorong investasi untuk menyediakan lapangan kerja, dengan tetap mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

2.1.1. Aspek Geografi

Kondisi geografi Kabupaten Banyumas menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Banyumas mendukung bagi: 1). Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 2). Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan untuk penguatan ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 3). Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Pengembangan potensi wilayah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah selatan : Kabupaten Cilacap.
- Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes



Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.1
Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas
Terhadap Provinsi Jawa Tengah

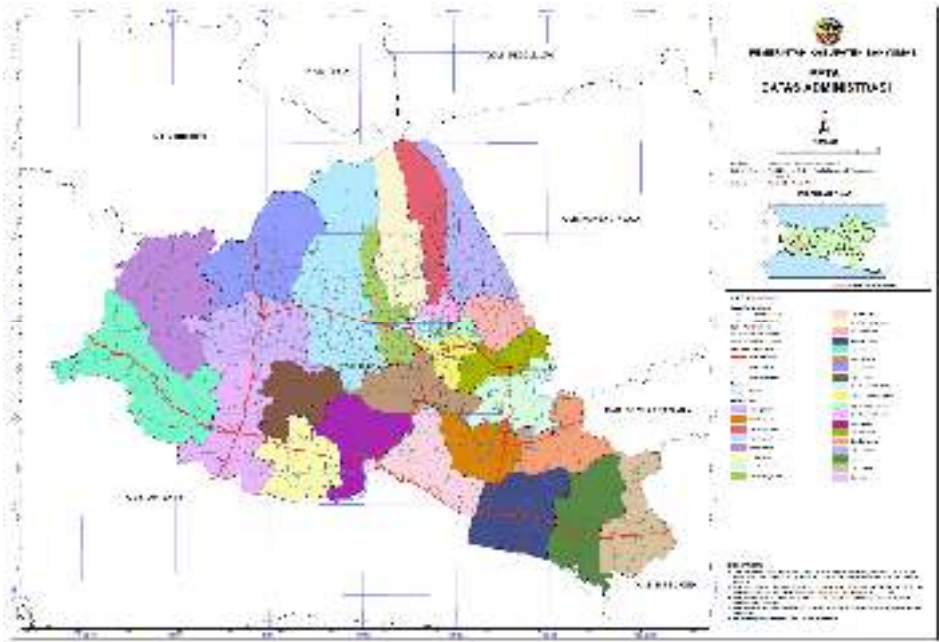
Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar, dan wilayah kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lumbir	10	-	10.266	7,73%
2	Wangon	12	-	6.078	4,58%
3	Jatilawang	11	-	4.816	3,63%
4	Rawalo	9	-	4.964	3,74%
5	Kebasen	12	-	5.400	4,07%
6	Kemranjen	15	-	6.071	4,57%
7	Sumpiuh	11	3	6.001	4,52%
8	Tambak	12	-	5.203	3,92%
9	Somagede	9	-	4.011	3,02%
10	Kalibagor	12	-	3.573	2,69%
11	Banyumas	12	-	3.809	2,87%

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
12	Patikraja	13	-	4.323	3,26%
13	Purwojati	10	-	3.786	2,85%
14	Ajibarang	15	-	6.650	5,01%
15	Gumelar	10	-	9.395	7,08%
16	Pekuncen	16	-	9.270	6,98%
17	Cilongok	20	-	10.534	7,93%
18	Karanglewas	13	-	3.250	2,45%
19	Kedungbanteng	14	-	6.022	4,54%
20	Baturraden	12	-	4.553	3,43%
21	Sumbang	19	-	5.342	4,02%
22	Kembaran	16	-	2.592	1,95%
23	Sokaraja	18	-	2.992	2,25%
24	Purwokerto Selatan	0	7	1.375	1,04%
25	Purwokerto Barat	0	7	740	0,56%
26	Purwokerto Timur	0	6	842	0,63%
27	Purwokerto Utara	0	7	901	0,68%
Jumlah		301	30	132.759	100%

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022



Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Banyumas

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan. Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan pengukuran menggunakan data spasial peta ketinggian lahan dan peta kemiringan lahan didapatkan data sebagai berikut:

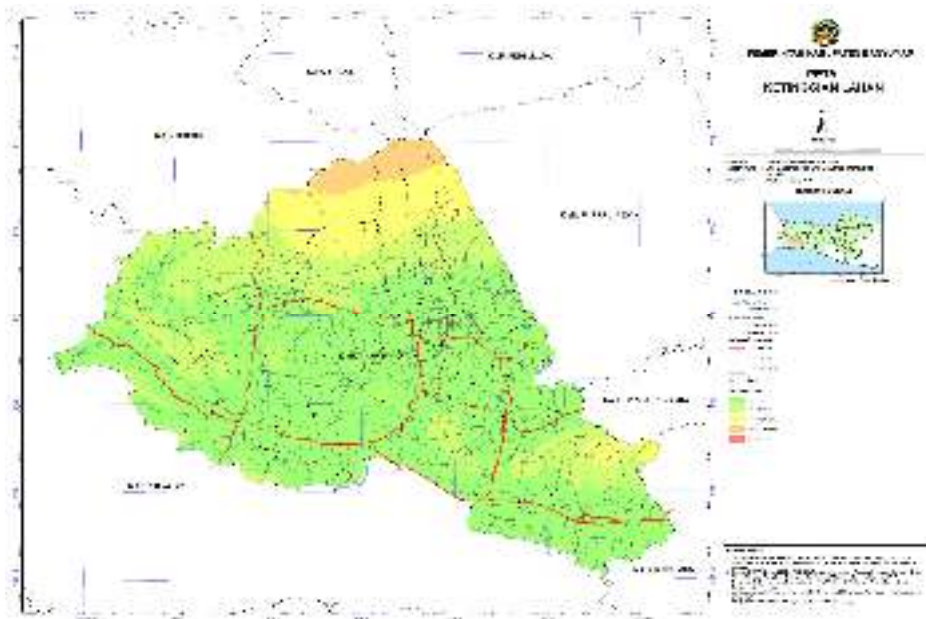
1. Berdasarkan ketinggian lahannya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Dataran dengan ketinggian 0 - 200 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
 - b. Dataran dengan ketinggian 200 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan

Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.

- c. Dataran dengan ketinggian 500 – 1500 meter diatas permukaan laut (dpl) sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara dan tenggara, yaitu meliputi Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.
 - d. Dataran dengan ketinggian 1500 – 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Pekuncen, dan Kecamatan Sumbang.
 - e. Dataran dengan ketinggian > 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah bagian paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.
2. Sedangkan berdasarkan kemiringan lahannya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Wilayah datar dengan kemiringan 0% - 8% terdapat sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
 - b. Wilayah landai dengan kemiringan 8%-15% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang,

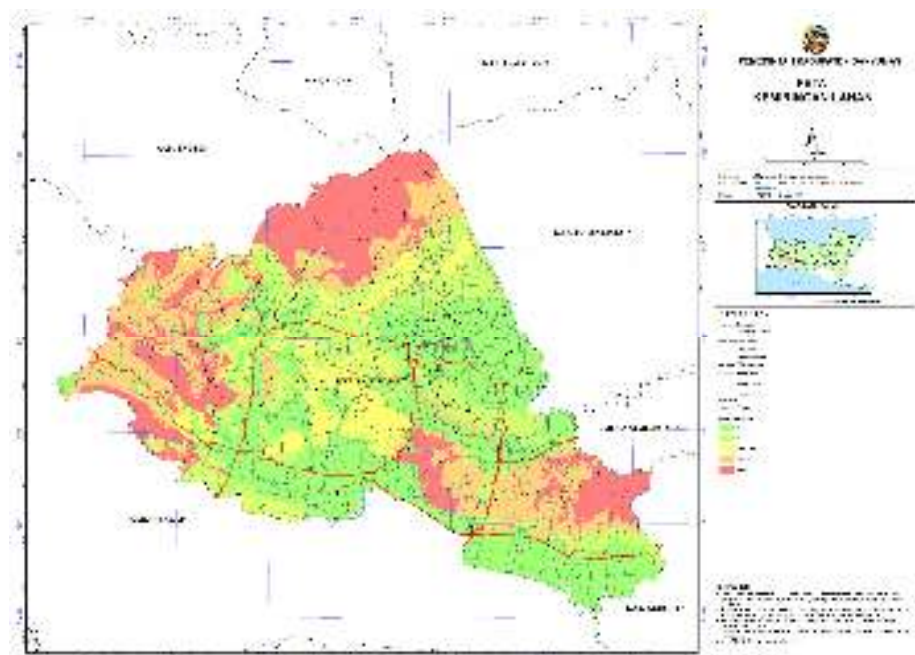
Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.

- c. Wilayah agak curam dengan kemiringan 15%–25% terdapat di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Wangon.
- d. Wilayah curam dengan kemiringan 25%-40% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
- e. Wilayah sangat curam dengan kemiringan > 40% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Banyumas



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Banyumas

2.1.1.3. Klimatologi

Banyaknya intensitas curah hujan sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan. Jumlah hari hujan pada Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas terjadi secara fluktuatif yaitu 163 hari dengan curah hujan yang beragam perbulannya. Curah hujan tertinggi tercatat pada

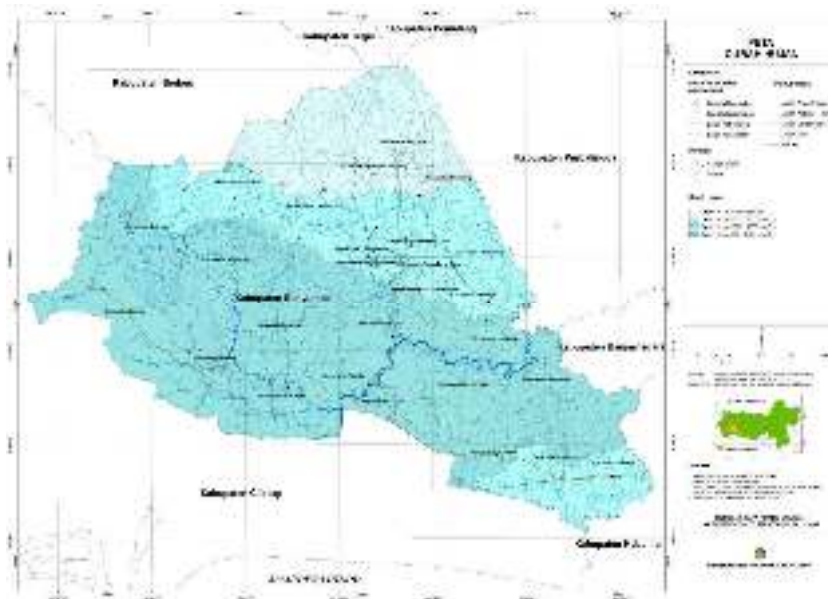
bulan Januari yaitu sebanyak 572 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 20 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 71 mm³ yang terjadi selama 7 hari, Angka ini menunjukkan bahwa curah di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis di wilayah Banyumas yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Tabel 2.2
Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	572	20
Februari	375	19
Maret	313	16
April	193	11
Mei	79	5
Juni	174	11
Juli	94	5
Agustus	71	7
September	227	14
Oktober	238	13
November	452	21
Desember	407	21
Jumlah	3.195	163

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi empat berdasarkan curah hujan, yaitu wilayah dengan curah hujan 500-1000 mm/tahun, 1000-1500 mm/tahun, 1500-3000 mm/tahun, dan >3000 mm/tahun (Gambar 2.5). Sesuai dengan letak geografisnya, curah hujan tertinggi (>3000 mm/tahun) terletak di sebelah utara yang terletak di lereng Gunung Slamet seperti Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan curah hujan terendah (500-100 mm/tahun) terletak hanya sedikit di sebagian kecil Kecamatan Pekuncen. Curah hujan yang dominan ada di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 1500-3000 mm/tahun yang tersebar di bagian tengah sampai bagian selatan meliputi Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede.



Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas 2018

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Banyumas

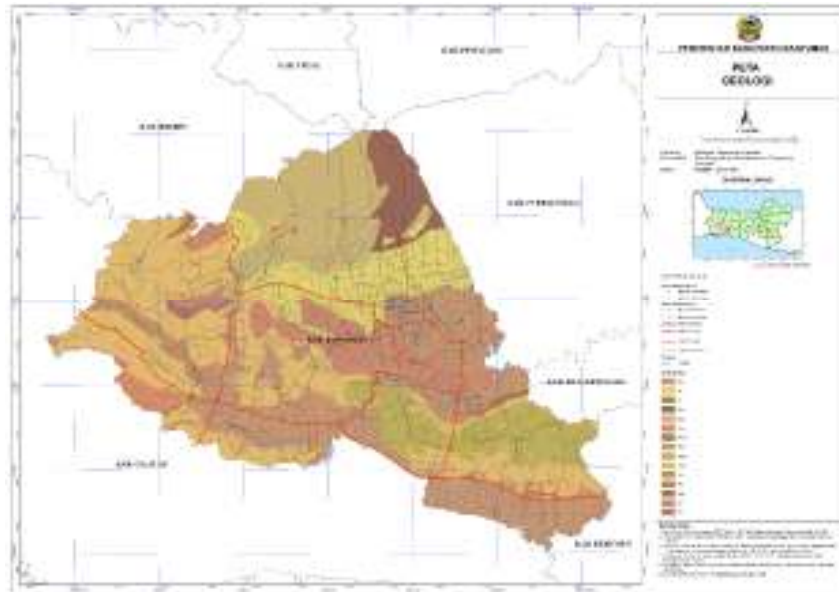
2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan, Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas, Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut Zona Serayu, Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Secara struktur geologi, Kabupaten Banyumas terdiri terdiri atas formasi; 1) Aluvial, 2) Anggota Batugamping, 3) Anggota Batupasir, 4) Anggota Breksi, 5) Basal), 6) Bat. Gunungapi Slamet tidak terdiferensiasi, 7) Batuan Terobosan, 8) Endapan Lahar Gunung Slamet, 9) Endapan Undak, 10) Formasi Halang, 11) Formasi Kumbang, 12) Formasi Pasean, 13) Formasi Penosogan, 14) Formasi Rambatan, 15) Formasi Tapak, 16) Lava Gunung Slamet, 17) Produk batuan erupsi tua Slamet.

Dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Banyumas, terdapat 9 jenis tanah yaitu sebagai berikut:

1. Alluvial, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Sokaraja, Cilongok, Purwojati, dan Kecamatan Ajibarang.
2. Andosol, Penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Baturraden, dan Kecamatan Sumbang.
3. Asosiasi Andosol dan Regosol, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Cilongok.
4. Asosiasi Mediteran, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Kedungbanteng, Karanglewas, dan Kecamatan Ajibarang.
5. Glei Humus, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Kemranjen.
6. Grumosol Hitam, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Lumbir.
7. Kompleks Mediteran, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Ajibarang, Cilongok, Purwojati, Wangon, Jatilawang, Pekuncen, Gumelar, Kebasen, Banyumas, Rawalo, Baturraden, Sumbang, Kedungbanteng, Kembaran, Patikraja, Karanglewas, Sokaraja, dan wilayah Perkotaan Purwokerto.
8. Komplek Regosol dan Litosol, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Cilongok.
9. Latosol, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Lumbir, Gumelar, Wangon, Ajibarang, Pekuncen, Purwojati, Jatilawang, Cilongok, Karanglewas, Patikraja, Kalibagor, Banyumas, Kemranjen, Kebasen, Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.6
Peta Geologi Kabupaten Banyumas

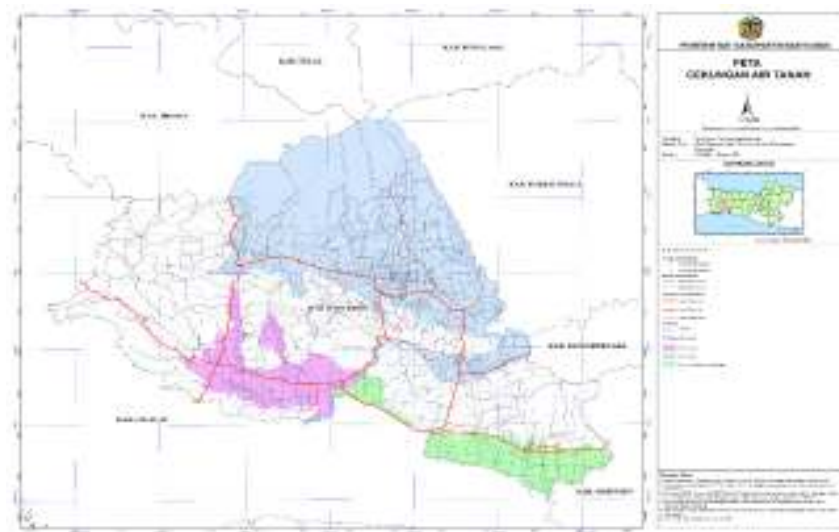
2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan, dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya. Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu:

1. Potensi air bawah tanah tinggi, berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
2. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.

3. Potensi air bawah tanah sedang, berada pada kelulusan sedang, meliputi: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada aluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
4. Potensi air bawah tanah rendah, berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada aluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
5. Potensi air bawah tanah langka, berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan manusia. Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, dan Cekungan Air Tanah Cilacap.

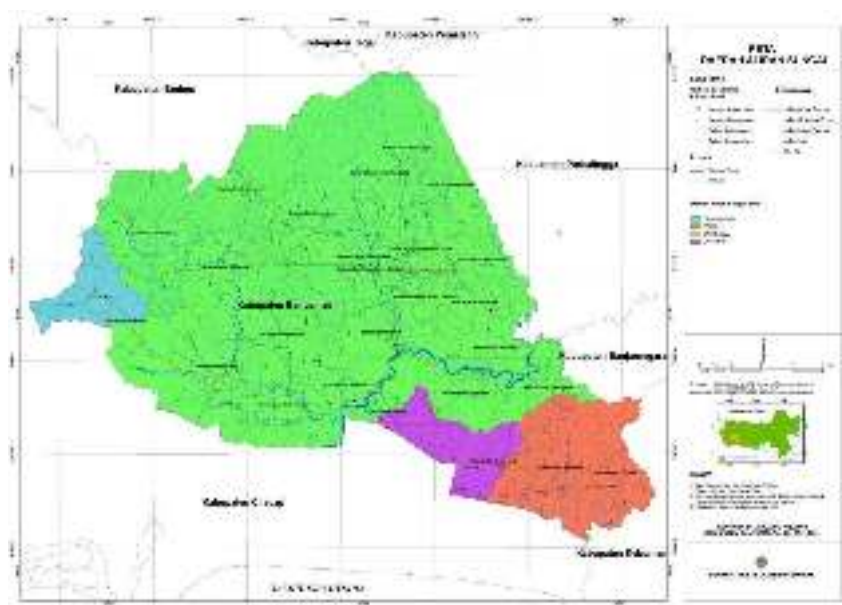


Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.7
Peta Cekungan Air Tanah

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di antara empat DAS tersebut, DAS Serayu merupakan DAS dengan luasan paling besar. Sebagai daerah tengah-hilir Sungai Serayu, aktivitas di hulu

sungai di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara akan sangat berpengaruh pada kondisi sungai di Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh. Selain permasalahan potensi, beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan kualitas air untuk kebutuhan air minum.



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.8
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Banyumas

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan baik yang sifatnya permanen maupun non permanen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyumas, tidak terlepas dari penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan.

Wilayah Kabupaten Banyumas dengan luas 132.759 Ha terbagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan

No.	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Lahan Pertanian	101.272	100.713	99.984	99.982	99.982
	a. Lahan Sawah	31.943	31.915	31.896	31.882	31.882
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	69.329	68.798	68.088	68.100	68.100
2.	Lahan Bukan Pertanian	31.487	32.047	32.774	32.776	32.776
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2022, Diolah

*Angka Sementara

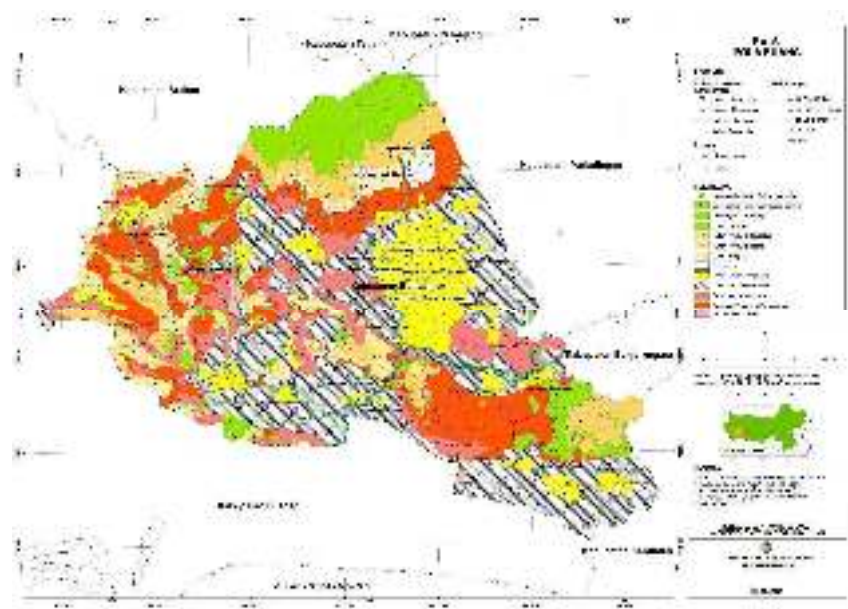
Luas penggunaan lahan sawah setiap tahun mengalami penurunan, sebaliknya luas lahan bukan sawah semakin meningkat. Hal ini diakibatkan kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Menindaklanjuti Perpres tersebut pada tahun 2021 Kementerian Agraria menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan keputusan tersebut luas LSD di Kabupaten Banyumas adalah 30.316,84 Ha. Setelah dilakukan verifikasi aktual, disepakati bahwa LSD yang dipertahankan di Kabupaten Banyumas adalah seluas 28.559,76 Ha. Implikasi dari hal tersebut adalah lahan LSD yang sudah disepakati tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi lahan sawah. Peta LSD selanjutnya diintegrasikan ke dalam revisi RTRW sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang

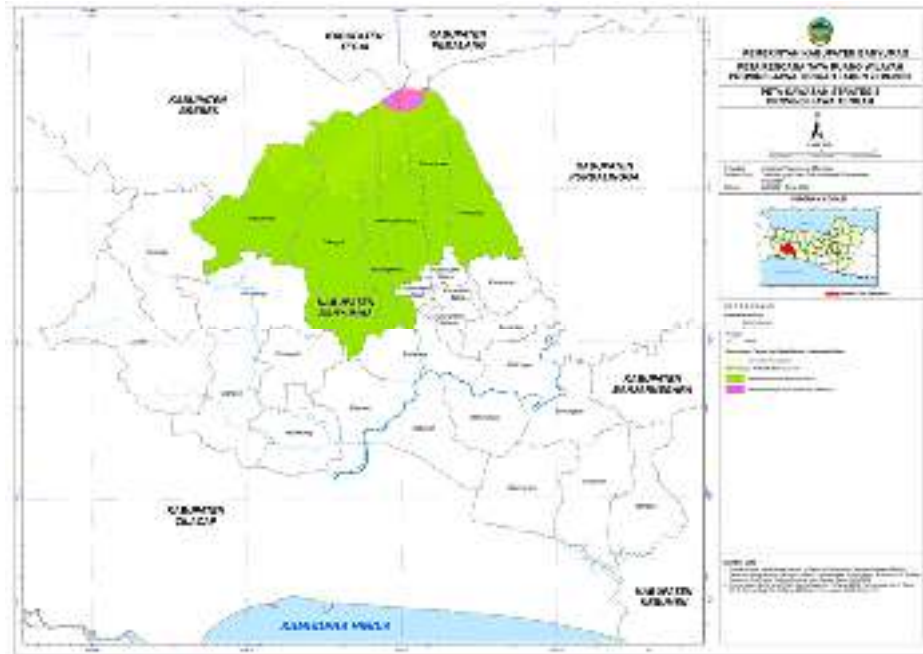
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman.



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.9
Peta Pola Ruang

Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdiri atas: kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas) dan kawasan pariwisata terpadu Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya; kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Gunung Slamet.

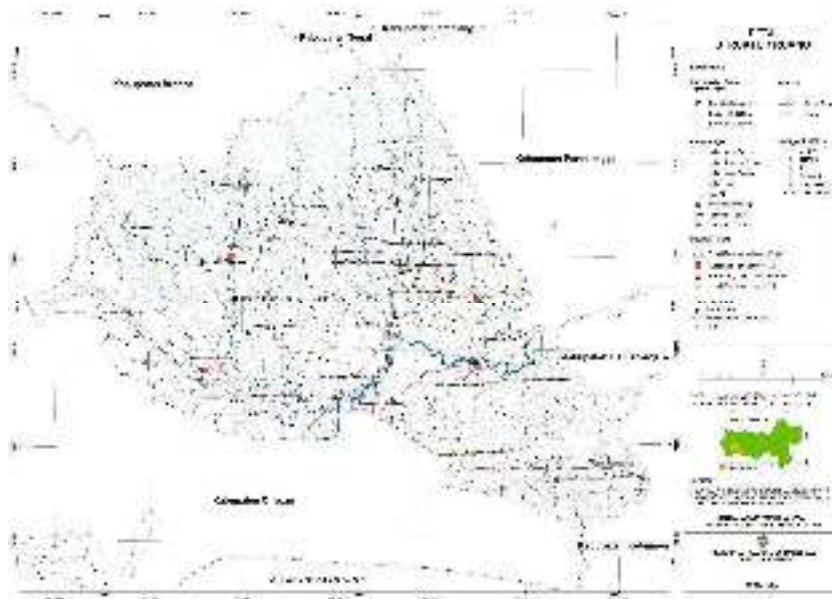


Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.10
Peta Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Banyumas

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Beberapa kota kecamatan mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecamatan lainnya. Perkotaan tersebut meliputi: 1) perkotaan Ajibarang; 2) perkotaan Wangon; 3) perkotaan Sokaraja; 4) perkotaan Banyumas; dan 5) perkotaan Sumpiuh. Dalam perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas perkotaan tersebut akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.11

Peta Struktur Ruang

Pengembangan PKL diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktivitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang, dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Rencana Induk dimaksud berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Banjarnegara–Purbalingga–Banyumas–Cilacap–Kebumen (Barlingmascakeb) yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam

percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes–Tegal–Pemalang. Kesiapan dan progres program/proyek dalam strategis Perpres Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Readiness Criteria dan Progres Proyek Strategis Perpres Nomor 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana	Kesiapan Lahan			Kelengkapan Dokumen			Capaian Program/Kegiatan sampai dengan Tahun 2022
				Status Lahan	Jalan Akses	Status Jalan	FS	DED	Dokumen Lain (sebutkan)	
1	Pembangunan Waduk Kaliurip, Kab. Banyumas	50	APBN	Rakyat + Desa + Kabu paten	Kabu paten	Kabupat en	2021	2022	-	Waduk Kaliurip berganti menjadi Embung Kaliurip karena untuk waduk luasnya harus lebih dari 15 m ² sedangkan Waduk Kaliurip hanya sekitar 14 m ² . Tahun 2020 disusun dokumen pengadaan tanah Embung Kaliurip. Paket pekerjaan tersebut sudah termasuk studi kelayakan Embung Kaliurip. Selanjutnya Tahun 2021 disusun dokumen UKL/UPL dan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Kaliurip. Proses pengadaan tanah pada Tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 10 bidang dari 86 bidang yang direncanakan untuk embung (20%). 76 bidang yang belum dibebaskan membutuhkan biaya sekitar 9,8 M. Pada perubahan anggaran Tahun 2022 ada tambahan anggaran 3 milyar yang dialokasikan untuk 14 bidang (sekitar 7600 m ²), untuk akses jalan dan pembangunan tugu embung. Pembangunan Embung Kaliurip diharapkan selesai pada tahun 2023.
2	Pembangunan Jembatan Kali Serayu Ds. Pegalongan-Ds. Mandirancan, Kab. Banyumas	50	APBN	Kabu paten	Provinsi + Kabu paten	Kabupat en	2020	2020	UKLPL	Pembangunan Jembatan Kali Serayu di Desa Pegalongan – Desa Mandirancan Kab. Banyumas sepanjang 800 m sudah mencapai tahap 3 atau sudah sekitar 75% dari proses pembangunannya. Pada Tahun 2020 dilaksanakan Pekerjaan Pembuatan Struktur bawah Jembatan berupa 2

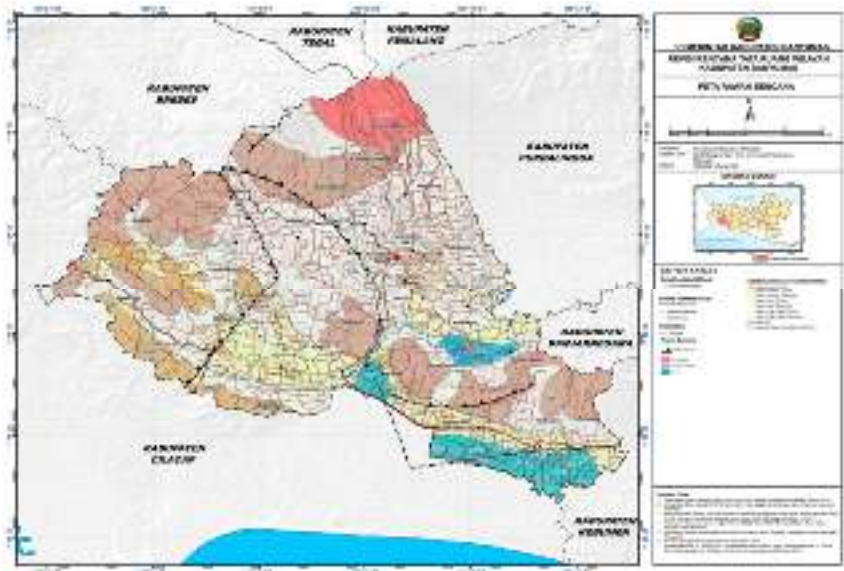
No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana	Kesiapan Lahan			Kelengkapan Dokumen			Capaian Program/Kegiatan sampai dengan Tahun 2022
				Status Lahan	Jalan Akses	Status Jalan	FS	DED	Dokumen Lain (sebutkan)	
										Abutmen dan 2 Pilar beserta pondasi borepile serta oprit jalan dengan pagu sebesar Rp. 14,5 Milyar. Pada Tahun 2021 masih proses pembangunan bangunan atas, pengaman bawah dan sebagian oprit jembatan dengan anggaran 18,5 Milyar dengan anggaran APBD. Konstruksi jembatan sebagian besar sudah ditangani dengan APBD dengan bantuan gelagar dari Kementerian PUPR sebesar 10 Milyar. Usulan dukungan anggaran untuk akses jalan tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat dikarenakan akses jalan tersebut masih non status, sehingga diusulkan melalui bantuan keuangan provinsi. Untuk pembangunan tahap 3 masih dibutuhkan anggaran sebesar 12 M di sisi Desa Pegalongan.
3	Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ), Kab. Banyumas	61.8	APBN	Kabupaten	Nasional	Nasional	2018	2018	-	Lahan yang akan digunakan sebagai Anjungan Pelayanan Jalan merupakan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas di Kecamatan Sumpiuh. Detail Engineering Design (DED) Anjungan Pelayanan Jalan telah disusun pada Tahun 2018 beserta dokumen lingkungan dan FS. Pembangunan APJ mengalami kendala karena pada lokasi yang ditetapkan terdapat lahan yang masuk dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mengupayakan agar lahan tersebut dikeluarkan dari LSD.

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana	Kesiapan Lahan			Kelengkapan Dokumen			Capaian Program/Kegiatan sampai dengan Tahun 2022
				Status Lahan	Jalan Akses	Status Jalan	FS	DED	Dokumen Lain (sebutkan)	
4	Pembangunan Fly over Tambaknegara, Kab. Banyumas	60	APBN	Nasional	Nasional	Nasional	2020	2020	Dok. Lingkungan	Pembangunan kedua Flyover sudah memasuki tahap perencanaan namun belum ada DED dan FS. Pembangunan Fly Over Tambaknegara telah dikoordinasikan dengan Pemerintah namun masih belum ada gambaran trase, meskipun telah dilaksanakan uji tanah di sekitar lokasi oleh Kementerian PUPR. Sehingga belum bisa diputuskan langkah berikutnya. Tanpa trase berarti belum diketahui titik-titik sebagai acuan perhitungan pengadaan tanah dan seterusnya.
5	Pembangunan Fly over Veteran, Kab. Banyumas	100	APBN	Nasional	Nasional	Nasional	2020	2020	Dok. Lingkungan	Pembangunan Fly Over Veteran saat ini sudah terdapat usulan rencana pembangunan dari Kementerian Perhubungan dengan struktur Underpass, namun belum ada tindak lanjut, sehingga juga belum bisa melangkah lebih lanjut sebelum ada persetujuan trase.
6	Peningkatan Terminal Tipe A Kab. Banyumas dan Bobotsari Kab. Purbalingga	100	APBN	Nasional	Kabupaten	Kabupaten	2019	2019	-	Telah selesai pada Tahun 2020
7	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Banyumas	50	APBN	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	2022	-	-	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis) Kab. Banyumas di Ajibarang ini sudah dalam tahap perencanaan dan akan difungsikan untung pasar pisang.

Selain program/proyek strategis, di Kabupaten Banyumas dilaksanakan program lintas kawasan yaitu: 1) Pembangunan Tol Pejagan - Cilacap, 2) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah, 3) Pengembangan amenities pariwisata berbasis homestay/desa wisata, 4) Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, 5) Pengembangan ekonomi berbasis pesantren, 6) Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, 7) Pengadaan alat kesehatan di 7 RS Provinsi, 8) Pengembangan SDM bidang IPTEK, 9) Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman).

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

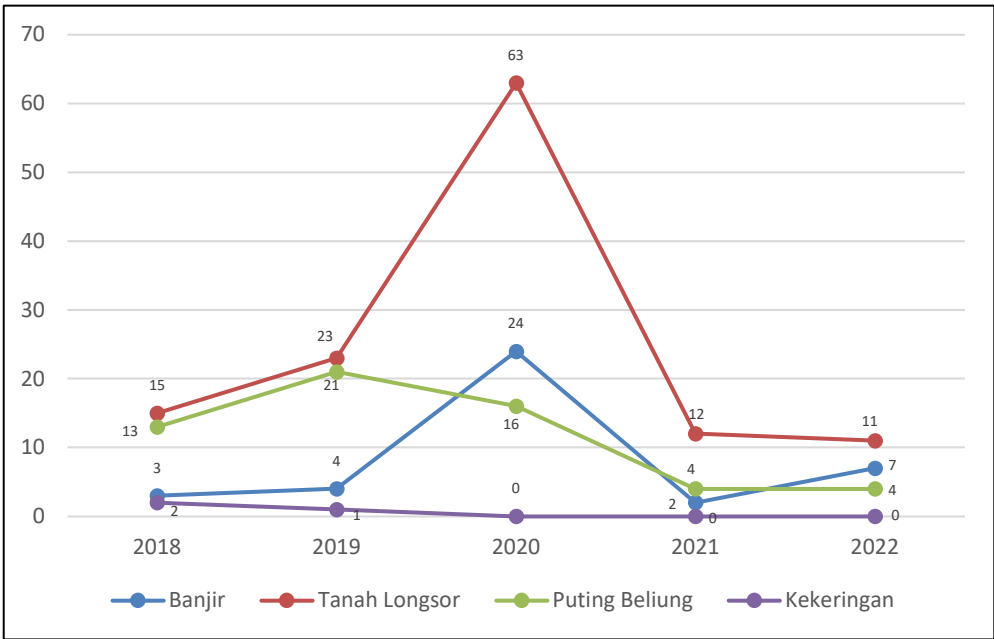
Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana gerakan tanah baik karena kemiringan lahan maupun dilalui sesar/patahan, rawan bencana banjir, kekeringan, dan rawan letusan gunung berapi. Wilayah rawan bencana gerakan tanah/tanah longsor merupakan jenis bencana yang terdapat di hampir seluruh kecamatan. Hal ini terkait dengan kondisi fisik sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang berada pada tingkat kelerengan tinggi, serta adanya sesar atau patahan yang juga mempengaruhi kerawanan bencana gerakan tanah. Terkait dengan bencana alam lainnya juga terdapat wilayah yang rawan terhadap letusan gunung api yang bersumber dari Gunung Slamet. Bencana alam lain di Kabupaten Banyumas adalah banjir dan kekeringan yang memiliki keterkaitan dengan iklim dan kondisi topografi Kabupaten Banyumas, yang masing-masing tersebar di 7 kecamatan dan 16 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki kerawanan bencana terdapat di 3 kecamatan berdasarkan pemetaan bencana yaitu Kecamatan Kembaran, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur.



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyumas

Berdasarkan analisis data dari Geoportal Data Bencana Indonesia, kejadian bencana di Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022 didominasi oleh kejadian bencana tanah longsor, puting beliung, dan banjir. Kejadian tertinggi untuk tanah longsor sebanyak 63 kejadian terjadi pada Tahun 2020, angin puting beliung sebanyak 21 kejadian terjadi pada Tahun 2019, dan banjir sebanyak 24 kejadian terjadi pada Tahun 2020.



Sumber: BNPB, 2022

Gambar 2.13
Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas 2018 – 2022

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2022 sebesar 1.842.582 jiwa yang terdiri dari 928.845 laki-laki dan 913.737 perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal tersebut disebabkan karena perbedaan data yang digunakan. Pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya data yang digunakan adalah data pelayanan, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Konsolidasi Bersih adalah data yang sudah dikonsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Dukcapil, sehingga data ini sudah dijamin ketunggalannya dan sudah bersih dari data ganda dan anomali. Dengan menurunnya jumlah penduduk di tahun 2022 mempengaruhi persentase laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 menjadi -2,95 atau menurun 4,32. Rincian pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki	902.873	928.093	945.119	958.061	928.845
2	Perempuan	888.607	912.059	928.077	940.685	913.737
3	Total	1.791.480	1.840.152	1.873.196	1.898.746	1.842.582
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,76	2,71	1,79	1,36	-2,95

Sumber: Tahun 2018-2021 Dindukcapil Kabupaten Banyumas
Tahun 2022 DKB Kemendagri

Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 130.502 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 39.007 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.842.582 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah 1.388 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 7.220 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 515 jiwa/km². Kepadatan penduduk

Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
1	Lumbir	102,66	52.859	514,89
2	Wangon	60,78	86.877	1.429,37
3	Jatilawang	48,16	70.481	1.463,48
4	Rawalo	49,64	55.523	1.118,51
5	Kebasen	53,99	70.498	1.305,76
6	Kemranjen	60,71	76.001	1.251,87
7	Sumpiuh	60,01	60.563	1.009,22
8	Tambak	52,03	52.574	1.010,46
9	Somagede	40,11	39.410	982,55
10	Kalibagor	35,73	58.224	1.629,55
11	Banyumas	38,09	55.191	1.448,96
12	Patikraja	43,23	61.872	1.431,23
13	Purwojati	37,86	39.007	1.030,30
14	Ajibarang	66,53	106.818	1.605,56
15	Gumelar	93,95	55.726	593,15
16	Pekuncen	92,70	78.897	851,10
17	Cilongok	105,34	130.502	1.238,86
18	Karanglewas	32,48	68.398	1.995,27
19	Kedungbanteng	60,22	63.967	1.062,22
20	Baturraden	45,53	55.502	1.219,02
21	Sumbang	53,42	96.329	1.803,24
22	Kembaran	25,92	82.327	3.176,20
23	Sokaraja	29,92	91.157	3.046,69
24	Purwokerto Selatan	13,75	74.371	5.408,80
25	Purwokerto Barat	7,40	53.429	7.220,14
26	Purwokerto Timur	8,42	57.997	6.888,00

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
27	Purwokerto Utara	9,01	48.082	5.336,51
	Jumlah	1.327,59	1.842.582	1.387,9

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan struktur penduduk menurut umur dan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Bonus demografi akan menjadi peluang bagi peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara.

Tabel 2.7

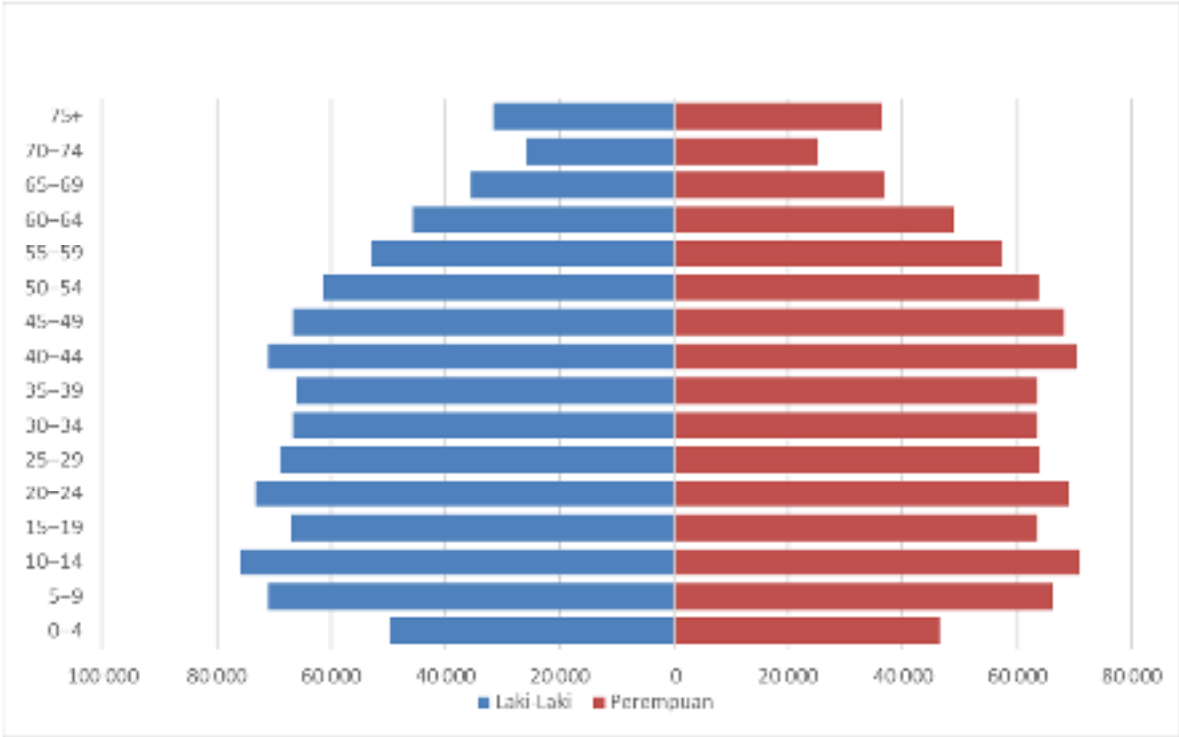
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki - Laki	Perempuan		
1	0-4	49.787	46.359	96.146	107,39
2	5-9	70.933	66.198	137.131	107,15
3	10-14	75.828	70.847	146.675	107,03
4	15-19	66.803	63.528	130.331	105,16
5	20-24	73.287	69.058	142.345	106,12
6	25-29	68.896	64.048	132.944	107,57
7	30-34	66.654	63.477	130.131	105,00
8	35-39	66.024	63.522	129.546	103,94
9	40-44	71.050	70.383	141.433	100,95
10	45-49	66.697	68.287	134.984	97,67
11	50-54	61.324	63.856	125.180	96,03
12	55-59	52.941	57.335	110.276	92,34
13	60-64	45.647	48.828	94.475	93,49
14	65-69	35.592	36.797	72.389	96,73
15	70-74	25.846	25.011	50.857	103,34
16	75+	31.536	36.203	67.739	87,11
	Jumlah	928.845	913.737	1.842.582	101,65
	0-14	196.548	183.404	379.952	107,17
	15-64	639.323	632.322	1.271.645	101,11

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki - Laki	Perempuan		
	65+	92.974	98.011	190.985	94,86
	Angka Ketergantungan (%)			44,90	

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 2022

Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2022



Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Berdasarkan gambar piramida kabupaten banyumas di dominasi oleh usia produktif usia 15-64. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (expansive) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten bnayumas mengalami bonus demografi.Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten banyumas jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten banyumas, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TDK/BLM SEKOLAH	222.122	208.405	430.527
2	BELUM TAMAT SD	95.135	90.111	185.246
3	SD	269.366	291.354	560.720
4	SLTP	145.511	142.636	288.147
5	SLTA	153.738	132.307	286.045
6	DIPLOMA (I. II)	2.701	3.894	6.595
7	DIPLOMA III	9.201	12.440	21.641
8	S1	28.496	30.918	59.414
9	S2	2.346	1.569	3.915
10	S3	229	103	332
JUMLAH		928.845	913.737	1.842.582

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	248.066	222.879	470.945
2				

5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	10.346	8.156	18.502
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	2.041	21	2.062
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1.952	129	2.081
8	PERDAGANGAN	2.950	2.781	5.731
9	PETANI/PEKEBUN	73.675	44.787	118.462
10	PETERNAK	289	54	343
11	NELAYAN/PERIKANAN	176	3	179
12	INDUSTRI	290	145	435
13	KONSTRUKSI	247	4	251
14	TRANSPORTASI	912	8	920
15	KARYAWAN SWASTA	122.119	48.793	170.912
16	KARYAWAN BUMN	3.295	862	4.157
17	KARYAWAN BUMD	411		

26	TUKANG BATU	3.649	0	3.649
27	TUKANG KAYU	3.387	0	3.387
28	TUKANG SOL SEPATU	54	1	55
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	298	2	300
30	TUKANG JAHIT	828	921	1.749
31	TUKANG GIGI	13	1	14
32	PENATA RIAS	13	180	193
33	PENATA BUSANA	5	12	17
34	PENATA RAMBUT	7	73	80
35	MEKANIK	895	1	896
36	SENIMAN	156	37	193
37	TABIB	19	4	23
38	PARAJI	13		

48	ANGGOTA DPR RI	1	1	2
49	ANGGOTA BPK	2	1	3
50	BUPATI	1	0	1
51	WAKIL BUPATI	1	0	1
52	ANGGOTA DPRD PROP.	2	0	2
53	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	27	9	36
54	DOSEN	759	623	1.382
55	GURU	4.082	8.641	12.723
56	PILOT	3	1	4
57	PENGACARA	53	9	62
58	NOTARIS	25	43	68
59	ARSITEK	24	2	26
60	AKUNTAN	2		

70	SOPIR	8.092	0	8.092
71	PIALANG	6	8	14
72	PARANORMAL	1	0	1
73	PEDAGANG	27.911	24.995	52.906
74	PERANGKAT DESA	2.445	580	3.025
75	KEPALA DESA	223	16	239
76	BIARAWAN/BIARAWATI	0	12	12
77	WIRASWASTA	74.966	19.086	94.052
78	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	64	31	95
79	TEKNISI	1	0	1
80	PEKERJAAN LAINNYA	1	0	1
JUMLAH		928.845	913.737	1.842.582

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan pada semua lapangan usaha. Peningkatan yang terbesar adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing Rp.9.930,05 dari PDRB Rp.43.069,50. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto

Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4.514,24	4.528,29	4.596,45	4.639,55	4.734,98
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.854,41	1.916,34	1.874,04	1.957,48	1.971,86
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	8.477,60	9.155,02	9.150,31	9.493,84	9.930,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	39,96	42,03	43,10	45,57	47,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	33,10	34,48	35,91	37,94	38,98
F	Konstruksi/ Construction	4.963,73	5.177,00	4.984,97	5.364,92	5.497,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6.170,05	6.670,47	6.423,63	6.812,93	7.093,30
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.448,39	1.563,88	1.065,89	1.089,79	2.001,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.334,79	1.438,32	1.336,53	1.411,51	1.643,05

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	2.464,76	2.754,12	3.134,35	3.288,81	3.358,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1.114,07	1.161,89	1.180,39	1.194,84	1.201,78
L	Real Estate/ Real Estate Activities	929,39	980,32	976,69	1.002,63	1.055,76
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	112,04	123,34	116,85	120,19	127,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.086,57	1.126,12	1.111,05	1.111,85	1.125,61
P	Jasa Pendidikan/ Education	1.791,43	1.936,53	1.931,54	1.942,25	1.968,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	368,29	395,10	426,04	434,28	446,10
R,S, T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	711,67	776,07	733,88	738,41	826,56
PDRB		37.414,50	39.779,32	39.121,62	40.686,81	43.069,50

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	6.351,39	6.470,10	6.681,39	6.873,90	7.340,03

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Agriculture, Forestry and Fishing					
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	2.854,73	2.983,61	2.990,22	3.156,93	3.277,39
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	12.143,97	13.301,27	13.618,07	14.550,71	16.059,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	47,24	49,74	50,70	53,18	56,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	37,16	39,37	43,32	46,57	48,43
F	Konstruksi/ Construction	6.613,48	7.123,21	6.883,64	7.667,10	8.368,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7.601,53	8.398,41	8.178,31	8.821,63	9.608,21
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.743,30	1.922,95	1.344,47	1.418,88	2.766,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.645,17	1.795,06	1.671,23	1.792,35	2.180,73

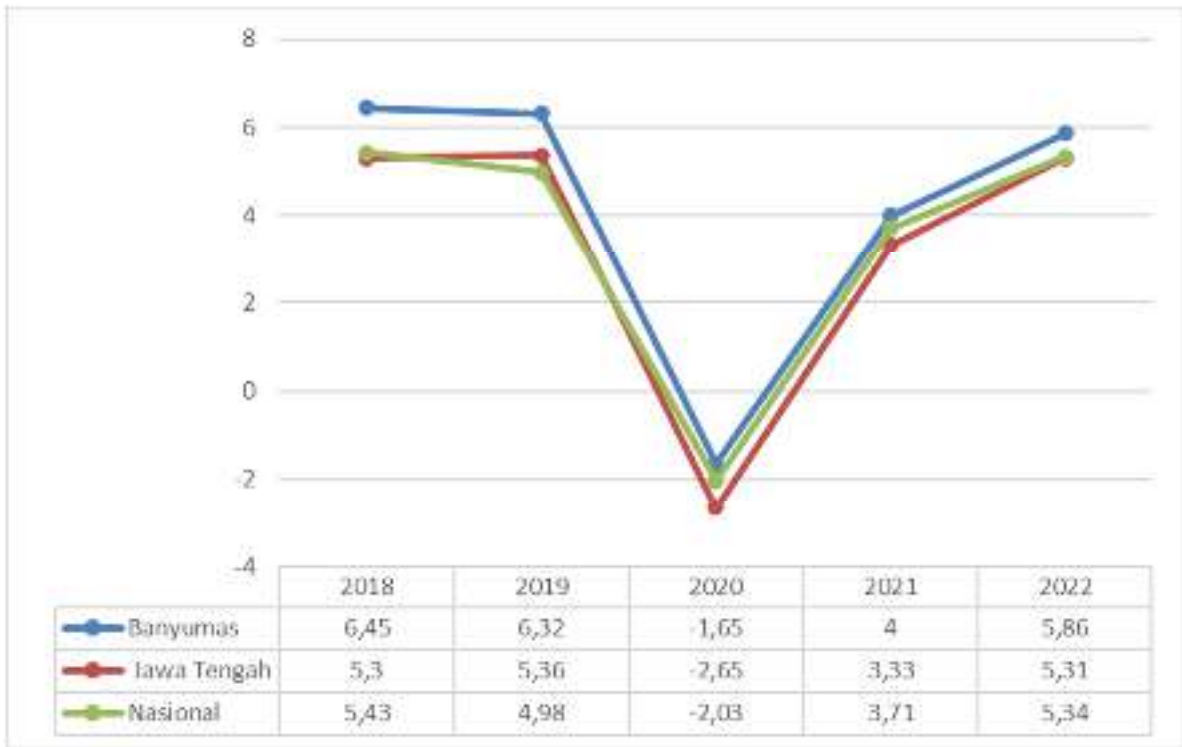
Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	2.329,85	2.638,37	3.005,97	3.138,21	3.202,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1.609,03	1.700,08	1.731,55	1.829,54	1.954,13
L	Real Estate/ Real Estate Activities	1.094,93	1.176,50	1.180,17	1.224,10	1.312,24
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	154,80	175,03	169,60	176,38	195,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.527,19	1.609,66	1.609,99	1.597,35	1.660,29
P	Jasa Pendidikan/ Education	2.750,60	3.043,17	2.988,55	3.004,64	3.079,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	496,95	541,67	596,59	611,48	637,05
R,S,T, U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	894,81	980,66	938,33	949,88	1.106,91
PDRB		49.896,13	53.948,86	53.682,12	56.919,82	62.852,91

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Banyumas telah mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas adalah 5,86%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan nilai tambah terbesar yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Banyumas adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yakni dengan adanya peningkatan moda transportasi dan pulihnya mobilitas dan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi.

Untuk melihat rincian perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan nasional kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2022

Gambar 2.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan perhitungan PDRB ADHK dimana pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 83,70%, dan pertumbuhan terendah ada pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu 0,58. Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,97	0,31	1,51	0,94	2,06
B	Pertambangan dan Penggalian	4,27	3,34	-2,21	4,45	0,73
C	Industri Pengolahan	6,37	7,99	-0,05	3,75	4,59
D	Pengadaan Listrik & Gas	6,76	5,16	2,55	5,74	4,82
E	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,43	4,17	4,15	5,66	2,74
F	Konstruksi	8,63	4,30	-3,71	7,62	2,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	8,11	-3,70	6,06	4,12
H	Transportasi dan Pergudangan	6,47	7,97	-31,84	2,24	83,70
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,57	7,76	-7,08	5,61	16,40
J	Informasi dan Komunikasi	9,50	11,74	13,81	4,93	2,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,99	4,29	1,59	1,22	0,58
L	Real Estate	5,57	5,48	-0,37	2,66	5,30
M,N	Jasa Perusahaan	8,39	10,08	-5,26	2,86	6,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan &	3,36	3,64	-1,34	0,07	1,24

	Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	8,44	8,10	-0,26	0,55	1,36
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,51	7,28	7,83	1,94	2,72
R,S,T, U	Jasa Lainnya	9,08	9,05	-5,44	0,62	11,94
PDRB		6,45	6,32	-1,65	4,00	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (%) pada tahun 2022 capaian yang tertinggi ada pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu 25,55% dan yang terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08%.

Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2018-2022 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,73	11,99	12,45	12,08	11,68
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	5,53	5,57	5,55	5,21
C	Industri Pengolahan	24,34	24,66	25,37	25,56	25,55
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	13,25	13,20	12,82	13,49	13,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,23	15,57	15,23	15,50	15,29
H	Transportasi dan Pergudangan	3,49	3,56	2,50	2,49	4,4
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,30	3,33	3,11	3,15	3,47
J	Informasi dan Komunikasi	4,67	4,89	5,60	5,51	5,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,22	3,15	3,23	3,21	3,11
L	Real Estate	2,19	2,18	2,20	2,15	2,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,06	2,98	3,00	2,80	2,64
P	Jasa Pendidikan	5,51	5,64	5,57	5,28	4,90
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,00	1,00	1,11	1,07	1,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,79	1,82	1,75	1,67	1,76
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Ditinjau dari aspek pengeluaran struktur ekonomi Kabupaten Banyumas pada distribusi PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Setelah konsumsi rumah tangga adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besarnya komponen pengeluaran PMTB dapat diartikan bahwa di Banyumas adanya besarnya investasi

sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Tabel 2.3

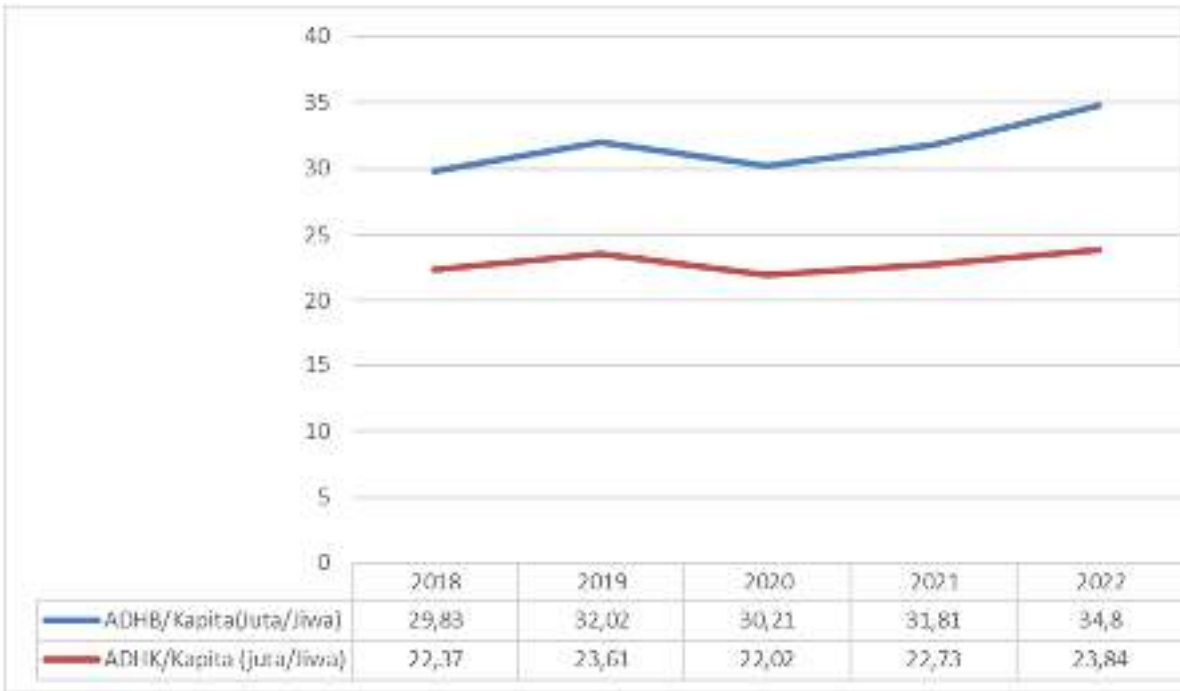
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2017–2021

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (%)	67,66	66,72	66,82	64,58	64,24
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,16	1,20	1,20	1,18	1,19
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	8,90	8,49	8,14	8,01	7,48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,48	38,57	36,44	37,46	36,27
5	Perubahan Inventori (%)	0,38	0,33	0,31	0,26	0,47
6	Net Ekspor	-16,57	-15,32	-12,90	-11,49	9,64
PDRB Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Nilai PDRB per kapita Banyumas atas dasar harga berlaku tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2018 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp.34,8 juta/ jiwa. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 Terjadi penurunan dari 2019 ke 2020 dikarenakan adanya pandemic covid 19. Dan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 23,84 juta per jiwa pada tahun 2022.

Rincian perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

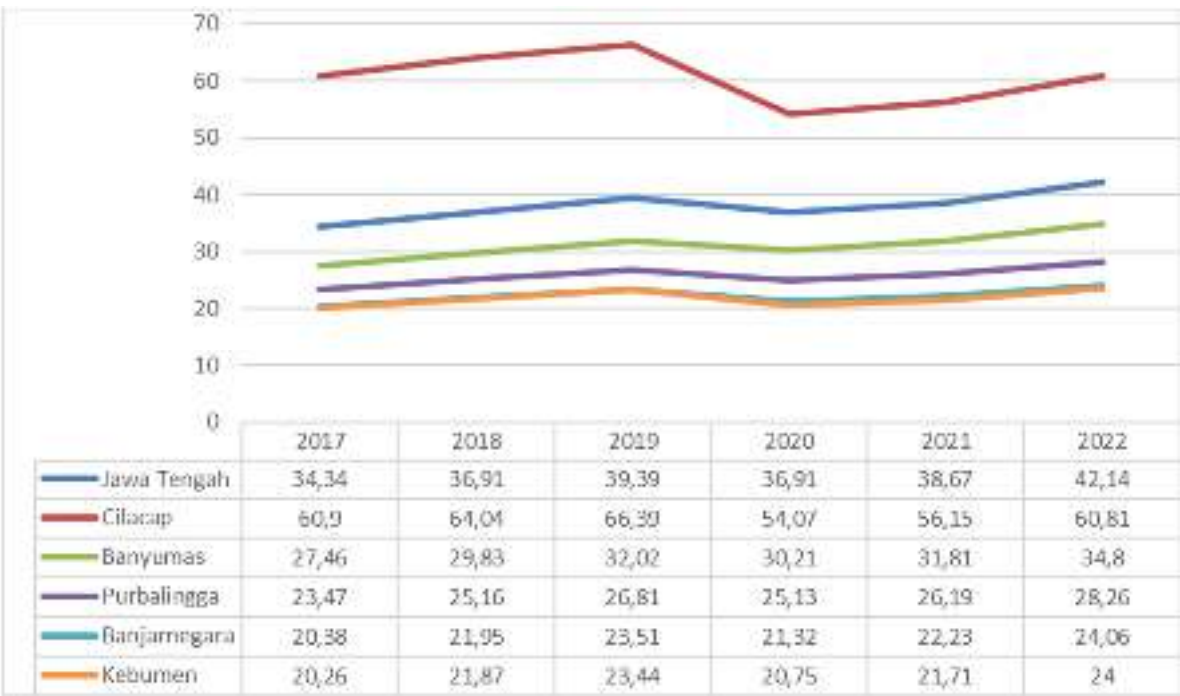


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.1

PDRB ADHB dan ADHK per Kapita Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

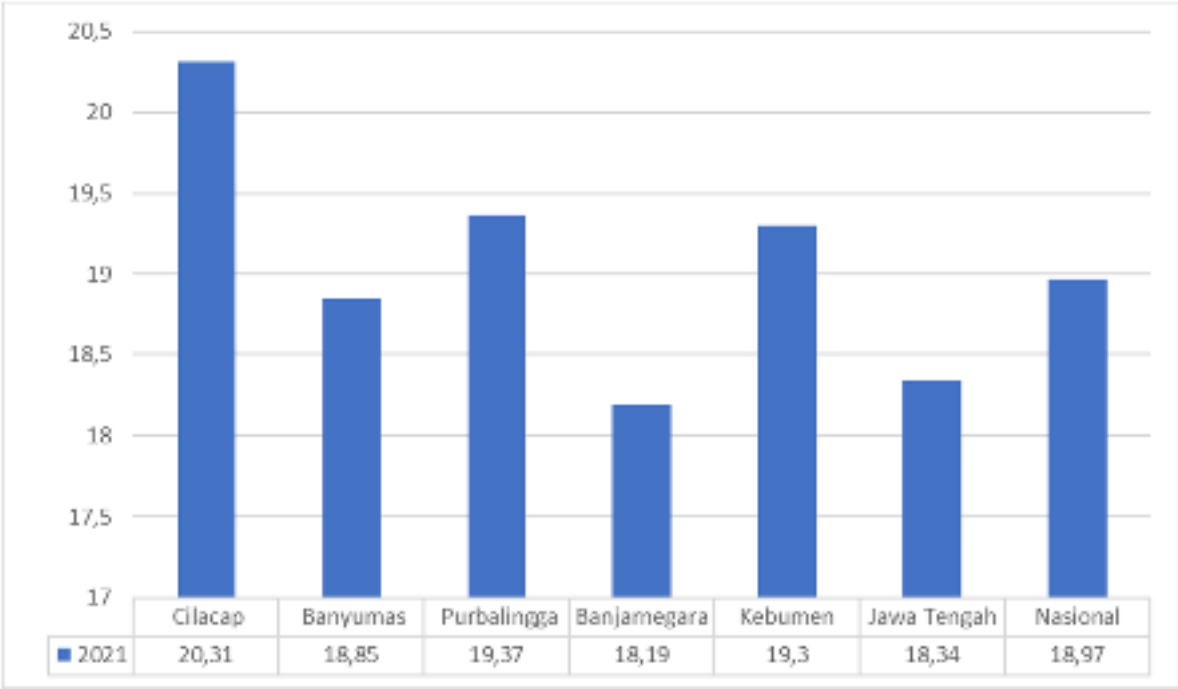
Produk Domestik Regional Bruto ADHB per Kapita Banyumas Tahun 2022 tertinggi kedua di Barlingmascakeb setelah Cilacap, lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Jawa Tengah. Rincian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Barlingmascakeb dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.1
PDRB per Kapita Jateng dan Kabupaten Barlingmascakeb
Menurut ADHB (juta rupiah)

Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia)

Ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Banyumas menurut perhitungan Bank Dunia pada tahun 2021 pada penduduk Kabupaten Banyumas dengan kategori 40% terbawah adalah 18,85% naik dari tahun 2020 sebesar 18,47% dengan melihat persentase ini diartikan bahwa ketimpangan pendapatan rendah. Bila dibandingkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten sekitar, Jawa Tengah dan Nasional dalam kategori ketimpangan pendapatan yang rendah namun persentase di Kabupaten Banyumas tahun 2021 lebih kecil dibanding Kabupaten sekitar kecuali Kabupaten Banjarnegara dengan ketimpangan pendapatan 40% penduduk terendah sebesar 18,19% dan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,34% dan lebih rendah dari Nasional sebesar 18,97%. Perbandingan distribusi pengeluaran Kabupaten Banyumas, kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.14

Distribusi pengeluaran Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%), Kabupaten Banyumas, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2021

Untuk melihat distribusi pengeluaran per kelompok penduduk dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut

Tabel 2.8

Rincian Distribusi pengeluaran Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen), Kabupaten Banyumas, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2018-2021

Kab/Kota/Prov	20% Atas				40% Tengah				40% Bawah			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Cilacap	42.48	42.30	44.37	42.99	38.43	38.37	37.41	36.70	19.09	19.34	18.23	20.31
Banyumas	43.60	42.93	43.36	44.61	38.00	38.03	38.17	36.54	18.40	19.04	18.47	18.85
Purbalingga	41.56	41.21	43.13	44.94	38.07	38.71	37.30	35.68	20.37	20.08	19.57	19.37
Banjarnegara	44.66	41.92	43.98	43.49	37.53	38.74	38.10	38.33	17.81	19.34	17.92	18.19

Kebumen	41.93	39.45	40.67	42.94	38.38	40.16	39.31	37.76	19.69	20.39	20.02	19.30
Jawa Tengah	45.14	43.66	43.72	44.90	36.95	37.63	37.75	36.76	17.90	18.71	18.53	18.34
Nasional	44.27	45.17	44.25	44.33	37.16	35.67	35.95	36.69	18.57	19.16	19.80	18.97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.2.1.2. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2018–2022 menunjukkan kenaikan, tahun 2022 meningkat menjadi 6,49% lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingginya inflasi pada Tahun 2022 salah satunya disebabkan oleh meningkatnya harga pada beberapa komoditas pangan strategis seperti beras dan telur ayam ras serta transportasi. Permintaan masyarakat yang tinggi mengakibatkan ketidakstabilan harga di pasar. Tingginya permintaan menyebabkan tinggi harga di pasar dan mendorong inflasi semakin tinggi. Di tengah ketidakpastian global, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya mengendalikan inflasi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan gerakan pangan murah, rapat koordinasi rutin pemantauan inflasi, operasi pasar, bantuan sosial untuk 100 IKM, 700 PKL,, BLT BBM untuk ojol, opang, supir angkutan kota ,angkutan desa dan perbaikan RTLH

Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (%) Tahun 2018–2022 disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.15
Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (%)
Tahun 2018–2022

2.2.1.3. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Persentase Penduduk Miskin

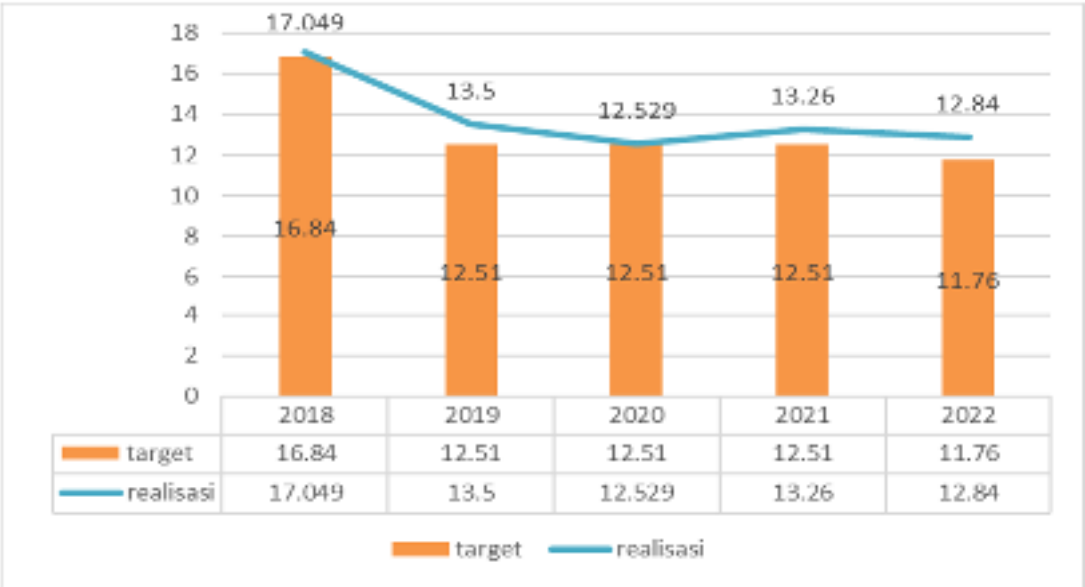
Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menurun sebesar 0,82% menjadi 12,84%. Perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.16
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

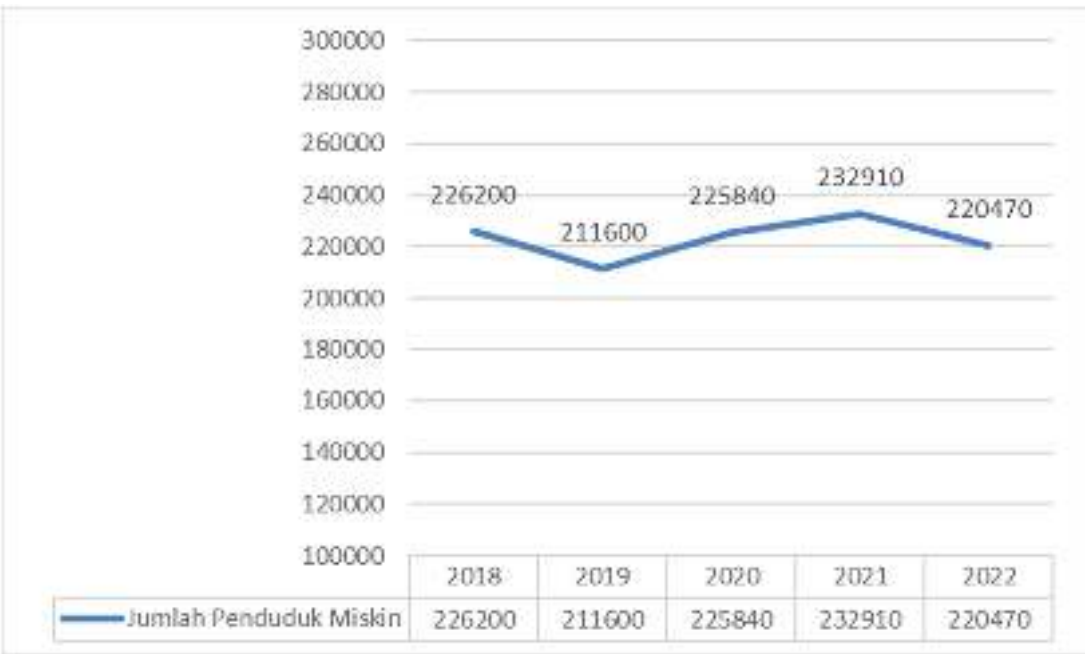


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.17
Target dan Realisasi Penurunan Penduduk Miskin
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

Jumlah Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, menurun di Tahun 2019 dan naik kembali di Tahun 2020 dan 2021, dan kembali turun di tahun 2022, sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.18
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas

Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin menurun 12.440 jiwa dari 232.910 pada Tahun 2020 menjadi 220.470 pada Tahun 2022. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

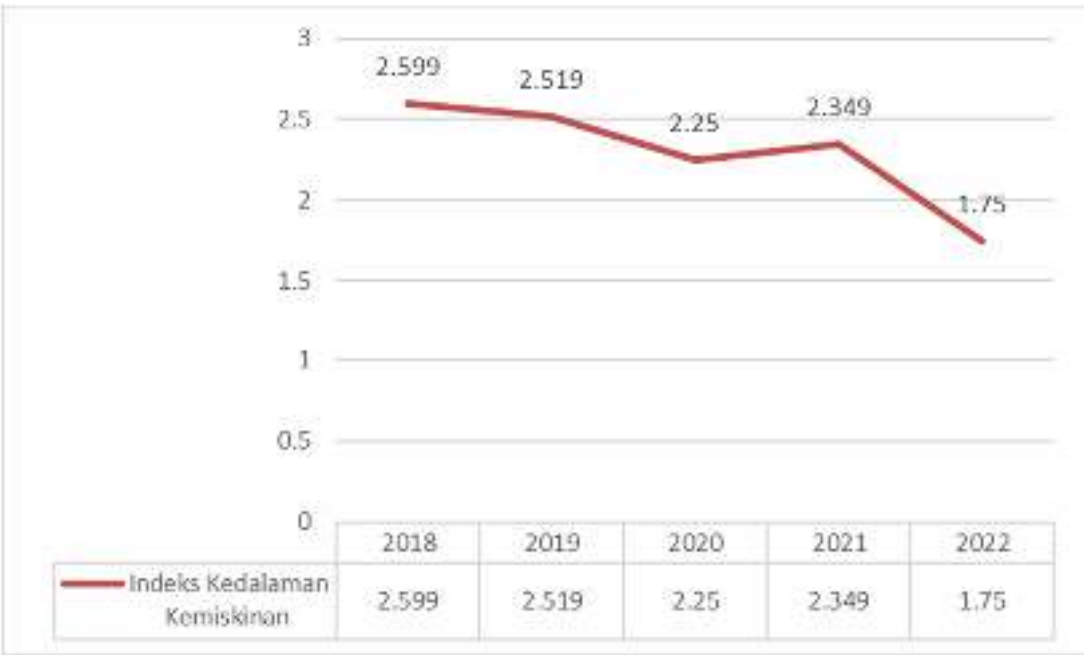
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

No	Penduduk	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
1	Jumlah Penduduk Miskin	190.960	220.470	145.330	141.250	196.160
2	Persentase Penduduk Miskin	11.02	12.84	15.30	15.20	16.41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1)

Pada periode 2018-2022, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada Tahun 2022 merupakan angka terendah. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan semakin jauh pendapatan penduduk miskin untuk mendekati garis kemiskinan dan dapat keluar dari garis kemiskinan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

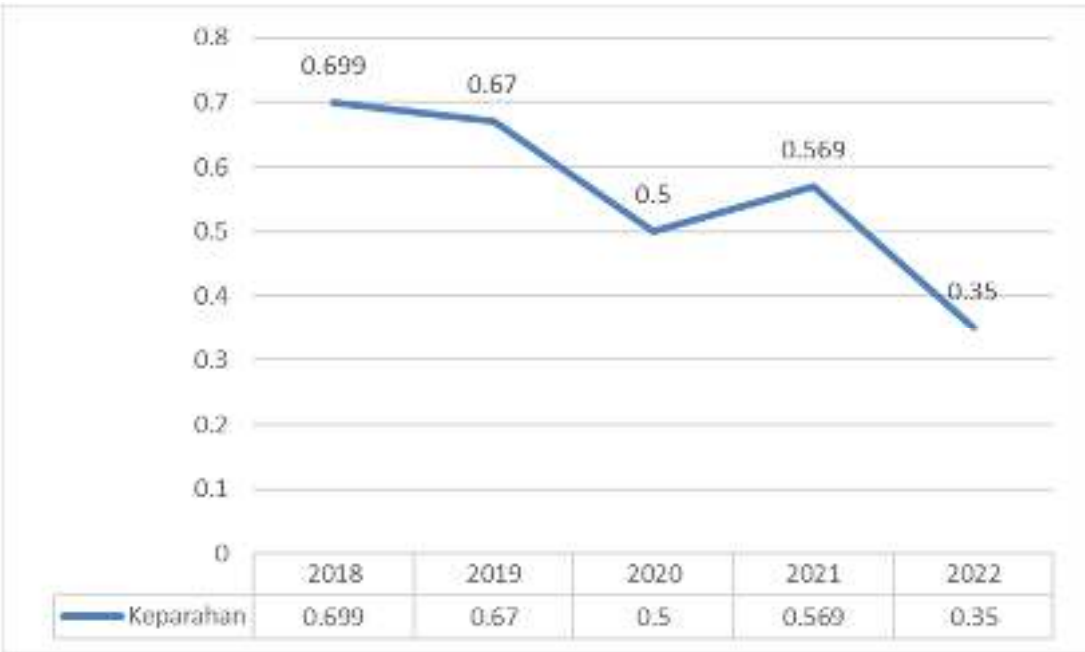
Gambar 2.19
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas

Indeks Keparahan Kemiskinan

Perkembangan Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2018-2022 relatif menurun, dimana di tahun 2022 merupakan angka terendah di angka 0,35. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index–P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai

indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

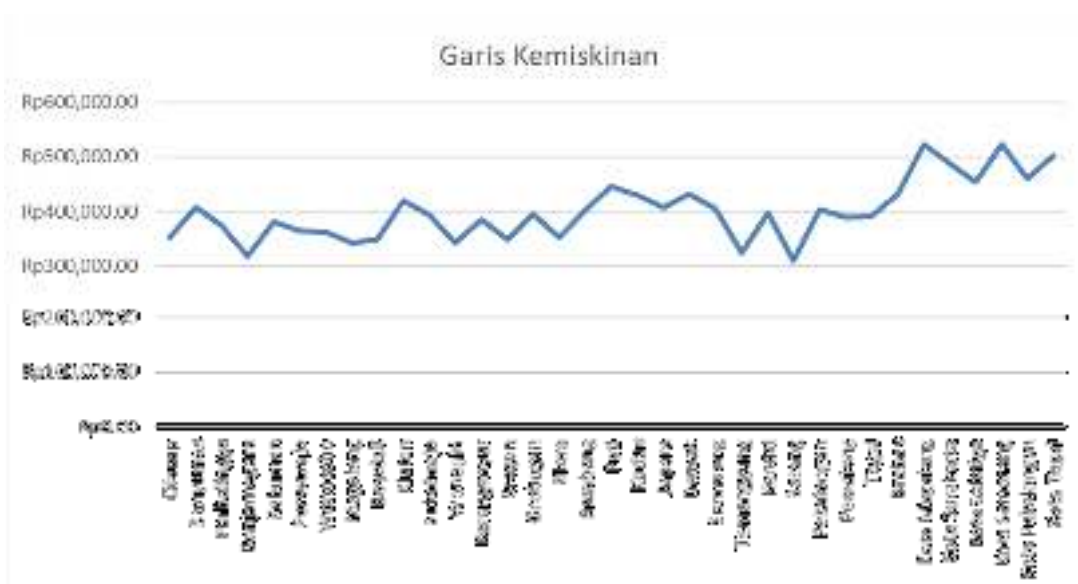


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.20
Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

Garis kemiskinan

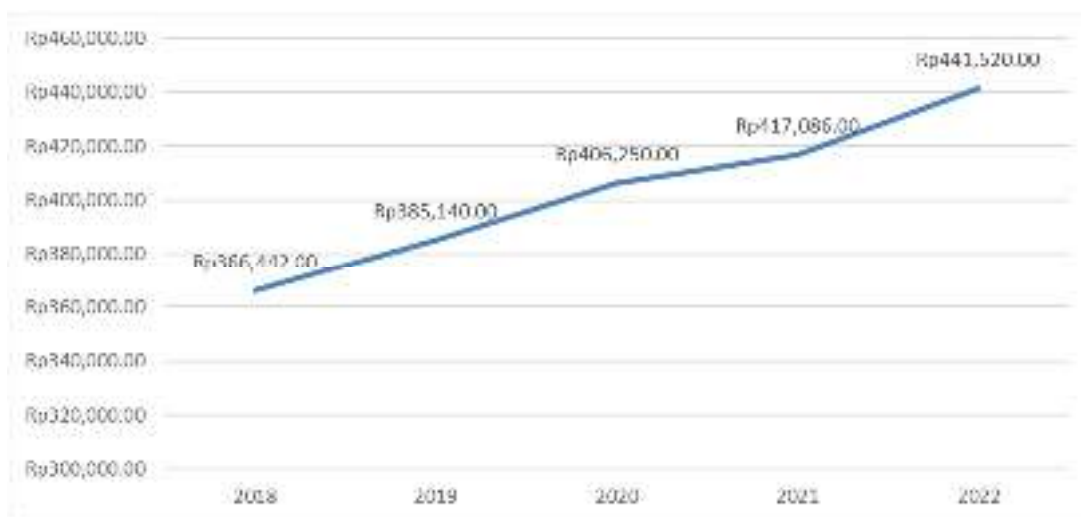
Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sebesar Rp.441.520, di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.438.833, dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di Kabupaten Banyumas paling tinggi dibanding kabupaten sekitarnya. Garis kemiskinan Kabupaten Banyumas tahun 2018–2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.22
Garis Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2022

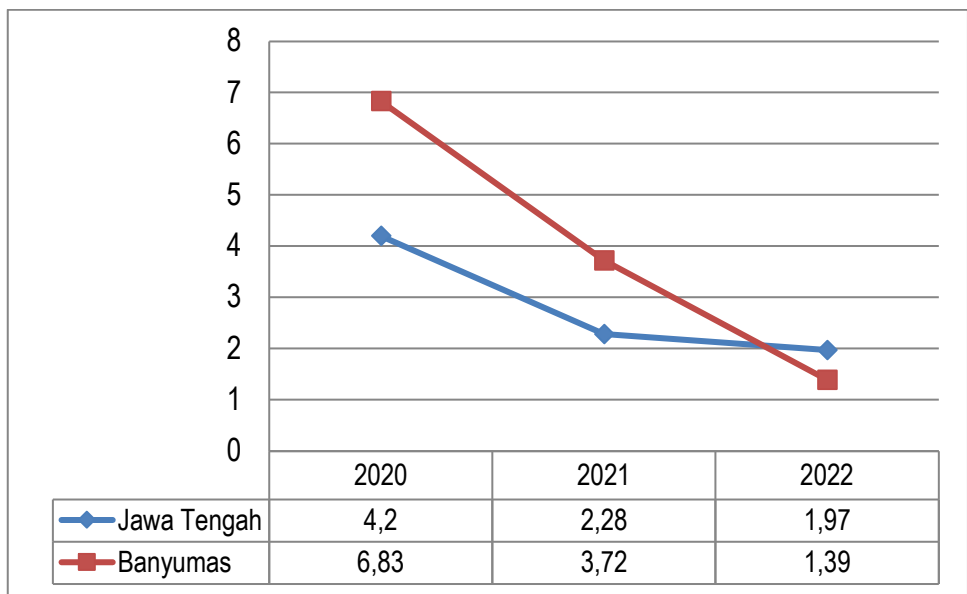
Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Banyumas.

Sesuai mandatori kebijakan pemerintah pusat melalui arahan/instruksi presiden bahwa capaian tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024.

Dampak Pandemi COVID-19 masih berlanjut pada aspek sosial-ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha menangani dampak pandemi COVID-19 melalui upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi untuk pemulihan kondisi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan, dengan fokus pada masyarakat dengan kesejahteraan terbawah yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrem.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dilakukan melalui konvergensi pemanfaatan anggaran dan konsolidasi program/kegiatan, baik yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan, yang menysasar kelompok miskin ekstrem yang tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Konvergensi pemanfaatan anggaran untuk kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem diawali dengan menyusun peta (*mapping*) program/kegiatan dan anggaran terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN, APBD, maupun APBDes. Sampai dengan Tahun 2022 upaya tersebut telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas menjadi 1,39%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.23

Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Upaya penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem, sudah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022, Pemerintah saat ini memakai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data P3KE di Kabupaten Banyumas sejumlah 197.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 69.569 KK di desil 1, 76.204 KK di desil 2, dan 51.992 KK di desil 3. Sedangkan jumlah individu di data P3KE sejumlah 746.152 individu terdiri 288.294 individu di desil 1, 278.908 individu di desil 2, dan 178.950 individu di desil 3.

Penanganan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 - 2026 di Kabupaten Banyumas diprioritaskan di 60 desa di 21 Kecamatan terutama di desil 1, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2.10
Desa dan Kecamatan Prioritas Penanganan
Kemiskinan Ekstrem
Tahun 2024 - 2026

Kecamatan	w4Desa		Jumlah KK Desil 1	Jumlah Individu desil 1
Ajibarang	1	BANJARSARI	274	1.158
	2	KRACAK	794	3.021
	3	SAWANGAN	649	2.587
	4	TIPAR KIDUL	303	1.291
Banyumas	5	BINANGUN	268	1.176
	6	KARANGRAU	405	1.688
Cilongok	7	KASEGERAN	227	928
	8	LANGGONGSARI	339	1.463
	9	PAGERAJI	466	1.969
	10	PANEMBANGAN	385	1.591
	11	PANUSUPAN	456	1.803
	12	RANCAMAYA	330	1.309

	13	SAMBIRATA	721	2.880
Gumelar	14	KARANGKEMOJING	256	953
	15	SAMUDRA	462	1.816
Jatilawang	16	BANTAR	350	1.515
	17	GUNUNG WETAN	390	1.790
Kalibagor	18	PAJERUKAN	292	1.189
	19	PEKAJA	262	1.105
	20	SURO	246	955
Karanglewas	21	JIPANG	233	959
	22	KEDIRI	215	906
	23	PANGEBATAN	256	1.086
	24	TAMANSARI	273	1.122
Kebasen	25	CINDAGA	527	2.230
	26	KALISALAK	326	1.402
	27	KARANGSARI	420	1.633
Kedungbanteng	28	DAWUHAN KULON	448	1.762

	29	DAWUHAN WETAN	282	1.234
	30	KALIKESUR	265	1.039
	31	KEBOCORAN	245	1.039
	32	MELUNG	349	1.363
	33	WINDUJAYA	420	1.656
Kembaran	34	BANTARWUNI	268	1.081
Kemrenjen	35	KARANGGINTUNG	441	1.804
	37	KARANGSALAM	317	1.275
Lumbir	38	CANDUK	292	1.126
	39	CINGEBUL	205	956
Patikraja	40	KARANGENDEP	268	1.170
Pekuncen	41	CIBANGKONG	265	1.042
	42	GLEMPANG	246	964
	43	KARANGKEMIRI	363	1.439
	44	KRAJAN	523	1.994
	45	PETAHUNAN	304	

	46	SEMEDO	275	1.182
	47	TUMIYANG	289	1.157
Purwojati	48	KALITAPEN	311	1.285
Rawalo	49	SANGGREMAN	277	1.174
	50	SIDAMULIH	349	1.466
	51	TIPAR	212	954
Somagede	52	KEMAWI	405	1.669
	53	SOMAKATON	172	935
Sumbang	54	LIMPAKUWUS	589	2.186
Sumpiuh	55	BANJARPANEPEN	336	1.346
	56	BOGANGIN	691	2.705
	57	KETANDA	395	1.634
	58	SELANEGARA	443	1.835
Tambak	59	WATUAGUNG	972	3.899
Wangon	60	PENGADEGAN	275	1.150

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pada Tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Banyumas sebesar 73,17 termasuk ke dalam kategori “tinggi”, sesuai klasifikasi UNDP. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya IPM Kabupaten Banyumas peringkatnya paling tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan IPM				Peringkat IPM Tahun 2022	
						2018-2019	201-2020	2020-2021	2021-2022	Se Jateng	Mas- barling cakeb
Cilacap	69,56	69,98	69,95	70,42	70,9	0,42	-0,03	0,47	0,48	22	2
Banyumas	71,30	71,96	71,98	72,44	73,17	0,66	0,02	0,46	0,73	17	1
Purbalingga	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54	0,58	-0,02	0,18	0,39	29	4
Banjarnegara	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61	0,8	0,11	0,41	0,75	33	5
Kebumen	68,80	69,60	69,81	70,05	70,79	0,8	0,21	0,24	0,74	26	3
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	0,61	0,14	0,29	0,63		
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,53	0,02	0,35	0,62		

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

IPM meliputi tiga komponen yaitu komponen umur harapan hidup, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli.

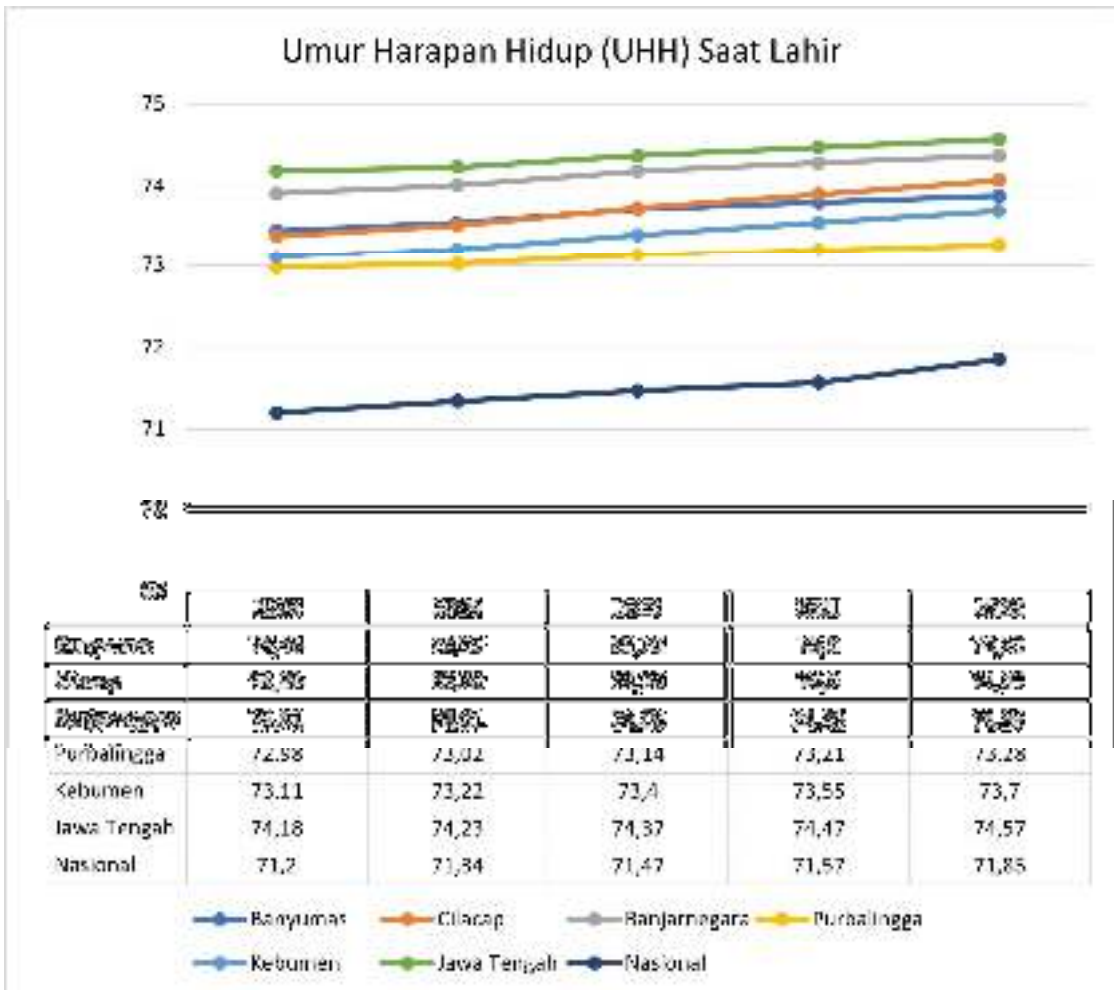
Tabel 2.12
Komponen IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun
2021-2022

No	Kabupaten	Umur Harapan Hidup (tahun)		Pendidikan				Pengeluaran (000)	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Cilacap	73,9	74,07	12,63	12,66	7,09	7,18	10.534	10.904
2	Banyumas	73,8	73,88	13,03	13,21	7,63	7,78	11.546	11.905
3	Purbalingga	73,21	73,28	12,00	12,01	7,25	7,33	10.032	10.277
4	Banjarnegara	74,28	74,37	11,63	11,81	6,75	6,84	9.407	9.776
5	Kebumen	73,55	73,70	13,35	13,36	7,55	7,85	9.028	9.282
	Jawa Tengah	74,47	74,57	12,77	12,81	7,75	7,93	11.034	11.377
	Nasional	71,57	71,85	13,08	13,10	8,54	8,69		

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.2.2.2. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup Tahun 2022 sebesar 73,88 tahun.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

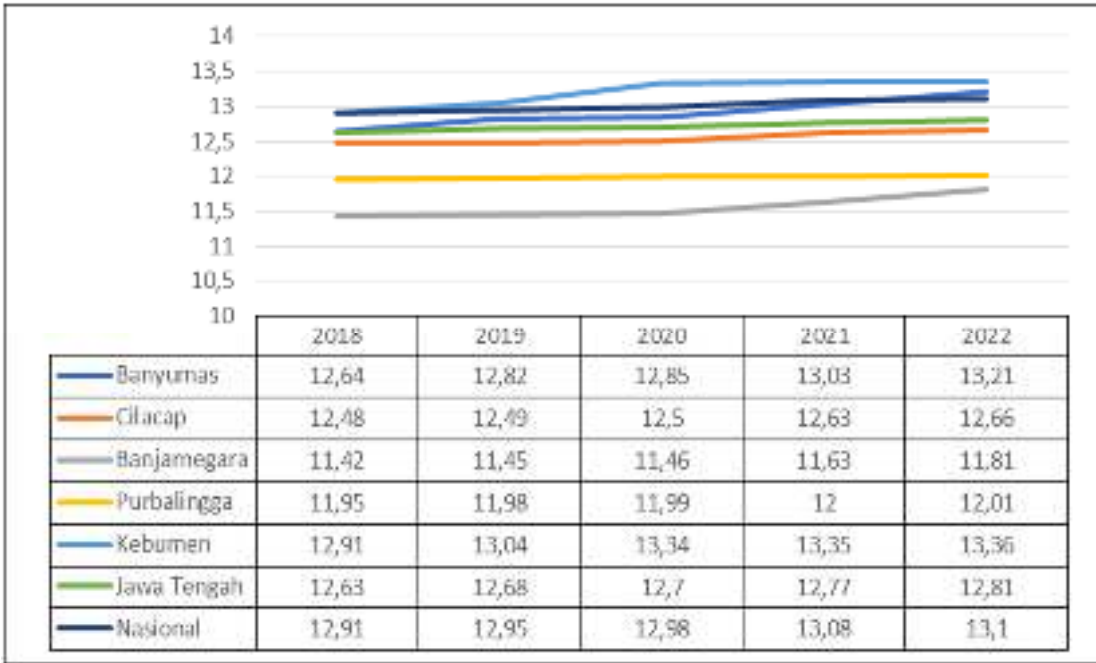
Gambar 2.24
Umur Harapan Hidup (tahun) Saat Lahir di Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas berada pada peringkat 3 (setelah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap) dari 5 Kabupaten. Sedangkan UHH Kabupaten Banyumas lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. UHH Kabupaten Banyumas lebih tinggi jika dibandingkan dengan UHH Nasional. Upaya meningkatkan Umur Harapan Hidup dilakukan dengan 4 cara yaitu program pembangunan kesehatan, program sosial khususnya kesehatan lingkungan, pemenuhan kecukupan gizi dan kalori, dan program pemberantasan kemiskinan.

2.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. HLS Tahun 2022 adalah sebesar 13,21 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,21 tahun atau setara dengan Diploma I.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

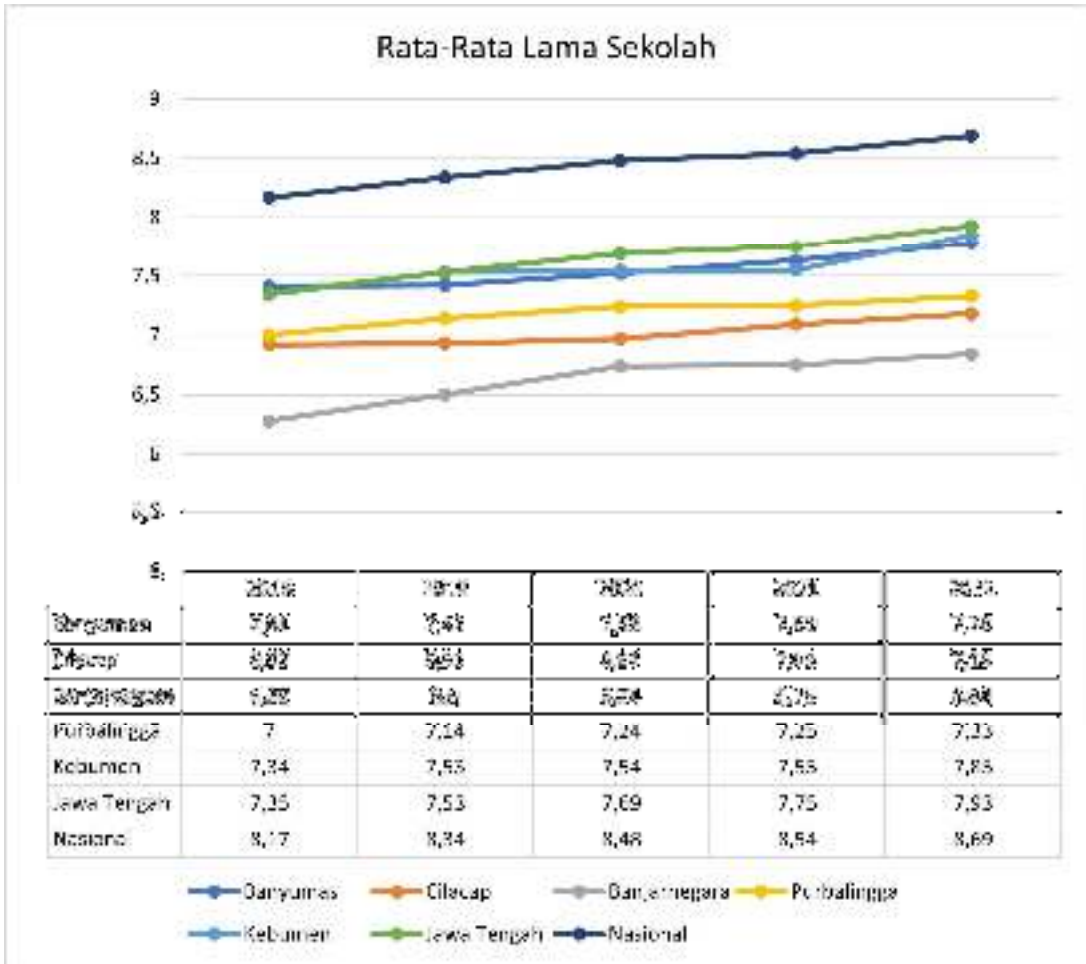
Gambar 2.25
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat ke 2 setelah Kabupaten Kebumen dan berada di atas Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

2.2.2.4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 7,78 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke dalam jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata-rata tingkat pendidikan di Kabupaten Banyumas adalah baru pada tingkat tamatan SD.

Angka Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.26

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

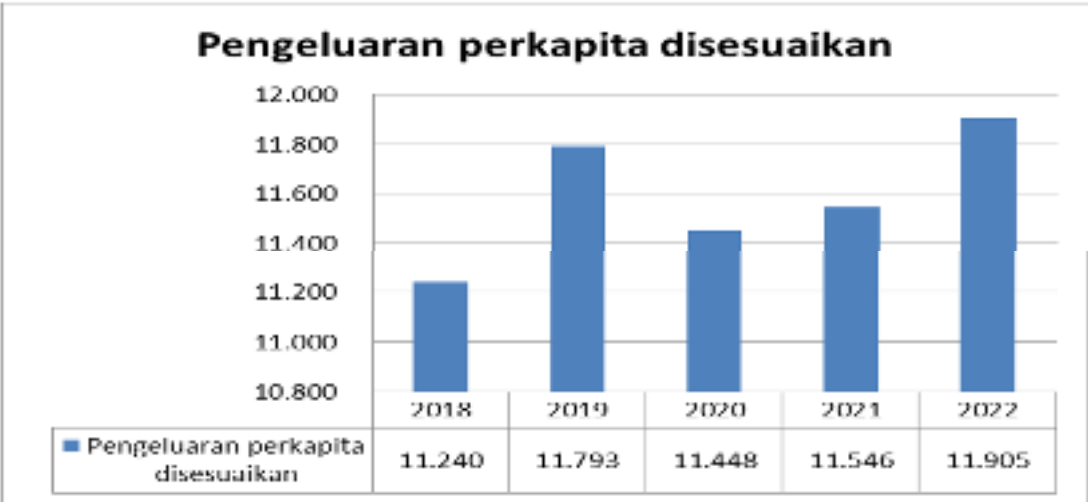
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat ke 2 setelah Kabupaten Kebumen. Nilai tersebut masih di bawah Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun upaya yang

akan dilakukan adalah mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) dan peningkatan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah mencakup 3 perspektif, yaitu siswa, guru, dan infrastruktur. Perspektif siswa yaitu biaya sekolah dibebaskan, beasiswa dan bantuan pendidikan ditingkatkan, dan mengintensifkan pendidikan kesetaraan. Perspektif guru yaitu menambah jumlah guru, pelatihan dan sertifikasi guru, serta tambahan tunjangan guru. Perspektif infrastruktur yaitu rehabilitasi dan melengkapi fasilitas sekolah, membangun sekolah baru, menjamin aksesibilitas sekolah lokasi sekolah berupa jalan atau jembatan, serta moda transportasi dan bus sekolah gratis.

2.2.2.5. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

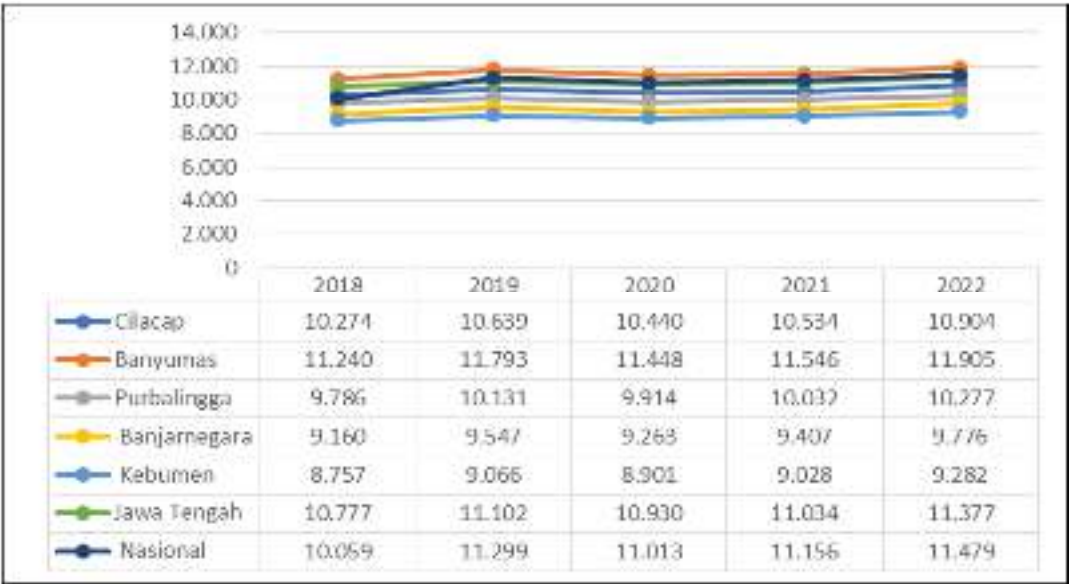
Besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Banyumas telah terjadi peningkatan selama periode 2018-2019, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM sangat sensitif sekali terhadap perubahan ekonomi yang sangat drastis, dimana pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi. Seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Banyumas paritas daya beli di Tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat.



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.27
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Banyumas (dalam
ribu rupiah/orang/tahun)

Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2018-2022 paling tinggi dari capaian kabupaten sekitar, dan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas, kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.28
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022
(dalam ribu rupiah/orang/tahun)

2.2.2.6. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2022 sebesar 105 per 100.000 kelahiran hidup, dengan rincian 24 kasus kematian ibu dari 22.734 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*SDG's*. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.29
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2022

Dari 24 kasus kematian ibu penyebab terbesar dikarenakan eklampsia (PEB) 9 kasus (37,5%), pendarahan 9 kasus (37,5), Lupus (SLE) 2 kasus (8,3%), emboli air ketuban 1 Kasus (4,2%), *Pneumonia* 1 kasus (4,2%), TBC 1 kasus (4,2%) dan *Syok Septic* 1 kasus (4,2%).

Guna mengetahui akar penyebab masalah kematian ibu dan bayi, Dinas Kesehatan secara rutin melaksanakan audit *maternal perinatal* oleh Tim Audit *Maternal Perinatal* sudah terbentuk dengan Keputusan Bupati Banyumas. Pada tahun 2022 terdapat 24 kasus kematian ibu, seluruhnya sudah dilakukan audit. Kematian bayi tahun 2022 terdapat 229 kasus, 25 diantaranya sudah dilakukan audit.

Untuk mendukung penurunan angka kematian ibu kemampuan dan keterampilan bidan dalam menangani ibu hamil perlu ditingkatkan, antara lain dengan pelatihan penatalaksanaan *pre eklampsi* dan pendarahan yang diadakan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IBI. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit juga telah secara rutin melakukan pembinaan kepada Puskesmas. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan (DSOG) dan dokter spesialis anak (DSA) telah membagi diri dalam wilayah binaan, dimana 1 dokter spesialis memegang 1 atau 2 puskesmas.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pengawasan kesehatan ibu hamil dan bayi, Dinas Kesehatan dengan memberdayakan kader dengan melatih kader pada program Jider Jiteng (Siji Kader, Siji Wong Meteng), yaitu satu kader memantau 1–3 ibu hamil. Tugas kader antara lain adalah memantau dan mengingatkan kesehatan dan pemeriksaan rutin ibu hamil,

memantau konsumsi tablet tambah darah, memantau keluhan ibu hamil, mengajak suami ibu hamil agar hadir di kelas bapak mamake, mengajak nenek untuk hadir di kelas embah ASI, mengajak kakek nenek hadir di kelas kaki nini untuk KIA dan sebagainya. Selain itu dilakukan pula penguatan Denmas Selamat (Deteksi Dini ben masyarakat dan ibu hamil selamat).

2.2.2.7. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas dalam periode 3 tahun terakhir (tahun 2020-2022) terus mengalami kenaikan. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.30
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2022

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 sebanyak 10,07 per 1.000 kelahiran hidup (229 kasus), dengan proporsi jenis kematian terdiri atas 44% perinatal (kematian pada usia 1-6 hari), 22% Neonatal (kematian pada usia 7-28 hari) dan 34% Bayi (usia 1-12 bulan).

Selanjutnya proporsi penyebab kematian bayi adalah sebagai berikut: BBLR 70 kasus, kelainan kongenital 56 kasus, Asfiksia 37 kasus, lain-lain 22 kasus (Lain-lain = Ginjal belum berfungsi, penyakit jantung bawaan, *immature*, hepatitis, *Atresia Billier*, *Meningoensefalitis*, VSD, *febris*, *hipotermia* karena kipas angin, benjolan *hemangioma* di kaki, gagal nafas,

tertindih saat menyusui, Distosia Bahu dan gagal ginjal), *Pneumonia* 13 kasus, Diare 9 kasus, *meningitis* 4 kasus, DBD 3 kasus, Aspirasi 6 kasus, *Sepsis* 3 kasus, Penyakit syaraf 2 kasus, Infeksi 1 kasus, Covid 1 kasus, *ikterus* 2 kasus.

Dalam 3 tahun terakhir angka kematian bayi terus meningkat, hal ini terutama disebabkan karena tingginya kasus BBLR serta tingginya gangguan kesehatan pada ibu hamil seperti ibu hamil dengan Pre Eklampsia Berat sehingga harus melahirkan bayi sebelum waktunya, ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti jantung, diabetes melitus dan sebagainya, ibu hamil dengan anemia, serta ibu hamil dengan KEK (Kurang Energi Kronis) dan gizi kurang.

Secara teori 100% kematian bayi di Kabupaten Banyumas dapat dicegah melalui upaya yang dilakukan baik oleh masyarakat, FKTP, FKRTL, dan Dinas Kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah pemanfaatan buku KIA dalam peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mendeteksi tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas; serta implementasi inovasi Denmas Slamet. Upaya yang dapat dilakukan FKTP adalah pemanfaatan buku KIA revisi 2020 untuk pengambilan keputusan, perbaikan deteksi dini faktor resiko pada saat ANC, dan peningkatan skill tim emergency gadar matneo di puskesmas. Upaya yang dapat dilakukan oleh FKRTL adalah mematuhi perjanjian kerjasama sistem rujukan gadar matneo, meningkatkan skill emergency melalui APK, memperbaiki komunikasi tim emergency dengan melalui DPJP, dan penambahan jumlah prasarana emergency neonatal. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah monev intensif melalui pendampingan, review kinerja rumah sakit menggunakan APK, finalisasi pedoman eradikasi PE, dan mereview perjanjian kerjasama sistem rujukan gadar matneo.

2.2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Kenaikan terjadi pada 2018 hingga 2021, sementara pada tahun 2022 TPT Banyumas tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 6,05%. Pada 2022, TPT Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57% dan tingkat nasional sebesar 5,86%. Bila dibandingkan dengan TPT Barlingmascakep, TPT Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 pada

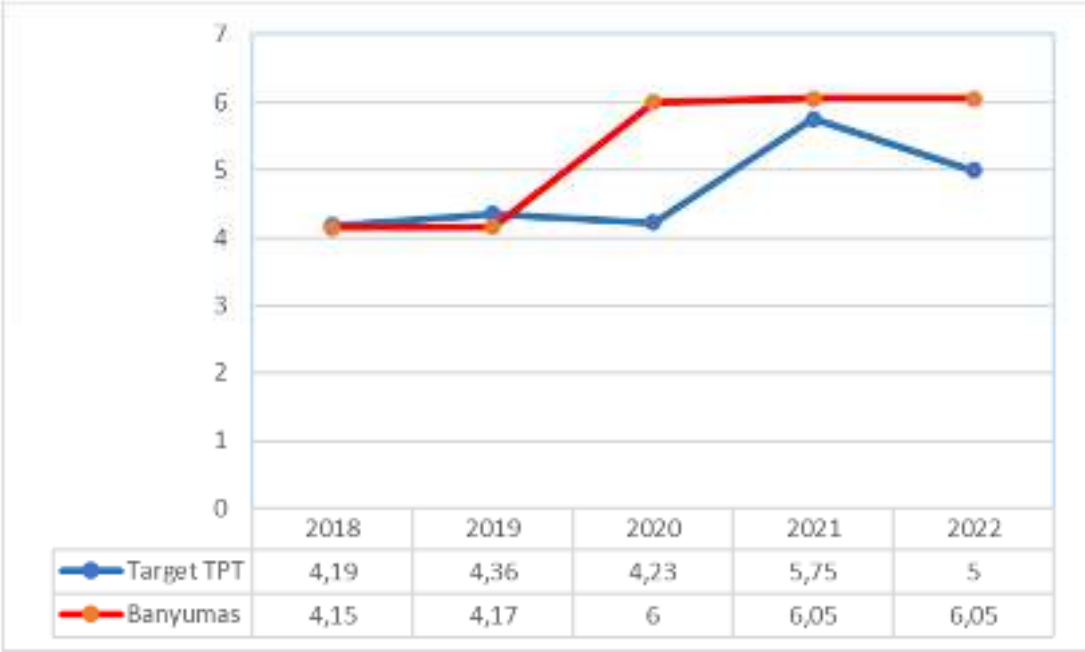
peringkat ke 3 terendah setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten dengan TPT terendah di linkup Barlingmascakep adalah kabupaten Purbalingga, dimana di Kabupaten Purbalingga banyak sekali industri yang menyerap tenaga kerja lokal. Perbandingan TPT Kabupaten Banyumas, Barlingmascakep, Provinsi dan nasional bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas dengan Barlingmascakeb, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)

Jika dibandingkan dengan target daerah TPT Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2022 belum memenuhi target daerah. Perbandingan target dan realisasi TPT Tahun 2018-2022 seperti dalam grafik berikut:

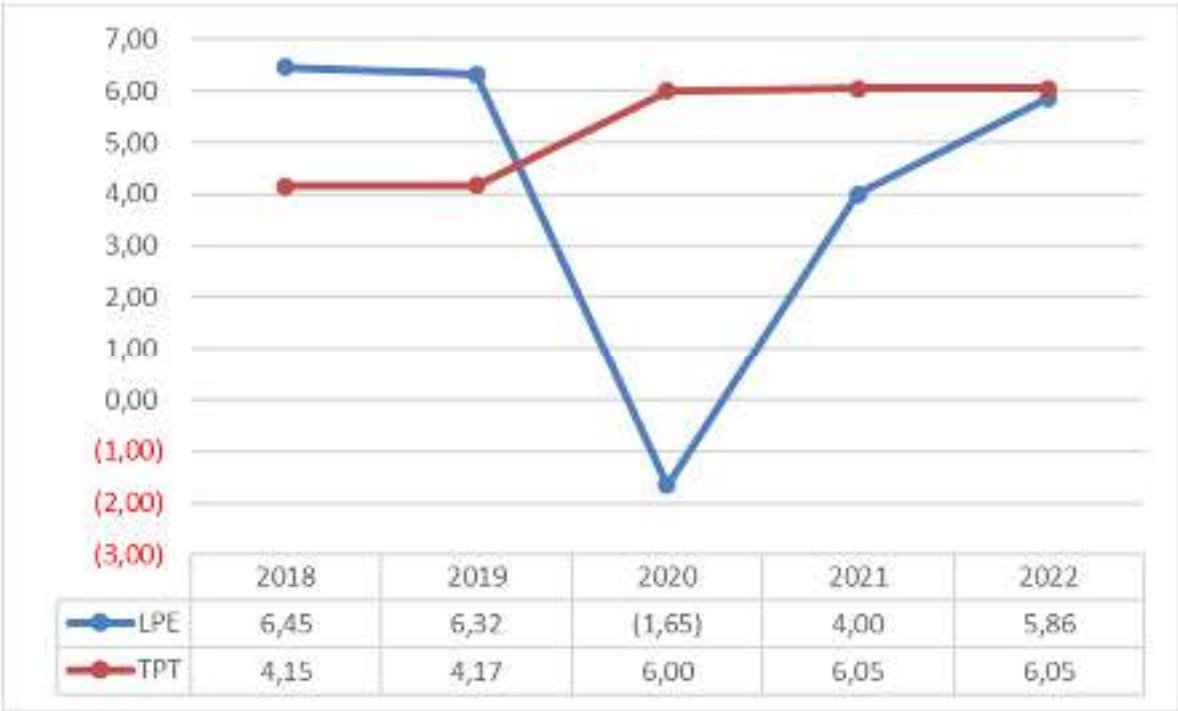


Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.32
Perbandingan Target dan Realisasi TPT Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran serta kemiskinan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran. Sementara itu, jika tingkat pengangguran menurun akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat berpengaruh terhadap permintaan produksi yang kemudian dapat juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi hanya salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan,. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang ada saat in tidak mampu membuka peluang kesempatan kerja mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian daripada penambahan pendapatan. adapun faktor lain diantaranya Upah Minimum Kabupaten, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Penduduk.

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Kabupaten Banyumas dapat dilihat perbandingan TPT dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2018-2022 pada grafik berikut ini



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.33
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2018-2022

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.13
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut jenis Pengeluaran,
2021-2022

Komoditas	Rata-rata 2021	2022		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Tinggi
Makanan	523.319	302.631	551.069	1.062.431
Bukan Makanan	500.654	194.836	397.152	1.194.368
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	225.038	100.485	195.385	526.157
Aneka Barang dan Jasa	138.132	50.417	108.917	344.694
Barang Tahan Lama	60.414	5.866	19.674	116.874
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	23.198	10.289	21.678	53.423
Pajak, Pungutan dan Asuransi	43.253	25.364	41.524	113.659
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	10.619	2.415	9.974	39.561
Total Pengeluaran	1.023.973	497.467	948.221	2.256.799

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp.1.023.973 menjadi Rp.1.029.591. Perbandingan konsumsi baik makanan maupun non makanan menurut kelompok pengeluaran memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah mengkonsumsi makanan sebesar Rp.302.631 per kapita per bulan, Angka ini menunjukkan angka yang dua kali lipat lebih rendah dibandingkan kelompok 40% tengah dan tiga kali lipat lebih rendah dibandingkan kelompok pengeluaran 20% teratas. Perbandingan antara konsumsi makanan dan non makanan untuk penduduk kelompok 40% terbawah, mereka lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan non makanan hampir 2 kali lipat. Adapun untuk penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% bawah dan 40% tengah mengkonsumsi makanan lebih besar daripada non makanan. Lain halnya dengan penduduk dengan kelompok pengeluaran 20% teratas, mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi non makanan dibandingkan kebutuhan makanan. Pola konsumsi ini menunjukkan pola perilaku ekonomi yang berbeda antar kategori kelompok pengeluaran penduduk

Untuk mengukur tingkat ketimpangan penduduk di Kabupaten Banyumas, digunakan pendekatan pengeluaran menurut kelompok pengeluaran penduduk. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, rata-rata

pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang termasuk 40 persen terbawah sebesar Rp497.467, sedangkan 40 persen tengah sebesar Rp948.220, dan 20 persen teratas sebesar Rp2.256.798 per kapita sebulan. Dari angka ini dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk 20 persen teratas sekitar 4,53 kali lipat dari pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan Banyumas, rata-rata pengeluarannya kelompok penduduk 40 persen terbawah hanya selisih Rp55.947 lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dalam buku ekonomi pembangunan, dijelaskan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka seharusnya kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan ketimpangan pengeluaran akan menurun (Todaro dan Smith, 2018). Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan ekonomi merosot maka sangat dimungkinkan persentase penduduk miskin dan ketimpangan akan meningkat. Jika diperluas, maka keterkaitan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan dijelaskan dalam konsep poverty-growth-inequality gap (PGI Gap). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara makro akan mendorong terjadinya ekspansi rumah yang pada gilirannya terciptanya lapangan usaha baru. Kondisi tersebut menjadikan penduduk yang tergolong miskin dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang menjadikan mereka tidak tergolong kategori penduduk atau keluarga miskin. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut pada gilirannya dapat menurunkan ketimpangan pengeluaran yang terjadi. Berdasarkan data BPS (2022), pertumbuhan ekonomi sebesar 4,00 persen pada tahun 2021 diimbangi penurunan jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran. Hal tersebut menjadikan indikasi awal bahwa arah pemulihan ekonomi relatif sudah pada jalan yang benar (on the right track). Indikasi awal tersebut sebaiknya harus dikaji empiris agar dapat mendapatkan hasil yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambil kebijakan. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya insentif dan sejenisnya, dalam kondisi pemulihan ekonomi harus tetap mempertimbangkan variabel pandemi. Di samping itu, pada saat yang bersamaan harus dilakukan kebijakan yang dapat menekan penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran. Dengan demikian kebijakan pro growth harus dibarengi dengan pro poor dan pro income distribution. Kebijakan tersebut harus diterapkan dengan konsisten dan berkelanjutan

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pemda Banyumas beserta pemangku kepentingan.

2.3.1.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non-Pangan Rumah Tangga (RT)

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran untuk pangan dan non-pangan penduduk di Banyumas kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Untuk Tahun 2022 persentase pengeluaran untuk pangan penduduk di Kabupaten Banyumas mencapai 53,80 persen, lebih tinggi dibandingkan konsumsi Rumah tangga Non-Pangan sebesar 46,20 persen. Persentase konsumsi RT Pangan dan Non-Pangan di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
Persentase Konsumsi RT Pangan dan Non-Pangan 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Konsumsi RT Pangan	49,81	47,69	48,92	51,11	53,80
2	Persentase Konsumsi RT Non-Pangan	50,19	52,31	51,08	48,89	46,20

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2023

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1. Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.716,886 km, dengan persentase kewenangan jalan terdiri atas jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sebesar 87,83%, jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24%, dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang (km)
Baik		Sedang		Rusak		
km	%	km	%	km	%	km
868,549	57,60%	356,686	23,65%	282,765	18,75%	1.508,000

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Tabel 2.16
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
		Baik		Rusak		
		M	%	M	%	m
1	Primer	304.490	77,47%	88.564	22,53%	393.054
2	Sekunder	235.076	86,62%	36.311	13,38%	271.386
	Jumlah	539.566	81,21%	124.874	18,79%	664.440

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun-tahun yang akan datang.

2.3.3. Fokus Iklim Investasi

2.3.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 cenderung turun pada 2 tahun terakhir. Perkembangan kriminalitas selama Tahun 2018-2022 adalah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Kriminalitas Tahun 2018-2022

No	Variabel	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1.791.480	1.840.152	1.873.196	1.898.746	1.842.582

No	Variabel	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Kriminalitas	Kasus	643	930	638	281	290
3	Jumlah Kriminalitas tertangani	Kasus	412	417	324	172	272
4	Persentase Kasus Kriminalitas tertangani	%	64,07	44,84	50,78	61,21	93,79
5	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	2,69	2,45	2,27	1,48	1,57

Sumber: Polresta Banyumas Tahun, 2022

Angka kriminalitas Kabupaten Banyumas untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan dari 1,48 per 10.000 penduduk menjadi 1,57 per 10.000 penduduk, Kenaikan angka kriminalitas ini disebabkan adanya penurunan jumlah penduduk karena adanya perbedaan basis data kependudukan sebagai komponen pembagi angka kriminalitas. Meskipun mengalami kenaikan namun kondisi di Kabupaten Banyumas cukup kondusif dan harapannya kondisi ini akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Banyumas semakin baik. Selain itu, kasus kriminalitas yang tertangani juga mengalami kenaikan dari 61,21% menjadi 93,02%, namun masih belum keseluruhan kasus kriminalitas tertangani sehingga perlu kerja keras dalam penanganan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banyumas.

2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.3.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 cenderung menurun. Pada Tahun 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas adalah 44,90 artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 45 penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk ini lebih banyak disumbangkan oleh kelompok produktif (15–64 tahun) yang mencapai 69,01% dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas. Tingginya jumlah penduduk produktif menjadi perhatian bagi kemajuan pembangunan.



Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 2022, diolah

Gambar 2.34
Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS kelompok umur 13 -15 di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,30 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena mulai diberlakukannya kembali kelas tatap muka dari yang sebelumnya dilakukan secara daring akibat pandemi covid 19, sehingga terdapat anak-anak yang enggan untuk kembali bersekolah.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Usia	Angka Partisipasi Sekolah (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	7 - 12	99,47	99,71	99,99	99,61	99,96
2	13 - 15	95,32	99,40	98,95	99,97	99,67

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022; Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyumas 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Perkembangan APK Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs
di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APK PAUD/TK *)	77,23	77,25	77,5	77,75	78,2
2	APK SD/MI/Paket A	108,12	108,19	106,90	108,61	108,48
3	APK SMP/MTs/Paket B	86,79	82,88	85,04	85,34	81,22

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022

**) Bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2022*

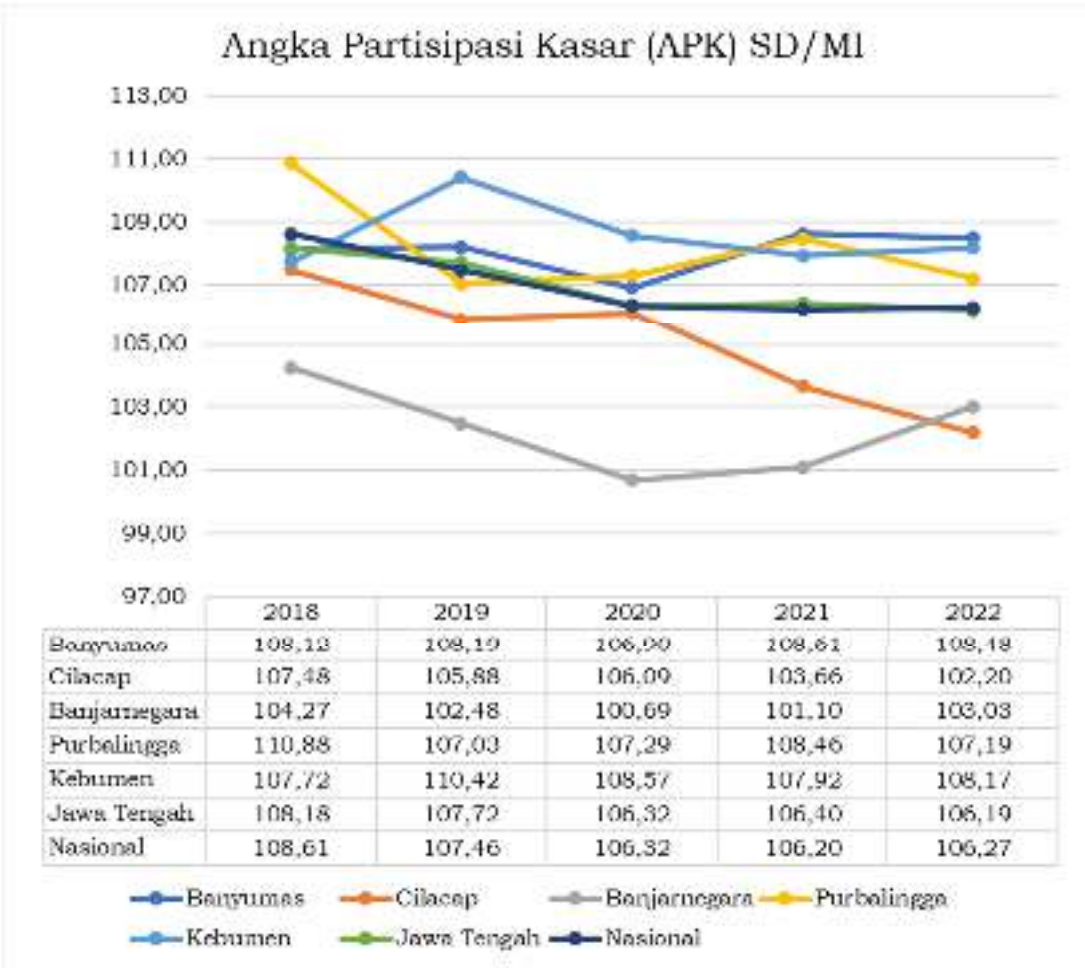
Saat ini pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan program PAUD satu tahun pra SD dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 32 Tahun 2018. Kebijakan pemerintah pusat ini diikuti pula dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun pra Sekolah Dasar. Dengan mewajibkan peserta didik untuk lulus PAUD minimal satu tahun, orang tua turut menyelamatkan usia keemasan anak usia 0-6 tahun untuk dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat lebih siap ketika memasuki jenjang berikutnya. Lebih dari itu, kebijakan tersebut memperluas tahapan

wajib pendidikan, yakni wajib SD, wajib belajar 9 tahun, dan wajib belajar 12 tahun.

Angka partisipasi kasar PAUD/TK sampai dengan Tahun 2022 belum mencapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum semua anak usia PAUD mengikuti Pendidikan jenjang PAUD. Belum optimalnya APK PAUD/TK perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya pendidikan usia dini untuk mempersiapkan pendidikan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, dan membentuk kepribadian anak secara positif.

Kontribusi masyarakat menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung perkembangan layanan pendidikan PAUD. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan pendidikan PAUD di wilayah masing-masing. Pemerintah desa masih perlu didorong untuk mengalokasikan dana desa bagi pengembangan PAUD.

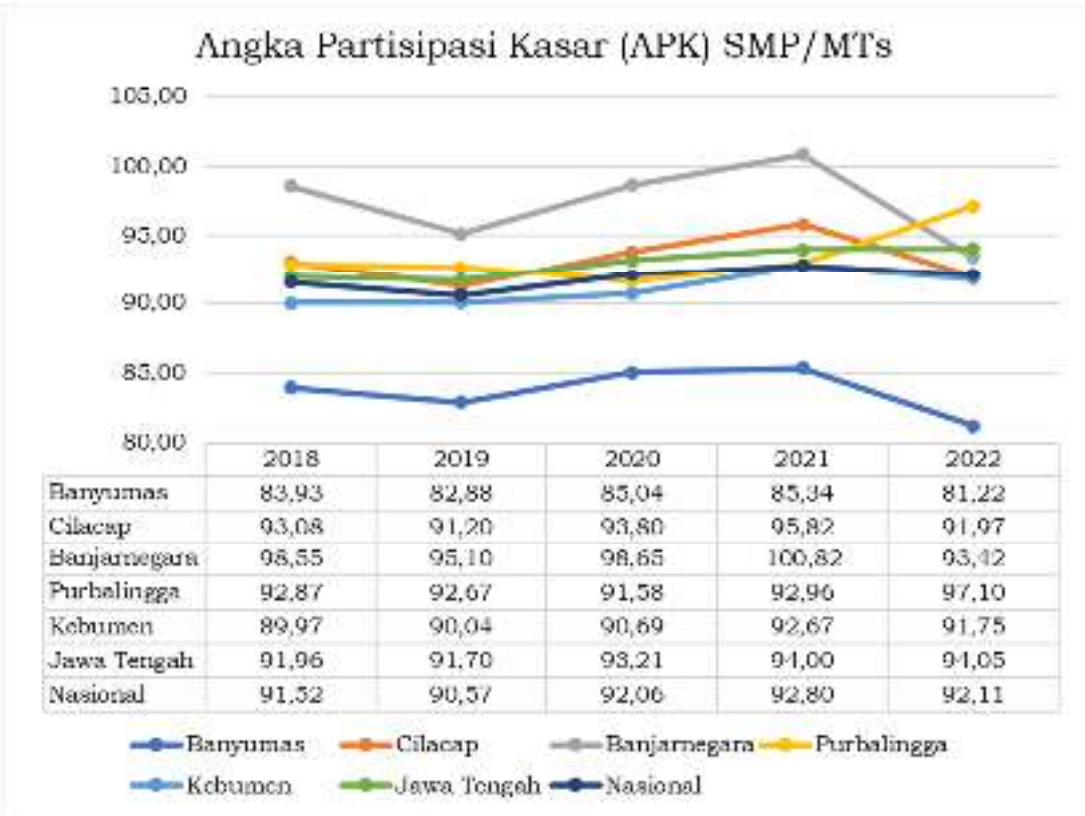
Capaian APK SD/MI Kabupaten Banyumas Tahun 2022 lebih tinggi dari APK kabupaten sejenis, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional. Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Banyumas, kabupaten sejenis, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2018-2022 dapat dilihat pada infografis dibawah ini:



Sumber : BPS, BPS Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Cilacap, BPS Kabupaten Banjarnegara, BPS Kabupaten Purbalingga, BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Gambar 2.35
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)

Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar capaiannya masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, kabupaten sekitar dan Nasional. Capaian APK SMP/MTS/Paket B wilayah Kabupaten Banyumas, wilayah kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS, BPS Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Cilacap, BPS Kabupaten Banjarnegara, BPS Kabupaten Purbalingga, BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Gambar 2.36
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022
(%)

Angka Partisipasi Murni (APM)

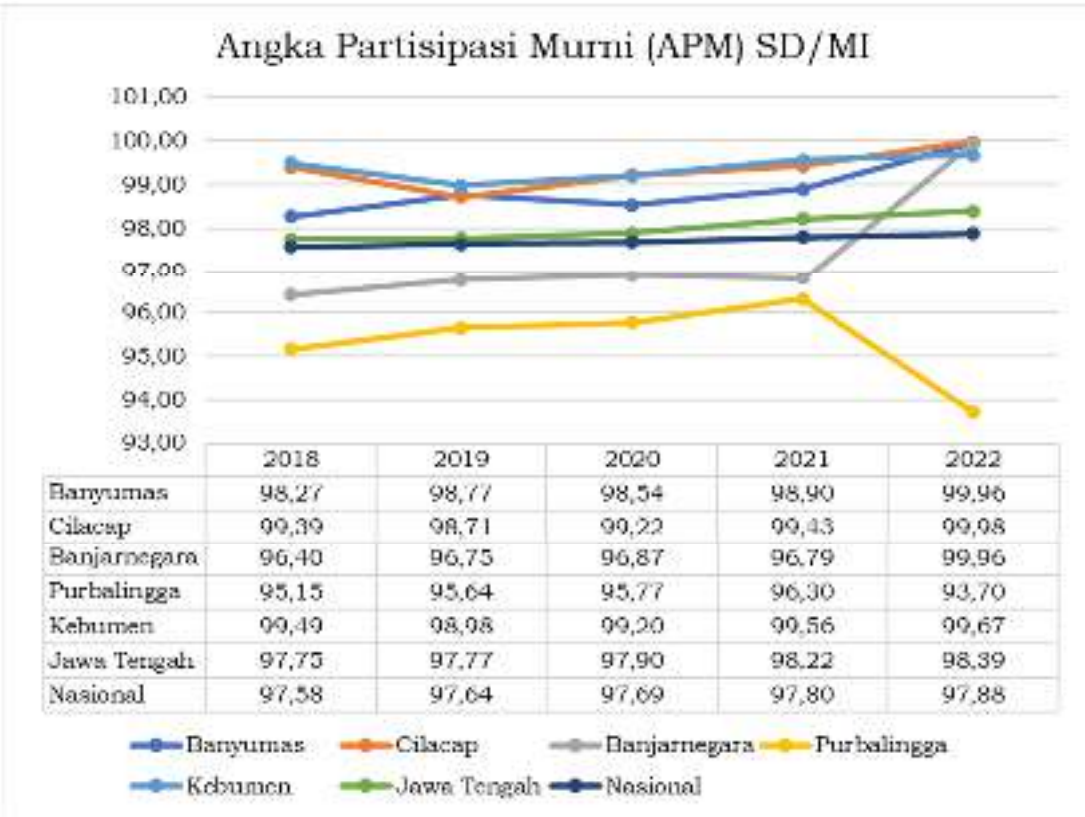
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Capaian APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs
di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APM SD/MI/Paket A (%)	98,27	98,77	98,54	98,90	99,96
2	APM SMP/MTs/Paket B (%)	80,21	80,73	81,23	81,54	81,22

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

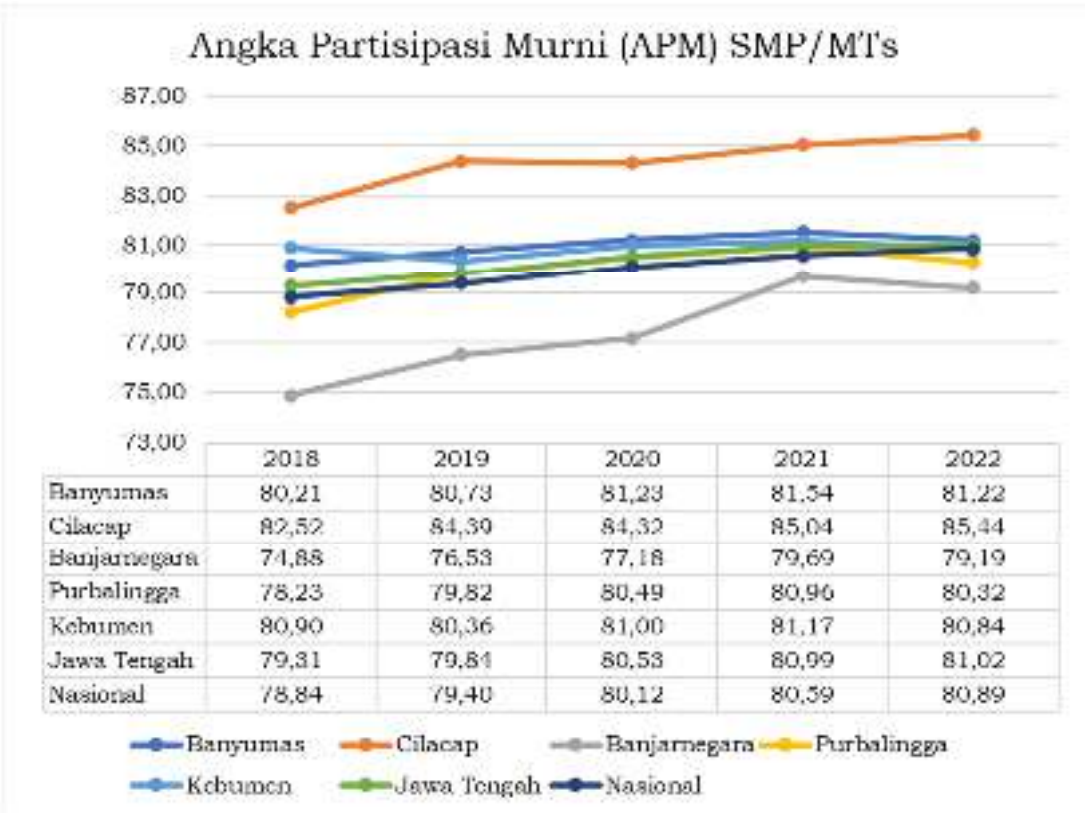
Capaian APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan ada pada peringkat 2 dibandingkan wilayah kabupaten sekitar. Capaian APM SD/MI/Paket A Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS, BPS Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Cilacap, BPS Kabupaten Banjarnegara, BPS Kabupaten Purbalingga, BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Gambar 2.37
 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)

Capaian APM SMP/MTs Paket B di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan berada pada peringkat 2 di wilayah kabupaten sekitar. Capaian APM SMP/MTs Paket B Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS, BPS Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Cilacap, BPS Kabupaten Banjarnegara, BPS Kabupaten Purbalingga, BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Gambar 2.38
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Paket B di Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan sebagai referensi utama, dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan indikator kinerja pada surat Mendikbudristek Nomor 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota, capaian rapor pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Capaian 2021
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini (APS)	%	68,72
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,72

3.1	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,82
3.2	Rata-rata kompetensi Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,60
4.1	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,95
4.2	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,75
5	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	69,61
6	Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV	%	69,93
7	Rasio pengawas/penilik PAUD	Nilai	4,77

Sumber: Kemendikbudristek, 2022

Rasio Murid terhadap Guru

Untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Banyumas selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan Tahun 2022 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi rasio murid terhadap guru selama kurun waktu 2018-2022 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Rasio Murid terhadap Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD					
	Murid	173.377	171.541	169.889	130.000	127.577
	Guru	9.267	10.014	10.690	7.327	7.199
	Rasio Guru terhadap murid	18,00	17,00	15,90	17,74	18,00
2.	SMP					
	Murid	80.026	82.321	84.113	66.165	68.136
	Guru	4.277	4.446	4.646	3.378	3.315
	Rasio Guru terhadap murid	18,00	19,00	18,10	19,59	21,00

Sumber: Dindik Kabupaten Banyumas, 2022

Rasio guru terhadap murid dihitung dengan jumlah guru secara keseluruhan baik yang PNS maupun yang non PNS. Apabila hanya dihitung

dengan jumlah guru PNS maka jumlahnya sangat tidak memadai. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas baik pada jenjang SD maupun SMP sudah cukup bagus. Semakin kecil rasio murid terhadap guru artinya jumlah murid yang dilayani oleh seorang guru semakin kecil, sehingga diharapkan kualitas pengajaran dan perhatian guru terhadap muridnya semakin bagus. Meskipun di Tahun 2022 rasio guru terhadap murid jenjang SD dan SMP mengalami kenaikan namun masih tergolong kecil dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 17 dimana rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru SD dan SMP 20:1.

Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan untuk jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MAN di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2021 belum 100% dimana masih ada anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan pendidikan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MAN tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Capaian Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

No	Angka Melanjutkan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD / MI ke SMP / MTs	101,48	106,4	100	99,36	99,41
2	SMP / MTs ke SMA / SMK / MAN	96,10	96,36	96,2	96,2	99,43

Sumber : Dindik Kabupaten Banyumas, 2022

Kondisi Bangunan Sekolah

Kondisi bangunan sekolah jenjang SD dan SMP sampai Tahun 2022 dalam kondisi baik cenderung mengalami penurunan ke kondisi rusak ringan dan rusak berat berkurang dan telah diperbaiki menjadi bangunan dengan kondisi baik. Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SD dan SMP Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24

Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SMP Kabupaten Banyumas
Tahun 2018–2022

No	Kondisi Bangunan Sekolah SD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	77,6	77,64	71,64	49,33	73,5
2	Rusak Ringan	18,7	18,68	19,69	50,51	26,4
3	Rusak Berat	3,7	3,68	8,67	0,16	0,2

Sumber : Dindik Kabupaten Banyumas, 2022

Angka Putus Sekolah (APS)

Anak Putus Sekolah merupakan bagian dari Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka Putus Sekolah (APS) sampai dengan tahun 2022 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,59% (127 murid) dari jumlah murid SD/MI (21.606 murid) dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebanyak 0,57% (123 murid) dari jumlah murid SMP/MTs (21.403 murid).

Angka putus sekolah perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%, dengan demikian secara absolut tidak ada anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Perkembangan kondisi Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Angka Putus Sekolah (%) Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD / MI	0,040	0,040	0,034	0,058	0,59
2	SMP / MTs	0,207	0,176	0,102	0,080	0,57

Sumber : Dindik Kabupaten Banyumas, 2022

Permasalahan anak-anak putus sekolah/anak tidak sekolah (ATS) merupakan salah satu faktor utama yang menghambat Pemerintah dalam mencapai target program Wajib Belajar 9 Tahun, dan menuju Wajib Belajar 12 Tahun. Penanganan ATS menjadi strategi nasional yang bertujuan agar seluruh anak Indonesia usia sekolah pendidikan dasar dan menengah (7-18 tahun) terus atau kembali dalam pendidikan baik formal maupun non formal untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Menurut data SUSENAS tahun 2021, di Kabupaten Banyumas terdapat ATS sejumlah 25.545 anak. Oleh karena itu di tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Tim Penanganan ATS Jawa Tengah dan UNICEF memperluas replikasi Penanganan Anak Tidak Sekolah

dengan Gerakan Sekolah Maneh di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Magelang.

Kegiatan replikasi penanganan ATS di Kabupaten Banyumas dilaksanakan di 4 desa di 4 kecamatan yaitu : 1) Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh; 2) Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen; 3) Desa Losari Kecamatan Rawalo; 4) Desa Watuagung Kecamatan Tambak, dengan memanfaatkan pendataan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDT melalui Pendamping Desa.

Sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus didukung dengan alokasi APBD Kabupaten Banyumas, pembentukan Tim di Tingkat Kabupaten untuk Program Penanganan Anak Tidak Sekolah – Gerakan Sekolah Maneh (ATS-GSM), pendataan ATS dan melakukan pendampingan ATS untuk kembali bersekolah, menyusun RAD Kabupaten Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai APS yang drastis dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi APS yaitu mengembalikan anak tidak sekolah melanjutkan pendidikan baik melalui SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) maupun PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), pemberian beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Banyumas Pintar (KBP), pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan kelengkapan fasilitas, dan adanya bantuan operasional sekolah (BOS).

Pencapaian kinerja urusan pendidikan tahun 2022 didasarkan pada 2 program dan 4 indikator. Gambaran kinerja urusan pendidikan tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Aspek/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	DINAS PENDIDIKAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

1.	APK SMP	%	99	95	81,22	Belum mencapai target 2022 (95%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (99%)
2.	APK SD	%	101,61	102,31	108,48	Melampaui target 2022 (102,31) dan mencapai target akhir RPJMD (101,61%)
3.	APK PAUD	%	78,25	78	78,2	Mencapai target 2022 (78%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (78,25%)
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
4.	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	%	85	82	82	Mencapai target 2022 (82%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (85%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pendidikan dari 4 target indikator, sebanyak 3 target indikator sudah melampaui target 2022, dan 3 target indikator belum mencapai target akhir RPJMD.

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator APK SD saja yang sudah melampaui target 2022 dan sudah *on the track* untuk mencapai target akhir RPJMD.

2.4.1.2. Kesehatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan upaya kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan dilakukan dengan promotif dan preventif. Sedangkan upaya kuratif dan rehabilitatif antara lain melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan perorangan maupun rujukan, serta pemenuhan cakupan tenaga medis dan paramedis untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Rasio Puskesmas

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebanyak 79 unit dengan rasio sebesar 1 : 23.324 penduduk. Rasio ideal Puskesmas dibanding jumlah penduduk adalah 1 : 16.000.

Tabel 2.27
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	1.791.480	1.840.152	1.873.196	1.898.746	1.842.582
2	Jumlah Puskesmas	39	39	40	40	40
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	39	39	39	39	39
4	Jumlah Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu	78	78	79	79	79
5	Rasio Puskesmas	45.935	47.183	46.830	47.469	46.065
6	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	22.968	23.592	23.711	24.035	23.324

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Sampai dengan Tahun 2022 di Kabupaten Banyumas terdapat 25

rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.842.582 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 1 : 73.703 jiwa.

Tabel 2.28
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	1.791.480	1.840.152	1.873.196	1.898.746	1.842.582
2	Jumlah Rumah Sakit	23	23	23	24	25
3	Rumah Sakit Umum	16	16	16	17	18
4	Rumah Sakit Khusus	7	7	7	7	7
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	77.890	80.007	81.443	79.114	73.703

Sumber: Dinkes Kabupaten Banyumas, 2022

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat didukung ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Rasio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan. Rasio dokter keseluruhan idealnya 1 dokter melayani 2.500 orang penduduk.

Tabel 2.29
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	1.791.480	1.840.152	1.873.196	1.898.746	1.842.582
2	Jumlah Dokter Umum	312	327	522	676	596
3	Jumlah dokter gigi	110	99	125	126	134
4	Jumlah dokter spesialis	473	473	300	295	376
5	Jumlah Dokter	895	899	947	1097	1.106

6	Rasio Dokter umum Per Satuan Penduduk	5.383	5.627	3.588	2.806	3.092
7	Rasio Dokter gigi Per Satuan Penduduk	15.268	18.587	14.986	15.054	13.751
8	Rasio Dokter spesialis Per Satuan Penduduk	3.551	3.890	6.244	6.430	4.900
9.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	2.002	2.047	1.978	1.731	1.666

Sumber: Dinkes Kabupaten Banyumas, 2022

Pada Tahun 2022 jumlah dokter yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.106 orang yang meliputi dokter umum 596 orang, dokter gigi 134 orang, dokter spesialis 376 orang.

Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

a. Rasio Tenaga Bidan per satuan penduduk

Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Bidan berbanding jumlah penduduk. Rasio ideal tenaga bidan per satuan penduduk adalah 1 : 1.000.

Tahun 2022 jumlah tenaga bidan di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.368 dan rasio bidan per satuan penduduk yaitu 1 : 1.347 atau 1 bidan melayani 1.346 jiwa sehingga Kabupaten Banyumas masih membutuhkan tenaga Bidan.

b. Rasio Perawat Per Satuan Penduduk

Rasio Perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 855.

Tahun 2022 jumlah tenaga perawat di Kabupaten Banyumas sebanyak 3.595 dan rasio tenaga perawat dengan perbandingan jumlah penduduk sebesar 1 : 513.

Tabel berikut menyajikan jumlah dan rasio perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di Kabupaten Banyumas Tahun 2021–2022.

Tabel 2.30
Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per Satuan Penduduk di Kabupaten Banyumas, 2021-2022

No	Uraian	2021		2022	
		Jumlah	Rasio per Satuan Penduduk	Jumlah	Rasio per Satuan Penduduk
1	Penduduk	1.898.746		1.842.582	
2	Perawat	3.490	544	3.595	513
3	Bidan	1.329	1.429	1.368	1.347
4	Farmasis	513	3.701	567	3.250
5	Ahli Gizi	135	14.065	157	11.736

Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2021-2022

Persentase Balita Gizi Buruk

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, selain intervensi gizi terhadap bayi Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian terhadap asupan gizi balita. Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2018–2022 relatif kecil, dan telah mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Tahun 2030 (17%). Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.39
 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas
 Tahun 2018–2022

Pravelensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:



Sumber: Dinkes Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.40
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2018–2022 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kualitas hidup usia balita akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Ketidakseimbangan zat gizi dapat mengganggu pertumbuhan dan kemampuan berpikir balita yang akan menjadi sumber daya manusia penerus bangsa. Peluang bonus demografi tidak optimal jika banyaknya usia produktif tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia.

Prevalensi Balita Stunting

Pada Tahun 2018-2022 kasus stunting menurut hasil pengukuran bulan timbang yang dilaksanakan Dinas Kesehatan mengalami penurunan dari 20,4% menjadi 11,86%. Upaya penurunan kasus stunting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah implementasi gerakan hidup sehat, Intervensi Gizi Spesifik, Intervensi Gizi Sensitif dan Workshop Stunting dan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting bagi masyarakat.

Tabel 2.31
Persentase Kasus Stunting Tahun 2018-2022
Berdasarkan Data Hasil Pengukuran Bulan Timbang

No	Tahun	% Stunting
		Balita 0-59 bulan
1	2018	20,4
2	2019	15,96
3	2020	14,21
4	2021	11,80
5	2022	11,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. Perkembangan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan ini meningkat dari Tahun 2018-2019, namun terus menurun pada Tahun 2020 dan 2021. Angka ini meningkat lagi pada tahun 2022. Peningkatan pemahaman tentang inisiasi menyusui dini dan pentingnya ASI eksklusif pada ibu melahirkan perlu terus dilakukan. Tabel berikut menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.32
Cakupan Bayi Usia 0-6 Bulan yang Mendapatkan
ASI Eksklusif (%) Tahun 2018-2022

No	Tahun	Cakupan (%) ASI
1	2018	63,3
2	2019	66,1
3	2020	61,9
4	2021	47,89
5	2022	68,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022

Pemberian ASI Eksklusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

Pola Penyakit

Penyakit menular dan tidak menular dapat menjadi penyebab kematian. Penyakit menular dipengaruhi oleh faktor perilaku dan

lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Kondisi penyakit baik menular maupun tidak menular di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022.

Tabel 2.33

Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2022

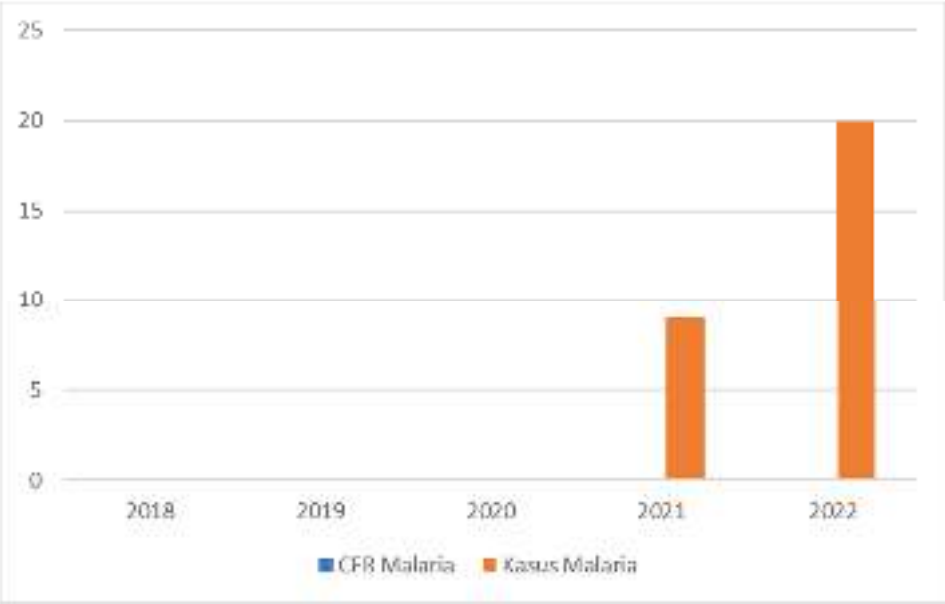
No	Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV/AIDS	
						Kasus HIV	Kasus AIDS
1	2018	3,07	3,64	94,2	42,2	221	136
2	2019	11	5,9	104,40	87,03	327	321
3	2020	19,95	3,17	77,39	71,42	267	159
4	2021	14,12	7,69	86	78	166	127
5	2022	15	4,23	96,7	38,79	245	183

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah: TB, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kasus TB tertinggi pada tahun 2019. CDR adalah jumlah kasus tuberkolosis yang diobati dan melaporkan. CR adalah jumlah penderita tuberkolosis yang sembuh setelah selesai masa pengobatannya.

Kasus HIV tertinggi pada tahun 2019. Kasus HIV adalah kasus dimana orang sudah terkena virus HIV tapi belum menunjukkan gejala-gejala yang parah, ciri-cirinya yaitu sariawan akut dan gatal - gatal. Kasus AIDS adalah kasus dimana orang sudah terkena virus HIV tapi sudah menunjukkan gejala - gejala yang parah yaitu tubuh menjadi kurus dan gampang terkena penyakit.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan gambar xx, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2022 merupakan tahun tertinggi kasus malaria. Kasus malaria di Kabupaten Banyumas bukan berasal dari adanya penularan di Kabupaten Banyumas, tetapi karena adanya penderita dari luar yang masuk ke Kabupaten Banyumas.

Penyebab kematian lainnya adalah penyakit tidak menular (PTM). Kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Kondisi Penyakit Tidak Menular
(Persentase per jumlah penduduk) dan Desa Aktif Mandiri Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2022

No	Tahun	Diabetes Mellitus	Desa Siaga Aktif Mandiri
1	2018	1,7	25
2	2019	1,52	45
3	2020	1,37	56
4	2021	2,21	64
5	2022	1,26	72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2022

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular antara lain kemajuan teknologi, mobilitas penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan

produktivitas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker.

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), *Open Defecation Free* (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan, serta penerapan status desa siaga aktif mandiri yang merupakan program dari Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018–2023 Pencapaian kinerja urusan kesehatan tahun 2021 didasarkan pada 8 program dan 8 indikator, dimana masing-masing 2 program dimiliki oleh RSUD Banyumas dan 2 program dimiliki oleh RSUD Ajibarang, dan 4 Program dimiliki Dinas Kesehatan. Gambaran kinerja urusan kesehatan tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	DINAS KESEHATAN					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1.	persentase Jenis UKM UKP sesuai standar yang terpenuhi	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
2.	persentase Unsur Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
3.	persentase Sarana Produksi, Distribusi dan Sediaan, Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan, Minuman yang sesuai standard	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
4.	persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
RSUD BANYUMAS						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
5.	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	%	85	85	NA	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
6.	Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Banyumas	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
RSUD AJIBARANG						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
7.	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang	%	85	85	NA	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
8.	Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Ajibarang	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Kesehatan dari 8 target indikator, sebanyak 6 target indikator telah melampaui target 2022 dan sekaligus mencapai target akhir RPJMD.

Untuk target indikator persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas tidak diperoleh angka (NA) karena indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan/pengadaan alat kesehatan dari anggaran DAK tersebut tidak ada kegiatan (tidak ada pengadaan).

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis tidak hanya karena terdapat sub bidang yang terkait dengan pelayanan dasar namun juga perannya sebagai pendukung keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Peningkatan kualitas infrastruktur dibutuhkan sebagai factor enabling untuk memperkuat daya saing daerah.

Sumber Daya Air

Sistem jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk mencapai ketahanan pangan dengan fungsi melayani ketersediaan air pada daerah irigasi. jaringan irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 2.36
Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	Pusat	2	6.578
2	Provinsi Jawa Tengah	10	5.084
3	Kabupaten Banyumas	573	23.716
	Jumlah	585	35.378

Sumber: Kementerian PUPR, 2015

Kondisi jaringan irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan. Kondisi jaringan irigasi kabupaten Tahun 2017-2022 diuraikan dalam tabel berikut.

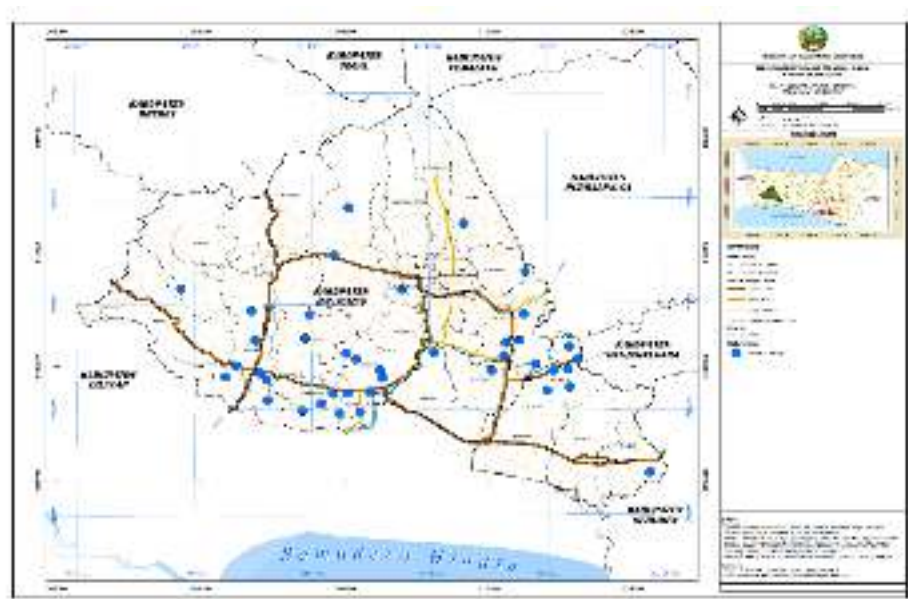
Tabel 2.37
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Banyumas

Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	641.081	641.081	543.192	564.133	664.440
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	76,74	78,31	78,62	80,35	81,21
3	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	23,26	21,69	21,38	19,65	18,79
	Rusak ringan (%)	14,86	13,67	13,50	12,62	12,04
	Rusak sedang (%)	3,32	2,99	3,10	2,66	2,52
	Rusak berat (%)	5,08	5,04	4,78	4,37	4,23

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membangun 10 embung dan merevitalisasi 5 sumber air baku (situ/telaga). Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 1 embung yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 2 embung yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Sebaran embung di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut:

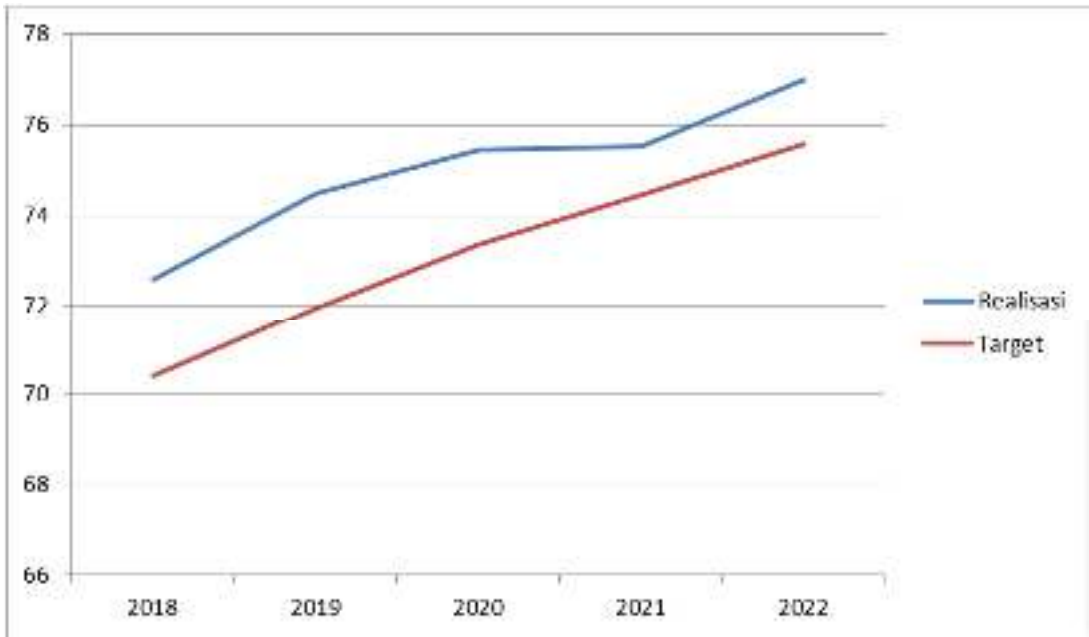


Sumber: DPU dan Dinptan KP Kabupaten Banyumas, 2022 diolah

Gambar 2.41
Peta Sebaran Embung di Kabupaten Banyumas

Air Minum

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyediaan air minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota. Penyediaan air dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat dan disediakan mandiri oleh masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 76,99% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyumas.



Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.42
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan
Perdesaan Kabupaten Banyumas 2018-2022

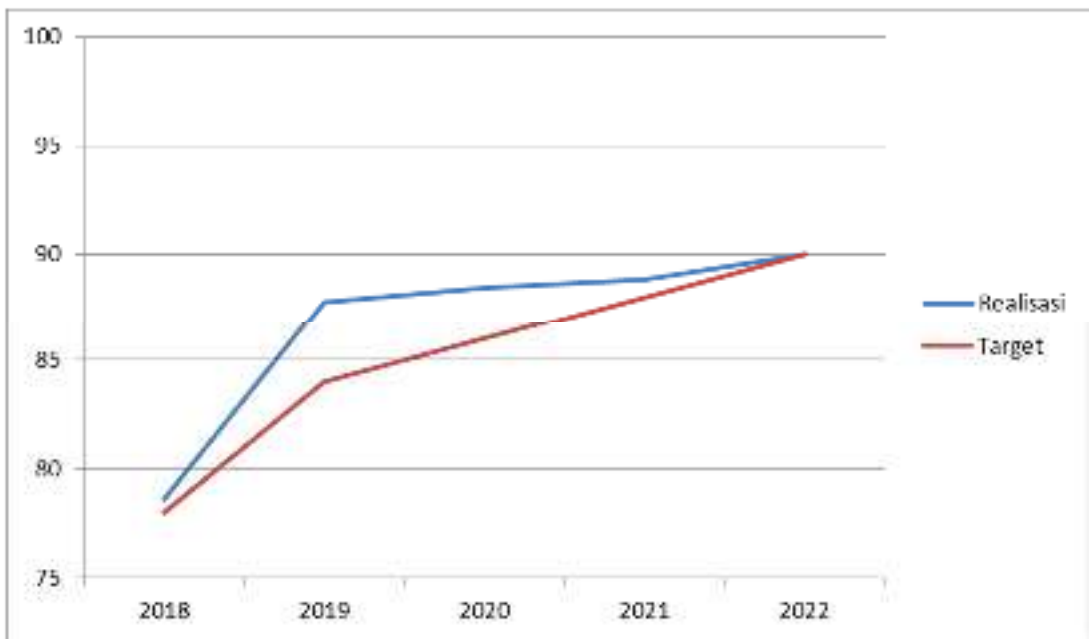
Air Limbah

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2022 rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Banyumas baru mencapai 90%. Capaian tersebut hanya berdasarkan akses jamban yang merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan air limbah. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan terutama pada pengelolaan lumpur tinja. Kabupaten Banyumas hanya memiliki 1 instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang memerlukan revitalisasi. Pemerintah Kabupaten

Banyumas tengah menata kembali pengelolaan air limbah, mulai dari kelembagaan hingga infrastruktur pendukungnya.

Indikator lainnya yang sangat penting terkait dengan air limbah adalah Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam masyarakat tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini. Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada jamban (sehat) harus mencapai 100% pada seluruh masyarakat. Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sudah ODF 100% yang artinya semua masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan. Meskipun sudah 100% masih diperlukan usaha untuk mempertahankan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.

Perkembangan capaian rumah tangga berakses sanitasi adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.43
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Banyumas

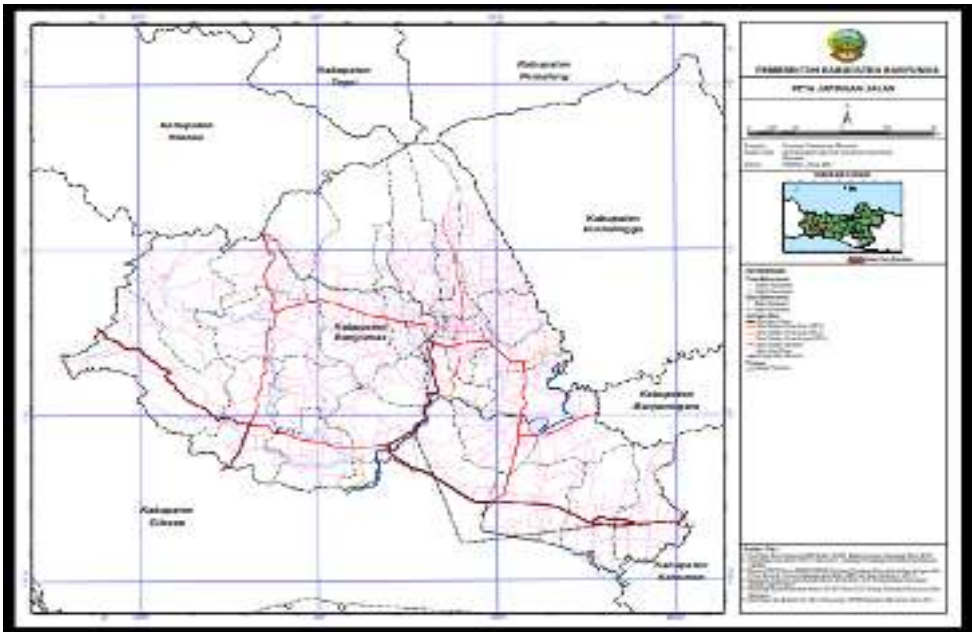
Jalan

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas Sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten menambah panjang jalan kabupaten yang semula sepanjang 804,784 Km menjadi 1.508 Km. Penambahan tersebut berasal dari ruas jalan desa yang menghubungkan antar desa yang kemudian diserahkan kewenangannya menjadi jalan kabupaten. Namun demikian jalan tersebut memiliki jenis permukaan yang berbeda-beda. Berikut jalan kabupaten berdasarkan permukaannya dan gambar jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.38
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan (Km)

Total Panjang Jalan	Aspal/ Penetrasi/ Macadam	Hotmix	Perkerasan Beton	Telford/ kerikil	Tanah /Belum Tembus
1.508,00	1.441,358	0	42,862	20,110	3,670

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2022



Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.44
Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banyumas

Di Kabupaten Banyumas terdapat 708 ruas jembatan dengan total panjang 7.279,26 m. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39

Kondisi Jembatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Konstruksi	Kondisi (Ruas)				
		Bangunan Atas	Bangunan Bawah	Pondasi	Lantai	Kondisi Secara Umum
1	Baik	9	10	12	12	6
2	Rusak Ringan	288	502	573	442	154
3	Rusak Sedang	387	159	88	218	460
4	Rusak Berat	20	26	28	31	67
5	Kritis	3	10	6	4	20
6	Runtuh	1	1	1	1	1
	Jumlah	708	708	708	708	708

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan Tahun 2022 terus berupaya meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Banyumas. Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Tabel 2.40

Kondisi Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2022

No	Uraian	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten (km)	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
2	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35,47	37,87	47,52	51,11	57,60
3	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	20,95	23,53	25,83	28,66	23,65
4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	44,09	41,00	36,30	20,23	18,75

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Jasa Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Dalam kurun waktu 2018-2022 telah memberikan pelatihan

sertifikasi kompetensi kepada 896 tenaga terampil konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.41
Sertifikasi/Pelatihan Tenaga Konstruksi Tahun 2018-2022

No	Jenis Sertifikasi	Kode Unit Kompetensi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tukang Pasang Batu (Tukang Bangunan Umum)	TA 005	181	480			
2	Pelaksana Jembatan	TS044		19		15	
3	Pelaksana Jalan	TS045		42		15	46
4	Pelaksana Saluran Irigasi	TS031			25		
5	Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung	TS051			24		
6	Supervisor K3	TL010			33		46
7	Bimbingan Teknis Administrasi Teknis Penyedia Jasa					20	
	Jumlah		181	541	82	50	92

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Bangunan Gedung

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki bangunan gedung pemerintahan berupa gedung kelurahan sebanyak 30 unit, bangunan kecamatan sebanyak 27 unit, dan bangunan perangkat daerah sebanyak 27 unit, dengan rincian kondisi bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Data Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Bangunan Gedung Pemerintah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah
1	Kelurahan	9	16	4	1	30
2	Kecamatan	24	2	1	0	27
3	Badan/Dinas	19	5	5	0	29
	Jumlah	52	23	10	1	86
	%	60.47	26.74	11.63	1.16	

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Penataan Ruang

Perangkat penting lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Banyumas tengah merevisi RTRW Kabupaten Banyumas. Rencana Rinci Tata Ruang yang telah ditetapkan adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan perijinan investasi perlu percepatan agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas, juga untuk mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Penyelenggaraan sub urusan penataan ruang pada tahun 2023 difokuskan untuk penyelesaian Revisi RTRW dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang untuk beberapa Pusat Kegiatan Lokal.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diukur dengan 13 indikator program sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	DINAS PEKERJAAN UMUM					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		82.1	81.10	80.35	Belum mencapai target 2022 (80.10) dan belum mencapai target akhir RPJMD (82.1)
2.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/kota		54	53	52.31	Belum mencapai target 2022 (53) dan belum mencapai target akhir RPJMD (54)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
3.	Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	%	72.94	71.62	74.77	Melampaui target 2022 (71.62) dan melampaui target akhir RPJMD (72.94)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
4.	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola	%	75.7	72.7	62	Belum mencapai target 2022 (72.7) dan belum mencapai target akhir RPJMD (75.7)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
5.	Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan	%	80	65	2769.25	Melampaui target 2022 (65) dan melampaui target akhir RPJMD (80)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
6.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota		60	50	81.25	Melampaui target 2022 (50) dan melampaui target akhir RPJMD (60)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
7.	Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina	%	35.11	30.27	36.56	Melampaui target 2022 (30.27) dan melampaui target akhir RPJMD (35.11)
DINPERKIM						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
8.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	%	77.08	75.58	76.99	Melampaui target 2022 (75.58%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (77.08%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
9.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	92	90	90	Sesuai target 2022 (90%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (92%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
10.	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	%	11.63	11.58	11.66	Melampaui target 2022 (11.58%) dan melampaui target akhir RPJMD (11.63%)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						
11.	Rasio Permukiman Layak Huni	%	80.10	79.99	79.97	Belum mencapai target 2022 (79,99%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (80,10%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
12.	persentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
DLH						
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
13.	persentase peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	%	5	5	18.75	Sudah mencapai target 2022 (5%) dan mencapai target akhir RPJMD (5%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari 13 target indikator, 7 target indikator sudah mencapai target 2022 dan target akhir RPJMD, 2 indikator sudah mencapai target 2022 tetapi belum mencapai target akhir RPJMD, dan 4 indikator belum mencapai target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang belum mencapai target antara lain Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/kota. Walaupun belum dapat mencapai target 2021 namun deviasi capaian kinerjanya relatif rendah dibandingkan targetnya, hal ini lebih dikarenakan capaian di tahun 2020 yaitu “Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor” yang capaiannya relatif rendah. Target 2020 = 51%, sedangkan realisasinya hanya 50,35% sehingga deviasinya 0,65%. Dari

target yang dipatok naik 1% per tahun makan capaian 2020 hanya mencapai 35%, sedangkan capaian 2021 mencapai 90%. Indikator berikutnya yang belum mencapai target 2021 dan RPJMD adalah Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola. Walaupun di suport dengan anggaran yang sangat besar yaitu Rp.114.280.814.130 namun yang ditangani (Terutama PEN) adalah objek yang diluar database bangunan gedung yang selama ini digunakan untuk perhitungan kinerja. Indikator yang belum mencapai target berikutnya adalah persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina. Penyebabnya adalah alokasi anggaran tahun 2021 yang hanya 64,97% dari kebutuhan Renstra. Indikator selanjutnya yang belum mencapai target adalah rasio permukiman layak huni. Hal tersebut dikarenakan *backlog* perumahan layak sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai target.

2.4.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai RPJMN 2020-2024 pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

Backlog kebutuhan perumahan di Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah sebesar 153.904 unit. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan hunian dilakukan dengan penyediaan rumah susun. Rumah susun di Kabupaten Banyumas terdapat di 8 (delapan) lokasi pondok pesantren dan 1 (satu) Universitas dengan total hunian sebanyak 205 unit. Rumah susun tersebut peruntukannya untuk santri di pondok pesantren dan mahasiswa di universitas, adapun rumah susun untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas tersedia.

Tabel 2.44
Rumah Susun di Kabupaten Banyumas

No	Lokasi Hunian	Jumlah Unit Hunian
1.	Yayasan Al Anwar Al Hisyamiyah	6 unit
2.	PP. Roudlotul Tholibin Banyumas	3 unit
3.	PP. Alhidayah Banyumas	6 unit

No	Lokasi Hunian	Jumlah Unit Hunian
4.	PP. Roudlotul Ilmi Banyumas	6 unit
5.	PP. Al Azhary Banyumas	3 unit
6.	Ponpes Darussalam	37 unit
7.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	9 unit
8.	Universitas Jenderal Soedirman	98 unit
9.	Ponpes At taujiah Al Islamy 2	37 unit

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Selanjutnya berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2021 yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 sebanyak 92,28% rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah memiliki rumah. Meskipun tingkat kepemilikan rumah tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi. Hingga Tahun 2022 di Kabupaten Banyumas masih terdapat 94.038 unit rumah tidak layak huni yang belum ditangani atau dengan rasio rumah layak huni di Kabupaten Banyumas baru mencapai 79,39%.

Banyaknya rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator permukiman kumuh. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha, mencakup kawasan dan lokasi kumuh di Perkotaan Purwokerto.

Tabel 2.45
Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan
Kabupaten Banyumas

No	Lokasi	Luas Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Kawasan Unsoed		23,24
	• Grendeng	13,48	
	• Karangwangkal	5,02	
	• Arcawinangun	4,47	

No	Lokasi	Luas Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
2.	Kawasan Perdagangan dan Jasa		16,13
	• Purwokerto Lor	3,3	
	• Purwokerto Kidul	4,99	
	• Purwokerto Kulon	4,35	
	• Purwokerto Wetan	3,49	
3.	Kawasan Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji)		15,9
	• Kedungwuluh	5,06	
	• Kranji	7,52	
	• Bantarsoka	3,32	
4.	Kawasan Purbomampir		14,73
	• Purwanegara	5,52	
	• Bobosan	2,96	
	• Sumampir	6,25	
5.	Kawasan Takarpucung		12,94
	• Tanjung	3,95	
	• Karangklesem	5,12	
	• Karangpucung	3,87	
	Kelurahan		
6.	Sokanegara	3,02	3,02
7.	Pasirmuncang	3,26	3,26
8.	Bancarkembar	0,76	0,76
9.	Berkoh	1,47	1,47
10.	Karanglewas Lor	2,5	2,5
11.	Kober	2,22	2,22
12.	Mersi	5,87	5,87
13.	Pabuaran	2,88	2,88
14.	Pasir Kidul	0,81	0,81
15.	Rejasari	4,07	4,07
16.	Teluk	5,9	5,9
	Total luas kawasan kumuh (Ha)		115,7

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020

Penanganan kawasan kumuh Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2022 telah mengurangi 27,13 Ha kawasan kumuh.

Tabel 2.46
Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh s/d Tahun 2022 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2021 (Ha)
1	Purwokerto Barat	Bantarsoka	3,324	0,474	2,851
2	Purwokerto Barat	Karanglewas Lor	2,500	-	2,500
3	Purwokerto Barat	Kedungwuluh	5,064	0,940	4,124
4	Purwokerto Barat	Kober	2,220	-	2,220
5	Purwokerto Barat	Pasir Kidul	0,810	-	0,810
6	Purwokerto Barat	Pasirmuncang	3,260	-	3,260
7	Purwokerto Barat	Rejasari	4,070	-	4,070
8	Purwokerto Selatan	Berkoh	1,470	-	1,470
9	Purwokerto Selatan	Karangklesem	5,124	5,124	-
10	Purwokerto Selatan	Karangpucung	3,868	-	3,868
11	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kidul	4,981	0,572	4,409
12	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kulon	4,345	0,789	3,555
13	Purwokerto Selatan	Tanjung	3,949	1,299	2,650
14	Purwokerto Selatan	Teluk	5,899	-	5,899
15	Purwokerto Timur	Arcawinangun	4,735	-	4,735
16	Purwokerto Timur	Kranji	7,520	7,520	-
17	Purwokerto Timur	Mersi	5,870	-	5,870
18	Purwokerto Timur	Purwokerto Lor	3,300	-	3,300
19	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	3,490	-	3,490
20	Purwokerto Timur	Sokanegara	3,021	-	3,021
21	Purwokerto Utara	Bancarkembar	0,755	-	0,755
22	Purwokerto Utara	Bobosan	2,950	-	2,950
23	Purwokerto Utara	Grendeng	13,470	1,607	11,863
24	Purwokerto Utara	Karangwangkal	5,020	-	5,020
25	Purwokerto Utara	Pabuaran	2,886	1,995	0,891
26	Purwokerto Utara	Purwanegara	5,516	2,421	3,095
27	Purwokerto Utara	Sumampir	6,256	4,393	1,863
TOTAL			115,67	27,13	88,54

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Untuk meningkatkan rasio rumah layak huni penanganan RTLH di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan kolaborasi kegiatan dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait. Sampai dengan 2021 capaian penanganan RTLH adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.47
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Sampai Dengan Tahun 2022

No	Penanganan RTLH, Sumber Dana		Jumlah ditangani (Unit)		Jumlah Total (Unit)
A	DATA RTLH KABUPATEN BANYUMAS SESUAI BDT 2015				116,977
B	PENANGANAN TAHUN 2016				
	1	BSPS	1,026		
	2	APBD Provinsi Jawa Tengah	240		
	3	APBD Kabupaten Banyumas	3,129		
	Jumlah yang ditangani 2016			4,395	
C	PENANGANAN TAHUN 2017				
	1	BSPS	302		
	2	APBD Provinsi Jawa Tengah	718		
	3	APBD Kabupaten Banyumas	681		
	4	BAZNAS	301		
	5	CSR	104		
	6	APBDes	1,472		
	Jumlah yang ditangani 2017			3,578	
D	PENANGANAN TAHUN 2018				
	1	BSPS	566		
	2	DAK	185		
	3	APBD Provinsi Jawa Tengah	903		
	4	APBD Kabupaten Banyumas	712		
	5	BAZNAS	82		
	6	CSR	0		
	7	APBDes	351		
	Jumlah yang ditangani 2018			2,799	
E	PENANGANAN TAHUN 2019				
	1	BSPS	725		
	2	DAK	178		
	3	APBD Provinsi Jawa Tengah	903		
	4	APBD Kabupaten Banyumas	697		
	5	BAZNAS			
	6	CSR			
	7	APBDes			
	Jumlah yang ditangani 2019			2,503	
F	PENANGANAN TAHUN 2020				
	Jumlah yang ditangani 2020			12,869	
G	PENANGANAN TAHUN 2021				
	1	BSPS	420		
	2	DAK	139		
	3	APBD Provinsi Jawa Tengah	487		
	4	APBD Kabupaten Banyumas	347		
	5	BAZNAS	-		
	6	CSR	2		
	7	APBDes	243		
	8	LAZIZNU	8		

No	Penanganan RTLH, Sumber Dana		Jumlah ditangani (Unit)		Jumlah Total (Unit)
	9	RTSTLH BTT Kab. Banyumas	799		
	Jumlah yang ditangani 2021			2,445	
JUMLAH YANG DITANGANI SAMPAI DENGAN 2021					28,589
SISA YANG BELUM TERTANGANI					88,388

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Untuk mengurangi angka *Backlog* kebutuhan perumahan di Kabupaten Banyumas, peran serta pengembang/ *developer* perumahan juga memegang peran penting. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 303 perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan baik yang berasal dari swasta maupun BUMN. Salah satu kewajiban pengembang perumahan setelah selesai melaksanakan pembangunan perumahan adalah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan ke Pemerintah Daerah. Dari 303 perumahan yang telah dibangun oleh pengembang, belum seluruhnya menyerahkan PSU perumahan kepada Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.48
Perkembangan Penyerahan PSU Perumahan ke Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas

No	Status Penyerahan PSU ke Pemda	Jumlah
1	Belum Proses Penyerahan PSU ke Pemda	62
2	Dalam Proses Penyerahan PSU ke Pemda	137
3	PSU Telah Diserahkan ke Pemda	104
	Total	303

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui program kawasan permukiman, program pengembangan perumahan, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan 3 indikator program.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan		Tahun 2022	Interpretasi

			Target Akhir RPJMD	Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
1.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	%	9.75	8.53	5.75	Belum mencapai target 2022 (8.53%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (9.75%)
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	77.58	77.33	79.39	Melampaui target 2022 (77.33%) dan melampaui target akhir RPJMD (77.58%)
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
3.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	96.30	92.59	100	Melampaui target 2022 (92.59%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (96.30%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari 3 target indikator, sebanyak 2 indikator melampaui target 2022 dan target akhir RPJMD. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani belum bisa mencapai target karena realisasi yang membutuhkan dukungan diluar aspek pemerintahan. Kurangnya partisipasi pihak diluar pemerintah menyebabkan sulitnya pemenuhan target.

2.4.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan serta perlindungan masyarakat yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat antara lain ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), jumlah perda yang ditegakkan, jumlah operasi keamanan yang dilaksanakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.50
Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Linmas	10.447	10.469	10.469	10.345	10.473
	Laki-laki (orang)	10.296	10.320	10.320	10.196	10.304
	Perempuan (orang)	151	149	149	149	169
2	Jumlah Perda yang ditegakkan	29	29	29	30	30
3	Jumlah Jenis Operasi Keamanan yang dilaksanakan	4	4	4	4	4
4	Jumlah Jenis Operasi Ketertiban yang dilaksanakan	3	3	3	3	3
	a. Operasi Penyakit Masyarakat dan PGOT. PSK (kasus)	70	140	19	72	608
	b. Operasi PKL	260	369	75	12	13

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	c. Pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol	30	9	-	--	1
	d. Penanganan unjuk rasa/aksi damai	11	8	10	10	24

Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2022

Upaya menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tenteram, tertib dan teratur, mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta masyarakat berperan untuk menciptakan, memelihara, serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan.

Penanggulangan bencana

Selama kurun waktu 2017-2021 indeks risiko bencana Kabupaten Banyumas mengalami penurunan yaitu pada angka 164,25. Nilai indeks risiko dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar
Tahun 2017-2021

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko
1	Banyumas	207,20	207,20	207,20	193,71	164.25	Tinggi
2	Purbalingga	159,20	159,20	159,20	159,20	148.12	Tinggi
3	Banjarnegara	150,00	150,00	150,00	127,36	127.36	Sedang
4	Kebumen	151,08	140,31	131,45	114,67	114.67	Sedang
5	Cilacap	157,92	138,61	124,40	112,75	112.75	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021 BNPB, 2021

Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menunjukan risiko bencana pada tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 2.52
Resiko Bencana Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kerentanan						
		Banjir	Cuaca ekstrem	kekeringan	Tanah Longsor	Gempa bumi	Kebakaran Hutan	Letusan Gunung Slamet
1	Lumbir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	
2	Wangon	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	
3	Jatilawang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	
4	Rawalo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	-	
5	Kebasen	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-	
6	Kemranjen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	-	
7	Sumpiuh	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	
8	Tambak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	-	
9	Somagede	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	-	
10	Kalibagor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	-	
11	Banyumas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	-	
12	Patikraja	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-	
13	Purwojati	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	-	
14	Ajibarang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	
15	Gumelar	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	

16	Pekuncen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	
17	Cilongok	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
18	Karanglewas	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
19	Kedungbanteng	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	
20	Baturraden	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
21	Sumbang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
22	Kembaran	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	-	
23	Sokaraja	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	-	
24	Purwokerto Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	-	
25	Purwokerto Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	-	
26	Purwokerto Timur	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	-	
27	Purwokerto Utara	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	-	Rendah

Sumber : BPBD Kabupaten Banyumas, 2022

Pengukuran indeks risiko bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Indeks risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen indeks risiko bencana. Tren risiko bencana diukur utamanya berdasarkan perubahan pada komponen kapasitas, sedangkan komponen bahaya dan kerentanan mengacu kepada baseline (IRBI 2013).

Pengukuran kapasitas daerah mencakup 71 indikator yang dikelompokkan dalam 7 fokus prioritas yaitu: 1) Perkuatan Kebijakan dan

Kelembagaan; 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Berdasarkan pengukuran Tahun 2020, IKD Kabupaten Banyumas adalah 0,64 (level sedang).

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program Desatana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian Desa/Kelurahan Tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas telah terbentuk 16 desa tangguh bencana.

Sebagai dukungan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas telah memiliki tenaga terlatih dan peralatan dasar penanggulangan bencana sebagai berikut:

Tabel 2.53
Peralatan dan SDM Pendukung Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Jenis Pendukung Penanggulangan Bencana	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga yang terlatih	27 kecamatan	
2	Peralatan dasar penanggulangan Bencana	1 paket	
	• Peralatan dapur umum	1 paket	
	• Peralatan dasar penanggulangan bencana banjir (peralatan air)	1 paket	
	• Peralatan dasar penanggulangan bencana gerakan tanah (peralatan tanah)	1 paket	
	• Tenda	58 set	5 rusak

Sumber : BPBD Kabupaten Banyumas, 2022

Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran

Penangan kebakaran dilaksanakan oleh Unit Pemadam Kebakaran yang merupakan unsur pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Unit Pemadam Kebakaran memiliki tugas untuk pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penanggulangan kebakaran.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran. Unit Pemadam Kebakaran memiliki beberapa pos pelayanan di beberapa kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Pos Pemadam Kebakaran tersebut berada di Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Wangon.

Kinerja pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 telah tercapai 100%, namun tingkat waktu tanggap (*respons time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) belum optimal. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas dan baru terdapat 4 wilayah pos pemadam kebakaran.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bencana Kebakaran (%)	100	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (<i>respons time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	39,83	53,11	53	53	55

Sumber : Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 3 pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat: a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Untuk indikator Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%) di Kabupaten Banyumas dalam waktu 55 menit dimana sesuai dengan mutu pelayanan dasar dalam Permendagri tersebut tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Kendala yang dihadapi adalah lokasi di perkampungan, keterjangkauan tempat bencana kebakaran sangat jauh dan masih terbatasnya pos pemadam kebakaran di wilayah kecamatan.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Pemerintah
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	BPBD					
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
1.	Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
2.	Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	100	99,96	Belum mencapai target 2022 (100%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
3.	Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	SATPOL PP					
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
4.	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
5.	Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
6.	Tingkat waktu tanggap (<i>respons time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)		80	80	55	Belum mencapai target 2022 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (80%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas sampai dengan tahun 2022, capaian kinerja bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dari 6 target indikator, sebanyak 5 target

indikator sudah melampaui target 2022 dan target akhir RPJMD. Terdapat 1 target indikator yang belum melampaui target 2022 dan target akhir RPJMD yaitu indikator pada program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan capaian 55%. Perlu peningkatan SDM dan sarana prasarana kebakaran sehingga bisa tercapai 100% dengan tingkat waktu tanggap 15 menit.

2.4.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS) untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, advokasi, dan sinergi untuk mendukung penanganan permasalahan sosial.

Tabel 2.56
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas
Tahun 2022

No	Jenis PSKS	Jenis Kelamin		Tanpa Input Gender	Total
		L	P		
1	Pekerja Sosial Profesional	9	8	0	17
2	Pekerja Sosial Masyarakat	1.189	529	17	1.735
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	62	4	3	69
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	0	33	37
5	Karang Taruna	73	12	353	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga	6	2	0	8
7	Keluarga Pioner	32	1	21	54
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	6	2	0	8
9	Wanita Pemimpin kesejahteraan Sosial	1	53	0	54
10	Penyuluh Sosial	14	1	0	15
11	Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan	14	7	4	25
12	Dunia Usaha	5	1	115	121
13	Pendamping PKH	22	93	14	129
14	<i>Family Care Unit</i>	2	0	0	2
Total					2.713

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2022

Dalam penanganan masalah sosial diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai sumber kesejahteraan sosial masyarakat untuk mengatasi problematika sosial yang ada.

Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas. Rumah Singgah yang ada saat ini tidak bisa menampung secara maksimal dikarenakan sarana prasarana dan kapasitas rumah singgah yang ada terbatas. Perkembangan PPKS di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.57
Perkembangan Jumlah PPKS di Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

No	Jumlah PPKS	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	Orang	90	72	17	90	90
2	Anak terlantar	Orang	559	504	94	559	93
3	Anak nakal yang berhadapan dengan hukum (AMH)	Orang	69	18	6	30	15
4	Anak jalanan	Orang	61	65	7	69	9
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	Orang	938	891	778	938	436
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Orang	2819	2333	716	2819	675
7	Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	Orang	5	4	NA	7	2
8	Lanjut Usia terlantar	Orang	2643	2667	1033	2643	853
9	Penyandang Cacat	Orang	5670	5639	2702	5670	6625
10	Tuna Susila	Orang	72	74	9	72	5
11	Pengemis	Orang	131	111	22	131	44
12	Gelandangan	Orang	156	90	15	156	32
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	24	22	15	24	9
14	Korban Bencana Alam	Orang	103	97	9	80	3.709
15	Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	0	0	0
16	Pemulung	Orang	287	249	136	287	141
17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	0	0	0	0	1
18	Korban Trafficking	Orang	5	4	6	5	2
19	Fakir Miskin	Orang	240.023	157.873	877.142	1.117.404	1.117.404*
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Orang	44	37	6	44	9
21	Korban Bencana Sosial	Orang	38	36	20	92	0
22	Kelompok Minoritas/Waria	Orang	-	-	0	0	0

No	Jumlah PPKS	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
23	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	Orang	329	303	97	329	94
24	Korban Tindak Kekerasan	Orang	5	4	1	5	2
25	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	19	7	3	19	1
26	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	46	48	5	46	32
	Jumlah	Orang	254.098	171.112	882.882	1.131.519	1.130.283

Sumber : Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2022

*= angka sementara

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 relatif sama, jenis PPKS yang meningkat adalah korban bencana alam sejumlah 3.709 orang, hal ini terjadi karena bencana alam yang tidak dapat diprediksi.

Peran masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial ditunjukkan dengan bertambahnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, yang hingga Tahun 2022 meningkat menjadi 39 panti.

Tabel 2.58
Prasarana Sosial di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Prasarana	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	23	25	25	39	39
2	Rumah Singgah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2022

Permasalahan sosial lainya di Kabupaten Banyumas adalah banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap menyebabkan mereka belum mandiri, sehingga kerap memilih untuk mengemis atau mengamen di jalan. Pembekalan keterampilan merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi dalam peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang selama ini menyebabkan pengangguran. Selain itu, dengan adanya peran dari pihak swasta, organisasi masyarakat, serta paguyuban penyandang

disabilitas yang diajak sinergi dan kolaborasi, maka dapat mengeliminasi cara pandang yang tidak benar terhadap penyandang disabilitas.

Pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2022 didasarkan pada 5 program dan 5 indikator, semua indikator sudah tercapai. Gambaran kinerja urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	DINSOSPERMASDES					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1.	Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif	%	50	39	58	Melampaui target 2022 (39%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (58%)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
2.	Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
3.	Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
4.	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
5.	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional		1	1	1	Melampaui target 2022 (1) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (1)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Sosial dari 5 target indikator, sebanyak 5 target indikator telah melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru umumnya lebih lambat. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran. Berikut jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Banyumas selama periode 2018-2022, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.60
Penduduk Usia Kerja Menurut Karakteristik Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	871.449	876.517	877.555	865.982	870.702
2	Bekerja	835.296	839.941	824.866	813.592	817.989
3	Pengangguran	36.153	36.576	52.689	52.390	52.713

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. 2022

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan Angkatan Kerja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 hingga 2020, jumlah Angkatan Kerja mengalami peningkatan dengan rata rata peningkatan 3,9%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 1,3%, dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 0,55%. Total Angkatan kerja hasil dari jumlah penduduk dan pengangguran dimana semakin besar pengangguran semakin besar angkatan kerja. Rincian perbandingan antara angkatan kerja dan pengangguran dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.45

Penduduk Usia Kerja Menurut Karakteristik Ketenagakerjaan
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi

barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK Kabupaten Banyumas pada periode 2018 hingga 2022 menunjukkan angka yang cenderung menurun, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.46
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

TPAK Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 67,74%, TPAK Kabupaten Banyumas terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada 2022, TPAK Kabupaten Banyumas menunjukkan angka 64,75% yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 65 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi.

Kewenangan pemerintah kabupaten bidang tenaga kerja meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Balai Latihan Kerja Kabupaten Banyumas melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja antara lain: pelatihan menjahit, las, teknisi handphone, otomotif sepeda motor, prosesing hasil pertanian/pembuatan aneka kue, menjahit garmen, tata rias pengantin, dan tata kecantikan. Lebih lanjut, terkait kewenangan

penempatan tenaga juga belum optimal. Tercatat pada 2022, ada 14.894 pencari kerja yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari lowongan kerja yang ditawarkan pada 2022 sejumlah 10.510 lowongan, hanya terserap 9.215 tenaga kerja saja. Kewenangan pemerintah kabupaten lainnya adalah terkait pemeliharaan hubungan industrial. Hubungan Industrial berperan menjaga hubungan antara tenaga kerja dan penyedia kerja. Hingga 2022, baru 9,2% perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak. Perlu adanya upaya pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan hubungan industrial, apabila sebuah perusahaan belum menerapkan tata kelola yang layak, maka akan rentan terjadi konflik antara tenaga kerja dan penyedia kerja.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022

No	Aspek/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	DINAKERKOP DAN UKM					
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
1.	Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
2.	Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

3.	Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
4.	Persentase produktivitas pada perusahaan kecil	%	6.7	5.65	6.57	Sudah melampaui target 2022 (5,65%) namun belum mencapai target akhir RPJMD (6,7%)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
5.	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	50	40	59.83	Sudah melampaui target 2022 (40%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (50%)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
6.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	9.03	8.18	9.2	Sudah melampaui target 2022 (8,18%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (9,03%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, semua indikator sudah mencapai target tahunan. Untuk capaian kinerja terhadap RPJMD, hingga 2022 capaian target indikator juga sudah mencapai target. Meskipun semua indikator sudah mencapai target, perlu upaya lebih untuk meningkatkan kinerja bidang Tenaga Kerja. Pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan memasuki puncak bonus demografi. Di masa itu, jumlah

penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. Oleh karena itu, kinerja bidang Ketenagakerjaan harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan lapangan kerja khususnya untuk Kabupaten Banyumas. Kerjasama antar daerah dalam hal distribusi pemenuhan tenaga kerja juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas lapangan kerja. Selain meningkatkan lapangan kerja, upaya lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Capaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender.

Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2018-2022 selalu mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 sebesar 89,15 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,83 dan nasional sebesar 91,63 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah dari kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

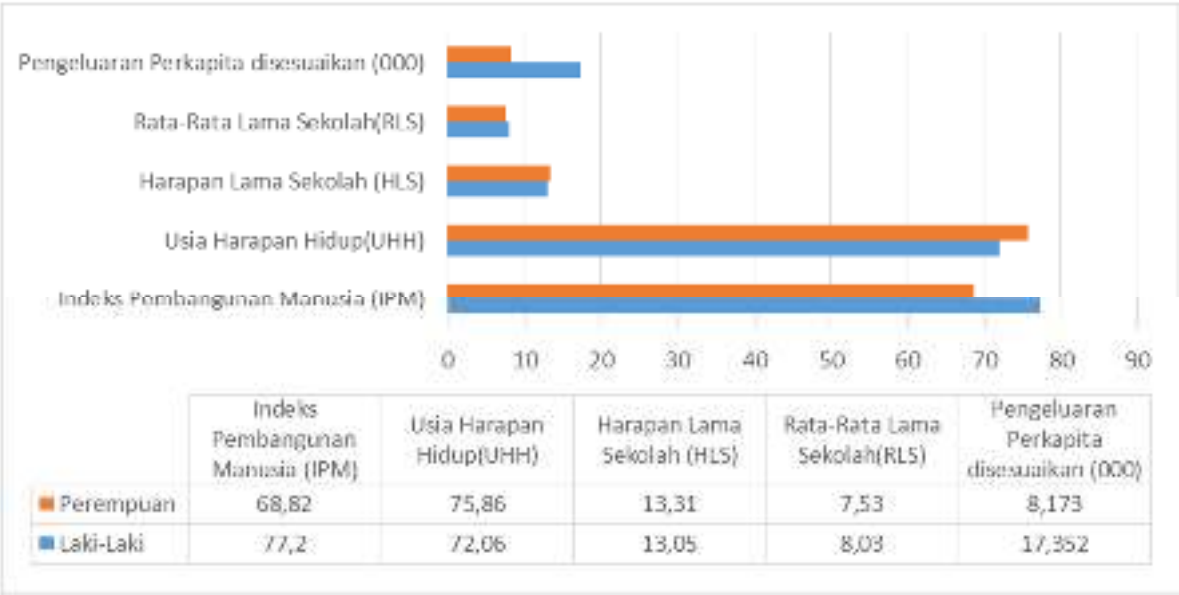
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, kabupaten sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.47
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten Lain dan

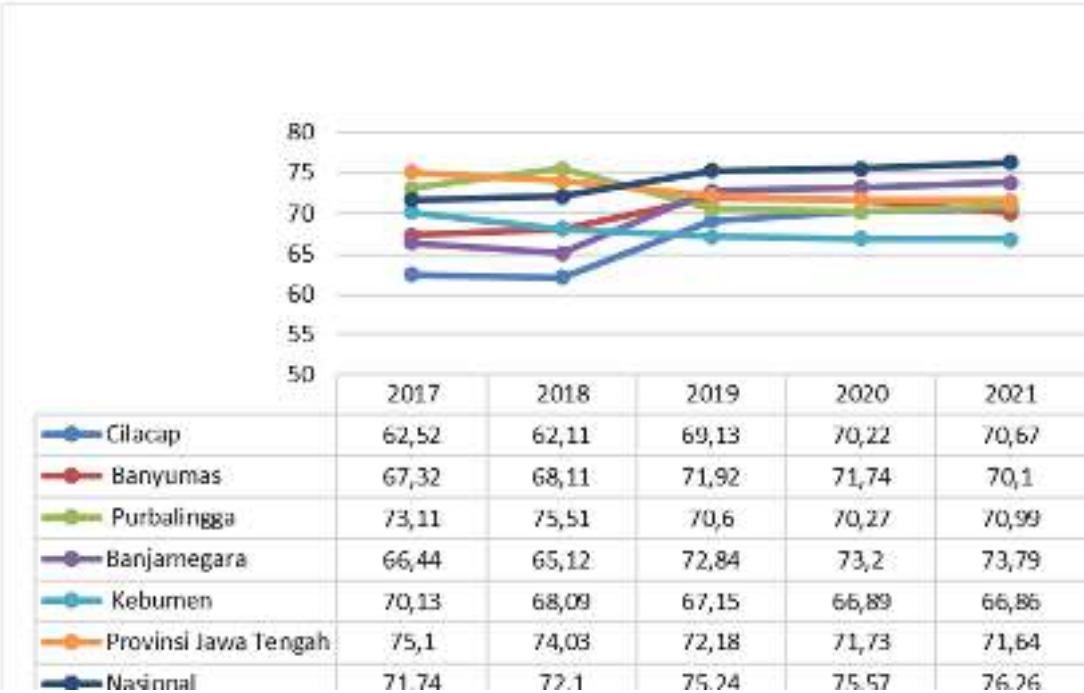
Data IPM pilah gender Tahun 2022 menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan grafik berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.48
Komponen IPM Kabupaten Banyumas Pilah Gender 2017–2022

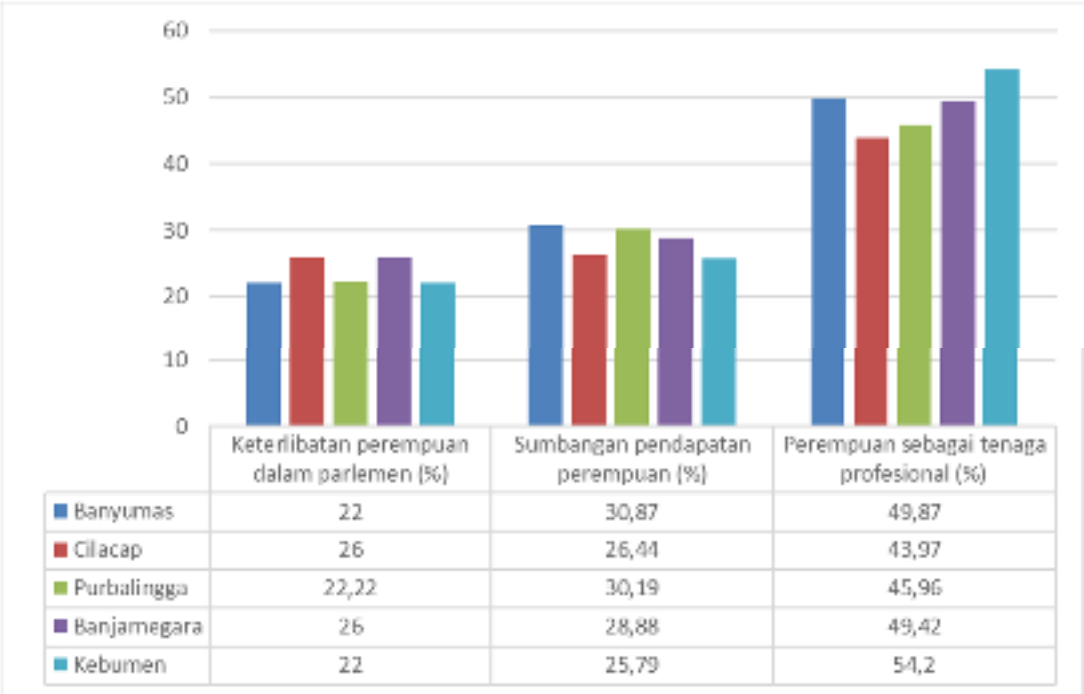
Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.49
Capaian IDG Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar di Barlingmascakeb Tahun 2017–2021

Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mengalami penurunan serta berada di bawah angka Nasional. Berdasarkan komponen IDG, keterlibatan perempuan Kabupaten Banyumas di parlemen relatif rendah, namun sumbangan pendapatan perempuan dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional paling tinggi dibanding Kabupaten sekitar.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.50
Keterlibatan Perempuan di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Tren pembangunan berbasis gender (IPG dan IDG) Kabupaten Banyumas dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan akan tetapi masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. IPG dan IDG merupakan indikator utama untuk mengukur kesetaraan gender. Salah satu langkah pemerintah meningkatkan nilai IPG dan IDG ini adalah dengan menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis responsif gender. Untuk itu diperlukan kualitas data terkait gender. Saat ini dari 29 OPD, baru 10 OPD atau 34,48% yang memanfaatkan Data pilah gender dalam perencanaan pembangunan. 10 OPD tersebut yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dindukcapil, Sekretariat Daerah, Dinsospermasdes, Dinakerkop UKM, DPPKBP3A, BKPSDM, Bappedalitbang, dan Dinkominfo.

Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Banyaknya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 (kasus)

No	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Perempuan					Kekerasan Terhadap Anak				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lumbir	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
2	Wangon	-	1	1	-	3	1	1	3	1	1
3	Jatilawang	-	-	-	-	-	2	2	-	6	2
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1
5	Kebasen	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
6	Kemranjen	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
7	Sumpiuh	-	-	-	1	-	2	7	3	-	2
8	Tambak	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
9	Somagede	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
10	Kalibagor	-	-	1	4	2	5	2	1	2	4
11	Banyumas	3	-	-	2	2	5	3	-	1	3
12	Patikraja	1	1	1	2	1	3	2	2	5	1
13	Purwojati	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
14	Ajibarang	-	-	-	-	-	2	4	1	2	2
15	Gumelar	-	-	-	-	-	4	2	-	1	-
16	Pekuncen	-	-	1	2	3	3	2	3	-	6
17	Cilongok	-	-	1	3	1	3	5	3	7	9
18	Karanglewes	3	2	-	2	3	17	1	1	1	4
19	Kedungbanteng	-	-	1	1	3	4	-	2	1	3
20	Baturaden	1	1	2	-	2	12	6	5	2	6
21	Sumbang	2	3		1	1	10	1	3	4	7
22	Kembaran	2	3	1	3	2	4	2	1	4	3
23	Sokaraja	3	1	3	3	1	5	3	6	5	3
24	Purwokerto Selatan	3	2	-	3	4	7	7	5	10	4
25	Purwokerto Barat	2	-	1	1	2	10	7	5	3	2
26	Purwokerto Timur	1	1	2	5	3	4	2	2	5	4
27	Purwokerto Utara	1	1	3	2	4	5	4	6	6	2
	Jumlah	22	18	17	35	37	112	71	62	72	76

Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2022

*= data sementara

Untuk penanganan korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah dibentuk UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan tugas teknis operasional berupa layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Capaian kinerja program urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan tahun 2022 ditunjukkan sebanyak 6 program dengan 7 indikator, sebagaimana ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.63
 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	DPPKBP3A					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
1.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22	22	22	Mencapai target 2022 (22%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (22%)
2.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
3.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
4.	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0.05	0.01	0.36	Melampaui target 2022 (0.01%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (0.05%)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
5.	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	42,86	35,71	34,48	Belum melampaui target 2022 (35,71%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (42,86%)

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
6.	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
7.	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.007	0.009	0.014	Belum melampaui target 2022 (0.009%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0.007%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 7 target indikator, sebanyak 5 target indikator mencapai target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 2 target indikator belum melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2.3. Pangan

Kabupaten Banyumas telah menyusun regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi: perencanaan pangan, kelembagaan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, keterjangkauan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas mengalami penurunan nilai komposit pada tahun 2022 menjadi sebesar 79,02 (2021 sebesar 79,97) dengan nilai ketersediaan pangan sebesar 80,98, nilai keterjangkauan pangan sebesar 79,48 dan nilai pemanfaatan pangan sebesar 77,20.

Melihat dari aspek ketersediaan pangan, berikut merupakan data produksi tanaman pangan utama untuk ketersediaan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64
Produksi Tanaman Pangan Utama Kabupaten Banyumas

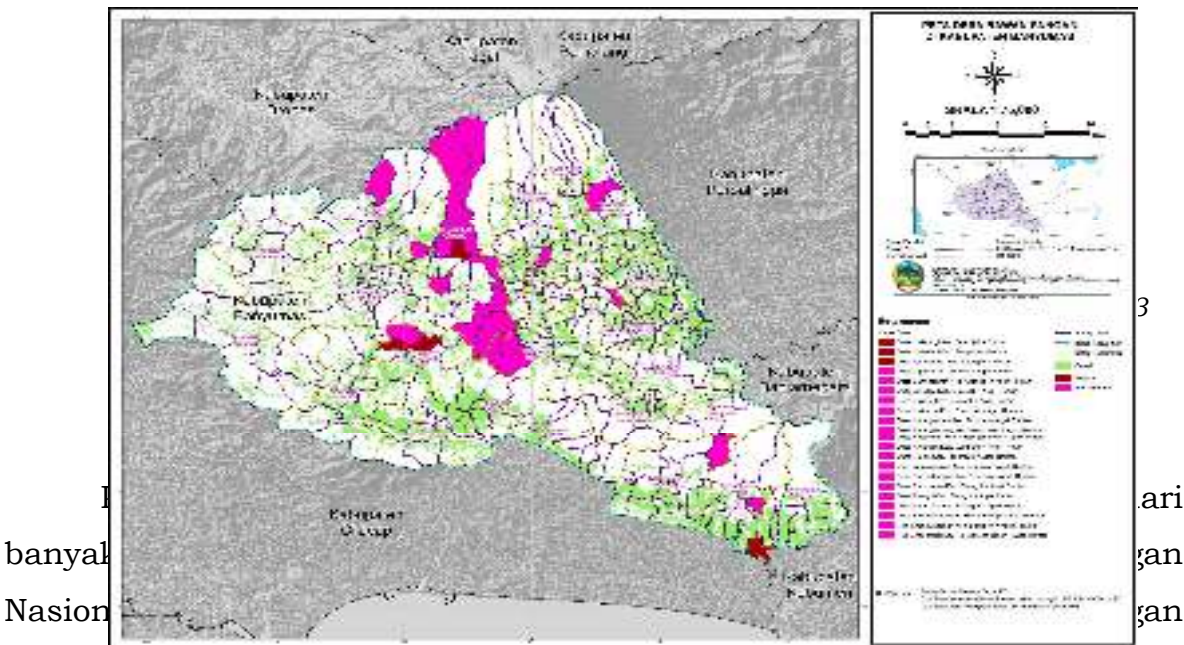
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Tanaman Padi (ton)	409.054	368.957	371.827	376.082	371.693
2	Produksi jagung (ton)	25.397	34.052	31.784	27.741	32.492
3	Produksi kedelai (ton)	3.427	1.124	298	1.783	437

Sumber: *Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2023*

Pada tahun 2022, produksi tanaman padi mencapai 371 ribu ton, atau menurun sebesar -1,2% dibandingkan tahun 2021, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Produksi kedelai juga mengalami penurunan pada 2022 yaitu sebesar 437 ton (-75%) yang disebabkan oleh menurunnya luas tanam komoditas kedelai. Sementara itu untuk produksi jagung mengalami peningkatan menjadi 32 ribu ton. Aspek ketersediaan pangan juga mengalami permasalahan yaitu *Food Loss and Waste* (FLW). *Food Loss* terjadi pada rantai pasok produksi pangan dan *Food Waste* merupakan sampah yang ditimbulkan pada proses distribusi, pelayanan, dan konsumsi pangan. Penyebab dan pendorong utama FLW antara lain: kurangnya implementasi *Good Handling Practices* (GHP), standar kualitas pasar dan preferensi konsumen, kurangnya edukasi pekerja pangan dan konsumen, serta kelebihan porsi dan perilaku konsumen.

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan dengan pengelolaan pangan yang baik dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Pada tahun 2022, terdapat 4 pembangunan sarana prasarana pendukung yaitu di Kecamatan Cilongok, Jatilawang, Kemranjen, dan Kecamatan Tambak. Sarana dan prasarana tersebut berupa lumbung pangan, lantai jemur, RMU dan *bed dryer*. Jika dibandingkan dengan

jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas hanya 18% (5 unit) dari total kecamatan (sangat rendah).

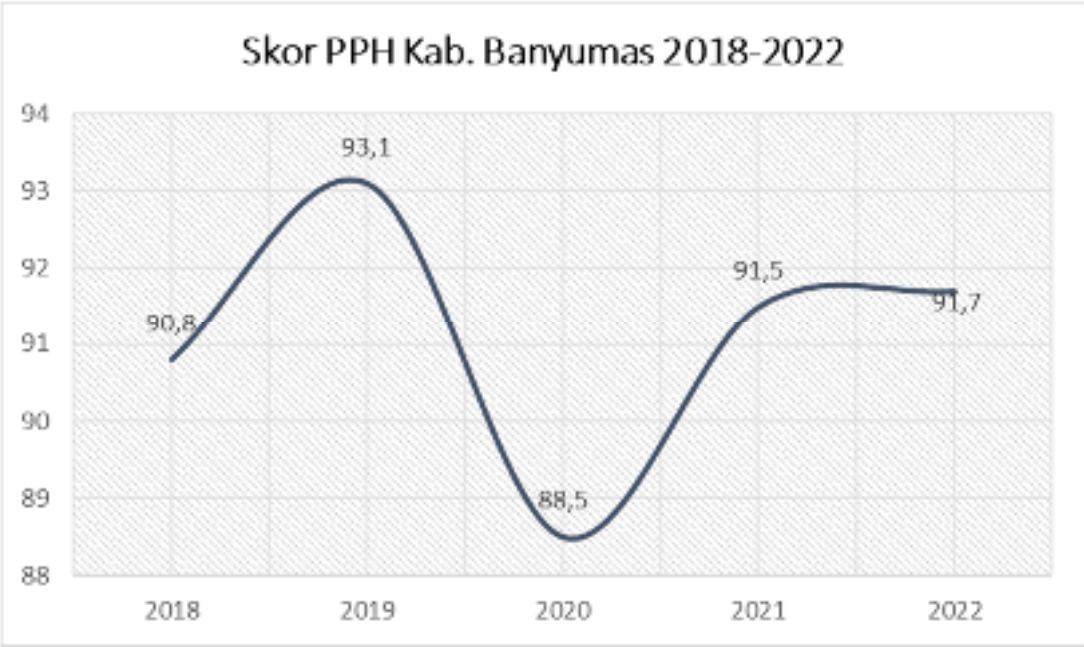


kondisi sangat rawan 0 desa, rentan rawan pangan 3 desa dan agak rentan rawan pangan 18 desa. Kondisi rawan pangan tersebut disebabkan: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Komponen yang mendukung Indek Ketahanan Pangan adalah nilai keterjangkauan pangan sebesar 79,48 dimana faktor yang mempengaruhi dari nilai keterjangkauan pangan adalah dari akses ekonomi, fisik dan sosial di Kabupaten Banyumas.

Sementara itu melihat dari aspek pemanfaatan pangan, skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada

tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor pola pangan harapan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: *Dinpartan KP Kabupaten Banyumas, 2023*

Gambar 2.51
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

Pada Tahun 2022 skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Banyumas sebesar 91,70 atau masih dibawah skor PPH ideal sebesar 100. Rendahnya skor PPH disebabkan oleh belum idealnya tingkat konsumsi umbi-umbian (konsumsi aktual 49 kkal/kap/hari, konsumsi ideal 129 kkal/kap/hari), pangan hewani (konsumsi aktual 235 kkal/kap/hari, konsumsi ideal 258 kkal/kap/hari), kacang-kacangan (konsumsi aktual 73 kkal/kap/hari, konsumsi ideal 108 kkal/kap/hari). Sementara itu untuk konsumsi padi-padian mencapai 1.101 kkal/kap/hari dan sudah melebihi angka idealnya yaitu 1.075 kkal/kap/hari (102% dari konsumsi ideal padi-padian). Upaya peningkatan kualitas dilakukan dengan kegiatan diversifikasi pangan dengan sosialisasi/promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, gerakan diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pangan dan menggerakkan dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan pangan lokal.

Melihat dari aspek keamanan pangan, pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setiap tahunnya. Namun, jika melihat dari jumlah sampel dan lokasi tergolong masih minim, melihat data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada 2022 hanya diambil sampel pangan sebanyak 101 sampel yang dilaksanakan di 10 lokasi. Jumlah dan lokasi pengambilan sampel perlu untuk ditingkatkan untuk menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	DINPERTAN KP					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
1	Tingkat ketersediaan energi	%	96	95	96,1	Realisasi 2022 melampaui target (95%) dan RPJMD (96%)
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
2	Konsumsi protein	gram/kapita/hari	57	54,8	57,57	Realisasi 2022 melampaui target (54,8%) dan melampaui target RPJMD (57%)
3	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	99	100	Realisasi 2022 melampaui target (99%) dan melampaui target RPJMD (100%)
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
4	Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani	%	10	5	108,11	Realisasi 2022 melampaui target (5%) dan melampaui target RPJMD (10%)

	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
5	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	97,43	96,43	94,12	Realisasi 2022 belum melampaui target 2022 (96,43%) dan <i>on track</i> untuk target RPJMD (97,43%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022, dari total 5 indikator, 4 indikator sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target pembangunan 2022 yaitu Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

2.4.2.4. Pertanahan

Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP Tahun 2019) bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 532.651 bidang (49,46%), dan belum terdaftar sebanyak 544.294 bidang (50.54%).

Tabel 2.66

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan kantor pertanahan berdasarkan jenis sertifikat di Kabupaten Banyumas

NO	JENIS SERTIFIKAT	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Hak Milik	316.581	320.923	447.207	510.431
2	Hak Guna Usaha	35	65	3	6
3	Hak Guna Bangunan	10.295	13.792	10.888	11.141
4	Hak Pakai	3.837	4.113	7.061	9.173
5	Hak Pengelolaan	18	1	18	20
6	Hak Wakaf	1.520	1.081	1.995	1.880
	TOTAL	332.286	339.975	467.172	532.651

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki aset berupa tanah sebanyak 2.843 bidang tanah. Pada Tahun 2021 sebanyak 654 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas selesai disertifikasi dari 670 bidang tanah yang diajukan ke BPN. Sementara sisanya sebanyak 16 bidang tanah masih dalam proses. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 58 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang

selesai disertifikasi. Pendaftaran tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan proses legalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan salah satu dari delapan area intervensi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Dengan penambahan pendaftaran tanah tersebut maka total bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah bersertifikat menjadi 1.507 bidang tanah atau 53,01% dari keseluruhan bidang tanah.

Tabel 2.67
 Persentase Luas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersertifikat Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase luas (bidang) tanah milik Pemkab yang bersertifikat	40,44%	50,33%	50,97%	53,01%

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas 2022

Tabel berikut menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan Tahun 2022 dengan indikator kinerja Persentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat) telah memenuhi target tahun 2022 dan sudah memenuhi target akhir RPJMD.

Tabel 2.68
 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
1.	Persentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	%	39.47	39.16	53.01	Melampaui target 2022 (53.01%) dan melampaui target akhir RPJMD (39.47%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Indikator persentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat) pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target tahunan dan sudah memenuhi target akhir RPJMD.

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dengan periode waktu tertentu. yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH telah dikembangkan sejak Tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengukuran IKA Kabupaten Banyumas tahun 2022 dilaksanakan dengan menguji kualitas air di 69 titik pantau sungai di Kabupaten Banyumas, dengan parameter yang diuji sebanyak 8 (delapan) parameter meliputi derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), total fosfat (T-Phosphat), Nitrat dan Fecal Coli. Berdasarkan pengukuran, Nilai IKA Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah 51,74 atau masuk dalam kategori “sedang”. Nilai tersebut menggambarkan kondisi air permukaan di wilayah Kabupaten Banyumas mengalami pencemaran dengan tingkat pencemaran sedang. Konsentrasi bahan pencemar tertinggi yang ditemukan adalah bahan pencemar yang berasal dari aktivitas domestik manusia yang ditandai dengan tingginya nilai parameter *fecal coliform*. Secara nilai, IKA tahun 2022 ini cenderung menurun dibandingkan dengan nilai IKA pada tahun sebelumnya. Namun, penurunan nilai ini terjadi karena perbedaan metode pengukuran IKA yang pada tahun 2022 ini sudah menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021.

Pengukuran IKU Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan metode *manual passive sampler*, dengan parameter yang diukur berupa *Sulfur Dioksida* (SO₂) dan *Nitrogen Dioksida* (NO₂).

Pengukuran dilaksanakan di 4 lokasi sampling yang mewakili masing-masing (1) area transportasi padat lalu lintas, (2) area industri, (3) area pemukiman, dan (4) area perkantoran. Perhitungan IKU dilakukan dengan menggunakan metode yang mengadopsi Program *European Union* (EU), diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Banyumas adalah 86,04 dengan klasifikasi “baik”.

Pada tahun 2022, perhitungan IKTL Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Banyumas adalah 43,44 dengan klasifikasi kurang. Nilai IKTL cenderung turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan metode perhitungan yang meliputi parameter dan skala tertingginya.

Indeks kualitas lingkungan hidup dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKTL) yang dikalikan masing-masing bobot yaitu 0,376 untuk IKA, 0,405 untuk IKU, dan 0,219 untuk IKTL. Hasil perhitungan IKLH Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah 63,31 dengan predikat “Sedang”. Nilai IKLH Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKLH pada tahun sebelumnya dan bahkan tidak memenuhi target capaian. Nilai IKLH yang tidak mencapai target disebabkan oleh nilai IKA yang turun signifikan untuk periode satu. Hal ini disebabkan karena pengambilan sampel periode satu pada musim kemarau, di mana cadangan air masyarakat berkurang, sehingga aktivitas harian masyarakat lebih banyak dilakukan di sungai sehingga konsentrasi pencemar di sungai meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil uji parameter *fecal coli* yang sangat tinggi yang berasal dari limbah domestik manusia.

Tabel berikut menyajikan target dan hasil analisis kualitas lingkungan hidup pada Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 2.69
Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyumas Tahun 2020-2022

No	Indikator	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IKA	54,40	59,33	54,60	68,00	53,85	51,74
2	IKU	83,20	85,07	83,30	85,43	85,20	86,04
3	IKTL	56,50	66,81	56,50	67,00	42,50	43,44
4	IKLH	63,88	70,04	63,88	72,83	64,06	63,81

Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2022

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terkait dengan lingkungan hidup adalah penanganan perubahan iklim. Selaras dengan SDG's, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Perubahan iklim erat kaitannya dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan angin puting beliung. Selain itu, perubahan iklim juga memiliki dampak jangka panjang terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi yang tentu saja akan mengancam keberlangsungan kehidupan.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), telah dilaksanakan Inventarisasi GRK tahun 2022. Inventarisasi ini berupaya mencakup seluruh sektor dan kategori yang penting dan signifikan menghasilkan emisi GRK di wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber data tahun 2021, namun demikian dari 32 kategori berdasarkan aplikasi pada SIGNSMART, hanya terdapat 22 kategori data di Kabupaten Banyumas, sedangkan 8 data dinyatakan tidak tersedia (*Not Applicable*), 1 data tidak diestimasikan (*Not Estimated*) yaitu data konsumsi karbonat untuk industri makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas dan 1 data telah dimasukkan ke dalam kategori lainnya (*Including Elsewhere*) yaitu pada kategori Pembakaran Bahan Bakar di Sektor Lainnya (Pertanian, Perikanan, dll). Hasil perhitungan tingkat emisi di Kabupaten Banyumas tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70

Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	SEKTOR	CO2 Eq (Gg)
1	Pengadaan dan Penggunaan Energi	1.979,75
2	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	1.014,98
3	Pertanian	839,53
4	Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	295,31
5	Pengelolaan Limbah	225,04
	TOTAL	4.354,61

Sumber: DLH Kabupaten Banyumas 2022

Dari hasil inventarisasi GRK di Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa tingkat emisi dan serapan GRK di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 yaitu sebesar 4.354,61 Gg CO2 Eq, dengan tingkat emisi pada sektor energi menempati urutan pertama sebesar 1.979,75 Gg CO2 Eq (45,5%), disusul oleh sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU) sebesar 1.014,98 Gg CO2 Eq (23,3%), kemudian sektor pertanian pada urutan ketiga sebesar 839,53 Gg CO2 Eq (19,3%), dan sektor kehutanan pada urutan keempat sebesar 295,31 Gg CO2 Eq (6,8%). Sektor Pengelolaan limbah menyumbang emisi terkecil sebesar 225,04 Gg CO2 Eq (5,2%). Status total emisi dan serapan GRK di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 (4.354,61) cenderung meningkat jika dibandingkan dengan total emisi dan serapan GRK pada Tahun 2020 (3.728,12 Gg CO2 Eq).

Berdasarkan hasil kalkulasi emisi, maka didapatkan hasil bahwa status emisi dan serapan GRK pada Tahun 2021 cenderung menurun jika dibandingkan dengan status emisi dan serapan pada Tahun 2017 dan 2018 namun demikian cenderung meningkat dibandingkan status emisi dan serapan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Status Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71

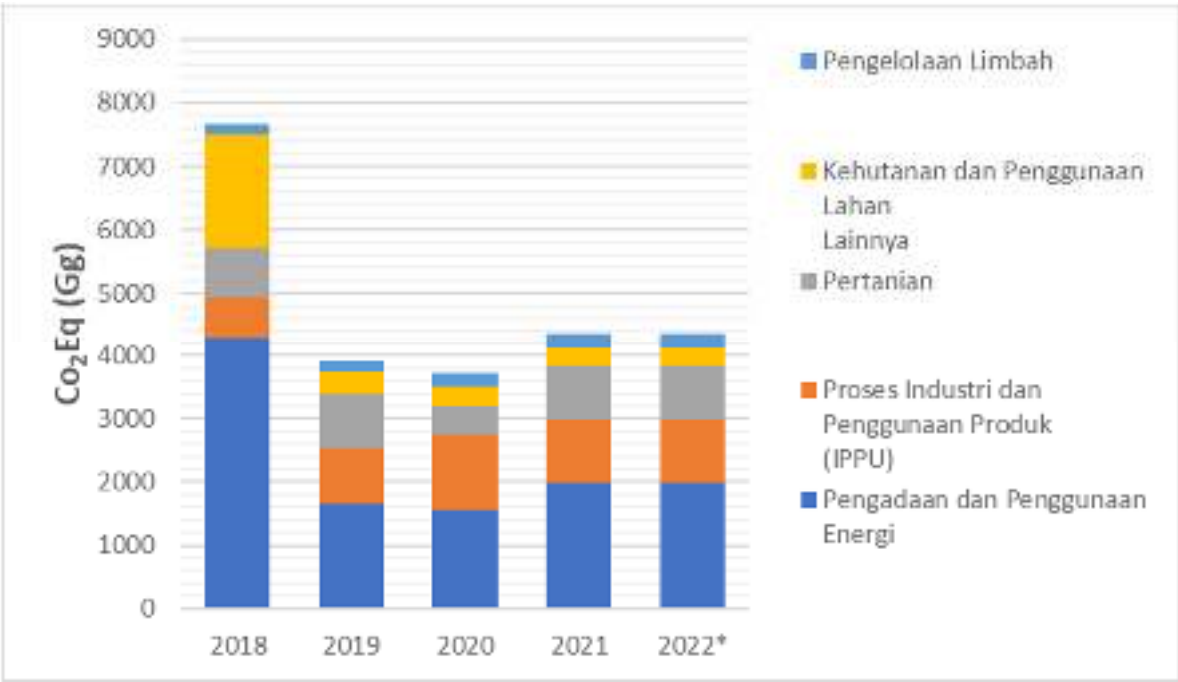
Status Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Pengadaan & Penggunaan Energi	4.297,4	1.663,0	1.556,2	1.979,8	1.979,8

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022*
2	Proses Industri & Penggunaan Produk (IPPU)	642,7	878,2	1.180,3	1.014,9	1.014,9
3	Pertanian	773,0	841,3	460,6	839,5	839,5
4	Kehutanan & Penggunaan Lahan Lainnya	1.794,2	351,7	306,8	295,3	295,3
5	Pengelolaan Limbah	154,4	180,3	224,2	225,0	225,0
	Total	7.661,7	3.914,5	3.728,1	4.354,6	4.354,6

*Angka Sementara
Sumber: DLH Kabupaten Banyumas 2022

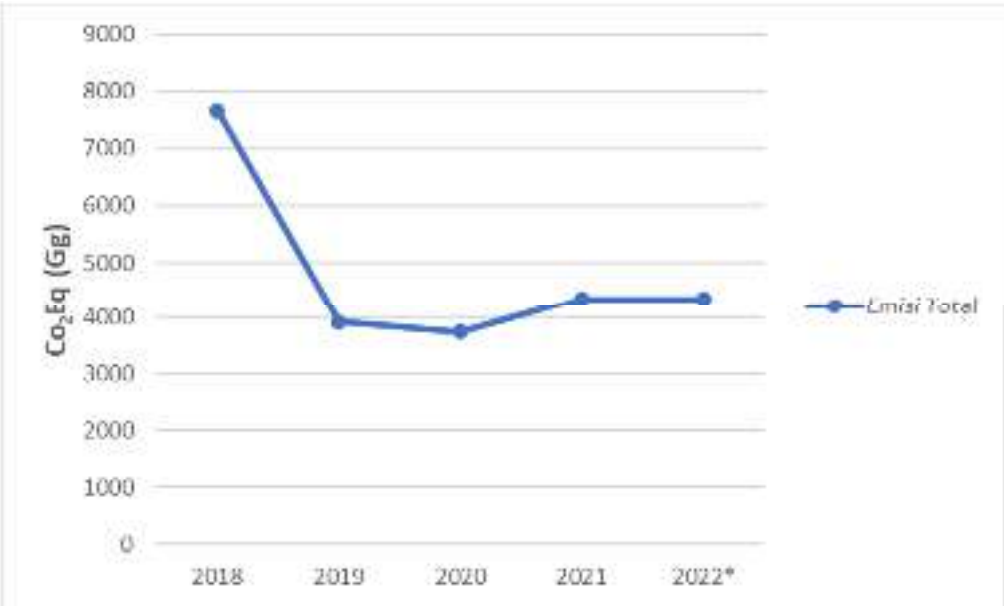
Gambaran status emisi tersebut disajikan pada grafik berikut ini.



*Angka Sementara
Sumber: DLH Kabupaten Banyumas 2022

Gambar 2.52
Status Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Berdasarkan data status emisi GRK di Kabupaten Banyumas, dapat diketahui tren emisi total GRK cenderung menurun sebagaimana disajikan pada Gambar 2.58. Walaupun memiliki tren yang cenderung menurun sejak tahun 2017, emisi total mulai meningkat lagi pada tahun 2021 dan harus dilakukan upaya penurunan emisi GRK agar emisi total di tahun selanjutnya dapat ditekan.



*Angka Sementara
Sumber: DLH Kabupaten Banyumas 2022

Gambar 2.53
Tren dan Kecenderungan Emisi GRK di Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

Hasil Inventarisasi GRK pada Tahun 2022 ini menghasilkan rekomendasi untuk rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang disajikan pada tabel berikut:

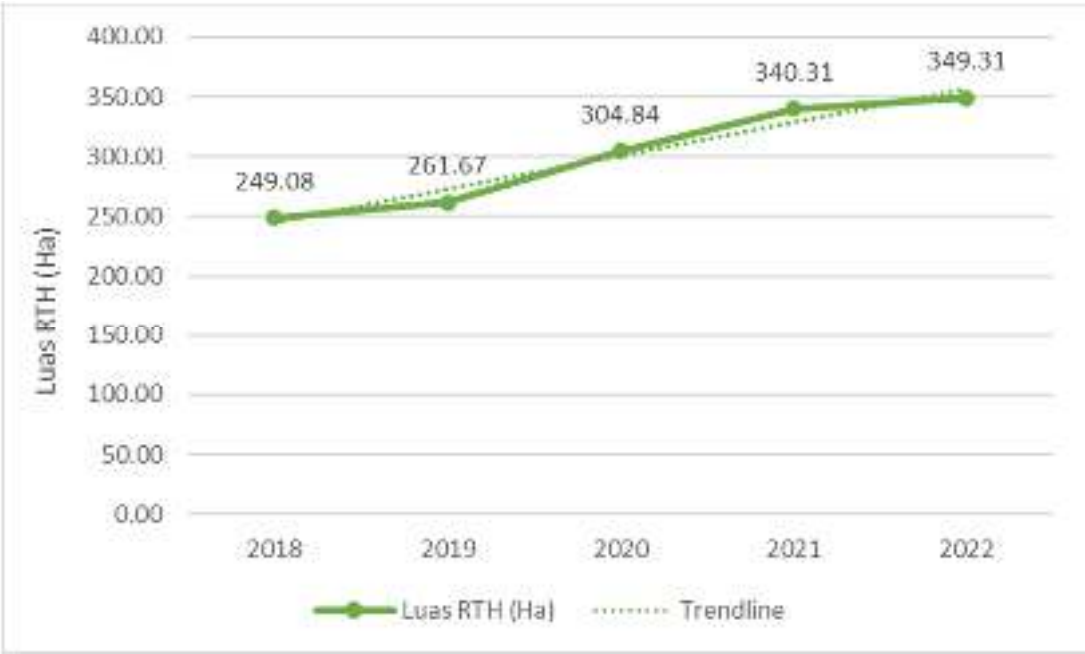
Tabel 2.72
Rekomendasi Inventarisasi GRK Kabupaten Banyumas Tahun 2022

KATEGORI	TUJUAN UTAMA MITIGASI	RENCANA AKSI
1A3 Transportasi	Mengurangi peningkatan konsumsi BBM oleh kendaraan, meningkatkan kelancaran lalu lintas dan menyediakan sistem transportasi yang ramah lingkungan	- Penggunaan kendaraan ramah lingkungan - Penataan Sistem Angkutan Umum - Pelatihan Smart Driving - Penataan Ruang Parkir - Pengembangan <i>Intelligent Transport System</i>
3C7 Agriculture (Budidaya Padi)	Mengurangi penggunaan pupuk kimia pada masa tanam, dan mengurangi kegiatan pembakaran jerami sisa panen yang sering dilakukan oleh petani	- Penggunaan pupuk organik - Sosialisasi kepada petani terkait akibat kegiatan pembakaran jerami sisa panen dan manfaat jika membiarkan jerami tersebut untuk kesuburan tanah
2A4d IPPU (Industri Mineral – Proses Penggunaan Karbonat Lainnya)	Mendorong efisiensi dalam proses industri	- Penerapan Produksi Bersih - Penerapan Proper

KATEGORI	TUJUAN UTAMA MITIGASI	RENCANA AKSI
2A1 IPPU (Industri Mineral – Produksi Semen)	Mendorong efisiensi dalam proses industri, terutama penggunaan kapur dan klinker	- Penerapan Produksi Bersih - Penerapan Proper
1A2 Industri Manufaktur dan Konstruksi	Mendorong industri untuk efisien menggunakan bahan bakar dan atau menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.	- Audit energi - Efisiensi energi - Penerapan Produksi Bersih - Penerapan Proper
3B1a Kehutanan – Sisa Mineral Biomassa pada Lahan Hutan	Meningkatkan kemampuan penyerapan (rosot) pada tutupan lahan, Mengurangi aktivitas pemanfaatan maupun pembakaran biomassa	- Pemantauan tutupan lahan secara regular - Pengendalian perijinan alih fungsi lahan - Meningkatkan tutupan lahan melalui penanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan kerusakan hutan
1A4B Energi – Perumahan / Rumah Tangga	Mengurangi penggunaan LPG pada skala rumah tangga	Penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk skala rumah tangga, sebagai contoh: biogas
4D1 CH4 Air Limbah Domestik	Meningkatnya jumlah KK yang memiliki dan menggunakan sistem pembuangan yang sesuai standar yang berlaku	- Penggunaan <i>Septic tank</i> plus - Perbanyak pembangunan IPAL komunal
3B2a Kehutanan – Sisa Mineral Biomassa pada Lahan Pertanian	- Meningkatkan kemampuan penyerapan (rosot) pada tutupan lahan - Mengurangi aktivitas pemanfaatan maupun pembakaran biomassa	Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Sumber : DLH Kabupaten Banyumas 2022

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Banyumas cenderung terus meningkat. Rata-rata peningkatan luas RTH setiap tahunnya mencapai 9%. Sampai dengan tahun 2022, luas RTH publik di Kabupaten Banyumas adalah 349,31 hektar atau sekitar 2% dari luas wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dihadapkan pada tantangan keterbatasan lahan atau harga lahan yang tinggi. Selain itu, jumlah sumber daya manusia untuk memelihara dan mengelola seluruh RTH publik di Kabupaten Banyumas juga terbatas.



Gambar 2.54
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan. Penyelenggaraan sub urusan persampahan tersebut menjadi prioritas untuk pengelolaan sampah yaitu jumlah timbulan sampah cukup besar. Mengacu SNI 1995 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia yaitu 2,75–3,25 liter/orang/hari untuk kota sedang, sedangkan untuk kota kecil yaitu sebesar 2,50–2,75 liter/orang/hari, potensi timbulan sampah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73
Potensi Timbulan Sampah Kabupaten Banyumas

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	1.791.480	1.840.152	1.873.196	1.898.746	1.842.582
2	Koefisien timbulan sampah	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Timbulan Sampah (L/org/hari)	4.478.700	4.600.380	4.682.990	4.746.865	4.606.455

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pelayanan sampah di Kabupaten Banyumas didukung dengan ketersediaan sarana prasarana persampahan yang meliputi TPST, TPA, TPS 3R, dan PDU.

Tabel 2.74
 Fasilitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas

No	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)	Alamat
1	TPST Ajibarang	730,00	-	Tipar Kidul. Ajibarang
2	TPST Rawalo	2.562,30	-	Rawalo. Rawalo
3	TPST Sumbang	6.460,50	-	Karangcegak. Sumbang
4	TPST Wangon	3.309,09	-	Wangon. Wangon
5	TPST Pekuncen	1.752,00	-	Pekuncen. Pekuncen
6	TPST Patikraja	3.832,50	-	Kedungrandu. Patikraja
7	TPST Sokaraja	2.518,50	-	Sokaraja Kulon. Sokaraja
8	TPST Banyumas	1.839,60	-	Kedunggede. Banyumas
9	TPST Cilongok	2.445,50	-	Cilongok, Cilongok
10	TPST Sumpiuh	2.190,00	-	Kradean, Sumpiuh
11	TPST Rempoah	3.942,00	-	Rempoah, Baturaden
12	TPA BLE	8.920,60	-	Wlahar Wetan, Kalibagor
13	TPS 3 R Berkoh	1.460,00	-	Berkoh. Purwokerto Selatan
14	TPS 3 R Sumampir	2.737,50	-	Sumampir. Purwokerto Utara
15	TPS 3 R Kelurahan Arcawinangun	2.190,00	-	Komplek Perumahan Arcawinangun Estate. Purwokerto Timur
16	TPS 3 R Karangpucung	3.467,50	-	Karangpucung. Purwokerto Selatan
17	TPS 3 R Karanglewas Lor	1.204,50	-	Jl. Stadion Mini Karanglewas Lor. Purwokerto Barat
18	TPS 3 R Teluk	1.752,00	-	Teluk. Purwokerto Selatan
19	TPS 3 R Rejasari	1.423,50	-	Rejasari, Purwokerto Barat
20	TPS 3 R Karangmangu	702,63	-	Karangmangu, Baturaden
21	TPS 3 R Pasir Kidul	1.7424,63	-	Pasir Kidul, Purwokerto Barat
22	PDU Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas	1.149,75	-	Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas
23	PDU Kelurahan Purwanegara	2.080,50	-	Gang STAIN Purwanegara. Purwokerto Utara
24	PDU Purwokerto Lor	1.872,45	-	Kedungwuluh. Purwokerto Barat

No	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)	Alamat
25	PDU Kelurahan Pabuwaran	1.872,45	-	Jl. Raya HR Bunyamin Karangwangkal. Purwokerto Utara
26	PDU Kelurahan Tanjung	3.285,00	-	Jalan Tambak Batu Tanjung. Purwokerto Selatan
27	PDU Kelurahan Kober	1.842,89	-	Jl. TK Pertiwi Kober. Purwokerto Barat
28	PDU Kelurahan Sokanegara	2.737,50	-	Sokanegara. Purwokerto Timur
29	PDU Kelurahan Karangwangkal	1.095,00	-	Jl. Jaelani Karangwangkal. Purwokerto Utara
30	PDU Kelurahan Purwokerto Wetan	2.190,99	-	Jl. Martadireja Purwokerto Wetan. Purwokerto Timur
31	PDU Bobosan	2.190,00	-	Jl. Kamandaka Bobosan, Purwokerto Utara
32	Rumah Kompos Grendeng	2.190,00	-	Grendeng, Purwokerto Utara

Sumber: DLH Kabupaten Banyumas, 2022



Sumber: DLH Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.55
TPS3R

Fasilitas pengelolaan sampah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk dapat mengolah sampah tanpa residu. Sarana dan prasarana pada fasilitas pengelolaan sampah yang dibutuhkan antara lain *belt conveyor*, mesin pemilah, mesin paving, biopon maggot, dan mesin pyrolysis.



Sumber: DLH Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 2.57

Sarana Prasarana pada Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah selain pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah, beberapa inovasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, di antaranya SALINMAS (Sampah Online Banyumas), dan pelibatan kelompok masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2.75

Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelolaan Sampah

No	KSM	Kelurahan	Fasilitas yang dikelola
1	Sejahtera	Ajibarang	TPST
2	Sumber Rejeki Abadi	Pekuncen	TPST
3	Sumber Makmur	Cilongok	TPST
4	Berkah Maju Bersama	Rempoah	TPST
5	Gawa Berkah	Sokaraja Kulon	TPST
6	Kedung Mas	Kedunggede	TPST
7	Mekar Sari	Karangcegak	TPST

No	KSM	Kelurahan	Fasilitas yang dikelola
8	Sumber Rejeki	Krandegan	TPST
9	Randu Makmur	Kedungrandu	TPST
10	Maju Mandiri	Wangon	TPST
11	Karya Mandiri Sejahtera	Rawalo	TPST
12	Migunani	Pabuwaran	PDU
13	Sregeprawat	Karangwangkal	PDU
14	Sejahtera	Purwanegara	PDU
15	Kamandaka	Bobosan	PDU
16	SAE	Puwokerto Wetan	PDU
17	Resik Mandiri	Purwokerto Lor	PDU
18	Soka Bersimpah	Sokanegara	PDU
19	Brayan	Tanjung	PDU
20	Wulan Sari	Kedungwuluh	PDU
21	Gempar	Kober	PDU
22	Paku Mas	Pasir Kulon	PDU
23	Greensaber	Grendeng	Rumah Kompos
24	Sumber	Sumampir	TPS 3 R
25	Bersih Mandiri	Kranji	TPS 3 R
26	Adipati Mersi	Mersi	TPS 3 R
27	Mulya Sejati	Teluk	TPS 3 R
28	Berkah	Berkoh	TPS 3 R
29	Mugi Resik	Karangpucung	TPS 3 R
30	Rahayu	Karanglewas Lor	TPS 3 R
31	Ceria	Pasir Kidul	TPS 3 R
32	Barokah	Rejasari	TPS 3 R
33	Wahana Hijau	Bantarsoka	TPS 3 R
34	Arcasatria	Arcawinangun	TPS 3 R
35	Bumi Indah Lestari	Pasir Muncang	TPS 3 R
36	Jadi Mulia Bersama	Karangmangu	TPS 3 R
37	Bumdes Cikal Pambagyan	Pesawahan	TPS 3 R
38	Berkah Runtah	Pancasan	TPS 3 R
39	Gotong Royong	Margasana	TPS 3 R
40	Piasa Kulon	Piasa Kulon	TPS 3 R
41	Sawit Berkah Usaha	Klapasawit	TPS 3 R

Sumber: DLH Kabupaten Banyumas, 2022

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 8 indikator program telah tercapai.

Tabel 2.76
 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
 Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
1.	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100	100	100	Memenuhi target 2022 (100%) dan target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
2.	Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan sesuai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
3.	Persentase RTH publik	%	8.28	7.99	10.26	Mencapai target 2022 (7.99%) dan target akhir RPJMD (8.28%)
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
4.	Persentase Rincian Teknis (Rintek) pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target RPJMD (100%)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					

5.	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	%	80	70	100	Melampaui target 2022 (70%) dan target akhir RPJMD (80%)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
6.	Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan target RPJMD (100%)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
7.	Persentase sengketa dan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan target RPJMD (100%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
8.	Persentase sampah yang berkurang melalui 3R	%	27	26	66.83	Melampaui target 2022 (26%) dan target RPJMD (27%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan tahun 2022, dari 8 target indikator capaian kinerja bidang Lingkungan Hidup, seluruh target indikator telah mencapai target, baik target di tahun 2022 maupun target akhir RPJMD. Terdapat 2 (dua) target indikator yang realisasinya melampaui target, baik target akhir maupun target RPJMD, yaitu (1) Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda, dan (2) Persentase sampah yang berkurang melalui 3R.

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran penting, dikarenakan pelayanan kependudukan dan

catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan publik lainnya. Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Data kependudukan yang digunakan oleh sektor lain haruslah data yang valid yaitu data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau bisa disebut data bersih. Persentase data bersih dari data ganda dan anomali yang tervalidasi pada tahun 2022 sejumlah 94,26%.

Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas antara lain: tersedianya tempat perekaman data kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK, pelayanan akta kelahiran dengan sistem jemput bola sebagai upaya mempermudah akses pelayanan pembuatan akta.

Pelayanan administrasi kependudukan sudah dilayani secara online meliputi semua layanan administrasi kependudukan yaitu: akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga, perpindahan ke luar, kedatangan, dan sinkronisasi data untuk BPJS, bank, dan sebagainya.

Kepemilikan KTP, Akta Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk yang wajib KTP	1.337.689	1.374.934	1.403.957	1.427.833	1.378.950
2	Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	85,91	86,31	86,46	90,25	89
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,19	99,80	96,94	97,02	99,40
4	Jumlah Keluarga (KK)	586.247	603.844	618.937	634.139	627.674

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)	97,90	98,11	98,33	98,64	98,92
6	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun (%)	84,52	87,38	88,54	90,56	94,69

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2022 ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 Program dengan 4 indikator. Dari keempat indikator tersebut realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	DINDUKCAPIL					
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	97	96	99.4	Melampaui target 2022 (96%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (97%)
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
2.	Persentase pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
3.	Persentase ketersediaan data dan informasi kependudukan	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
4.	Persentase ketersediaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dari 4 target indikator, sebanyak 4 target indikator sudah melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

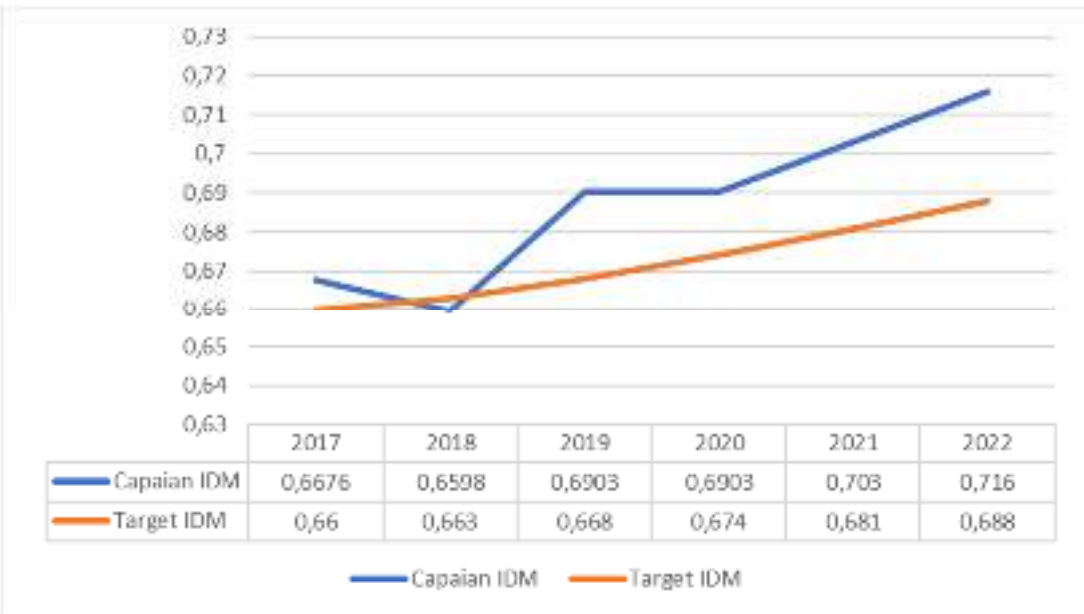
Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Untuk menuju Desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi ukuran status desa dalam wilayah Kabupaten. Status desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas dari tahun 2018-2022 berstatus berkembang dengan nilai yang fluktuatif dan cenderung turun.

Klasifikasi penilaian status Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri (Desa Sembada) dengan nilai IDM $> 0,85155$
- b. Desa Maju (Desa Pra Sembada) dengan nilai IDM $\leq 0,8155 \rightarrow 0,7072$
- c. Desa Berkembang (Desa Madya) dengan nilai IDM $\leq 0,7072$ dan $> 0,5989$
- d. Desa Tertinggal (Pra Madya) dengan nilai IDM $\leq 0,5985$ dan $> 0,4907$
- e. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) dengan nilai IDM $\leq 0,4907$

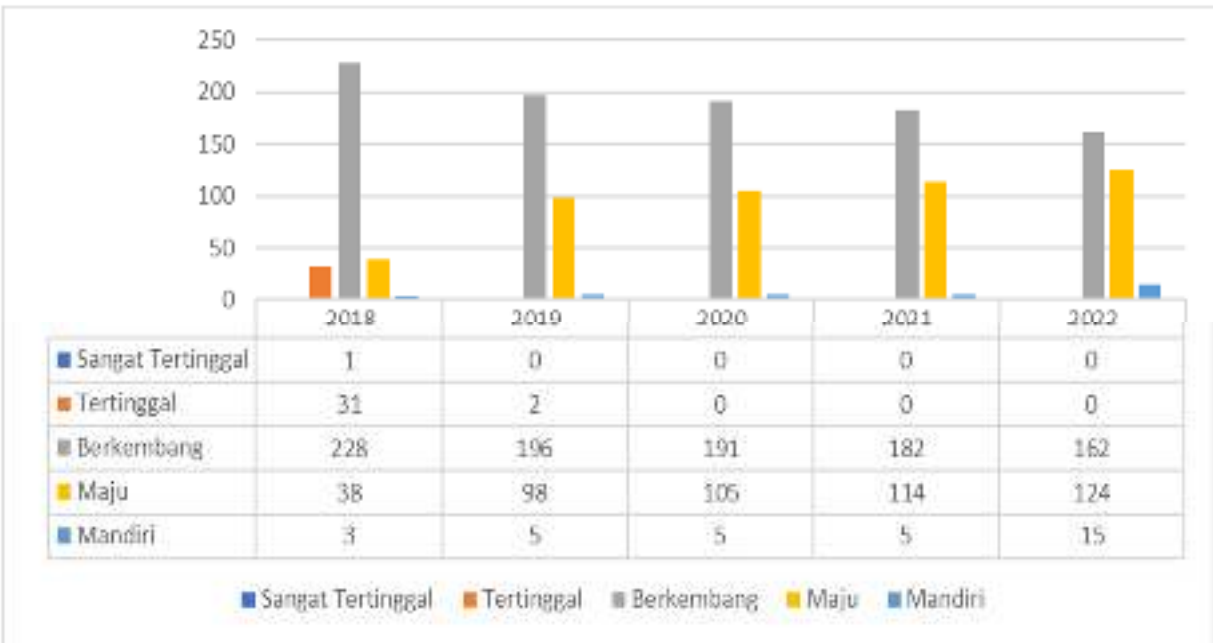
Tahun 2022 Kabupaten Banyumas mendapat nilai IDM 0,7163 dengan status berkembang. Perkembangan IDM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2022, diolah

Gambar 2.58
Perkembangan IDM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

Nilai IDM desa-desa di Kabupaten Banyumas Status IDM desa di Kabupaten tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Kemendes dan PTT, 2022

Gambar 2.59
Status Desa dalam IDM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

Pembinaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas meliputi fasilitasi kerja sama antar desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Pembangunan Kerjasama desa bisa dilakukan dengan pembentukan Kawasan Perdesaan, BUMDES dan BUMDES Bersama. Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Banyumas telah memiliki 3 Kawasan Perdesaan yaitu:

1. Kawasan Perdesaan Kawasan Agrowisata Pegunungan Kendeng Kecamatan Somagede dengan lokasi Desa Klinting, Kemawi, Tanggeran dan Somagede.
2. Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng dengan lokasi Desa Windujaya, Kalisalak, Baseh dan Melung.
3. Kawasan Perdesaan Serayu Semanger Kecamatan Somagede dengan lokasi Desa Piasa Kulon, Plana, Somakaton, Kanding, Somagede dan Sokawera.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui posyandu. Posyandu merupakan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar meliputi KB, KIA, Gizi, imunisasi, penanggulangan diare dan ISPA.

Untuk melihat perkembangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di
Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu (buah)	2.537	2.534	2.534	2.520	2.533
2	Jumlah Posyandu aktif (buah)	2.537	2.514	2.446	2.520	2.533
3	persentase Posyandu aktif (%)	100	99,21	96,53	100	100
4	Jumlah Bumdes (buah)	221	249	269	296	299
5	Jumlah bumdes dasar (buah)	184	152	146	126	91
6	Jumlah bumdes tumbuh (buah)	4	90	113	144	171
7	Jumlah bumdes berkembang (buah)	2	7	8	23	26
8	Jumlah bumdes Maju (buah)	0	0	2	3	11
9	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk (kawasan)	1	1	3	3	3

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2022
*= angka sementara

Perkembangan jumlah posyandu tahun 2022 mengalami peningkatan sedangkan persentase posyandu yang aktif persentasenya tetap yaitu 100%.

Untuk Lembaga Bumdes juga meningkat di Tahun 2022 menjadi 299 Bumdes atau meningkat sebanyak 2 buah Bumdes dan perkembangan status Bumdes juga meningkat cukup baik.

Untuk melihat evaluasi realisasi indikator capaian kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	DINSOSPERMASDES					
	PROGRAM PENATAAN DESA					
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	30	200	Melampaui target 2022 (30%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					
2.	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	6	2	6,64	Melampaui target 2022 (2%) dan mencapai target akhir RPJMD (6%)
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
3.	Persentase desa dengan administrasi baik	%	100	30	30	Mencapai target 2022 (30%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 4 target indikator, sebanyak 3 target indikator sudah melampaui target 2022

dan sudah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 1 target indikator melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021 didominasi kelompok usia produktif sebagai sumber daya pembangunan. Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi sekitar Tahun 2030. Untuk dapat mewujudkan bonus demografi salah satu faktor penting adalah pengendalian penduduk.

Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta KB aktif	254.357	229.288	243.562	233.481	169.517	205.720
2	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,59	74,93	75,47	73,67	58,19	68,8
3	Jumlah peserta KB baru	37.263	37.934	31.222	26.781		
4	<i>Unmetneed</i> KB	30.505	38.241	40.629	42.155	56.853	12
5	Persentase <i>Drop Out</i> (DO) KB	15,16	17,95	7,39	15,13	25,99	25,99*
6	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	29,6	33,6	34	32,2	34,5	34,5*
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	66,88	68,58	70,5	62,13	70,56	70,56*
8.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,21	NA	NA	NA	0,47	0,47*
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,84	2,76	2,71	1,79	1,36	-2,95
10	Persentase keluarga Pra Sejahtera (%)	22,26	21,42	20,68	19,94	47,21	47,21*
11.	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	100	100	100	100	100	100
12.	Rasio Akseptor KB	78,59	74,93	75,47	73,67	57,96	68,8
13.	Jumlah PIK	77	94	95	109	109	109*
14.	Rasio Petugas Pembina KB desa	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(PPKBD) setiap desa/kelurahan						
15.	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)	2,2	4,08	4,08	3,8	2,13	3,18
16.	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)	1	1	1	1	1	100
17.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,72	2,09	2,29	1,13	0.99

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2022

*= data sememntara

Kinerja Pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada sub bidang keluarga berencana sampai dengan tahun 2022 menunjukkan cakupan peserta KB dan Rasio Akseptor KB menurun dari tahun sebelumnya, dan *Unmeetneed* KB mengalami kenaikan.

Tabel 2.82
Jumlah PUS Bukan Peserta KB Menurut Alasan Tidak Ber-KB

No	Uraian	2021	2022
1	Jumlah PUS Bukan Peserta KB	121.798	121.798*
2	Alasan tidak ber KB		
	1) Ingin Hamil/Anak	56.587	56.587*
	2) Tidak Tahu Tentang KB	351	351*
	3) Alasan Kesehatan	17.381	17.381*
	4) Efek Samping	13.817	13.817*
	5) Tempat Pelayanan Jauh	135	135*
	6) Alat/Obat/Cara KB Tidak Tersedia	138	138*
	7) Biaya Mahal	338	338*
	8) Tidak Ada Alat/Obat/Cara KB yang Cocok	3.328	3.328*
	9) Suami/Keluarga Menolak	5.555	5.555*
	10) Alasan Agama	1.793	1.793*
	11) Suami Tinggal Jauh/Jarang Berhubungan	13.989	13.989*
	12) Tidak Ada Petugas Pelayanan KB	28	28*
	13) Infertilitas	8.358	8.358*

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2022

*= data sementara

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sudah mulai menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan 5 Pilar yang terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, meliputi : Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk,

Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Pengembangan Data Base Kependudukan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap prioritas pembangunan kependudukan, untuk meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap pembangunan kependudukan pembangunan kependudukan, yang saling terintegrasi, dan bersinergi dalam setiap langkah dan capaian-capaiannya.

Capaian kinerja program urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2022 sebanyak 3 program dengan 5 indikator, sebagaimana ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.83
 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	DPPKBP3A					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.30	2.40	0.99	melampaui target 2022 (2.40) dan melampaui target akhir RPJMD (2.30%)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
2.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42.00	41.00	45.15	Melampaui target 2022 (41.00%) dan melampaui target akhir RPJMD (42.00%)
3.	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	Mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
4.	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	80	65	65	Mencapai target 2022 (65%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (80%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					

5.	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25.93	18.52	7.41	Belum melampaui target 2022 (18,52%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (25.93%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari 5 target indikator, sebanyak 2 target indikator sudah melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD. Sebanyak 2 target indikator sudah mencapai target 2022 dengan 1 belum mencapai target akhir RPJMD serta 1 sudah mencapai target akhir RPJMD. Sebanyak 1 indikator belum mencapai target 2022 dan target akhir RPJMD. Target indikator persentase Kampung KB yang terfasilitasi dan target indikator persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan sangat terpengaruh dengan besarnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2.4.2.9. Perhubungan

Kebijakan keselamatan transportasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 difokuskan pada keselamatan lalu lintas jalan mengingat tingginya jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas, korban, dan nilai kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021 cenderung meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.84
Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Nilai Kerugiannya

No	Kondisi	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecelakaan	940	1.050	1.574	1.595
2	Korban Meninggal	220	224	217	216

3	Korban Luka Berat	1	7	1	13
4	Korban Luka Ringan	1.030	1.149	1.765	1.816
5	Kerugian Material (ribu rupiah)	609.790.000	685.580.000	952.820.000	1.121.220.000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas. Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 9 titik rawan kecelakaan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.85
Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Banyumas
Tahun 2022

No.	Ruas Jalan
1	Jl. Raya Baturaden
2	Jl. Raya Cilongok - Purwokerto (depan Pasar Cilongok)
3	Jl. Raya Purwokerto - Sokaraja (selatan RSOP)
4	Jl. Raya Wangon - Lumbir (depan PLN Wangon)
5	Jl. Raya Wangon - Jeruklegi (depan Batalyon 405/SK)
6	Jl. Raya Rawalo Purwokerto (depan kantor UPK Rawalo)
7	Jl. Kemranjen - Sumpiuh (barat pos ojek Lebeng)
8	Jl. Raya Sumpiuh - Kemranjen (barat Mapolsek Sumpiuh)
9	Jl. Raya Exit Barat Lingkar Sumpiuh

Sumber: Polresta Banyumas, 2022

Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Prasarana Lalu Lintas

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dilaksanakan untuk mewujudkan jalan yang berkeselamatan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas yang perkembangannya dari Tahun 2017-2022 ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.86
Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Kabupaten Banyumas

No	Sarpras lalu lintas (unit)	Kebutuhan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terminal*)	8	3	3	3	3	3	4
2	Halte	100	28	53	56	-	76	76
3	Alat Penerangan Jalan (APJ)	102.743	NA	19.047	19.847	20.716	21.273	21867
4	Rambu Lalu Lintas (unit)	10.276	4.766	5.166	5.700	5.899	6.263	6272
5	Rambu (pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit)	1.685	441	449	447	497	502	502
6	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)	84	61	62	64	65	65	67
7	Warning Lamp (unit)	311	155	166	189	190	223	224
8	Marka Jalan (m2)	59.940	38.932	45.868	47.662	48.862	51.821	52.098

Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2022

*) kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas sesuai RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan.

Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perhubungan. Dari 19 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Banyumas 16 perlintasan dalam kondisi baik, 3 perlintasan sebidang belum berpalang pintu.

Tabel 2.87
Kondisi perlintasan sebidang Kabupaten Banyumas tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Status Penjagaan	Palang Pintu & pos jaga
1	Pasir muncang	Purwokerto Barat	Nasional	PT.KAI	ada

2	Kaliwangi	Rawalo	Nasional	PT.KAI	ada
3	Kradenan	Sumpiuh	Nasional	PT.KAI	ada
4	Karangtengah	Cilongok	Kabupaten	PT.KAI	ada
5	Karanglo	Cilongok	Kabupaten	PT.KAI	ada
6	Karanggandul	Karanglewas	Kabupaten	PT.KAI	ada
7	Kedunglemah	Kedungbanteng	Kabupaten	PT.KAI	ada
8	Notog	Patikraja	Kabupaten	PT.KAI	ada
9	Gambarsari A	Kebasen	Kabupaten	PT.KAI	ada
10	Gambarsari B	Kebasen	Kabupaten	PT.KAI	ada
11	Sawangan	Kebasen	Kabupaten	Penjagaan dari Pemkab	ada
12	Karanglo	Kemranjen	Kabupaten	Tidak ada	tidak ada
13	Sibalung	Kemranjen	Kabupaten	PT.KAI	ada
14	Pandak	Sumpiuh	Kabupaten	Tidak ada	tidak ada
15	Kuntili	Sumpiuh	Kabupaten	Tidak ada	tidak ada
16	Sumpiuh	Sumpiuh	Kabupaten	PT.KAI	ada
17	Karangpucung	Tambak	Kabupaten	PT.KAI	ada
18	Pesantren	Tambak	Kabupaten	Penjagaan dari Pemkab	ada
19	Buniayu	Tambak	Kabupaten	PT.KAI	ada

Sumber: Dinhub Kabupaten Banyumas, 2022

Pengelolaan Terminal

Kabupaten Banyumas memiliki 3 terminal Tipe C dan 1 terminal pariwisata, yaitu:

- Terminal Penumpang Wangon dan Ajibarang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang Kabupaten Banyumas Sebagai Terminal Tipe C.
- Terminal Karanglewas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 551.22/394/2022 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Karanglewas sebagai Terminal Penumpang Tipe C.
- Terminal Baturraden Keputusan Bupati Banyumas Nomor 551.22/392/2022 tentang Penyelenggaraan Terminal Pariwisata Baturraden.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga mengelola sebagian Terminal Bulupitu.

Terminal penumpang Tipe C yang ada masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Jalan. Permasalahan penerapan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan, sebagai berikut:

Tabel 2.88
 Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Terminal Tipe C di Kabupaten Banyumas

No	Jenis pelayanan	Kondisi
Terminal Ajibarang		
1.	Keselamatan	Tidak tersedia jalur evakuasi, fasilitas pemeriksaan kelaikan kendaraan umum, fasilitas keselamatan dan Kesehatan, fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan umum
2.	Keamanan	-
3.	Kehandalan / Keteraturan	Tidak tersedia jadwal kendaraan umum dalam dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan, tidak tersedia loket penjualan tiket
4.	Kenyamanan	Tidak tersedia smoking area, hot spot area, tidak tersedia tempat istirahat awak kendaraan
5.	Kemudahan / keterjangkauan	Tidak tersedia lajur pemberangkatan kendaraan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, tinggi platform yang tidak sama dengan tinggi lantai bus
6.	Kesetaraan	Tidak tersedianya fasilitas untuk pengguna jasa difabel
Terminal Wangon		
1.	Keselamatan	Tidak tersedia jalur evakuasi, fasilitas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas keselamatan dan Kesehatan, fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan umum
2.	Keamanan	-
3.	Kehandalan / Keteraturan	Tidak tersedia jadwal kendaraan umum dalam dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan,tidak tersedia loket penjualan tiket
4.	Kenyamanan	Tidak tersedia smoking area, hot spot area, tidak tersedia tempat istirahat awak kendaraan, drainase yang tidak memadai
5.	Kemudahan / keterjangkauan	Tidak tersedia lajur pemberangkatan kendaraan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, tinggi platform yang tidak sama dengan tinggi lantai bus
6.	Kesetaraan	Tidak tersedianya fasilitas untuk pengguna jasa difabel

No	Jenis pelayanan	Kondisi
Terminal Karanglewas		
1.	Keselamatan	Tidak tersedia jalur evakuasi, fasilitas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas keselamatan dan Kesehatan, fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan umum
2.	Keamanan	-
3.	Kehandalan / Keteraturan	Tidak tersedia jadwal kendaraan umum dalam dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan,tidak tersedia loket penjualan tiket
4.	Kenyamanan	Tidak tersedia smoking area, hot spot area, tidak tersedia tempat istirahat awak kendaraan.
5.	Kemudahan / keterjangkauan	Tidak tersedia lajur pemberangkatan kendaraan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, tinggi platform yang tidak sama dengan tinggi lantai bus
6.	Kesetaraan	Tidak tersedianya fasilitas untuk pengguna jasa difabel

Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2022

Pengujian berkala kendaraan bermotor

Kendaraan yang berkeselamatan merupakan salah satu pilar keselamatan transportasi. Kelaikan kendaraan juga menjadi aspek penting untuk keselamatan dan keamanan transportasi. Dalam aspek kelaikan kendaraan, Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tambahan alat pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan layanan pengujian kendaraan yang sudah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Kementerian Perhubungan.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut belum mampu menjangkau seluruh kendaraan wajib uji. Hal ini terlihat dari gap antara kendaraan wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji KIR. Jumlah kendaraan wajib uji dan jumlah uji KIR diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.89
 Jumlah Kendaraan Wajib Uji Dan Jumlah Uji KIR di Kabupaten Banyumas

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	13.199	13.019	11.626	15.585	15.719	16.581
2	Jumlah Uji KIR angkutan umum :						
	Mobil penumpang umum	321	233	217	43	38	119
	Mobil Bus	3.217	2.955	2.533	1.601	1518	1900
	Mobil Barang	22.719	21.183	18.610	12.114	13764	10045
	Mobil Gandengan	186	158	103	41	28	69

Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2022

Penyediaan Angkutan Umum

Penyediaan angkutan umum merupakan salah satu kewenangan kabupaten/kota dalam sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai dasar penyelenggaraan penyediaan angkutan Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

Sampai dengan Tahun 2022 wilayah di Kabupaten Banyumas masih terdapat wilayah yang belum dilayani trayek angkutan. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, dan Kecamatan Kalibagor.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program *Buy The Service* (BTS). Program *Buy The Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Program BTS dilatarbelakangi permasalahan kemacetan

serta tidak tertatanya sistem transportasi publik yang baik sehingga menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Jalur BRT yang dikembangkan meliputi: 1) Pasar Pon – Ajibarang, 2) Terminal Notog Patikraja – Baturraden, dan 3) Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem. Jalur Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem diintegrasikan dengan Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga. Operasional BTS akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipilih melalui mekanisme lelang. Pengembangan BTS masih akan berlanjut di Tahun 2023 baik untuk operasional, maupun penyediaan sarana dan prasarannya.

Selain kewenangan penyediaan angkutan, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota serta penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu.

Tabel 2.90
Jumlah Angkutan Umum dan Trayek di Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah trayek angkutan umum (unit)						
1	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	570	566	582	447	447	408
2	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	70	70	96	39	39	58
3	AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)	90	90	85	28	28	28
4	AJAP (Antar Jemput antar Provinsi)	16	16	16	16	16	17
5	Angkutan Desa	344	332	332	332	328	328
6	Angkutan Kota	506	486	888	621	839	667
7	Taksi	170	170	170	160	155	160

8	Jumlah angkutan wisata (unit)	104	104	118	123	120	49

Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2022

Pembangunan Dermaga dan Halte Sungai Serayu

Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan sungai dilaksanakan pembangunan dermaga/halte Sungai Serayu. Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Pengembangan angkutan sungai didasarkan pada kajian Penyusunan SID Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Berdasarkan kajian tersebut direncanakan prasarana berupa 1 pelabuhan dan 6 halte sungai untuk pengembangan angkutan di Sungai Serayu. Selain untuk memberikan alternatif moda transportasi, angkutan sungai menjadi dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas.

Sampai dengan Tahun 2022 telah dibangun 2 halte Sungai Serayu, yaitu di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo, dan Desa Papringan Kecamatan Banyumas. Selanjutnya sebagai bentuk sinergi hibah pembangunan dermaga Sungai Serayu untuk pengembangan angkutan sungai, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan membangun dermaga sungai di lokasi lainnya sesuai hasil kajian dimaksud dengan anggaran APBD.

Perparkiran

Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir menjadi urusan pemerintahan bidang perhubungan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Banyumas nomor 300/797 Tahun 2018 tentang zona parkir dalam ruang milik jalan di Kabupaten Banyumas, sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Banyumas terdapat 48 zona parkir.

Tabel 2.91
Rekapitulasi pendapatan parkir Kabupaten Banyumas

No	Tahun	Jumlah Zona	Jumlah Pendapatan (Rp)
1	2019	48	1.378.375.000

2	2020	45	884.236.000
3	2021	48	783.886.000
4	2022	47	1.215.800.000

Sumber: Dinhub Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	DINAS PERHUBUNGAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
1.	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	83.3	83.3	Sudah mencapai target 2022 (83.3%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
2.	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	%	96	95	132.27	Sudah melampaui target 2022 (95%) dan melampaui target akhir RPJMD (96%)
3.	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
4.	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	%	59	56	53.4	Belum mencapai target 2022 (56%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (59%)
5.	Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
6.	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	%	100	99	100	Sudah melampaui target 2022 (99%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
7.	Persentase pelaksanaan MRL	%	100	100	100	Sudah mencapai target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
8.	Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	%	57,14	42.85	28.5	Belum mencapai target 2022 (42.85%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (57,14%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Perhubungan dari 8 target indikator, sebanyak 2 indikator sudah mencapai target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD . Terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD. Terdapat 1 indikator yang melampaui target 2022 dan melampaui target akhir RPJMD. Terdapat 2 indikator belum mencapai target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kelembagaan PPID pada Pemerintah Kabupaten Banyumas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Kelembagaan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website <http://ppid.banyumaskab.go.id>. Informasi yang tersedia meliputi:

- a) Informasi berkala, meliputi: informasi tentang profil badan publik, ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan, ringkasan informasi tentang kinerja, ringkasan laporan keuangan, laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik, serta pengumuman pengadaan barang dan jasa;
- b) Daftar informasi publik;
- c) Informasi serta merta;
- d) Informasi setiap saat, meliputi daftar informasi publik, Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan, informasi tentang pedoman pelayanan publik, informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik Badan Publik;
- e) Informasi yang dikecualikan, daftar informasi publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Banyumas Nomor 480/2725/Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f) Pengadaan barang dan jasa.

Hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menetapkan Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten dengan kategori informatif dengan nilai keterbukaan informasi publik 90,5%. Penilaian tersebut

merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, meliputi: penilaian website dan media sosial, penilaian *Self Assessment Questioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta uji publik Badan Publik.

Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik, baik dalam penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik lainnya. Dengan pelayanan publik berbasis elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan serta keterbukaan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki infrastruktur pendukung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.93
Fasilitas Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Website milik pemerintah daerah	358
2	Perangkat Daerah terhubung <i>Fiber Optic</i>	30
3	Perangkat Daerah memanfaatkan TIK	50
4	Aplikasi pemerintah daerah (dalam <i>e-office</i>)	124
5	Aplikasi berbasis pelayanan publik	54
6	Pusat Data Terstandar	1
7	<i>Smart Room</i>	1

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Banyumas, 2022

Perangkat daerah di Kabupaten Banyumas yang telah aktif melakukan update website sebanyak 38 perangkat daerah (21 badan/dinas dan 17 kecamatan) dari 57 perangkat daerah. Selain website, 17 kecamatan dan 28 badan/dinas juga aktif melakukan update media sosial (facebook/instagram) untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Kesiapan Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPBE juga ditunjukkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE). Dasar penyelenggaraan tanda tangan elektronik yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Untuk penyelenggaraan TTE lebih lanjut telah disusun 8 standar operasional dan prosedur (SOP) terkait oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Sampai dengan Februari 2023 jumlah TTE yang sudah diterbitkan sebanyak 163 TTE (meliputi Bupati, Sekda, Ka. Dinas/Badan, Camat & Kades). Tanda tangan elektronik/sertifikat elektronik telah digunakan pada 5 aplikasi layanan publik yaitu SRIKANDI, Perijinan Banyumas, Satria Pajak, E-Filling, dan Sistem Informasi Desa (SID). Sedangkan untuk administrasi pemerintahan, terdapat 6 perangkat daerah yang sudah menggunakan TTE, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 16 desa.

Untuk mendukung pengembangan *smart city* dan penerapan SPBE 30 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan *fiber optic* dan infrastruktur komunikasi dan informatika lain yang disediakan oleh penyedia layanan komunikasi. Dari sisi kelembagaan telah dibentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/363 Tahun 2018.

Peran BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika telah memperluas akses terhadap ponsel dan internet. Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas Tahun 2022, pada tahun 2022, pengguna ponsel/komputer telah mencakup 78,81% anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas, dan 68,13% anggota rumah tangga anggota rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah mengakses internet.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui capaian 3 indikator program indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut:

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan		Tahun 2022	Interpretasi

			Target Akhir RPJMD	Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
2.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	%	55	50	54	Melampaui target 2022 (50%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (55%)
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>on line</i> dan terintegrasi	%	40	35	63	Melampaui target 2021 (35%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (40%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022, capaian kinerja bidang Komunikasi dan Informatika dari 3 target indikator, sebanyak 2 target indikator telah melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 1 target indikator melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu membangun dan memaksimalkan potensi ekonomi. Jumlah koperasi di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun. Sampai dengan tahun 2022, dari 547 koperasi yang ada di Banyumas, hanya 289 koperasi yang dinyatakan aktif atau sebesar 54,30% saja. Sementara itu, koperasi sehat yang terdata sejumlah 105 unit atau sebanyak 19,19% dan koperasi yang tidak sehat sejumlah 442 unit atau sebesar 80,81%. Terus menurunnya koperasi aktif dan sehat dikarenakan belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi dan

belum optimalnya pelatihan dan pengembangan koperasi. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja koperasi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi	Unit	546	554	558	547	547
2.	Persentase koperasi aktif	%	80,22	80,51	80,65	52,83	54,30
3.	Persentase Koperasi Sehat	%	29,22	28,92	28,44	24,86	19,19
4.	Persentase Koperasi Tidak Sehat	%	70,78	71,08	71,56	75,14	80,81

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2022

Selain koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. UMKM berperan penting sebagai jaring pengaman untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, UMKM juga turut berkontribusi pada Produk Domestik Bruto. Bertambahnya daya saing UMKM akan membuat perekonomian daerah menjadi lebih berkembang.

Tabel 2.96
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1,	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	85.948	86.228	86.645	86.875	87.590

2,	Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang)	126.986	128.118	128.952	129.182	130.432
3,	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memiliki izin usaha (unit)	6.720	8.653	19.865	24.978	40.700
4,	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang)	8.539	9.205	9.674	10.194	10.517
5,	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (%)	9,94	10,68	11,17	11,73	12

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2022

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam lima tahun terakhir jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 7%. Berdasarkan data di atas, dalam lima tahun terakhir rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-2 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas.

Sampai dengan tahun 2022 Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki izin usaha mencapai 46,67% dari 87.590 unit Usaha Mikro dan Kecil yang ada. Sedangkan yang memperoleh fasilitas permodalan usaha dari pemerintah sebesar 10.511 orang atau 12% dengan dana bergulir. Sebagian besar UMK memperoleh permodalan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk mengembangkan UMKM, pemerintah telah melakukan peningkatan usaha mikro menjadi wirausaha dan peningkatan pelatihan bagi usaha mikro. Untuk melihat perkembangan kinerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2021		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	DINAKERKOP DAN UKM					
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
1.	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam	%	100	100	100	Realisasi sudah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
2.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	%	8,96	8,96	14,26	Realisasi sudah mencapai target 2022 (8,96%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (8,96%)
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
3.	Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya	%	8,96	8,96	12,56	Realisasi sudah mencapai target 2022 (8,96%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (8,96%)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
4.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	13,44	13,44	27,6	Realisasi sudah mencapai target 2022 (13,44%) dan sudah melampaui target

						akhir RPJMD (13,44%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
5.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	8,96	8,96	8,96	Realisasi sudah mencapai target 2022 (8,96%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (8,96%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
6.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	1,42	1,18	1,73	Realisasi sudah mencapai target 2022 (1,18%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (1,42%)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
7.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,254	0,249	0,33	Realisasi sudah mencapai target 2022 (0,249%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (0,254%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, seluruh indikator sudah mencapai target tahunan. Untuk capaian kinerja terhadap RPJMD, hingga 2021 ada satu indikator (17%) yang sudah mencapai target dan ada lima indikator (83%) yang belum mencapai target. Meskipun beberapa indikator sudah mencapai target tahunan, perlu upaya lebih untuk mencapai target RPJMD. Untuk memaksimalkan indikator yang belum tercapai, perlu adanya perhatian terhadap pelaksanaan pelatihan koperasi dan pendampingan kelembagaan dan usaha, pemeriksaan dan pengawasan koperasi harus tetap dilaksanakan lebih baik lagi. Usaha Mikro yang menjadi wirausaha juga harus terus ditingkatkan dengan mempermudah izin usaha demi meningkatkan pemasaran produk. Selain itu, perlu adanya

upaya penguatan daya saing koperasi dan UMKM mengingat pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

2.4.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2018–2022 mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.98
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	23,23	21,74	41,53	54,22	62,74
2.	Jumlah investor (PMDN/ PMA)	183 (proyek)	210 (proyek)	413 (proyek)	721 (proyek)	824 (proyek)
3.	Jumlah investasi (Rp)	625.635.300.000	761.621.384.873	1.077.955.780.000	1.021.561.268.294	1.662.456.999.547
4.	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)	1.406	4.688	4.568	5.521	1.022
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	7,68	22,32	11,06	7,66	1,24

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Banyumas, 2022

Untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Banyumas telah dilakukan pengembangan lapak pelayanan publik melalui Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program pelayanan ini menyediakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai standar pelayanan. Pada pelaksanaannya, Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menghadapi kendala yang menghambat penerbitan perizinan dan non perizinan yaitu terdapat akses layanan yang belum memadai serta terjadinya pengaduan berulang dari masyarakat. Selain itu, Lapak pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik pada tahun 2022 melayani 1438 jenis perizinan yang terdiri atas 82 Perizinan Non OSS, 1336 Perizinan OSS dan 119 pelayanan dari gerai Instansi/OPD. Kinerja urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.99						
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022						
No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	DPMPTSP					
.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
1.	Persentase pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal	%	80	75	0	Realisasi tidak mencapai target 2022 (75%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (80%)
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
2.	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	%	85	80	100	Realisasi sudah melampaui target 2022 (80%) dan target akhir RPJMD (85%)
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
3.	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	90	90	100	Realisasi sudah melampaui target 2022 (90%) dan target akhir RPJMD (90%)
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
4.	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	90	88	117,71	Realisasi sudah melampaui target 2022 (88%) dan target akhir RPJMD (90%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Seperti terlihat pada tabel capaian kinerja diatas, dari 4 indikator program yang ada pada Urusan Penanaman Modal, hanya 1 indikator yaitu persentase pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal yang masih belum mencapai target di tahun 2022 dan juga target akhir RPJMD. Hal ini dikarenakan masih belum terbitnya Peraturan Bupati tentang pemberian insentif penanaman modal sehingga belum bisa memberikan fasilitasi insentif terkait penanaman modal di Banyumas.

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas melalui peningkatan daya saing dan prestasi pemuda didukung oleh organisasi pemuda, olahraga dan penyediaan sarana prasarana olahraga. Sampai dengan tahun 2022 organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 196 organisasi, jumlah ini lebih besar dari tahun 2021 dengan jumlah 193 organisasi pemuda. Organisasi olahraga berjumlah 163 unit. Pada 2022, jumlah lapangan olahraga berjumlah 24 unit.

Daya saing pemuda juga dapat terwujud dengan menggalakan pelatihan rintisan wirausaha muda. Hingga 2022, rintisan wirausaha pemuda yang difasilitasi sejumlah 30 wirausahawan, jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yaitu sebanyak 23 wirausahawan. Meskipun terjadi peningkatan, namun angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah pemuda di Kabupaten Banyumas yang mencapai 416.645 orang. Rincian jumlah Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga, serta jumlah rintisan wirausaha yang difasilitasi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100

Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, Lapangan Olahraga, dan Jumlah Rintisan Wirausaha Muda Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif	unit	119	173	200	193	196
2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	202	202	200	200	163
3	Jumlah lapangan olahraga	lapangan	657	657	657	658	707

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah Rintisan wirausaha yang difasilitasi	unit	N/A	N/A	14	23	30

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2022

Lebih lanjut terkait penyelenggaraan sub urusan olahraga, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya meningkatkan prestasi olahraga di berbagai cabang. Sampai dengan tahun 2022 untuk tingkat Kabupaten medali yang diperoleh sebanyak 119 medali, tingkat provinsi 84 medali, dan tidak mendapatkan medali untuk tingkat nasional dan tingkat internasional. Untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Banyumas upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pelatih olahraga yang bersertifikat. Lebih rinci prestasi olahraga Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101
Perkembangan Prestasi Olahraga Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

No	Level	Jumlah Medali				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten	N/A	1.519	1.676	1.245	119
2	Provinsi	165	2	55	16	84
3	Nasional	0	1	38	24	0
4	Internasional	0	0	1	1	0

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2022

Tingkat capaian kinerja urusan kepemudaan di tahun 2022 untuk wirausaha muda sebesar 87,5%, persentase organisasi pemuda yang aktif 98%, pelatih olahraga yang bersertifikasi sebesar 23,28%, dan kepramukaan aktif sebesar 91,67% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.102
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	DINPORABUDPAR					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
1.	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60,0	58,7	87,5	Realisasi sudah melampaui target 2022 (58,7%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (60%)
2.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	89	77	98	Realisasi sudah melampaui target 2022 (77%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (89%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN					
3.	Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	13,75	9,59	23,28	Realisasi sudah melampaui target 2022 (9,59%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (13,75%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
4.	Persentase kepramukaan aktif	%	100	100	91,67	Realisasi tidak mencapai target 2022 (100%) dan tidak mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Secara umum, capaian kinerja bidang pemuda dan olahraga sudah cukup baik. Meskipun ada satu indikator yang tidak mencapai target di tahun 2022, angka capaian mencapai tersebut cukup tinggi yaitu dengan tingkat ketercapaian 91,67%. Selain permasalahan di atas, masih ada permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu masih rendahnya minat pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan. Selain itu, fasilitasi kegiatan pemuda masih cukup rendah dan cakupan organisasi pemuda masih sangat sempit.

2.4.2.14. Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Data statistik senantiasa dilakukan update, guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan murah, data ini telah dipublikasikan melalui website Satu Data Kabupaten Banyumas *dimassatria.banyumaskab.go.id*. Adapun penyusunan data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah statistik sektoral, yang disusun dalam buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas setiap tahun.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengembangkan basis data untuk satu data Kabupaten Banyumas sesuai prinsip SDI yaitu Standar Data, Metadata, interoperabilitas, dan Kode Referensi. Dalam implementasinya di daerah, SDI mengamanatkan agar pemerintah daerah dapat menyediakan data yang sinkron dengan kebutuhan perencanaan dan data geospasial yang optimal. Pengembangan basis data tersebut diharapkan dapat menyediakan data yang berkualitas dengan penguatan pengelolaan statistik sektoral Kabupaten Banyumas dan terintegrasi dengan penyeragaman pola. Dalam rangka pengembangan satu data Kabupaten Banyumas telah disusun regulasi berupa Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Banyumas, dan telah dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 487.22/722 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

Tabel berikut menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik Tahun 2022 dengan indikator kinerja persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah telah memenuhi target (capaian 100%).

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
1.	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	100	100	Sudah melampaui target 2022 (100%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Tabel di atas menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik Tahun 2022 dengan target indikator kinerja persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah telah melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD (capaian 100%).

2.4.2.15. Persandian

Untuk keamanan data dan informasi merupakan kebutuhan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Keamanan SPBE merupakan bagian dari arsitektur SPBE. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah diperlukan pengamanan data pemerintah. Tantangan dalam keamanan informasi justru dikarenakan kurangnya *awareness* dari pengguna terhadap keamanan informasi, di antaranya jarang sekali pengguna mengubah *password* untuk login sistem informasi dari *password default* yang disediakan admin.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Sampai

dengan Tahun 2022, sebanyak 36 OPD di Kabupaten Banyumas telah menggunakan layanan keamanan informasi.

Untuk pemenuhan standar keamanan informasi dilaksanakan audit keamanan data ISO 27001. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola data dan informasi telah mampu memenuhi standarisasi keamanan data ISO 27001. Untuk keperluan standarisasi pusat data/*data center* pada tahun 2022 telah dilaksanakan audit pusat data/*data center*.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi selain memberikan kemudahan juga dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan. Pemerintahan Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara pemerintahan berbasis elektronik berkewajiban untuk menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 555/562 Tahun 2021 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas, untuk menjamin sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat beroperasi secara terus menerus, dan menyediakan mekanisme untuk penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden kerawanan dan ancaman siber.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian berdasarkan Evaluasi RKPD Tahun 2022 menunjukan target indikator program telah tercapai, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.104						
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022						
No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah		3	3	3	Sudah melampaui target 2022 (100%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian berdasarkan Evaluasi RKPD Tahun 2022 menunjukkan target indikator program telah melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.2.16. Kebudayaan

Banyumas memiliki bermacam-macam kebudayaan yang beragam mulai dari cagar budaya, kesenian, tradisi, maupun kearifan lokal. Kebudayaan yang beragam ini harus dilestarikan karena merupakan identitas kolektif atau jatidiri masyarakat Banyumas. Selain itu, keunikan kebudayaan Banyumas dapat menjadi potensi untuk mendukung sektor pariwisata lewat pemanfaatan kebudayaan. Berikut data perkembangan pembangunan kebudayaan Kabupaten Banyumas 2018 hingga 2022:

Tabel 2.105
Perkembangan Pembangunan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	24	25	30	20	38
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	6	6	6	21	16
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	60	102	63
4.	Jumlah grup kesenian (kelompok)	1.633	1.717	1.079	1.160	2.494
5.	Jumlah grup kesenian yang telah dibina (kelompok)	157	200	201	201	133
6.	Jumlah seniman (orang)					
	Penari	1.529	8.520	8.525	8.600	1.491

	Pemain teater	900	7.400	7.405	7.500	332
	Pelukis	112	112	112	112	112
	Pemusik	5.983	6.300	6.300	6.500	1.664

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2022

Dalam rangka pelestarian budaya, penyelenggaraan festival seni dan budaya sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 pelaksanaan festival budaya mengalami kenaikan. Akan tetapi kenaikan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang mengalami penurunan 5 unit dari tahun sebelumnya.

Selain pelestarian seni dan budaya, upaya lain yang dilakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah melakukan pelestarian benda, situs, dan Kawasan cagar budaya. Pada tahun 2022 jumlah objek benda/situs/cagar budaya yang terlestarikan menurun sebesar 38% atau hanya mencapai 63 objek terlestarikan. Jumlah ini masih belum optimal karena belum semua objek benda/situs/cagar budaya dapat dilestarikan. Hal ini terkendala oleh aturan terkait pendanaan pengelolaan cagar budaya yang hanya bisa didapatkan oleh cagar budaya berstatus aset daerah. Sementara, masih banyak cagar budaya yang bukan tergolong aset pemerintah daerah.

Pelaku seni di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Pada 2018 tercatat ada 1.633 grup kesenian, kemudian bertambah di tahun 2020 sebesar 5,14% menjadi 1.717. Pada 2022, grup kesenian menurun menjadi 1.079 kelompok. Penurunan terjadi karena banyaknya pegiat seni yang beralih profesi pada saat Pandemi Covid-19. Grup kesenian kembali meningkat pada dua tahun terakhir, pada 2022 jumlah kelompok kesenian tercatat mencapai 2.494 kelompok.

Peningkatan jumlah kelompok seni tidak diikuti oleh pelaksanaan pembinaan kelompok seni yang dilaksanakan. Pada tahun 2022 kelompok seni yang terbina hanya 5,33% dari total seluruh kelompok seni di Banyumas. Sementara itu, penurunan justru terjadi terjadi pada jumlah pelaku seni. Pada 2022 tercatat ada 1.491 orang penari, 332 orang pemain teater, 112 orang pelukis, dan 1.664 orang pemusik. Penurunan ini mengharuskan pemerintah kabupaten untuk berupaya lebih keras dalam melakukan pembinaan kelompok seni dan pelatihan individu. Banyaknya pelaku seni juga dapat menjadi potensi untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan Ekonomi Kreatif dan memberikan pelatihan pembuatan konten kreatif.

Tabel 2. 110
 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
 Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	DINPORABUDPAR					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
1.	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100	89.69	80.41	Realisasi tidak mencapai target 2022 (89.69%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional					
2.	Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	100	90.57	100	Realisasi sudah melampaui target 2022 (90.57%) dan target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
3.	Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	40	32	31.74	Realisasi tidak mencapai target 2022 (32%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (40%)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
4.	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	100	100	98	Realisasi tidak mencapai target 2022 (100%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, capaian kinerja tahun 2022 cukup baik. Meskipun hanya 25% saja indikator yang sudah mencapai target, capaian kinerja indikator lainnya cukup tinggi meskipun belum mencapai target tahunan. Untuk mencapai target akhir RPJMD, perlu adanya upaya lebih keras dalam melakukan revitalisasi dan inventarisasi kebudayaan. Peningkatan koordinasi dan pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan pelaku kebudayaan dapat dilaksanakan

lebih intensif untuk mendukung usaha tersebut. Sementara itu, upaya lain yang perlu dilaksanakan adalah pemerataan pelestarian budaya. Diharapkan pelestarian budaya menyeluruh ke semua jenis budaya sehingga target akhir RPJMD dapat terwujud. Upaya lainnya adalah menambah koleksi museum yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Dengan mengejar target 100%, Diharapkan museum di Banyumas dapat menggambarkan seluruh kebudayaan di Kabupaten Banyumas. Selain itu, untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal, perlu dioptimalkan juga pembinaan sejarah lokal Kabupaten Banyumas. Pada 2022, kegiatan pembinaan sejarah lokal baru terlaksana satu kali saja.

2.4.2.17. Kearsipan

Untuk mendukung Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraannya sesuai dengan NSPK (Norma Standar Pedoman dan Kriteria) diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan Pembinaan Teknis Pengelolaan Kearsipan. Pada tahun 2022, sebanyak 352 orang telah mengikuti bintek kearsipan. Maka sampai dengan tahun 2022, total SDM yang telah mengikuti bintek kearsipan sebanyak 1.074 orang. Selain bintek kearsipan yang dilakukan untuk pengelolaan arsip adalah pengelolaan arsip secara baku/sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Kabupaten Banyumas telah memiliki Depo arsip sebanyak 1 (satu) unit sebagai tempat untuk penyimpanan arsip statis dan arsip inaktif, dengan kapasitas sekitar 13.000 box arsip dan sampai dengan tahun 2022 sudah menampung arsip sebanyak 2.865 box arsip atau sekitar 22,04% yang terdiri dari arsip statis sebanyak 1.495 box arsip dan arsip inaktif sebanyak 1.370 box arsip sebagai upaya untuk perlindungan dan penyelamatan arsip.

Sumber daya manusia pengelola kearsipan yang ada di Dinas Arsip dan perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas dari Tahun 2018-2022 ada 3 orang fungsional arsiparis. Sedangkan untuk pengelolaan arsip statis dan dinamis di 29 OPD di Kabupaten Banyumas, sangat diperlukan tenaga arsiparis di masing-masing OPD.

Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Banyumas sudah cukup bagus dengan nilai 86 di tahun 2020 namun nilai tersebut hanya memperhitungkan penilaian eksternal dari ANRI melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Kearsipan Daerah. Mulai tahun 2021 Nilai Penyelenggaraan Kearsipan tidak hanya memperhitungkan penilaian eksternal namun juga penilaian internal yaitu penilaian dari Lembaga Kearsipan Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas sehingga nilai turun menjadi 62,92. Dan pada tahun 2022 nilai penyelenggaraan kearsipan terdapat peningkatan dengan nilai 64.35 atau ada kenaikan nilai sebesar 1,43.

Dinas Arsip dan perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan bintek kearsipan pada 2022 sebanyak 192 orang dan juga melaksanakan fasilitasi ke unit pencipta arsip sebanyak 19 unit pencipta arsip serta melaksanakan audit kearsipan sebanyak 32 unit pencipta arsip.

Rincian capaian indikator kinerja Pengelolaan kearsipan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106
Kinerja Kearsipan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2022

No	Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	67	75	86	62.92	64.35
2.	Depo Arsip	Unit	1	1	1	1	1
3.	Tenaga Arsiparis Tingkat Terampil	Orang	2	2	2	3	3
4.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	54	205	115	273	291
5.	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas	%	8,13	27,82	40	60,3	99.39
6.	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	5,5	10,92	14,5	21,43	50

No	Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
7.	Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	%	5,5	10,92	14,5	42,86	58.93
8.	Jumlah pencipta arsip yang difasilitasi	SKPD	10	30	25	18	19
9.	Jumlah pencipta arsip yang diawasi	SKPD	NA	10	8	37	32

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang kearsipan dalam target akhir RPJMD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 program dengan 2 target indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.107
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
1.	Persentase unit kerja / OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	%	35	27	58,93	Melampaui target 2022 (27%) dan target akhir RPJMD (35%)
2.	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%	77	65	99,39	Melampaui target 2022 (65%) dan target akhir RPJMD (77%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Kearsipan dari 2 target indikator, seluruhnya sudah melampaui target 2022 dan target akhir RPJMD.

2.4.2.18. Perpustakaan

Pembinaan Perpustakaan

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa agar tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas.

Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 telah mempunyai tenaga pustakawan sebanyak 3 orang yang terdiri dari pustakawan ahli madya 3 orang.

Kabupaten Banyumas memiliki 938 perpustakaan. Banyaknya perpustakaan yang ada di Kabupaten Banyumas belum diimbangi dengan jumlah pengelola perpustakaan yang memadai. Selama ini pengelolaan perpustakaan desa di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh perangkat desa, belum dikelola oleh tenaga ahli keperpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terus meningkat dari tahun 2017-2019, namun di tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami penurunan dikarenakan adanya pembatasan kunjungan Perpustakaan daerah dan perpustakaan lainnya di Kabupaten Banyumas.

Namun demikian tahun 2021 dengan mulai terkendalinya pandemi, maka mulai dibukanya kembali kunjungan ke perpustakaan walaupun masih dengan pembatasan, sehingga jumlah pengunjung naik pada tahun 2021 yaitu sebesar 751.157 orang, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 1.172.348 orang.

Perpustakaan Daerah sudah menyediakan layanan perpustakaan digital, sehingga pengunjung yang tidak dapat berkunjung langsung ke perpustakaan daerah dapat berkunjung secara *online* melalui perpustakaan digital.

Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah maka dilakukan penambahan koleksi buku. Pada tahun 2019 penambahan koleksi buku sebanyak 56.407 buku, meningkat menjadi 61.335 pada tahun 2020 namun tidak ada penambahan pada tahun 2021. Tahun 2022 bertambah lagi sebanyak 792 buku. Selain penambahan koleksi buku, juga telah ada penambahan koleksi *e-book* sebanyak 1 (satu) paket pada tahun 2021 dan 1 (satu) paket pada tahun 2022, serta peningkatan data koleksi digital menjadi 491 judul atau 1.170 eksemplar pada tahun 2021, dan bertambah 191 judul/eksemplar pada tahun 2022. Peningkatan unggahan

video *resource*/sumber pembelajaran masyarakat yang diunggah di web/aplikasi perpustakaan digital Banyumas. Hal ini juga didukung dengan penyediaan fasilitas berupa Internet Gratis, serta fasilitas WIFI/*Hotspot* secara gratis/*free access* di perpustakaan daerah untuk peningkatan pelayanan.

Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas juga menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku dan aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Data Perpustakaan), dimana dalam layanannya disinergikan dengan layanan Silang Terpadu yaitu layanan pesan antar peminjaman buku antar perpustakaan serta aplikasi iPusda Banyumas (Perpustakaan Digital). Aplikasi iPusda Banyumas merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dilengkapi fitur social media, bisa diakses melalui *smartphone*, tablet, laptop dan desktop dalam layanannya berbasis buku elektronik. Jumlah peminjaman buku pada aplikasi iPusda cenderung meningkat.

Dalam rangka mendorong indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melakukan optimalisasi Taman Baca Masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang langsung membawahi taman baca, serta melakukan koordinasi dengan pegiat literasi yang tergabung dalam forum Taman Baca Masyarakat.

Akses literasi terdiri dari perpustakaan daerah, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas dan perpustakaan sekolah. Bagi sebagian masyarakat terutama di desa terpencil yang jauh dari akses literasi dapat diatasi dengan menciptakan perpustakaan keliling dari satu tempat ke tempat lain agar seluruh lapisan masyarakat terutama kaum milenial, termasuk yang bertempat tinggal di tempat atau daerah terpencil, bisa merasakan manfaat membaca.

Akses literasi juga dapat dijangkau melalui penggunaan internet, diantaranya guna membaca daring, mengakses situs e-book (buku digital), maupun media online lainnya.

Pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan Dana Desa untuk membangun perpustakaan di wilayahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016.

Capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.108
Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Kondisi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	897	897	919	938	1025
	Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
	Perpustakaan keliling	6	6	5	4	4
	Perpustakaan Sekolah	798	798	820	821	821
	Perpustakaan Desa	53	53	53	66	69
	Perpustakaan Rumah ibadah	4	4	4	4	4
	Taman Bacaan Masyarakat	18	18	19	19	103
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	17	17	17	17	17
	Perpustakaan Khusus	NA	NA	NA	6	6
2.	Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang)	15.403	17.396	17.361	19.816	21164
3.	Jumlah peminjam buku perpustakaan Daerah pertahun (orang)	36.308	32.865	4.594	36.260	4551
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang)	1.009.646	1.332.677	587.339	751.157	1.172.348
	- Perpustakaan Daerah	63.224	80.030	51.806	23.000	91.183
	• Kunjungan langsung				8.182	19.703
	• Kunjungan online				14.818	71480
	- Perpustakaan keliling	25.338	20.535	-	2.055	15.535
	- Perpustakaan Sekolah SD/MI	137.227	268.084	140.918	70.890	182.594
	- Perpustakaan SMP	248.612	369.588	300.510	139.168	204.091
	- Perpustakaan SMA	227.210	101.894	78.540	11.896	184.880
	- Perpustakaan Perguruan Tinggi	296.787	481.246	14.141	501.328	492.652
	- Taman Bacaan Masyarakat	11.228	11.300	1.424	2.820	1.101
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	53.164	56.407	61.335	61.335	58.405
6.	Jumlah koleksi <i>e-book</i> yang tersedia	NA	NA	1	2	1
7.	Jumlah Data Koleksi Digital					
	- Judul	NA	NA	140	507	191
	- Eksemplar	NA	NA	280	1014	191
8.	Jumlah peminjaman buku perpustakaan digital	NA	20	52	152	570
9.	Persentase Jumlah Perpustakaan Terbina (%)	NA	NA	19,80	3,84	5.36
10	Jumlah Perpustakaan yang aktif	NA	NA	NA	57	110
	Jumlah Perpustakaan yang dibina atau dimonitoring dan dievaluasi	76	15	182	36	55

No	Kondisi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
11	Jumlah Kerjasama Pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan	NA	NA	21	29	36
12	Jumlah kegiatan literasi yang difasilitasi	NA	6	6	12	8

Sumber : Dinarpusda Kabupaten Banyumas, 2022

Sedangkan Kinerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dalam target akhir RPJMD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 program dengan 2 target indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Kinerja urusan pemerintahan bidang perpustakaan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
1.	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	250	225	1.144	Melampaui target 2022 (225 orang) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (250 orang)
2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Nilai	82.30	82.27	82.3	Melampaui target 2022 (82.27) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (82.30%)
3.	Persentase Naskah Kuno milik masyarakat yang dialihmediakan	%	40	20	20	Mencapai target 2022 (20%) namun belum mencapai target akhir RPJMD (40%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2021. Capaian kinerja bidang Perpustakaan dari 3 target indikator, sebanyak 2 target indikator sudah melampaui target 2022 sekaligus target

akhir RPJMD. Namun masih ada 1 target indikator walaupun sudah mencapai target 2022, tapi belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.3.1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 sebanyak 12.553,02 ton dimana mengalami peningkatan sebesar 4,10% dari tahun 2021. Namun, tingkat produksi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar 65.782,37 ton dengan tingkat Konsumsi Ikan pada 2022 sebesar 34,25 kg/kapita/tahun. Produksi ikan di Kabupaten Banyumas berasal dari budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Tahun 2022 produksi budidaya tidak mengalami kenaikan yang signifikan karena kawasan untuk budidaya perikanan yang cenderung stagnan. Sedangkan untuk perikanan tangkap pada tahun 2022, jumlah ikan yang ter-*stocking* hanya 20 kawasan atau 13,47% dari total jumlah perairan yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan survei untuk memastikan jumlah ikan yang harus di *stocking* di setiap kawasan selain itu juga disebabkan oleh terjadinya *Flushing* dari Waduk Mrican, yang mengakibatkan polusi pada perairan sungai Serayu dan berdampak kematian ikan.

Untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, di Kabupaten Banyumas terdapat unit usaha pengelolaan ikan dan produksi olahan perikanan yang cukup besar, namun bahan bakunya sebagian masih berasal dari luar Kabupaten Banyumas. Saat ini, jumlah informasi tentang usaha olahan hasil perikanan masih rendah. Hal ini didukung oleh usaha olahan hasil perikanan yang terdata berizin dan bersertifikat masih sangat rendah.

Perkembangan produksi perikanan, konsumsi ikan, dan banyaknya penebaran ikan di perairan umum di Kabupaten Banyumas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan dan Penebaran Ikan
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi perikanan (ton)	11.121,0	11.670,2	11.850,2	12.058,2	12.553,0

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)	14,33	21,00	22,39	28,35	34,25
3	Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.)	515.000	210.000	275.000	150.000	110.000
4	Produksi Budidaya Perikanan (ton)	10.249	10.767	10.931	11.120	11.600
5.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	872	902,85	926,55	938	953,05
6.	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit usaha)	N/A	168	139	148	328
7.	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	N/A	178,35	188,50	198,48	204,92

Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	DINKANNAK					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2831,31	942,32	953,05	Realisasi 2022 sudah melampaui target (942,32 ton) dan <i>on track</i> untuk pencapaian target RPJMD (2831,31 ton)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.959,8	11.261,8	11.600,0	Realisasi 2022 sudah melampaui target (11.261,8 ton) dan <i>on track</i> untuk pencapaian target RPJMD (33.959,8 ton)
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
3.	Persentase Perairan Umum Yang Ter <i>Restocking</i> Ikan	%	10	10	13,47	Realisasi 2022 sudah melampaui target 2022 (10%) dan target RPJMD (10%)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
4.	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	588,49	196,14	204,92	Realisasi 2022 sudah melampaui target (196,14 ton) dan sudah <i>on track</i> untuk pencapaian target RPJMD (588,49 ton)
5.	Peningkatan angka konsumsi ikan*	%	0.10	0.10	5.93	Realisasi 2022 sudah melampaui target 2022 (0,10%) dan target RPJMD (0,10%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022 capaian kinerja bidang Kelautan dan Perikanan sudah sangat baik. Dari 5 indikator yang ditetapkan, realisasi sudah melampaui target tahun 2022. Sementara itu untuk produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, dan produksi olahan hasil perikanan sudah *on track* dalam upaya mencapai target RPJMD pada 2023 nanti.

2.4.3.2. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam. Pada umumnya, lokawisata di Kabupaten Banyumas mudah dijangkau karena telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, masih banyak potensi wisata yang belum tergali dengan optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Beberapa objek wisata yang perlu dikembangkan antara lain : Kawasan Wisata Baturraden, Kawasan Kota Tua Banyumas, Taman Rekreasi Nirwana Manggala, Bendung Gerak Serayu, Wana Wisata, Goa Sarabadak, Telaga Sunyi, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Pemandian Kalibacin, Bukit Kendalisada, Museum BRI, dan Museum Wayang.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas, disusun kajian One District One Destination (ODOD) yaitu

konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan serta kajian Revitalisasi Kota Lama Banyumas. Lebih lanjut, Kabupaten Banyumas juga telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) Tahun 2018-2033 yang menetapkan Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Tabel 2. 117
 Jumlah Kunjungan Wisata, Lama Tinggal Wisatawan
 dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Pariwisata Kabupaten Banyumas
 Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN					
		Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	Orang	2.363.002	3.580.743	1.866.157	1.498.236	2.656.579
2.	Daya tarik wisata	Objek	24	35	101	89	92
3.	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1	1	1	1	2
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	1	1	1	0	2
5.	Hotel (buah)						
	- Hotel bintang	buah	4	15	16	16	17
	- Hotel non bintang	buah	211	168	168	201	201
6.	Promosi pariwisata	kali	80	80	90	101	103
7.	SDM Pariwisata tersertifikasi	orang	N/A	36	216	292	452
8.	Pelaku Ekonomi Kreatif	orang	N/A	N/A	N/A	89	77

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2022

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Kurun waktu 2018-2019, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata

menunjukkan peningkatan, sedangkan mulai tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang disebabkan pandemi Covid-19. Pada 2022, kunjungan wisatawan di Kabupaten meningkat hingga 77,3% dengan jumlah 2.656.579 wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisata tidak lepas dari meningkatnya daya tarik wisata pada tahun 2022. Pada 2022, daya tarik wisata di Kabupaten Banyumas mencapai 92 daya tarik wisata, meningkat 3,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penambahan jumlah daya tarik wisata tidak diimbangi dengan peningkatan promosi wisata dan pelayanan wisata yang optimal. Lebih lanjut, pada 2022 pelaksanaan promosi wisata dilaksanakan sebanyak 130 kali. Sejak tahun 2018 sudah terlaksana promosi wisata sebanyak 481 kali baik dilaksanakan secara konvensional maupun lewat media digital. Dalam pelaksanaannya, hanya 68,48% objek wisata yang memiliki akun promosi mandiri berupa media sosial (*Instagram*) yang konsisten melakukan promosi wisata. Jika dilihat dari pelayanan wisata, SDM kepariwisataan yang tersertifikasi pada tahun 2022 mencapai 452 orang.

Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2018-2021. Pada November 2022, terjadi peningkatan rata-rata lama menginap tamu domestik maupun mancanegara. Rata-rata lama menginap tamu domestik mencapai angka 1,32 sedangkan rata-rata lama menginap mancanegara mencapai angka 1,70. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan optimalisasi potensi seperti paket wisata untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan. Infrastruktur pendukung seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia.

Melihat potensi dan tantangan yang ada, diperlukan adanya rangkaian event terintegrasi antar sektor (olahraga, UMKM, seni budaya) maupun antar objek wisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan. Selain itu, peningkatan dapat diupayakan dengan meningkatkan variasi objek wisata dan meningkatkan daya tarik objek wisata dengan ciri khas masing-masing agar menambah pilihan berwisata para wisatawan. Sejauh

ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam dan buatan. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan *heritage* belum tergarap maksimal. Belum tepat sasaran promosi baik digital maupun konvensional juga harus diperhatikan lebih. Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama antar daerah dengan membuat paket wisata antar daerah.

Dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, potensi lain yang dapat dioptimalkan adalah Ekonomi Kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif dilaksanakan pada 17 subsektor yaitu : aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film/animasi/video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi/radio. Dari 17 subsektor yang ada, Pada 2021, tercatat ada total 89 pelaku ekonomi kreatif dengan rincian 2 pelaku subsektor aplikasi, 67 pelaku subsektor kriya (bambu), 20 pelaku subsektor seni pertunjukan. Pada 2022, bertambah 77 pelaku ekonomi kreatif baru dengan rincian 40 pelaku subsektor film, 13 pelaku subsektor kriya (*ecoprint*), 24 pelaku subsektor kuliner (barista). Total dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 tercatat 166 orang menjadi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. 118

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2021		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	DINPORABUDBAR					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1.	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100	66,7	100	Realisasi sudah melampaui target 2022 (66,7%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

2.	Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	97,9	73	100	Realisasi sudah melampaui target 2022 (73%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (97,9%)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
3.	Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	33,3	32,7	38,4	Realisasi sudah melampaui target 2022 (32,7%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (33,3%)
4.	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100	80	113	Realisasi sudah melampaui target 2022 (80%) dan sudah melampaui target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, capaian kinerja tahun 2022 cukup baik. Dari empat indikator yang ada, semuanya sudah melampaui target tahunan dan target RPJMD. Namun perlu adanya upaya lebih untuk terus meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Banyumas. Perlu adanya inovasi dalam hal promosi wisata. Pada pelaksanaannya, promosi konvensional harus di barengi dengan promosi digital yang lebih masif, konsisten, dan tepat sasaran. Bentuk promosi harus disesuaikan dengan target pasar masing masing jenis objek wisata sehingga peningkatan kunjungan wisata akan lebih optimal. Peningkatan perlu dilakukan dalam pelayanan objek wisata seperti membuat SOP pariwisata dan melengkapi fasilitas serta sarpras pendukung objek wisata. Lebih lanjut, perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kepariwisataan lewat pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, untuk memajukan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas, perlu adanya pendataan pelaku Ekonomi Kreatif agar pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banyumas lebih tepat sasaran.

2.4.3.3. Pertanian

Komoditas pertanian Kabupaten Banyumas meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura perkebunan dan peternakan. Komoditas utama tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai, komoditas hortikultura Durian, Pisang dan Cabai. Sementara itu untuk komoditas perkebunan meliputi Kelapa, Cengkeh dan Kopi.

Melihat dari aspek produktivitas, komoditas padi, jagung dan kedelai mengalami penurunan untuk ketiga komoditas tersebut. Hal tersebut menyebabkan stagnasi produksi tanaman pangan utama di Kab. Banyumas. Sementara itu produksi hortikultura pada 2022 untuk komoditas pisang mengalami peningkatan dibandingkan 2021 (naik 34%), berbanding terbalik dengan komoditas durian yang mengalami penurunan cukup tajam (turun -37%). Sementara itu, produksi komoditas perkebunan 2022 terutama kelapa mengalami peningkatan baik kelapa dalam (naik 6%) maupun kelapa deres (naik 2%).

Pengembangan sektor pertanian juga menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya kualitas SDM pertanian. hal ini ditunjukkan dengan beberapa data utama antara lain: pendidikan petani rendah, usia petani yang menua (SUTAS BPS 2018: 64,2% petani berusia diatas 45 tahun). Hal tersebut menyebabkan sulit dalam adaptasi dan penerapan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien. Sementara itu, melihat dari aspek nilai tambah sektor pertanian, salah satu andalan ekspor Kabupaten Banyumas yaitu gula kelapa justru mengalami penurunan volume ekspor menjadi 11.218 ton pada tahun 2022 atau turun 11 persen dibandingkan 2021 (12.648 ton). lemahnya sarana prasarana pengolahan serta pemasaran dan terbatasnya bimbingan teknis yang konsisten dan berkesinambungan menjadi permasalahan utama lemahnya nilai tambah sektor pertanian tersebut.

Tabel 2.112
Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produktivitas Tanaman Pangan					
	Tanaman Padi (ton/ha)	4,69	5,71	5,81	5,84	5,80
	Jagung (ton/ha)	6,50	7,50	6,12	6,40	6,30
	Kedelai (ton/ha)	1,34	1,28	1,25	1,70	1,50
2.	Produksi Hortikultura:					
	Durian (ton)	12.751	15.559	6.159	5.689	3.591
	Pisang (ton)	27.749	30.781	31.375	25.337	33.883
	Cabe Merah (ton)	1.724	1.376	2.000	1.510	1.578
3.	Produksi Tanaman Perkebunan					
	Cengkeh (ton)	484	495	533	523	500
	Kelapa Dalam (ton)	13.905	14.109	14.331	14.331	15.148
	Kelapa Deres (ton)	53.408	54.985	55.884	55.884	57.058

Sumber : Dinptertan KP Kabupaten Banyumas 2023

Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, sapi perah, ayam, kambing dan domba, selama kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan produksi yang fluktuatif. Perkembangan populasi ternak, produksi hasil ternak, angka kesakitan dan kematian ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113
Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak 2018-2022

No	Komoditas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Populasi Produksi komoditas Peternakan Utama (Ekor)					
	Sapi Potong	14.350	14.661	15.253	15.714	16.186
	Sapi Perah	2.279	2.287	2.427	2.499	2.572
	Kambing	165.276				

No	Komoditas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Ayam Ras Pedaging	8.208.000	11.741.324	11.706.590	9.387.741	9.668.761
	Ayam Buras / Kampung	1.053.940	1.071.354	1.189.202	1.224.878	1.260.438
2.	Produksi Daging (Ton)					
	Sapi	3.555	1.700	1.700	1.768	1.841
	Kambing	1.127	813	556	582	600
	Domba	92	853	75	88	91
	Ayam Buras / Kampung	812	3.141	701	372	384
	Ayam Pedaging	11.880	14.025	18.447	20.113	20.729
3.	Produksi Susu (liter)	3.572.900	3.658.567	3.862.424	4.002.105	4.236.953
4.	Produksi Telur (ton)	15.421	17.286	17.900	18.389	18.940

Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2022

Dalam pengembangan subsektor peternakan, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan, baik hijauan pakan ternak maupun pakan konsentrat. Selama ini, peternak menghadapi permasalahan utama pakan ternak yang sulit diperoleh dengan harga yang terjangkau.

Di dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian, terdapat sub urusan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Beberapa kinerjanya adalah sebagai berikut:

Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH)

Untuk menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1) pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama); 2) pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia; dan 3) pemantauan dan surveilans penyakit hewan

dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* di daerah asal hewan.

Kabupaten Banyumas memiliki 10 unit RPH yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Jumlah pemotongan hewan ternak di RPH dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan di RPH terdapat aturan yang melarang pemotongan untuk betina produktif. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Jumlah Pemotongan Hewan di RPH Tahun 2018-2022

NO	RPH	PEMOTONGAN (ekor)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cilongok	1.766	1.980	1.707	1.822	1.117
2	Ajibarang	2.588	2.319	1.742	2.106	1.924
3	Sumpiuh	1.961	1.918	1.700	1.456	1.271
4	Sokaraja	4.362	3.431	2.692	2.631	2.386
5	Wangon	4.063	1.852	1.188	1.379	1.737
6	Tambaksari	3.198	2.975	2.548	1.082	1.574
7	Banyumas	-	-	-	-	-
8	Kembaran	-	-	-	-	-
9	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-
10	Purwokerto Barat	183	292	-	-	-
	JUMLAH	18.121	14.767	11.577	10.476	10.009

Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2022.

Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal telah dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan merupakan unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas (UPTD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan dalam kewenangan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. UPTD Puskeswan mempunyai tugas berupa: a) pelaksanaan penyehatan hewan; b) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; c) pelaksanaan epidemiologi; d) pelaksanaan

informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; e) pemberian pelayanan jasa veteriner.

Tabel 2.115
 Penanganan Penyakit Hewan

Tahun	Kasus Penyakit Hewan yang ditangani		
	Sapi	Kambing/Domba	Jumlah
2019	4.409	3.009	7.418
2020	4.278	2.814	7.092
2021	4.139	2.286	6.425
2022	4.343	2.463	6.806
JUMLAH	17.169	10.572	27.741

Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2022

Tabel 2.116
 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2021

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	DINPERTAN KP					
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
1	Peningkatan Populasi Ternak	%	3	3	2,98	Realisasi belum melampaui target 2022 (3%) dan RPJMD (3%)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

2	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	20	20	Realisasi sudah mencapai target 2022 (20%) dan RPJMD (20%)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
3	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Doku men	3	1	1	Realisasi 2022 sudah mencapai target 2022 (1 Dokumen) dan on track untuk mencapai target RPJMD (3 Dokumen)
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						
4	Persentase usaha peternakan yang berizin	%	1	1	50	Realisasi sudah mencapai target 2022 (1%) dan RPJMD (1%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
5	Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian	%	50	50	56,36	Realisasi sudah mencapai target 2022 (50%) dan RPJMD (50%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
6	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian	%	50	50	108,33	Realisasi sudah mencapai target 2022 (50%) dan RPJMD (50%)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
7	Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani	%	60	50	100	Realisasi sudah mencapai target 2022 (50%) dan RPJMD (60%)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
8	Cakupan bina kelompok petani	%	100	93,11	100	Realisasi sudah mencapai target 2022 (93,11%)

						dan target RPJMD (100%)

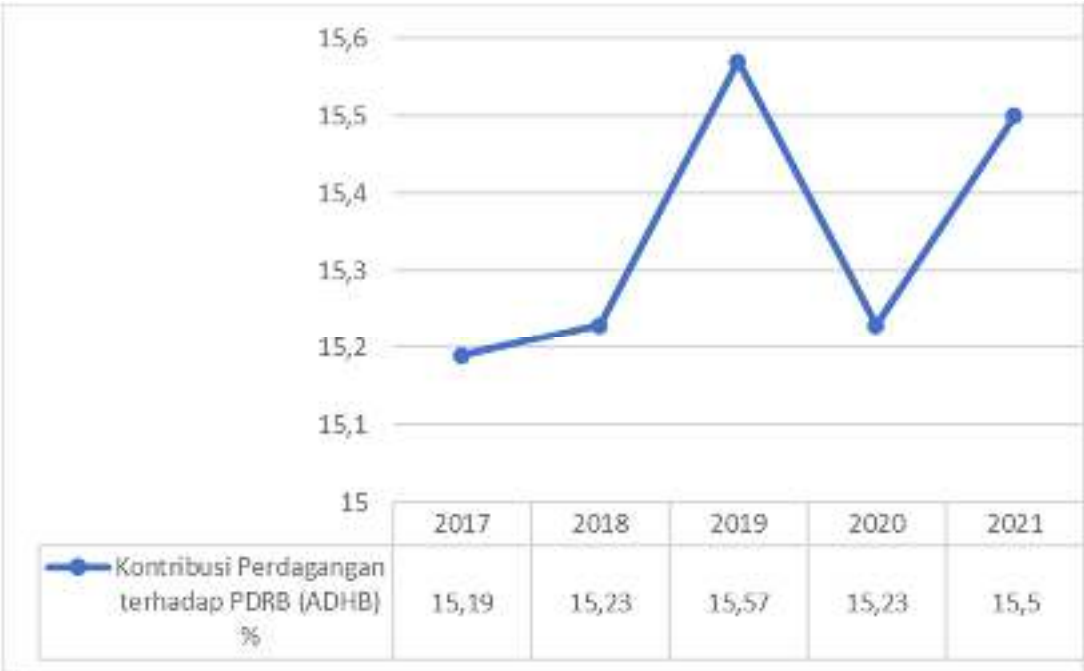
Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022 capaian kinerja bidang pertanian sudah sangat baik. Dari 8 indikator yang ditetapkan, realisasi sudah melampaui target tahun 2022. Sementara itu untuk Dokumen Peta sebaran penyakit hewan sudah *on track* dalam upaya mencapai target RPJMD pada 2023 nanti.

2.4.3.4. Perdagangan

Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, perdagangan skala kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah dapat meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah. Peran Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,50 persen naik 0,26 poin dibanding tahun 2020. Kontribusi PDRB pada kategori perdagangan paling tinggi di tahun 2019 sebesar 15,57 namun turun di 2020 dikarenakan pandemi covid 19 dan naik kembali di tahun 2021. Lebih rinci perkembangan kontribusi PDRB pada kategori perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor periode 2018-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

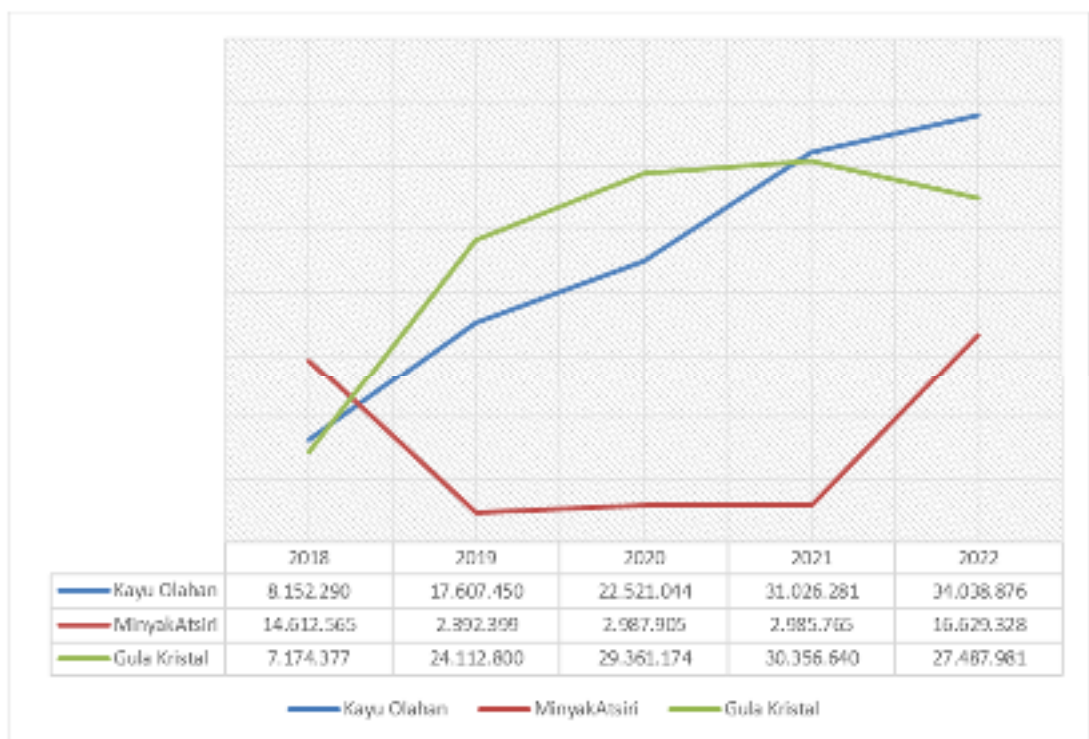


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2022

Gambar 2.60
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Nilai ekspor

Nilai ekspor di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang baik. Nilai ekspor 2022 mencapai US\$ 78 juta, dengan ekspor tertinggi adalah kayu olahan (US\$ 34,0 juta), gula kristal (US\$ 27,5 juta) dan minyak atsiri (US\$ 16,6 juta).



Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2023

Gambar 2.61
 Nilai Ekspor Komoditas Utama Menurut Komoditas Tahun 2018-2022

Terkait dengan peningkatan nilai tambah dapat ditingkatkan melalui aspek penggunaan produk dalam negeri. Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dan menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 510/367 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dimana sebagai upaya meningkatkan kecintaan, kebanggaan dan penggunaan produk dalam negeri sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah melalui perbaikan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri serta mampu bersaing dengan produk impor.

Pasar Rakyat

Dalam rangka memperkuat peran pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Pemerintah pusat dan swasta melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. diantaranya adalah pasar modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana prasarana Perdagangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.117
Prasarana Perdagangan di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Prasarana Perdagangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit)	101	101	101	103	133
2	Jumlah pasar tradisional (unit)	25	25	26	26	26

Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2023

Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 sebanyak 26 unit. Pasar tradisional dibangun dalam rangka menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, untuk itu perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 103 unit tahun 2021 menjadi 133 unit pada tahun 2022. Untuk pasar modern tersebut tersebar di pusat-pusat perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah.

Kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022			Interpretasi
				Target	Realisasi		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	DINPERINDAG						
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	85,19	84,95	87,74	Realisasi sudah melampaui target 2022 (84,95%) dan target akhir RPJMD (85,19%)	

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
2	Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	100	100	147,17	Realisasi sudah melampaui target 2022 (100%) dan target akhir RPJMD (100%)
3	Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan	%	52	50	96,06	Realisasi sudah melampaui target 2022 (50%) dan target akhir RPJMD (52%)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
4	Koefisien variasi harga barang	%	15	15	9,06	Realisasi sudah melampaui target 2022 (15%) dan target akhir RPJMD (15%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
5	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD	35.000.000	30.000.000	78.548.120	Realisasi sudah melampaui target 2022 (30.000.000 USD) dan target akhir RPJMD (35.000.000 USD)
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
6	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	100	99,51	170,49	Realisasi sudah melampaui target 2022 (99,51%) dan target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
7	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	0,8	0,7	1,12	Realisasi sudah Melampaui target 2022 (0,7) dan target akhir RPJMD (0,8%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Seperti terlihat pada tabel capaian kinerja diatas, dari 7 indikator program yang ada pada urusan perdagangan, semua indikator tercapai baik untuk target 2022 maupun target RPJMD.

2.4.3.5. Perindustrian

Berkembangnya industri memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangan bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas relatif cukup baik terutama industri menengah dan industri kecil dan mikro.

Iklim usaha di Kabupaten Banyumas yang semakin membaik mendorong tumbuhnya industri. Pertumbuhan industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah unit industri di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 ada sebanyak 43.182 unit kemudian meningkat menjadi 44.099 unit di tahun 2022. Namun, peningkatan jumlah unit usaha tidak diiringi dengan peningkatan jumlah izin yang dipantau dan dianalisis, dimana pada tahun 2022 nilainya sangat rendah jika dibandingkan dengan total jumlah industri yang ada 17 perusahaan saja. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri tahun 2018 ada sebanyak 104.289 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 106.348 orang. Gambaran perkembangan industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Perkembangan Industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Unit Industri	43.182	43.910	43.921	44.073	44.099
a.	Industri besar (unit)	6	6	6	6	6
b.	Industri menengah (unit)	77	77	77	77	77
c.	Industri kecil (unit)	42.447	43.099	43.827	43.990	44.016
2.	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri	104.289	104.289	105.304	106.018	106.348
a.	Industri besar (orang)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
b.	Industri menengah (orang)	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949
c.	Industri kecil (orang)	97.065	97.065	98.080	98.588	99.124
3.	Pertumbuhan jumlah Industri	0,50	1,53	1,69	2,06	0,06

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2022

Perkembangan industri di Kabupaten Banyumas terhambat oleh kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Selain itu, kurangnya perencanaan dan pembangunan industri juga mendorong terhambatnya perkembangan industri. Sementara itu, pengendalian dan pengawasan izin usaha industri di Kabupaten Banyumas juga belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sinkronisasi sistem industri serta kurangnya pengendalian dan penerbitan izin industri. Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
1.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	91	91	149.99	Realisasi sudah melampaui target 2022 (91%) dan target akhir RPJMD (91%)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
2.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terk	%	125	127	100	Realisasi belum melampaui target 2022 (127%) dan target akhir RPJMD (125%)

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
3.	Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	40	45	Realisasi sudah melampaui target 2022 (40%) dan target akhir RPJMD (40%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Seperti terlihat pada tabel capaian kinerja diatas, dari 3 indikator program yang ada pada urusan perindustrian, terdapat 2 indikator program sudah melampaui target 2022 dan target akhir RPJMD. Sementara itu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terk sudah *on track* dalam upaya mencapai target RPJMD pada 2023 nanti.

2.4.3.6. Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian kewenangan urusan pemerintahan bidang transmigrasi ditujukan bagi kabupaten tujuan transmigrasi. Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengirim hanya memfasilitasi pelayanan transmigrasi untuk masyarakat yang berminat mengikuti transmigrasi. Pemerintah Daerah mendorong program nasional transmigrasi sesuai dengan kewenangannya yaitu membuka minat penduduk Kabupaten Banyumas untuk Transmigrasi, pelatihan calon transmigrasi dan pengiriman calon transmigrasi ke Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya Provinsi Jawa Tengah mengirim ke daerah tujuan transmigrasi. Data transmigrasi sesuai kewenangan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut dari tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Jumlah pendaftar transmigrasi	13	6	5	4	15	43

2	Jumlah pelatihan calon transmigrasi	4	5	3	4	2	18
3	Jumlah pemberangkatan	4	5	0	0	2	11

Jumlah pendaftar transmigrasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 43 keluarga dan yang bisa dilatih sebagai calon transmigrasi sebanyak 18 keluarga dan yang bisa diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi sebanyak 11 keluarga. Prosentase dari jumlah yang dilatih dengan yang diberangkatkan sebesar 61,2% dimana yang dilatih ada yang mengundurkan diri dari pendaftaran dan kuota yang tersedia dari pusat juga terbatas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sub urusan transmigrasi tetap mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemerataan wilayah maka perlu untuk tetap mensosialisasikan dan memotifasi penduduk untuk ikut program transmigrasi.

Tabel 2.121
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2021		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
	DINAKERKOP DAN UKM					
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					

1.	Persentase Calon Transmigran yang Akan Ditempatkan	%	100	100	50	Tidak mencapai target 2022 (100%) juga belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Capaian kinerja bidang Transmigrasi sudah cukup baik. Pelaksanaan sudah dilaksanakan pada 2022 mencapai angka 50%. Perlu upaya keras untuk mengejar target akhir RPJMD sebesar 100%. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, pembinaan calon transmigran, melakukan monitoring baik secara luring atau secara daring, dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan transmigrasi.

2.4.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung

2.4.4.1. Sekretariat Daerah

Pada masa RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 terdapat dua aturan penilaian yaitu Peraturan MenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan MenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020. Hasil Indek Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan MenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122

Hasil Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019
A.	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,77	2,02
2	Penataan Peraturan Perundang undangan	6,00	2,40	1,96
3	Penataan dan penguatan organisasi	5,00	3,01	3,04
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,85	3,03
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,39	11,99
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,12	4,24
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,73	5,57
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,92	3,37
Total Komponen Pengungkit		60,00	36,19	35,22
B.	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,43	9,93

No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,74	5,23
3.	Survei eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,92	6,53
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei eksternal pelayanan publik	10,00	8,40	8,85
Total Komponen Hasil		40,00	30,49	33,54
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	66,68	68,76

Sumber : KemenpanRB Tahun 2019

Nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dan 2019 dengan komponen sesuai Peraturan MenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2019 menunjukkan bahwa nilainya mengalami kenaikan dari 66,68 menjadi 68,76 dengan kategori B dimana Predikat Nilai Absolut Interpretasi adalah $B > 60 - 70$ Baik, perlu sedikit perbaikan.

Untuk melihat hasil nilai Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan penilaian Peraturan MenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.123

Hasil Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20	11,62	11,75	14,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,18	6,33	6,30
	Ill. Reform	30	15,2	18,92	19,88
Total Komponen Pengungkit		80	33	37	40,18
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,17	8,25	8,49
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,48	9,09	9,65
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,63	8,4	8,58
4.	Kinerja Organisasi	10	8,79	8,38	6,18
Total Komponen Hasil		40	36,07	34,12	32,90
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100	69,07	71,12	73,08

Sumber : Kemenpan RB, 2022

Nilai Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 69,07 dengan kategori B menjadi 73,08 di tahun 2022 dengan kategori BB.

Pada komponen hasil Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.124

Capaian Komponen Hasil Pemerintah Kabupaten Banyumas

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	78,46	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	96,5	Kementerian PANRB
4	Indek Persepsi anti Korupsi (IPAK)	0-100	85,8	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	82,48	SPI Internal oleh KPK

Sumber : Kemenpan RB, 2022

Dari hasil tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi capaian Indek Reformasi Birokrasi untuk capaian tahunan telah melebihi target yang telah ditentukan namun bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023, pada tahun 2022 ini masih belum memenuhi target, yaitu baru 97,44%. Masa akhir RPJMD Kabupaten Banyumas masih dalam kurun waktu 2 tahun. Masih ada waktu untuk memperbaiki dan melaksanakan hasil rekomendasi dari Kementerian PANRB.

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan daerah pada Sekretariat daerah terwujud dalam 2 program dengan 8 indikator kinerja. Secara umum dapat dinyatakan bahwa hampir seluruh indikator kinerja di Sekretariat Daerah tercapai sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.125

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	4.23	4.22	3.44	Belum melampaui target 2022 (4.22) dan belum mencapai target akhir RPJMD (4.23)
2.	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
3.	Persentase kerjasama Daerah dan pengembangan potensi daerah yang tersusun	%	100	100	104,16	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
4.	persentase kasus kasus hukum yang ditangani	%	100	100	110	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
5.	Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
6.	Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitabel	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
7.	Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
8.	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	108	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
9.	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja pada Sekretariat Daerah dari 9 target indikator, sebanyak 1 target indikator belum melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 8 target indikator melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD. Target Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2022 adalah 4,21 dan realisasi skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah 3,44 oleh karena itu capaiannya adalah 81,71% sehingga belum tercapai target 2022.

2.4.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tingkat pelayanan kinerja Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik. Perkembangan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126
Perkembangan Capaian Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyumas 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan DPRD	%	86	98	100	100	100
2	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, 2022

Indikator program fokus layanan unsur pendukung urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD terwujud dalam 1 Program dan 5 Indikator

kinerja dan telah tercapai 100% dari keseluruhan indikatornya, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.127
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DPRD					
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
1.	Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	%	70	70	100	Melampaui target 2022 (70%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (70%)
2.	Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
3.	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
4.	Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
5.	Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dari 5 target indikator, sebanyak 5 target indikator tersebut melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.5. Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.4.5.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya di tengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tujuan berkaitan dengan bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Selaras dengan tujuan tersebut, maka fokus pelayanan bidang perencanaan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah,
2. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,
3. Penyusunan perencanaan dan pendanaan,
4. Pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan kunci utama suksesnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Di Kabupaten Banyumas ada 53 Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik dari total 56 Organisasi Perangkat daerah.

Pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas mendapat Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 7,57 dan mengalami kenaikan 0,03 pada tahun 2021. Nilai tersebut membawa Kabupaten Banyumas masuk pada peringkat sepuluh besar Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas tidak termasuk dalam peringkat sepuluh besar di Tingkat Provinsi Jawa

Tengah dalam penilaian tersebut sedangkan Provinsi Jawa Tengah hanya mengeluarkan nilai bagi peringkat sepuluh besar Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik.

Adanya penurunan nilai dari tahun sebelumnya dikarenakan belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah. Aspek kualitas dokumen perencanaan masih perlu disesuaikan dengan aspek penilaian penghargaan pembangunan daerah, dimana aspek inovasi masih perlu peningkatan dan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan.

Kabupaten Banyumas memiliki 17 program prioritas pembangunan daerah, pada tahun 2022 baru terealisasi 10 program prioritas atau sebesar 58,82%.

Fokus kinerja pelayanan bidang perencanaan dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.128
Kinerja Layanan Penunjang Urusan Perencanaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

No	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah						
	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1
	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1
	Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	1	1	1	1	1
	Tersedianya RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	1	1	1	1	1
	Jumlah keterwakilan dalam musrenbang kabupaten	Unsur	10	10	10	10	10
2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	%	100	97,47	99,52	98,44	100
3	Penjabaran program RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

No	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah data profil daerah yang terisi	Data	8 (KLP Data)	8 (KLP Data)	107	107	117
	Jumlah monev perencanaan pembangunan daerah	Kali	4	4	4	4	4
6	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah						
	Dinas/Badan	OPD	28	28	29	29	29
	Kecamatan	Kecamatan	27	27	27	27	27

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan penunjang bidang perencanaan ditunjukkan dengan 2 program dan 3 indikator kinerja.

Tabel 2.129
Capaian Kinerja Perencanaan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	PERENCANAAN					
	BAPPEDALITBANG					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
1.	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program	%	90	80	93.2	Melampaui target 2022 (80%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (90%)
2.	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
3.	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Perencanaan dari 3 target indikator, sebanyak 3 target indikator melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.5.2. Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, selain itu juga pemerintah Kabupaten Banyumas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut menunjukan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas terus membaik.

Transparansi anggaran telah dilaksanakan dengan tersedianya informasi APBD hingga ke level kegiatan secara *online* yang dapat diakses di ppid.banyumaskab.go.id.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banyumas masih rendah. Belum optimalnya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah disebabkan dari sisi kesadaran wajib pajak, perubahan regulasi, keterbatasan SDM pemeriksa pajak, kesulitan dalam mengidentifikasi Subjek dan Objek Pajak di lapangan dalam rangka *updating* objek dan NJOP.

Tahun 2022 Kabupaten Banyumas berhasil melakukan pensertifikatan tanah aset daerah sebanyak 343 sertifikat. Pengelolaan aset daerah tercapai 86% karena belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah.

Tabel 2. 139
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase penyerapan APBD	%	100	100	100	82.28	86,99
4	Persentase atas pengamanan aset daerah	%	NA	NA	NA	85	86
5	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	19,86	19,99	20,07	18,06	22,36
6	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4,61	5,93	-2,7	14,03	-8
7	Proporsi besaran SILPA	%	10,64	8,08	7,86	9,43	3.15

Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, Tahun 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan keuangan tahun 2022 ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 Program dengan 4 indikator target kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 140
Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	KEUANGAN					
	BAPENDA					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya	%	56	50	60	Melampaui target 2022 (50%) dan sudah mencapai

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	melebihi target pendapatan					target akhir RPJMD (56%)
	BKAD					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
2.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
3.	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
4.	Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang milik daerah dengan baik	%	98	95	100	Belum melampaui target 2022 (95%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (98%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Keuangan dari 4 target indikator, semua indikator melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Aparatur Sipil Negara merupakan aset bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Jumlah ASN Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 141
Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	L		P		TOTAL	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	BAKOLOREAT/ AKADEMI	9	0.08	10	0.09	19	0.16
2	D - II + A - II	1	0.01	0	0.00	1	0.01
3	D - III + A - III	0	0.00	1	0.01	1	0.01
4	DIPLOMA I	6	0.05	9	0.08	15	0.13
5	DIPLOMA II	47	0.40	32	0.27	79	0.67
6	DIPLOMA III	405	3.45	1.462	12.44	1.867	15.89
7	DIPLOMA IV	55	0.47	166	1.41	221	1.88
8	DOKTOR	3	0.03	1	0.01	4	0.03
9	PASCA SARJANA	264	2.25	171	1.46	435	3.70
10	PENDIDIKAN DASAR	139	1.18	7	0.06	146	1.24
11	PROFESI	68	0.58	187	1.59	255	2.17
12	S 1 + A IV	112	0.95	296	2.52	408	3.47
13	S1 + PROFESI	0	0.00	1	0.01	1	0.01
14	SARJANA	2.478	21.09	4.233	36.02	6.711	57.11
15	SARJANA MUDA	1	1.79	2	0.02	3	0.03
16	SLTA KEJURUAN	305	2.60	174	1.48	479	4.08
17	SLTA UMUM	578	4.92	192	1.63	770	6.55
18	SLTP KEJURUAN	9	0.08	0	0.00	9	0.08
19	SLTP UMUM	251	2.14	19	0.16	270	2.30
20	SPELIALIS I	39	0.33	18	0.15	57	0.49

21	SPEKIALIS II	1	0.01	0	0.00	1	0.01
	TOTAL	4.771	40,60	6.981	59,40	11.752	100

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banyumas, 2022

Pada Tahun 2022 Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas dengan tingkat pendidikan Sarjana merupakan jumlah terbanyak yaitu 6.711 orang (57,11%). Urutan kedua adalah ASN dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 1.867 orang (15,89%), dan urutan ke tiga adalah ASN dengan tingkat pendidikan SLTA Umum sebanyak 770 orang (6,55%).

Berdasarkan golongan kepangkatan ASN Kabupaten Banyumas selalu mengalami perubahan dikarenakan karena kenaikan pangkat reguler, pilihan atau penyesuaian pendidikan. Jumlah ASN menurut golongan di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 142
Jumlah ASN Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Jumlah PNS Daerah menurut golongan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PNS	12.539	12.551	11.809	11.641	11.752
2	Golongan I	354	333	292	274	214
3	Golongan II	2.240	2.186	1.999	1.933	2.314
4	Golongan III	5.576	6.056	5.923	6.216	6.396
5	Golongan IV	4.369	3.976	3.595	3.218	2.828

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banyumas, 2022

Pada Tahun 2022 ASN di Kabupaten Banyumas yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 6.396 orang (54,42%) sedangkan urutan kedua adalah golongan IV sebanyak 2.828 orang (24,06%) dan urutan ketiga adalah golongan II sebanyak 2.314 orang (19,70%) dan yang terakhir golongan I sebanyak 214 orang (1,82%).

Untuk memenuhi standar kompetensi Aparatur Sipil Negara harus terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada negara dan masyarakat. Pendidikan dan latihan adalah upaya untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, yaitu melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan struktural. ASN Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti diklat dan

lulus, serta memiliki sertifikasi kompetensi Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 143
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat

No	Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	ASN yang telah mengikuti diklat	573	600	0	140	296
2	ASN yang telah lulus diklat	572	600	0	140	296
	Jumlah ASN	12.539	12.551	0	11.641	11.752
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4,57	4,78	0	0,8	1,8

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banyumas, 2022

Pada Tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten Banyumas dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19, tetapi pada Tahun 2022 ada 296 ASN yang mengikuti diklat dan lulus serta memiliki sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa 1,8% ASN telah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan Tugas sesuai jabatan fungsional dan struktural di Kabupaten Banyumas.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Banyumas mendapatkan nilai 189,5 dari hasil penilaian penerapan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penilaian sistem merit baru diajukan oleh Kabupaten Banyumas di Tahun 2022 dan belum diajukan di tahun sebelumnya. Pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Banyumas telah menggunakan sistem informasi manajemen data kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG juga digunakan untuk pelayanan proses kepegawaian *paperless/less paper* yang akan diterapkan secara bertahap. Kinerja bidang kepegawaian lainnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 144
Disiplin ASN, Mutasi, Promosi, dan Keterisian SIMPEG Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Disiplin ASN	Orang	11	15	11	7	10

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Mutasi	Orang	210	75	52	39	625
3	Jumlah pensiun ASN	Orang	685	829	698	850	849
4	Jumlah Promosi Jabatan Struktural	Orang	350	861	122	187	97
5	SIMPEG (Entry Update data Pegawai)	Orang	12.539	12.551	11.809	11.641	11.752
6	Nilai Sistem Merit	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	189,5

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 program dengan 2 target indikator kinerja, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 145
Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	KEPEGAWAIAN					
	BKPSDM					
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
1.	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95	95	95	Melampaui target 2021 (95%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (95%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Kepegawaian dari 1 target indikator, sebanyak 1 target indikator mencapai target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 2. 146
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	

	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	BKPSDM					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	%	2.4	0.8	1.8	Melampaui target 2022 (0.8%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.4%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pendidikan dan Pelatihan dari 1 target indikator, sebanyak 1 target indikator melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah melalui inovasi dan teknologi. Fokus kinerja pelayanan bidang penelitian dan pengembangan dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 147
Kinerja Pelayanan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kajian penelitian		NA	3	5	15	19
	Kajian bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	NA	NA	2	10	10
	Kajian bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	NA	1	1	4	1
	Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	NA	2	2	1	8
2	Jumlah inovasi yang diikuti dalam lomba Krenova	Inovasi	72	48	64	36	83
3	Jumlah publikasi inovasi daerah	Kali	1	1	0	2	2

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Urusan Penelitian di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dalam bentuk Pengkajian dengan memanfaatkan IPTEK untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan 19 kajian yaitu 10 kajian bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, 1 kajian bidang sosial dan kependudukan dan 8 kajian bidang ekonomi dan pembangunan. Setiap judul kajian diusulkan oleh SKPD yang mengalami permasalahan dan membutuhkan pengkajian dalam menentukan sebuah kebijakan, selain itu beberapa kajian juga merupakan hasil dari Musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil dari kajian tersebut merupakan sebuah rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar sebuah kebijakan di Kabupaten Banyumas.

Pengembangan merupakan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Pengembangan daerah dapat terwujud dalam sebuah pembaharuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai inovasi daerah. Inovasi daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Perkembangan inovasi daerah dapat dilihat berdasarkan Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID).

Berdasarkan kategori capaian predikat Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Banyumas tidak mengalami perubahan, pada tahun 2021 predikat Kabupaten Banyumas adalah inovatif begitupun pada tahun 2022. Perubahan metode perhitungan dan sistem klasifikasi predikat Indeks Inovasi Daerah (IID) terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 predikat diperoleh dari penjumlahan skoring inovasi dengan output berupa angka, sedangkan pada tahun 2021 predikat diperoleh dari perhitungan skor Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dengan porsi 25,2% dari total penilaian dan skor Satuan Inovasi Daerah (SID) dengan porsi 74,8%. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap capaian predikat meskipun jumlah Inovasi Daerah yang diikutsertakan lebih banyak.

Sistem penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2021 memuat 36 indikator. Indikator-indikator tersebut bertujuan untuk menjamin kebermanfaatan dan keberlangsungan inovasi daerah. Namun dari keseluruhan inovasi daerah di Kabupaten Banyumas masih belum memenuhi indikator-indikator tersebut secara maksimal. Di sisi lain,

kurangnya monitoring secara berkala juga mempengaruhi perkembangan inovasi daerah. Hal ini menyebabkan inovasi-inovasi tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sebesar 53,94 dan pada tahun 2020 sebesar 2.129. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem penilaian ditingkat pusat. Jika dilihat berdasarkan peringkat capaiannya, Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan yaitu secara nasional pada tahun 2020 menempati peringkat 83 naik menjadi peringkat 60 pada tahun 2021, sedangkan secara provinsi dari peringkat 13 pada tahun 2020 naik menjadi peringkat 7 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan yaitu secara nasional menempati peringkat 26 dengan skor sebesar 59,10, sedangkan secara provinsi bertahan pada peringkat 7.

Pemerintah Pusat melakukan penilaian inovasi Pemerintah Daerah dan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi, termasuk dalam bentuk fiskal. Penilaian dan apresiasi Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Penganugerahan Innovative Government Award (IGA). Penganugerahan tersebut diberikan untuk semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

Pada Gelaran *Innovative Government Award* (IGA) Kemendagri Tahun 2022, Kabupaten Banyumas mengusulkan sebanyak 50 inovasi, Skor hasil Verifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) untuk Kabupaten Banyumas mencapai 59,10 dan masuk Kategori “Kabupaten Inovatif”. Untuk itu Kabupaten Banyumas menduduki peringkat 26 dari total sebanyak 415 Kabupaten di Indonesia, dan menduduki peringkat 7 dari sebanyak 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya meningkatkan inovasi kreativitas masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas, maka Bappedalitbang menyelenggarakan lomba Krenova. Lomba Krenova pada tahun 2022 dilaksanakan dengan 2 kategori yaitu aplikasi dan teknologi tepat guna dengan jumlah peserta mencapai 74 inovasi. Jumlah peserta Krenova pada Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah peserta sebanyak 36 inovasi pada tahun 2021.

Sosialisasi dan publikasi inovasi mempunyai tujuan supaya hasil inovasi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Pada tahun 2022,

Bappedalitbang telah menyelenggarakan publikasi hasil inovasi Si Look yang merupakan sebuah aplikasi untuk deteksi dini bencana banjir. Beberapa inovasi yang dipublikasi melalui media massa adalah Dewa (Desktop Whatsapp Auto) 2022, Kolabiz, Digits (Digital Ticketing Systems), Cahaya Bulan, Sistem Dashboard Global Positioning Systems (GPS) Tracking Pendaki Berbasis Website, dan Dawans.

Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 program dengan 1 target indikator kinerja dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 148
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	BAPPEDALITBANG					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
1.	Persentase implementasi kelitbangan	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Penelitian dan Pengembangan dari 1 target indikator, sebanyak 1 target indikator mencapai target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.6. Fokus Layanan Pengawasan

2.4.6.1. Inspektorat

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah. Untuk temuan APIP dari 140 pada Tahun 2021 menjadi 232 pada Tahun 2022, sedangkan temuan BPK dari 12 pada Tahun 2021 menjadi 15 pada Tahun 2022. Dari 232 temuan APIP tersebut 160 temuan pengawasan telah selesai ditindaklanjuti, 16 sedang dalam proses

ditindaklanjuti dan 56 belum ditindaklanjuti. Sedangkan dari 15 temuan BPK tersebut 14 temuan pengawasan telah selesai ditindaklanjuti, 1 sedang dalam proses ditindaklanjuti dan tidak ada yang belum ditindaklanjuti. Untuk jumlah pengaduan masyarakat terkait pengawasan pada Tahun 2022 sebanyak 29 kasus, dan semuanya telah ditindaklanjuti. Secara rinci kinerja di bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 149
Kinerja Pengawasan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah temuan APIP	515	604	348	140	232
2.	Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti	411	587	289	72	160
3.	Jumlah rekomendasi APIP yang sedang dalam proses	28	16	43	17	16
4.	Jumlah rekomendasi APIP yang belum ditindaklanjuti	76	1	16	51	56
5.	Jumlah temuan BPK	22	26	13	12	15
6.	Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	41	33	26	8	14
7.	Jumlah rekomendasi BPK yang sedang dalam proses	8	39	0	30	1
8.	Jumlah rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti	0	0	0	0	0
9.	Jumlah pengaduan masyarakat (kasus)	8	9	6	6	29
10.	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus)	8	9	6	6	29
11	Level kapabilitas APIP	2	3	3	2,75	2,92
12	Nilai capaian MCP	NA	80	85,48	95,79	96

Sumber : Inspektorat Kabupaten Banyumas, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 150
Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	FUNGSI PENGAWASAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
1.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	%	55	50	76	Melampaui target 2022 (50%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (55%)
2.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	%	96	95	95.84	Melampaui target 2022 (95%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (96%)
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
3.	Persentase Capaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)	%	87	86	93	Melampaui target 2022 (86%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (87%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Capaian kinerja bidang Pengawasan dari 3 target indikator, sebanyak 2 target indikator melampaui target 2022 dan sudah melampaui target akhir RPJMD serta sebanyak 1 target indikator melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

2.4.7. Fokus Layanan Unsur Kewilayahan

2.4.7.1. Kecamatan

Unsur wilayah di Kabupaten Banyumas dengan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Sampai dengan Tahun 2022, IKM Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 86,62% meningkat dari Tahun 2021 sebesar 85,97% .

Penilaian IKM mencakup 9 unsur pelayanan yaitu : 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku

Pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9) Sarana dan Prasarana.

Tabel 2. 151
Rekapitulasi Nilai IKM Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Unsur	Nilai
1	Persyaratan	83,54
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	83,60
3	Waktu Penyelesaian	82,59
4	Biaya/Tarif	99,26
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	84,42
6	Kompetensi Pelaksana	83,80
7	Perilaku Pelaksana	84,46
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	83,10
9	Sarana dan Prasarana	94,82
Rata-rata		86,62

Sumber: Setda Kabupaten Banyumas, 2022

Capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan terdiri dari 6 indikator target kinerja dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 152
Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Rerata Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
2	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Rerata Reali sasi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
3	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	99.13	100	99,39	Belum melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (99.13%)
4	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
5	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	99.63	99,63	99,62	Belum melampaui target 2022 (99,63%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (99.629%)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
6	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	Belum melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbnag Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas sampai dengan Tahun 2022. Rata-rata capaian kinerja Kecamatan dari 6 target indikator, sebanyak 4 target indikator melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 2 target indikator belum melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD.

2.4.8. Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

2.2.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan jumlah unjuk rasa sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 16 kali, menurun dari tahun 2020 berjumlah 24 kali. persentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu pada tahun 2019 sebesar 78,8% dimana seharusnya persentase tersebut 100%. Jumlah LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan sampai dengan 2022 sebanyak 187.

Tabel 2. 153

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah unjuk rasa (kali)	47	47	24	16	n/a
2	Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD HANKAM	n/a	n/a	27	25	24
3	persentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu	74,74	78,8	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu
4	Kegiatan pembinaan politik daerah	7	7	7	10	10
5	Jumlah LSM Yang Aktif	134	159	180	155	187
6	persentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	84,3	86,4	87,8	65%	n/a

Sumber : Bakesbangpol Kab. Banyumas tahun 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 program dengan 5 target indikator kinerja berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 2. 154

Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
1.	persentase peserta pembinaan yang paham tentang penguatan nilai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	90	90	90.25	Melampaui target 2022 (90%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (90%)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
2.	Persentase Parpol yang aktif dalam Kegiatan Pendidikan Politik	%	75	75	100	Melampaui target 2022 (75%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (75%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
3.	Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
4.	Persentase peserta pembinaan yang memahami materi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	%	100	100	90	Belum melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Tahun 2022		Interpretasi
				Target	Realisasi	
5.	Persentase Penanganan Potensi Konflik Ipoeksosbudhankam dengan baik	%	100	100	100	Melampaui target 2022 (100%) dan sudah mencapai target akhir RPJMD (100%)

Sumber: Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas sampai dengan Tahun 2021. Capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dari 5 target indikator, sebanyak 4 target indikator melampaui target 2022 dan sudah mencapai target akhir RPJMD dan sebanyak 1 target indikator belum melampaui target 2022 dan belum mencapai target akhir RPJMD.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap kondisi dan potensi keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu perlu dilakukan analisis ratio-ratio keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. sejak tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang baik.

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LKPJ Bupati Banyumas, 2017-2021.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai

tahun 2021. Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Sedangkan klasifikasi belanja yang sebelumnya menggunakan belanja langsung dan tidak langsung, mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun gambaran keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2018-2022, sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 2018-2022

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2018-2022 meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah, sebagai berikut.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola-an Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuatif, tahun 2018 mencapai Rp.3,27 triliun, meningkat tahun 2019 mencapai Rp.3,43 triliun, tahun 2020 menurun menjadi Rp.3,33 triliun, meningkat kembali tahun 2021 mencapai

Rp.3,49 triliun dan menurun menjadi Rp.3,12 pada tahun 2022. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.1.

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar minus 0,46%. Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah selama kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar 2,68%. Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 14,03 % dan terendah pada tahun 2022 sebesar minus 8,46%.

Untuk dana transfer daerah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2018-2022 tumbuh rata-rata sebesar 0,24%. Jika dilihat tren pertumbuhan dana transfer menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 5,16% dan terendah di tahun 2022 sebesar minus 5,03%. Dana transfer bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (*otonom*) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 4,39% dan terendah pada tahun 2022 sebesar minus 92,60%. Rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar 0,24%.

Pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 – 2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,62	5,94	(2,71)	14,03	(8,46)	2,68
1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5,98	8,43	(9,05)	6,66	19,57	6,32
1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	17,19	0,60	(27,36)	(0,10)	18,12	1,69
1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	83,09	(47,93)	22,43	(1,87)	40,59	19,26
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,18	8,52	1,99	19,09	(23,71)	1,21
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2,02	5,16	(3,20)	2,25	(5,03)	0,24
2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,14	5,46	(3,13)	0,44	(6,55)	(0,33)
2.1.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,39	2,42	(4,44)	1,48	(8,01)	(1,43)
2.1.1.1.	Bagi Hasil Pajak	(3,89)	(34,31)	74,56	19,22	(9,37)	9,24
2.1.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	(22,93)	(3,45)	36,62	24,99	42,64	15,57
2.1.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4,59	(9,05)	(1,32)	(0,28)	(1,21)
2.1.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	6,27	(0,60)	4,90	7,07	(26,79)	(1,83)
2.1.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6,63	22,85	3,09	(4,19)	0,30	5,74
2.1.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)/Dana Penyesuaian	(36,41)	30,89	(11,71)	(51,08)	58,06	(2,05)
2.1.2.2.	Dana Desa	15,70	21,92	4,93	0,71	(2,64)	8,13
2.2.	Transfer Pemerintah Provinsi	0,75	2,04	(3,89)	22,05	8,68	5,93
2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,75	2,04	(12,34)	23,18	8,80	4,49
2.2.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan	-	-	-	10,33	7,30	8,82
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(15,03)	2,65	(2,28)	4,39	(92,60)	(20,58)
3.1.	Pendapatan Hibah	(3,53)	(1,12)	(89,33)	72,18	(54,43)	(15,24)
3.2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	(67,99)	54,91	768,58	(2,99)	(99,98)	130,51
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)		1,39	5,17	(3,05)	4,73	(10,55)	(0,46)

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022 (Th. 2022 Unaudited).

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022 berada pada kisaran 19,85%-22,36%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2022 sebesar 22,36%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Banyumas termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar 3.2. sebagai berikut :



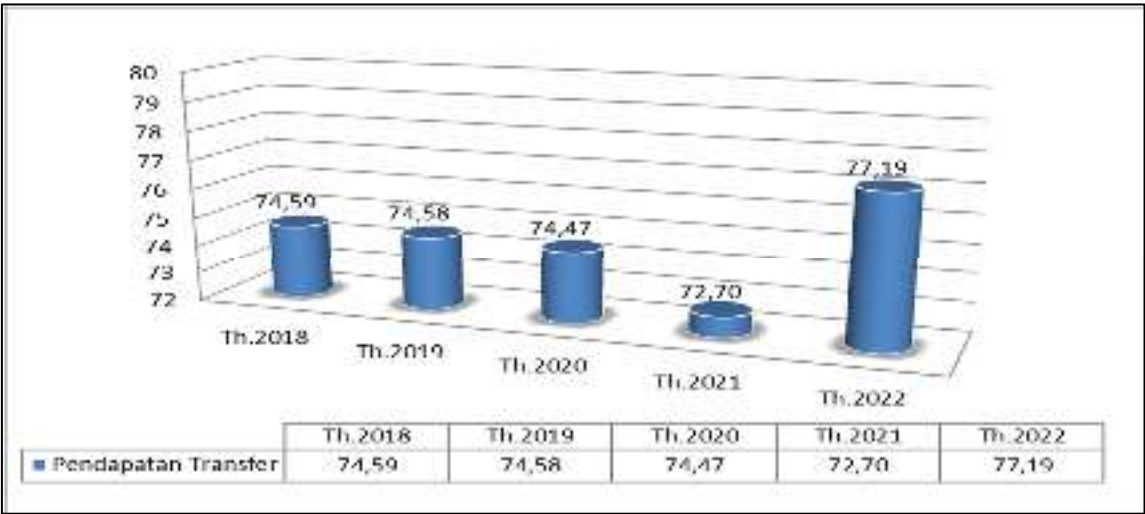
Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.2.
 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022
 (Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan (%))

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total Pendapatan Daerah. Kurun waktu tahun 2018-2022 rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukan perkembangan fluktuatif, terendah tahun 2021 sebesar 72,70% dan tertinggi tahun 2022 sebesar 77,19%. Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Banyumas terhadap pemerintah

pusat dan provinsi kurun waktu tahun 2018-2022 termasuk kategori masih sangat tinggi dengan rasio diatas 50%.

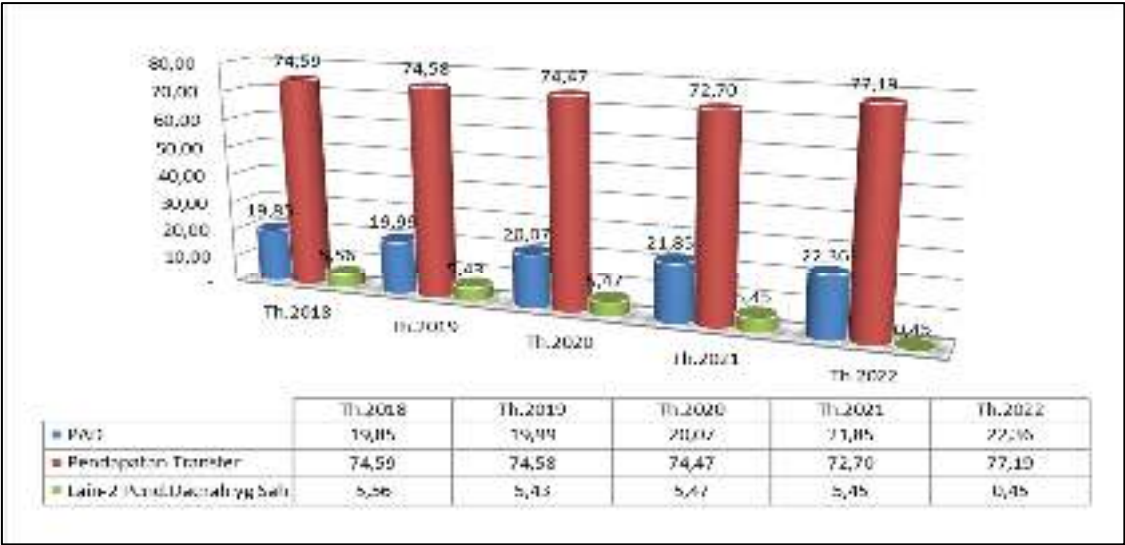
Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.3. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Lporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.3.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (%)

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar kurun waktu tahun 2018-2022 adalah pendapatan transfer dengan kisaran antara 72,70% hingga 77,19%. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 19,85% hingga 22,36%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sah berkisar antara 0,45% hingga 5,56%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 3.4. berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.4.
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (%)

Secara rinci perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022, pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Rata-rata Perkembangan (%)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	648.326.914.034,83	686.805.512.326,17	668.211.148.299,00	761.991.440.173,00	697.496.236.093,00	2,20
1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	211.550.291.844,00	229.377.285.773,00	208.624.349.832,00	222.525.782.288,00	266.072.615.859,00	6,40
1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	32.451.215.298,00	32.644.361.735,00	23.711.587.937,00	23.687.898.823,00	27.981.218.676,00	(2,19)
1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.789.507.343,00	12.907.559.398,00	15.802.591.533,00	15.507.581.925,00	21.801.615.649,00	3,30
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	379.535.899.549,83	411.876.305.420,17	420.072.618.997,00	500.270.177.137,00	381.640.785.909,00	1,47
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.436.061.762.307,00	2.561.772.524.235,00	2.479.870.538.123,00	2.535.638.088.327,00	2.408.091.948.911,00	(0,20)
2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.224.539.063.142,00	2.345.924.745.633,00	2.272.417.360.150,00	2.282.438.497.924,00	2.132.921.733.376,00	
2.1.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.894.413.016.142,00	1.940.352.355.633,00	1.854.294.495.150,00	1.881.829.664.924,00	1.731.121.052.496,00	(2,13)
2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	41.388.138.494,00	27.188.633.700,00	47.461.438.644,00	56.584.800.161,00	51.280.979.747,00	12,53
2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.520.017.322,00	1.467.574.212,00	2.004.973.702,00	2.506.021.548,00	3.574.498.957,00	25,20
2.1.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.373.971.809.000,00	1.437.036.239.000,00	1.306.921.916.000,00	1.289.633.614.000,00	1.285.982.684.800	(1,52)
2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	477.533.051.326,00	474.659.908.721,00	497.906.166.804,00	533.105.229.215,00	390.282.888.992	(3,86)
2.1.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	330.126.047.000,00	405.572.390.000,00	418.122.865.000,00	400.608.833.000,00	401.800.680.880,00	5,51
2.1.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)/Dana Penyesuaian	34.250.000.000,00	44.828.869.000,00	39.577.682.000,00	19.361.734.000,00	30.603.775.000	-
2.1.2.2	Dana Desa	295.876.047.000,00	360.743.521.000,00	378.545.183.000,00	381.247.099.000,00	371.196.905.880	6,23
2.2.	Transfer Pemerintah Provinsi	211.522.699.165,00	215.847.778.602,00	207.453.177.973,00	253.199.590.403,00	275.170.215.535,00	7,22
2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	211.522.699.165,00	215.847.778.602,00	189.208.586.743,00	233.070.254.488,00	253.570.782.196	5,42
2.2.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan	-	-	18.244.591.230,00	20.129.335.915,00	21.599.433.339,00	-
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	181.537.975.519,00	186.347.958.742,00	182.105.101.820,00	190.093.371.910,00	14.061.809.570,00	(21,96)
3.1.	Pendapatan Hibah	169.332.334.519,00	167.439.942.427,00	17.874.081.820,00	30.775.169.520,00	14.024.437.570,00	(18,17)
3.2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	12.205.641.000,00	18.908.016.315,00	164.231.020.000,00	159.318.202.390,00	37.372.000,00	180,13
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)		3.265.926.651.860,83	3.434.925.995.303,17	3.330.186.788.242,00	3.487.722.900.410,00	3.119.649.994.574,00	(0,92)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022 (Th. 2022 Unaudited).

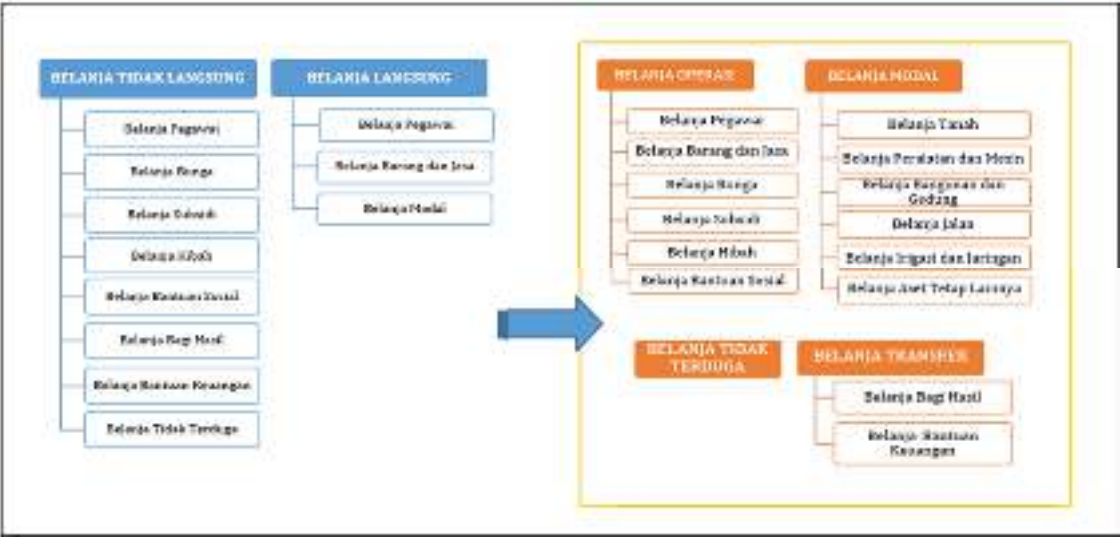
Dari tabel 3.3. di atas dapat terlihat bahwa Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan pendapatan yang tidak begitu signifikan selama kurun waktu tahun 2018-2022, yaitu hanya mengalami perkembangan pertumbuhan sebesar minus 0,92%. Secara umum rata-rata perkembangan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) kondisinya cukup baik yaitu 2,20%. Pada kelompok ini jenis pendapatan yang mengalami pertumbuhan terkecil yaitu Pendapatan Retribusi Daerah rata-rata sebesar minus 2,19% akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan retribusi daerah selalu mengalami kenaikan. Untuk perkembangan pendapatan pajak daerah tertingi dengan rata-rata sebesar 6,40%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-rata sebesar 1,47%. Sedangkan perkembangan untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,30%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Melihat hal tersebut di atas artinya pemerintah Kabupaten Banyumas harus lebih optimal lagi meningkatkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD sehingga dapat lebih mandiri lagi.

Pada kelompok Pendapatan Transfer selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami rata-rata perkembangan pertumbuhan sebesar minus 0,20%. Pada kelompok ini jenis pendapatan yang mengalami perkembangan terkecil yaitu dari transfer pemerintah pusat rata-rata sebesar minus 0,95% dan tertinggi Transfer Pemerintah Provinsi rata-rata sebesar 7,22%.

Rata-rata perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami perkembangan pertumbuhan sebesar minus 21,96%.

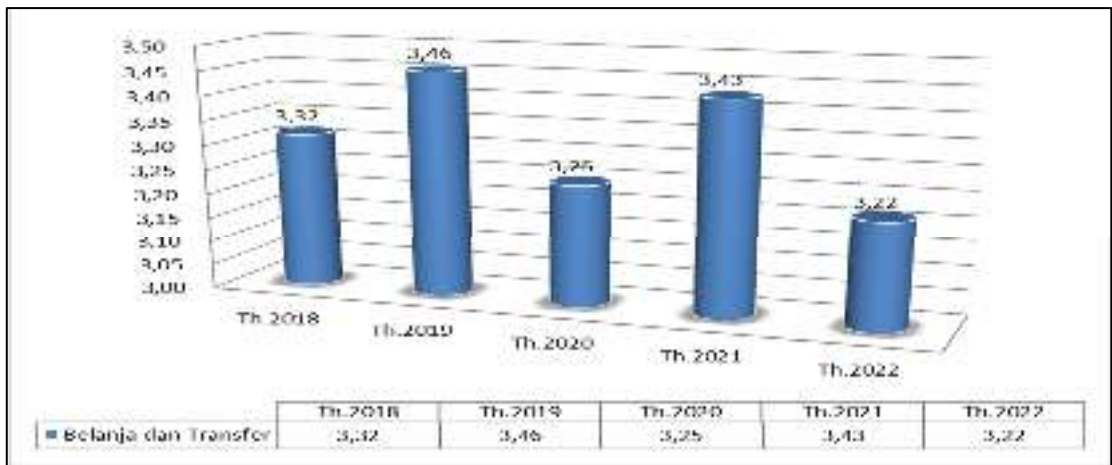
3.1.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.



Gambar 3.5.
Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja dan Transfer Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja dan transfer daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 belanja dan transfer daerah sebesar Rp.3,32 triliun menurun menjadi Rp.3,22 triliun pada tahun 2022. Perkembangan Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.6. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.6.
Perkembangan Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Rata-rata pertumbuhan Belanja Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar minus 0,06%. Persentase pertumbuhan belanja tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,64% dan terendah tahun 2022 sebesar minus 8,47%.

Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2019 sebesar 4,77% dan terendah pada tahun 2022 sebesar minus 6,05%. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata komponen Belanja Modal sebesar minus 2,44%. Komponen Belanja Modal selama kurun waktu tahun 2018-2022 tertinggi tahun 2021 sebesar 18,92% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 24,09%.

Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 sebesar 3.042,41%. Persentase pertumbuhan belanja tidak terduga tertinggi pada tahun 2020 sebesar 15.073,37% dan terendah tahun 2018 sebesar minus 91,10%.

Rata-rata pertumbuhan Transfer Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 sebesar 1,94%. Persentase pertumbuhan transfer daerah tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 13,66% dan terendah tahun 2020 sebesar minus 14,34%. Komponen transfer bagi hasil pendapatan selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2022 sebesar 36,28% dan terendah pada tahun

2021 sebesar minus 10,13%. Untuk komponen transfer bantuan keuangan selama kurun waktu tahun 2018-2022 tertinggi tahun 2019 sebesar 13,10% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 15,08%.

Untuk rata-rata pertumbuhan Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 sebesar 0,24%. Persentase pertumbuhan belanja dan transfer tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 5,59% dan terendah tahun 2020 sebesar minus 6,03%.

Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah kurun waktu tahun 2018-2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	BELANJA	5,64	2,17	(4,08)	4,42	(8,47)	(0,06)
1.1.	BELANJA OPERASI	4,47	4,77	(3,42)	2,37	(6,05)	0,43
1.1.1.	Belanja Pegawai	3,35	2,96	(3,50)	9,99	0,01	2,56
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,19	12,49	(2,33)	(11,35)	(16,34)	(2,87)
1.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	1.535,12	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Belanja Hibah	44,79	(47,10)	(8,32)	69,32	(18,23)	8,09
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	28,31	(7,41)	(56,55)	80,44	(16,76)	5,61
1.2.	BELANJA MODAL	11,20	(8,87)	(24,09)	18,92	(9,34)	(2,44)
1.2.1	Belanja Tanah	(45,98)	(65,28)	43,40	9,12	(82,07)	(28,16)
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	(29,56)	17,66	17,77	(1,52)	(50,61)	(9,25)
1.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	28,28	(17,61)	(31,87)	164,87	6,44	30,02
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	36,82	(5,75)	(37,59)	(38,70)	17,44	(5,56)
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	17,21	(78,85)	(44,30)	832,43	(80,07)	129,28
1.2.6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.	BELANJA TAK TERDUGA	(91,10)	308,95	15.073,37	(4,01)	(75,19)	3.042,41
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	(91,10)	308,95	15.073,37	(4,01)	(75,19)	3.042,41
2.	BELANJA TRANSFER	(4,62)	13,66	(14,34)	11,22	3,78	1,94
2.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	30,73	29,68	4,45	(10,13)	36,28	18,20
2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	36,69	29,24	6,88	(10,70)	41,43	20,71
2.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	(0,52)	32,90	(12,55)	(5,30)	(5,36)	1,83
2.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	(5,50)	13,10	(15,08)	12,26	2,52	1,46
2.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	(5,56)	13,14	(15,37)	12,87	2,52	1,52
2.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	30,41	(0,87)	126,67	(100,00)	-	11,24
2.2.4.	Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (1+2)		3,70	4,17	(6,03)	5,59	(6,24)	0,24

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022 (Th. 2022 Unaudited).

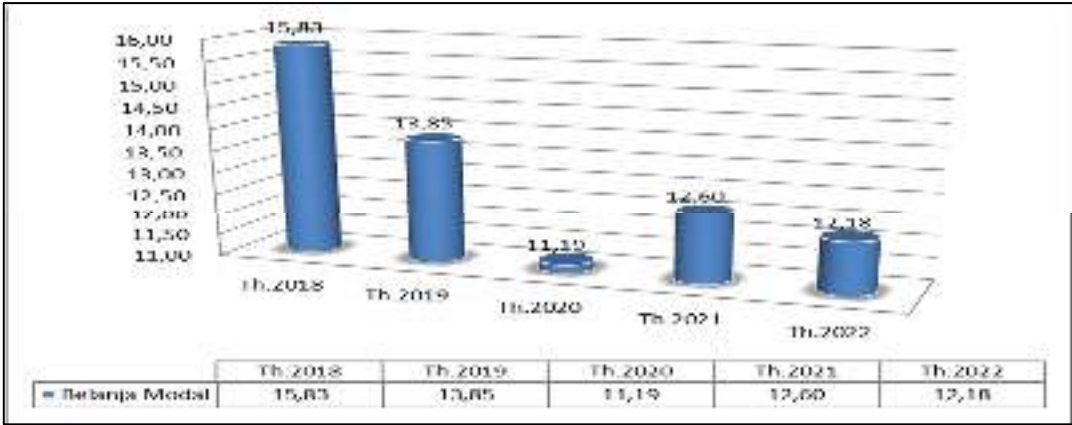
Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja dan Transfer daerah di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuatif bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2022 berkisar antara 66,75%-69,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar 3.7. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.7.
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah
Tahun 2018-2022 (%)

Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja dan Transfer di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja dan Transfer kurun waktu tahun 2018-2022 berkisar antara 11,19%-15,83%. Perkembangan rasio Belanja Modal terhadap total Belanja dan Transfer di Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.8. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.8.
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah
Tahun 2018-2022 (%)

Rasio Belanja Tak Terduga terhadap total Belanja dan Transfer di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap total Belanja dan Transfer kurun waktu tahun 2018-2022 berkisar antara 0,004%-2,493%. Perkembangan rasio Belanja Tak Terduga terhadap total Belanja dan Transfer di Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.9. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.9.
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah
Tahun 2018-2022 (%)

Rasio Transfer terhadap total Belanja dan Transfer di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio Belanja Transfer terhadap total Belanja dan Transfer kurun waktu tahun 2018-2022 berkisar

antara 17,32%-20,19%. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.10. sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.10.
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Transfer Daerah
Tahun 2018-2022 (%)

Perincian Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Banyumas, kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.5.
Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Rata-rata Perkembangan (%)
1.	BELANJA	2.741.141.898.312,00	2.800.699.579.326,40	2.686.475.021.852,00	2.805.089.012.738,00	2.567.430.840.045,00	(1,49)
1.1.	BELANJA OPERASI	2.215.594.413.698,00	2.321.368.211.981,40	2.241.998.515.846,00	2.295.095.801.085,00	2.156.264.853.361,00	(0,58)
1.1.1.	Belanja Pegawai	1.279.343.072.051,00	1.317.180.709.881,00	1.271.128.929.454,00	1.398.098.601.191,00	1.398.249.383.604,00	2,37
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.054.267.149,00	949.470.698.650,40	927.391.409.192,00	822.140.656.636,00	687.788.394.354,00	(4,38)
1.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	570.163.094,00	9.322.835.019,00	-
1.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Belanja Hibah	77.228.833.298,00	40.857.344.650,00	37.456.450.000,00	63.420.758.764,00	51.859.968.984,00	(1,08)
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	14.968.241.200,00	13.859.458.800,00	6.021.727.200,00	10.865.621.400,00	9.044.271.400,00	(0,07)
1.2.	BELANJA MODAL	525.416.939.614,00	478.797.497.271,00	363.470.409.584,00	432.235.246.229,00	391.871.221.995,00	(5,84)
1.2.1.	Belanja Tanah	23.525.790.031,00	8.168.354.576,00	11.713.397.328,00	12.781.710.449,00	2.291.821.714,00	(23,71)
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	79.351.637.733,00	93.368.565.888,00	109.957.064.819,00	108.280.757.683,00	53.484.907.353,00	(4,17)
1.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	136.742.721.339,00	112.662.636.972,00	76.760.898.881,00	203.318.241.966,00	216.406.620.948,00	30,46
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.281.890.886,00	263.219.979.395,00	164.271.492.147,00	100.697.645.954,00	118.261.602.429,00	(16,15)
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.514.899.625,00	1.377.960.440,00	767.556.409,00	7.156.890.177,00	1.426.269.551,00	157,30
1.2.6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.	BELANJA TAK TERDUGA	130.545.000,00	533.870.074,00	81.006.096.422,00	77.757.965.424,00	19.294.764.689,00	3.825,78
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	130.545.000,00	533.870.074,00	81.006.096.422,00	77.757.965.424,00	19.294.764.689,00	3.825,78
2.	BELANJA TRANSFER	577.918.860.731,00	656.850.622.171,00	562.666.913.512,00	625.795.273.415,00	649.473.961.099,00	3,58
2.1.	Belanja Bagi Hasil	19.309.875.825,00	25.041.355.300,00	26.156.571.346,00	23.505.816.950,00	32.032.638.219,00	15,07
2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	16.957.392.011,00	21.915.000.000,00	23.422.682.526,00	20.916.759.399,00	29.582.380.341,00	16,71
2.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	2.352.483.814,00	3.126.355.300,00	2.733.888.820,00	2.589.057.551,00	2.450.257.878,00	2,42
2.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.	Belanja Bantuan Keuangan	558.608.984.906,00	631.809.266.871,00	536.510.342.166,00	602.289.456.465,00	617.441.322.880,00	3,20
2.2.1.	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Bantuan Keuangan ke Desa	557.312.891.106,00	630.524.389.419,00	533.597.927.166,00	602.289.456.465,00	617.441.322.880,00	3,29
2.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya	1.296.093.800,00	1.284.877.452,00	2.912.415.000,00	-	-	-
2.2.4.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (1+2)		3.319.060.759.043,00	3.457.550.201.497,40	3.249.141.935.364,00	3.430.884.286.153,00	3.216.904.801.144,00	(0,62)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022 (Th. 2022 Unaudited).

Dari tabel di atas rata-rata perkembangan belanja kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar minus 1,49%. Jenis komponen belanja tertinggi yaitu pada Belanja Tak Terduga sebesar 3.825,78% dan yang terkecil Belanja Modal sebesar minus 5,84%.

Pada jenis komponen Belanja Operasi kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata perkembangan tertinggi yaitu pada Belanja Pegawai sebesar 2,37%, untuk belanja pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan terendah yaitu belanja Barang dan Jasa sebesar minus 4,38%.

Rata-rata perkembangan pada komponen Belanja Hibah kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar minus 1,08%, untuk belanja hibah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan tertinggi pada tahun 2020 sedangkan untuk rata-rata perkembangan komponen Belanja Bantuan Sosial sebesar minus 0,07%. Alokasi Bantuan Sosial dianggarkan mendasari Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Rata-rata perkembangan Belanja Modal kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar minus 5,84%. Untuk komponen Belanja Modal tertinggi yaitu pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rata-rata perkembangan yaitu sebesar 157,30% dan terendah pada Belanja Belanja Tanah dengan rata-rata perkembangan sebesar minus 23,71%.

Rata-rata perkembangan Belanja Tidak Terduga kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar 3.825,78%, belanja tidak terduga tertinggi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Rata-rata perkembangan Belanja Transfer kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar 3,58%, belanja transfer tertinggi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020, untuk komponen belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dengan rata-rata perkembangan sebesar 15,07% dan belanja bantuan keuangan dengan rata-rata perkembangan sebesar 3,20%.

3.1.1.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 sebagaimana tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.6.
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Pendapatan Daerah	3.265.926.651.860,83	3.434.925.995.303,17	3.330.186.788.242,00	3.487.722.900.410,00	3.119.649.994.574,00
2.	Penerimaan Pembiayaan	388.439.356.857,40	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	362.806.077.979,00	486.691.123.266,00
	Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan (1)	3.654.366.008.718,23	3.725.271.324.978,40	3.572.891.911.723,00	3.850.528.978.389,00	3.606.341.117.840,00
1.	Belanja	2.741.141.898.312,00	2.800.699.579.326,40	2.686.475.021.852,00	2.805.089.012.738,00	2.567.430.840.045,00
2.	Transfer	577.918.860.731,00	656.850.622.171,00	562.666.913.512,00	625.795.273.415,00	649.473.961.099,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan	44.959.920.000,00	25.016.000.000,00	29.519.500.000,00	49.748.000.000,00	49.746.000.000,00
	Belanja + Transfer + Pengeluaran Pembiayaan (2)	3.364.020.679.043,00	3.482.566.201.497,40	3.278.661.435.364,00	3.480.632.286.153,00	3.266.650.801.144,00
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (1) - (2)	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	294.230.476.359,00	369.896.692.236,00	339.690.316.696,00

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022 (Th. 2022 Unaudited).

Berdasarkan tabel 3.6. di atas terlihat bahwa kemampuan riil keuangan Kabupaten Banyumas pada tahun tahun 2018-2022 fluktuatif, kemampuan riil tertinggi pada tahun 2021 yaitu mencapai Rp.369,89 miliar dan kemampuan riil terendah pada tahun 2019 mencapai Rp.242,70 miliar. Untuk itu diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan.

3.1.1.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- e. Penerimaan Piutang Daerah.
- f. Penerimaan Dana Bergulir.
- g. Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui :

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas berasal Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir) pada tahun 2018 sebesar Rp.6,12 miliar, penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.68,58 miliar dan pemanfaatan SiLPA yang didasarkan atas hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, penerimaan pembiayaan tahun 2018 mencapai sebesar Rp.388,44 miliar, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.290,35 miliar, pada tahun 2020 menurun kembali menjadi sebesar Rp.242,71 miliar, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.362,81 miliar dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp.486,69 miliar.

Perkembangan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.11. sebagai berikut :



Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

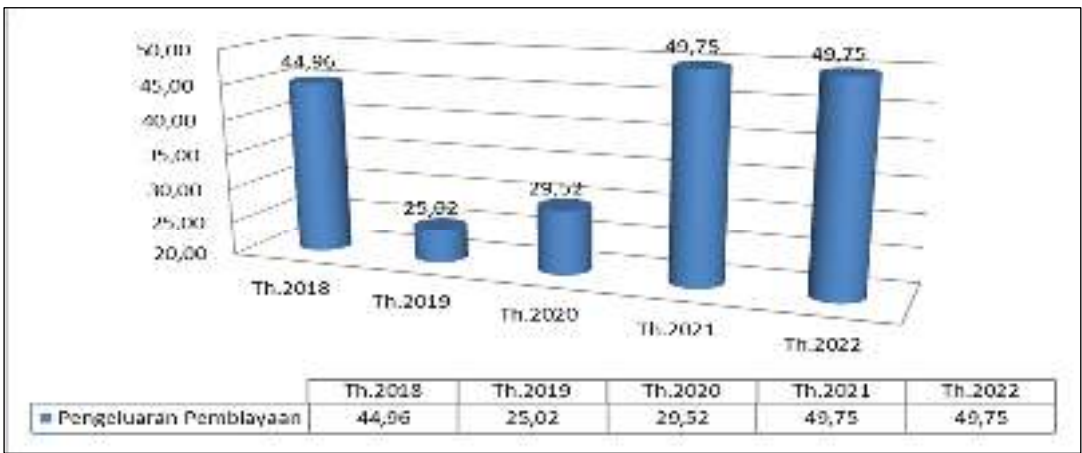
Gambar 3.11.
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan selama kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, pengeluaran pembiayaan tahun

2018 mencapai sebesar Rp.44,49 miliar, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.265,33 miliar, menurun kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.213,19 miliar, meningkat pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp.313,06 miliar dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp.436,95 miliar.

Pengeluaran pembiayaan utamanya terdiri dari pembentukan dana cadangan Pilkada pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 20 miliar dan tahun 2022 dianggarkan kembali sebesar Rp.25 miliar. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan tertinggi pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp.43,19 miliar dan terendah pada tahun 2019 mencapai Rp.23,44 miliar. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah) pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp.1,78 miliar dan pada tahun 2021 sebesar Rp.1,5 miliar.

Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.12. berikut :



Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Gambar 3.12.
Perkembangan Pengeluaran dan Pembiayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 sebagaimana table 3.7. berikut.

Tabel 3.7.
Perkembangan Pengeluaran dan Pembiayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Rata-rata Perkembangan (%)
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	388.439.356.857,40	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	362.806.077.979,00	486.691.123.266,00	10,49
4.1.1.	Penggunaan SILPA	382.315.707.328,40	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	294.230.476.359,00	369.896.692.236,00	1,62
4.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan	-	-	-	68.575.601.620,00	116.794.431.030,00	-
4.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.123.649.529,00	-	-	-	-	-
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.959.920.000,00	25.016.000.000,00	29.519.500.000,00	49.748.000.000,00	49.746.000.000,00	(9,42)
4.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000	25.000.000.000,000	-
4.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	43.184.920.000,00	23.435.000.000,00	28.150.000.000,00	28.249.000.000,00	24.746.000.000,00	(9,42)
4.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
4.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.775.000.000,00	1.581.000.000	1.369.500.000	1.499.000.000	-	-
4.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETO (1-2)		343.479.436.857,40	265.329.329.675,23	213.185.623.481,00	313.058.077.979,00	436.945.123.266,00	11,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022 (Th. 2022 Unaudited).

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

- a. Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,63%. Aset Pemerintah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan menjadi :
 1. Aset Lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terikat penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pertumbuhan aset lancar kurun waktu tahun 2017-2021 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,92%. Penurunan pada asset lancar terjadi pada pos kas dan setara kas yang berisi sisa saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan penempatan deposito daerah serta pada pos persediaan pada SKPD yang menandakan pengadaan barang habis pakai, langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tidak banyak menghasilkan sisa persediaan.
 2. Investasi Jangka Panjang berupa investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa penyertaan modal pada BUMD/BUMN. Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,55% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyumas menambah pembiayaan penyertaan modal pada BUMD.
 3. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertumbuhan aset tetap kurun waktu tahun 2017-2021 fluktuatif,

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,24%. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa sarana dan prasarana fisik serta pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan yang menambah nilai aset tetap.

4. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dikhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
5. Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2017-2021 fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan minus 3,51%. Aset lainnya dalam bentuk berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainnya (barang yang diusulkan penghapusan) yang mengalami peningkatan.
- b. Kewajiban pada neraca menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu 2021-2023 nilainya cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan 83,34%. Walaupun kewajiban cukup signifikan masih dapat tertutup dengan nilai aktiva yang dibayar pada tahun berikutnya.
- c. Ekuitas pada neraca menginformasikan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai hak residual pemerintah daerah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban.

Untuk mengetahui rincian Neraca Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2017-2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut.

Tabel 3.8.
Neraca Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

No.	URAIAN	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	480.266.308.100,03	421.131.968.060,98	393.503.349.043,84	451.579.646.524,58	540.897.867.968,85	3,92
1.1.1.	Kas	383.054.327.899,40	291.001.753.539,23	243.492.888.706,00	294.967.226.249,00	370.834.616.627,00	1,63
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Piutang	62.635.247.775,86	83.920.296.532,28	104.782.136.234,25	99.274.147.720,71	117.848.564.396,35	18,07
	Piutang Pendapatan	121.786.731.317,22	159.946.912.399,35	183.419.387.107,50	180.894.369.780,35	199.758.466.342,35	13,77
	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	5.800.599.928,00	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(59.151.483.541,36)	(76.026.615.867,07)	(78.637.250.873,25)	(81.620.222.059,64)	(87.710.501.874,00)	10,80
1.1.4.	Beban Dibayar di Muka	37.024.767,00	56.972.500,00	33.450.000,00	56.021.004,17	175.561.357,50	73,36
1.1.5.	Persediaan	34.539.707.657,77	46.152.945.489,47	45.194.874.103,59	57.282.251.550,70	52.039.125.588,00	12,28
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	255.365.693.134,17	304.217.687.975,82	339.715.998.092,87	378.448.112.639,67	393.551.925.711,97	11,55
1.2.1.	Investasi Non Permanen	8.790.378.320,85	4.217.375.329,50	5.486.264.507,55	6.214.574.680,35	7.378.054.838,35	2,52
	Dana Bergulir	11.108.813.631,00	7.231.396.285,00	8.825.605.435,00	10.220.282.762,00	11.744.434.705,00	4,46
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.318.435.310,15)	(3.014.020.955,50)	(3.339.340.927,45)	(4.005.708.081,65)	(4.366.379.866,65)	17,44
1.2.2.	Investasi Permanen	246.575.314.813,32	300.000.312.646,32	334.229.733.585,32	372.233.537.959,32	386.173.870.873,62	12,05
1.3.	ASET TETAP	4.584.300.038.851,92	5.574.971.557.300,92	5.323.888.752.221,15	5.595.686.489.376,96	6.196.704.702.964,72	8,24
1.3.1.	Tanah	2.380.053.882.103,00	3.034.902.309.299,00	3.111.132.568.046,00	3.166.862.869.332,00	3.450.040.187.351,87	10,19
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	829.487.321.107,45	914.531.634.533,45	999.660.908.976,13	1.101.282.188.525,81	1.236.320.901.236,11	10,50
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.436.733.903.153,56	1.576.643.570.027,56	1.615.403.164.161,56	1.744.975.379.109,14	1.850.601.192.656,14	6,57
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.755.817.176.064,00	2.125.880.392.701,00	2.336.298.143.598,00	2.535.440.492.117,00	2.676.435.728.540,00	11,26
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	103.571.579.201,36	109.033.835.397,36	102.399.853.759,86	106.398.762.560,86	100.876.757.746,27	(0,52)
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	8.778.565.923,00	20.233.549.923,00	46.779.359.223,00	39.048.500.214,00	206.555.843.236,00	168,53
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(1.930.142.388.700,45)	(2.206.253.734.580,45)	(2.887.785.245.543,40)	(3.098.321.702.481,85)	(3.324.125.907.801,67)	14,94
1.4.	DANA CADANGAN	-	-	-	-	20.000.000.000,00	-
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	20.000.000.000,00	-
1.5.	ASET LAINNYA	143.845.341.931,00	119.543.839.116,00	169.544.316.154,82	114.801.590.491,50	107.128.534.984,50	(3,51)
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	111.200.000,00	-	-	-	758.550.000,00	-
1.3.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	97.060.888.565,00	82.767.544.715,00	82.767.544.715,00	(8,11)
1.3.4.	Aset Tidak Berwujud	428.282.284,00	488.232.775,00	322.499.375,00	146.262.772,00	56.372.910,00	(34,01)
1.3.5.	Aset Lain-lain	31.725.812.972,00	10.847.931.208,00	132.331.217.370,82	103.611.078.526,82	91.973.019.469,82	255,28
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.371.144.890,00)	(9.743.516.432,00)	(60.170.289.156,00)	(71.723.295.522,32)	(68.426.952.110,32)	146,27
	JUMLAH ASET	5.463.777.382.017,12	6.419.865.052.453,72	6.226.652.415.512,68	6.540.515.839.032,71	7.258.283.031.630,04	7,63

No.	URAIAN	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.163.426.452,34	47.584.450.428,00	48.022.508.588,25	53.745.484.966,00	157.445.030.773,00	56,07
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	292.620.830,00	467.202.961,00	543.554.646,00	304.523.002,00	599.803.097,00	32,25
	Utang Bunga	-	-	-	-	792.987.786,00	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	32,50
2.2.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.322.204.363,34	1.468.880.768,00	1.160.892.742,25	672.650.976,00	825.003.177,00	(7,32)
2.2.4.	Utang Beban	33.548.601.259,00	30.516.311.240,00	34.804.861.200,00	37.883.296.200,00	141.396.400.421,00	71,78
2.2.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	3.632.055.459,00	13.200.000,00	3.385.014.788,00	2.330.836.292,00	-
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.500.000.000,00	-	-	-	68.575.601.620,00	-
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	6.500.000.000,00	-	-	-	68.575.601.620,00	-
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	46.663.426.452,34	47.584.450.428,00	48.022.508.588,25	53.745.484.966,00	226.020.632.393,00	83,84
3.	EKUITAS						-
	JUMLAH EKUITAS	5.417.113.955.564,78	6.372.280.602.025,72	6.178.629.906.924,43	6.486.770.354.066,71	7.032.262.399.237,04	7,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.463.777.382.017,12	6.419.865.052.453,72	6.226.652.415.512,68	6.540.515.839.032,71	7.258.283.031.630,04	7,63

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

3.1.2.1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan :

- a. Rasio lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan Kewajiban Lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Rasio lancar (*Current Ratio*) Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2017-2021 fluktuatif. Tahun 2017-2019 menurun, tahun 2020 meningkat dan tahun 2021 menurun kembali, namun masih pada nilai positif >1, hal ini menanda-kan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajibannya. Untuk mengetahui rincian *Current Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table 3.9. berikut :

Tabel 3.9.
Current Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2017	480.266.308.100,03	40.163.426.452,34	11,96
2018	421.131.968.060,98	47.584.450.428,00	8,85
2019	393.503.349.043,84	48.022.508.588,25	8,19
2020	451.579.646.524,58	53.745.484.966,00	8,40
2021	540.897.867.968,85	157.445.030.773,00	3,44

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

- b. Rasio Kas (*Cash Ratio*) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. *Cash ratio* Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun

2017-2021 fluktuatif. Tahun 2017-2019 menurun, tahun 2020 meningkat dan tahun 2021 menurun kembali, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memenuhi/melunasi semua kewajibannya. Untuk mengetahui rincian *Cash Ratio* Kabupaten Banyuma tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.10. berikut :

Tabel 3.10.
Cash Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Kas (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2017	383.054.327.899,40	40.163.426.452,34	9,54
2018	291.001.753.539,23	47.584.450.428,00	6,12
2019	243.492.888.706,00	48.022.508.588,25	5,07
2020	294.967.226.249,00	53.745.484.966,00	5,49
2021	370.834.616.627,00	157.445.030.773,00	2,36

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

- c. Rasio Cepat (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat, semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021 fluktuatif. Tahun 2017-2019 menurun, tahun 2020 meningkat dan tahun 2021 menurun kembali. Walaupun mengalami penurunan masih menunjukkan angka positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas keuangan tinggi sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dengan cepat. Untuk mengetahui rincian *Quick Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table 3.11. berikut :

Tabel 3.11.
Quick Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Persediaan (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2017	480.266.308.100,03	34.539.707.657,77	40.163.426.452,34	11,10
2018	421.131.968.060,98	46.152.945.489,47	47.584.450.428,00	7,88
2019	393.503.349.043,84	45.194.874.103,59	48.022.508.588,25	7,25
2020	451.579.646.524,58	57.282.251.550,70	53.745.484.966,00	7,34
2021	540.897.867.968,85	52.039.125.588,00	157.445.030.773,00	3,10

Sumber :Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

3.1.2.2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Banyumas 2017-2021 fluktuatif. Tahun 2017-2018 meningkat Tahun 2019-2021 menurun. Walaupun ratio tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memenuhi seluruh kewajibannya masih sangat *solvable*. Untuk mengetahui rincian Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table 3.12. berikut :

Tabel 3.12.
Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Total Aktiva (Rp.)	Total Kewajiban (Rp.)	Ratio (%)
2017	5.463.777.382.017,12	46.663.426.452,34	117,09
2018	6.419.865.052.453,72	47.584.450.428,00	134,92
2019	6.226.652.415.512,68	48.022.508.588,25	129,66
2020	6.540.515.839.032,71	53.745.484.966,00	121,69
2021	7.258.283.031.630,04	226.020.632.393,00	32,11

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

3.1.2.3. Rasio Laverage

Rasio Utang (*leverage*) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage yaitu Rasio utang terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio/DER*). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over-laveraged*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio DER pada Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai aktiva atau kekayaan yang tinggi untuk membayar semua kewajibannya dengan modal yang telah dimiliki. Untuk mengetahui rincian DER Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table 3.13. berikut :

Tabel 3.13.
Debt to Equity Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Tahun	Total Kewajiban (Rp.)	Total Ekuitas (Rp.)	Ratio (%)
2017	46.663.426.452,34	5.417.113.955.564,78	0,01
2018	47.584.450.428,00	6.372.280.602.025,72	0,01
2019	48.022.508.588,25	6.178.629.906.924,43	0,01
2020	53.745.484.966,00	6.486.770.354.066,71	0,01
2021	226.020.632.393,00	7.032.262.399.237,04	0,03

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2017-2021.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, adapun secara terinci dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banyumas pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk

menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Rasio ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melaksanakan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tingkat realisasi belanja Kabupaten Banyumas secara keseluruhan fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 92,41%, pada tahun 2019 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 93,11%, pada tahun 2020 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 91,35%, pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar 88,79% dan pada tahun 2022 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 81,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2018–2022 berkisar 81,31%–93,11%. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat ekonomis. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran ekonomis. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup ekonomis dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang ekonomis. Apabila hasil di bawah 60% anggaran dikatakan tidak ekonomis. Realisasi pada tahun anggaran 2022 mencapai 81,31% masuk kategori cukup ekonomis. Rendahnya serapan terhadap anggaran dikarenakan banyaknya kegiatan yang ditunda bahkan dibatalkan dikarenakan dampak adanya Pandemi Covid-19.

Realisasi belanja terhadap anggaran belanja selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 3.14. berikut.

Tabel 3.14.
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Total Belanja dan Transfer (Perubahan)	Total Belanja dan Transfer (Realisasi)	Capaian (%)
		(a)	(b)	(b) / (a) x 100
1.	2018	3.591.602.406.921,00	3.319.060.759.043,00	92,41
2.	2019	3.713.463.232.719,00	3.457.550.201.497,40	93,11
3.	2020	3.556.833.000.332,00	3.249.141.935.364,00	91,35
4.	2021	3.863.994.130.518,00	3.430.884.286.153,00	88,79
5.	2022	3.956.268.992.204,00	3.216.904.801.144,00	81,31

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

b. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja Kebutuhan Aparatur, selain untuk Gaji dan Tunjangan termasuk juga belanja operasional rutin kantor dan pengadaan sarana/prasarana apartur. Untuk itu terhadap perhitungan Pengeluaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur untuk dapat disesuaikan jumlahnya, dengan ditambahkan realisasi belanja operasional rutin kantor dan pengadaan sarana/prasarana apartur. Gambaran perkembangan belanja aparatur kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 fluktuatif.

Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.15. berikut :

Tabel 3.15.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Banyumas Thun 2018-2022

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja dan Transfer + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100
1.	2018	1.279.343.072.051,00	3.364.020.679.043,00	38,03
2.	2019	1.317.180.709.881,00	3.482.566.201.497,40	37,82
3.	2020	1.271.128.929.454,00	3.278.661.435.364,00	38,77
4.	2021	1.398.098.601.191,00	3.480.632.286.153,00	40,17
5.	2022	1.398.249.383.604,00	3.266.650.801.144,00	42,80

Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan

seiring dengan kebijakan kenaikan gaji setiap tahun. Dapat dilihat bahwa bahwa selama tahun 2018-2022 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran (yang merupakan penjumlahan dari belanja dan transfer daerah dan pembiayaan pengeluaran) masih cukup tinggi. Tahun 2018 sebesar 38,03%, tahun 2019 menurun menjadi 37,82%, tahun 2020 meningkat menjadi 38,77%, tahun 2021 meningkat kembali menjadi 40,17% dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar 42,80% dari total pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Banyumas kurang baik, seiring dengan terjadinya peningkatan dalam proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.16. berikut.

Tabel 3.16.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2022

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
A.	Belanja Operasi	1.279.343.072.051,00	1.317.180.709.881,00	1.271.128.929.454,00	1.271.128.929.454,00	1.398.249.383.604,00
	Belanja Pegawai	1.279.343.072.051,00	1.317.180.709.881,00	1.271.128.929.454,00	1.398.098.601.191,00	1.398.249.383.604,00
B.	Belanja Modal	279.281.890.886	263.219.979.395	164.271.492.147	100.697.645.954	118.261.602.429
	Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan (Prioritas Bupati)	279.281.890.886,00	263.219.979.395,00	164.271.492.147,00	100.697.645.954,00	118.261.602.429,00
	Jumlah Pengeluaran Wajib Mengikat	1.558.624.962.937	1.580.400.689.276	1.435.400.421.601	1.371.826.575.408	1.516.510.986.033

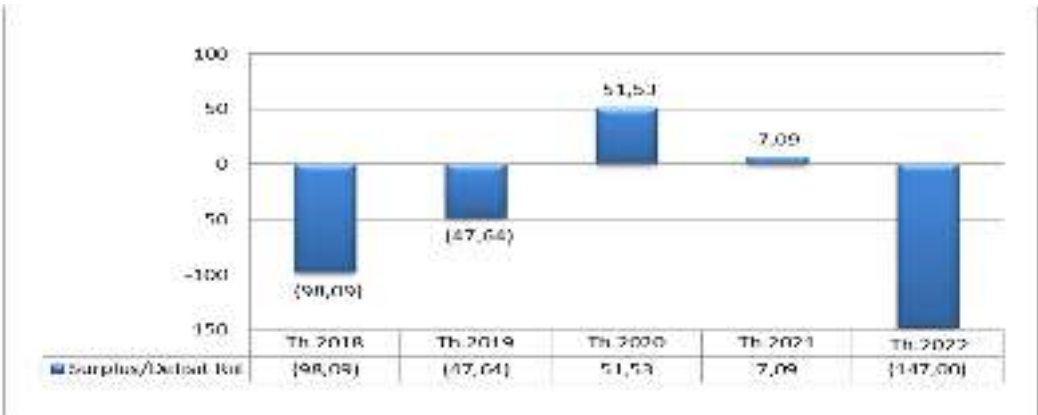
Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pada sub bab ini akan disajikan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah terhadap surplus/defisit belanja daerah selama kurun

waktu 2018-2022. Surplus/defisit riil diperoleh dari selisih antara pendapatan daerah dengan total pengeluaran (belanja dan transfer daerah dan pengeluaran pembiayaan). Perkembangan kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa defisit riil terjadi pada kurun waktu tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2022, sedangkan surplus anggaran terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Selama periode tersebut, defisit terbesar terjadi pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.147 miliar, sedangkan surplus terbesar tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.51,53 miliar.

Perkembangan surplus/deficit riil anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.13. berikut :



Sumber : Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2018-2022.

Gambar 3.13.
 Perkembangan Surplus/Defisit Riil Anggaran
 Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022
 (Rp. Miliar)

Komponen penutup defisit riil berasal dari penerimaan pembiayaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. SiLPA merupakan dana milik daerah sehingga tidak menimbulkan resiko fiskal seperti pinjaman. Besaran SiLPA selama periode 2018-2022 fluktuatif. Pada tahun 2018 SiLPA tercatat sebesar Rp.382,32 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp.290,35 miliar, tahun 2020 turun menjadi Rp.242,71 miliar, naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp.294,23 miliar dan naik kembali pada tahun 2022 mencapai Rp.369,89 miliar. Penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.68,58 miliar dan tahun

2022 sebesar Rp.116,79 miliar. Dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (dana bergulir) pada tahun 2018 sebesar Rp.6,12 miliar.

Dalam hal terdapat selisih antara surplus/defisit riil anggaran dengan penerimaan pembiayaan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Jika dilihat dari perkembangannya selama kurun waktu tahun 2018-2022 nilai SiLPA tahun berkenaan fluktuatif, tahun 2018 tercatat sebesar Rp.290,35 miliar, menurun menjadi Rp.242,71 miliar pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi Rp.294,23 miliar, tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp.369,89 miliar dan pada tahun 2022 menurun menjadi Rp.339,69 miliar.

Defisit riil anggaran dan penutupan defisit riil anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022, selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 3.17. berikut.

Tabel 3.17.
Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.265.926.651.860,83	3.434.925.995.303,17	3.330.186.788.242,00	3.487.722.900.410,00	3.119.649.994.574,00
	<i>Dikurangi realisasi :</i>					
2.	Belanja dan Transfer	3.319.060.759.043,00	3.457.550.201.497,40	3.249.141.935.364,00	3.430.884.286.153,00	3.216.904.801.144,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44.959.920.000,00	25.016.000.000,00	29.519.500.000,00	49.748.000.000,00	49.746.000.000,00
A.	Surplus/Defisit Riil	(98.094.027.182,17)	(47.640.206.194,23)	51.525.352.878,00	7.090.614.257,00	(147.000.806.570,00)
	<i>Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :</i>					
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	382.315.707.328,40	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	294.230.476.359,00	369.896.692.236,00
2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	68.575.601.620,00	116.794.431.030,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.123.649.529,00	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	388.439.356.857,40	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	362.806.077.979,00	486.691.123.266,00
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	290.345.329.675,23	242.705.123.481,00	294.230.476.359,00	369.896.692.236,00	339.690.316.696,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

Tabel 3.18.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	290.345.329.675,23	-	242.705.123.481,00	-	294.230.476.359,00	-	369.896.692.236,00	-	339.690.316.696,00	-
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	17.556.276.441,83	6,05	25.368.008.758,17	10,45	34.908.179.485,00	11,86	51.811.930.229,00	14,01	(166.655.136.167,00)	(49,06)
3.	Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	(23.424.347.858,00)	(8,07)	(30.954.450.843,00)	(12,75)	(21.701.480.827,00)	(7,38)	2.831.786.789,00	0,77	(237.727.934.556,00)	(69,98)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(4.587.858.481,00)	(1,58)	(18.431.761.258,00)	(7,59)	(32.182.865.180,00)	(10,94)	7.891.122.032,00	2,13	3.848.728.174,00	1,13
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	250.927.060.140,00	86,42	239.162.580.492,60	98,54	307.683.064.967,00	104,57	430.383.212.830,00	116,35	710.821.142.159,00	209,26
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas, 2018-2022.

3.3. Kerangka Pendanaan

Untuk tahun 2024 pendapatan daerah diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.28,70 miliar atau 0,81%. Adapun komponen pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, dimana untuk proyeksi pendapatan transfer tahun 2024-2026 mendasarkan pada alokasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024-2026 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2018-2022 (APBD tahun 2022 *Unaudited*) dan APBD Induk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 5,86% tahun 2022. Sedangkan target proyeksi PAD tahun 2024-2026 menggunakan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 6%, tahun 2025 sebesar 6,25 dan tahun 2026 sebesar 6,50% serta optimis bahwa perekonomian sudah mulai membaik.

PAD tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.28,70 miliar atau 3,13%. Adapun komponen PAD bersumber dari ; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.13,85 miliar atau 3,71%. Untuk sumber PAD dari pajak daerah berasal dari ; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral, pajak PBB dan pajak BPHTB.

Retribusi Daerah tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.7,61 juta atau 0,04%. Untuk sumber PAD dari retribusi daerah jasa umum, terdiri dari ; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.4,85 miliar atau 18,92%. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.10 miliar atau 2,04%.

Guna pencapaian target PAD tahun 2024-2026 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :

- a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD/OPD Penghasil.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya *ekstensifikasi* pendapatan daerah melalui :

- a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
- c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
- d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain itu, dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam pembiayaan program-program pembangunan melalui kolaborasi dengan sektor swasta utamanya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komposisi struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada RPD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas

pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024–2026 diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta ketahanan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
4. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangan diantaranya untuk fungsi pendidikan; fungsi kesehatan; dan infrastruktur.

Struktur Belanja Daerah pada RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.15,77 miliar atau 0,54%, struktur Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi, untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.7,81 miliar atau minus 0,30%. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN dan PPPK yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2024-2026 belanja pegawai diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.16,58 miliar atau 1,09%, kenaikan tersebut dikarenakan

untuk *acrees* 2,5% yang digunakan anata lain untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan PNS dan PPPK.

- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat. Dalam belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.5,34 miliar atau 0,62%, hal ini dikarena diperkirakan adanya kenaikan kebutuhan dan harga atas barang/jasa pada tahun yang akan datang, seperti kenaikan kebutuhan barang/jasa dan biaya jasa Non PNS yang setiap tahunnya naik dengan adanya kenaikan UMR untuk Wilayah Kabupaten Banyumas.
- c. Belanja bunga yaitu untuk membayar pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar minus Rp.3,10 miliar atau minus 33,42%.
- d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah, untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.25,25 miliar atau 16,93%. Belanja hibah antara lain digunakan untuk bantuan operasional PAUD dan TK, SD, MI dan SMP, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Ponpes, PMI, Pramuka,

organisasi olahraga/KONI, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik ke KPUD, Bawaslu dalam rangka kebutuhan penyelenggaraan Pilkada serentak.

- e. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Belanja Bantuan Sosial untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar Rp.1,38 miliar atau 6,33%. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Belanja Modal, untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.23,58 miliar atau 6,48%. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan tetap sebesar Rp.20 miliar. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
3. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja Transfer, untuk Tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.6,66 miliar atau 1,05%. Meningkatnya dana transfer karena adanya harapan penambahan dana transfer yang ditujukan untuk Pemerintah Desa/kelurahan. Belanja transfer dirinci atas jenis :
- a. Belanja Bagi Hasil Pendapatan bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada pemerintah kabupaten/kota. Belanja Bagi Hasil untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.3,52 miliar atau 8,34%.
 - b. Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja Bantuan Keuangan, untuk tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp.3,13 miliar atau 0,53%, proyeksi peningkatan tersebut di proyeksikan Pemerintah Pusat dan

pemerintah Provinsi akan memberiakan bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemulihan Ekonomi (UMKM) dan untuk pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan.

4. Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada RPD Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan pada tahun 2024 sebesar Rp.28 miliar akan dihibahkan ke KPUD, Bawaslu dalam rangka kebutuhan penyelenggaraan Pilkada serentak. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024-2026 dialokasikan untuk, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran pokok hutang berupa angsuran pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN Daerah).

Untuk lebih jelasnya Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 3.19. berikut.

Tabel 3.19.
APBD 2023 Induk dan Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No.	URAIAN	APBD 2023 Induk (Rp.)	RPD 2024 Proyeksi (Rp.)	RPD 2025 Proyeksi (Rp.)	RPD 2026 Proyeksi (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.535.754.200.122,00	3.549.629.665.700,00	3.578.640.800.800,00	3.607.032.873.200,00	0,81
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	889.320.206.922,00	903.195.672.500,00	932.206.807.600,00	960.598.880.000,00	3,13
1.1.1.	Pajak Daerah	367.146.432.194,00	367.146.432.000,00	375.994.259.000,00	394.842.088.000,00	3,71
1.1.2.	Retribusi Daerah	25.300.931.052,00	25.724.804.600,00	26.021.139.600,00	25.740.023.000,00	0,04
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.500.000.000,00	23.952.435.900,00	30.819.409.000,00	33.644.769.000,00	18,92
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	476.372.843.676,00	486.372.000.000,00	499.372.000.000,00	506.372.000.000,00	2,04
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.633.079.222.200,00	2.633.079.222.200,00	2.633.079.222.200,00	2.633.079.222.200,00	-
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.375.840.193.200,00	2.375.840.193.200,00	2.375.840.193.200,00	2.375.840.193.200,00	-
1.2.1.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.029.247.211.200,00	2.029.247.211.200,00	2.029.247.211.200,00	2.029.247.211.200,00	-
1.2.1.1.1.	Bagi Hasil Pajak	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00	-
1.2.1.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00	-
1.2.1.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00	-
1.2.1.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00	-
1.2.1.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	-
1.2.1.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)/Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1.2.1.2.2.	Dana Desa	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	-
1.2.2.	Transfer Pemerintah Provinsi	257.239.029.000,00	257.239.029.000,00	257.239.029.000,00	257.239.029.000,00	-
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00	-
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00	-
1.2.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	-
1.3.2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

No.	URAIAN	APBD 2023 Induk (Rp.)	RPD 2024 Proyeksi (Rp.)	RPD 2025 Proyeksi (Rp.)	RPD 2026 Proyeksi (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.	BELANJA	2.960.302.982.481,00	2.937.553.191.700,00	2.932.121.302.800,00	2.969.090.659.200,00	0,54
2.1.	BELANJA OPERASI	2.637.412.301.247,00	2.564.417.562.700,00	2.530.525.956.800,00	2.548.798.404.200,00	(0,30)
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.553.255.174.253,00	1.514.581.335.000,00	1.532.391.588.000,00	1.547.745.362.000,00	1,09
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	947.460.472.494,00	864.701.452.700,00	866.387.275.700,00	875.373.866.200,00	0,62
2.1.3.	Belanja Bunga	10.850.000.000,00	10.906.120.000,00	8.401.410.000,00	4.715.304.000,00	(33,42)
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	104.525.839.100,00	152.525.839.000,00	104.525.839.100,00	102.025.830.000,00	(16,93)
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	21.320.815.400,00	21.702.816.000,00	18.819.844.000,00	18.938.042.000,00	(6,33)
2.2.	BELANJA MODAL	312.890.681.234,00	353.135.629.000,00	381.595.346.000,00	400.292.255.000,00	6,48
2.2.1.	Belanja Tanah	10.556.110.000,00	15.000.000.000,00	16.500.000.000,00	20.000.000.000,00	15,61
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	101.431.234.789,00	104.248.064.000,00	112.216.487.000,00	106.855.696.000,00	1,43
2.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	114.912.883.445,00	123.587.708.000,00	130.580.000.000,00	139.087.700.000,00	6,09
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.287.436.000,00	83.550.998.000,00	93.550.000.000,00	104.500.000.000,00	11,84
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.803.017.000,00	15.848.859.000,00	17.848.859.000,00	18.948.859.000,00	9,39
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	-
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
3.	BELANJA TRANSFER	630.478.009.398,00	631.786.458.000,00	638.229.482.000,00	645.099.716.000,00	1,05
3.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	39.244.737.516,00	40.553.188.000,00	43.996.482.000,00	47.599.716.000,00	8,34
3.1.1.	Bagi Hasil Pajak	36.714.644.410,00	38.084.208.000,00	41.422.868.000,00	45.054.213.000,00	8,77
3.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	2.530.093.106,00	2.468.980.000,00	2.573.614.000,00	2.545.503.000,00	1,57
3.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
3.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	591.233.271.882,00	591.233.270.000,00	594.233.000.000,00	597.500.000.000,00	0,53
3.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
3.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	591.233.271.882,00	591.233.270.000,00	594.233.000.000,00	597.500.000.000,00	0,53
3.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
3.2.4.	Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.590.780.991.879,00	3.569.339.649.700,00	3.570.350.784.800,00	3.614.190.375.200,00	0,63
SURPLUS/(DEFISIT)		(55.026.791.757,00)	(19.709.984.000,00)	8.290.016.000,00	(7.157.502.000,00)	(164,20)

No.	URAIAN	APBD 2023 Induk (Rp.)	RPD 2024 Proyeksi (Rp.)	RPD 2025 Proyeksi (Rp.)	RPD 2026 Proyeksi (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.	PEMBIAYAAN					
4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.962.575.757,00	108.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	(12,96)
4.1.1.	Penggunaan SILPA	115.962.575.757,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	-
4.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	28.000.000.000,00	-	-	-
4.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	-	-	-	-	-
4.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	-	-	-	-
4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.935.784.000,00	88.290.016.000,00	88.290.016.000,00	72.842.498.000,00	(8,75)
4.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	-	-	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.285.784.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	-
4.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	20.650.000.000,00	61.790.016.000,00	61.790.016.000,00	46.342.498.000,00	(12,50)
4.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
4.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		55.026.791.757,00	19.709.984.000,00	(8.290.016.000,00)	7.157.502.000,00	(164,20)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-	-	-	-	-

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Banyumas, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2022.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang direncanakan dan/atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang dimiliki belum didayagunakan secara optimal, kelemahan daerah yang ada belum diatasi, peluang yang terbuka belum dimanfaatkan, dan ancaman yang ada belum disiapkan antisipasinya.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun terakhir, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Banyumas diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Kurang optimalnya pengelolaan pendidikan

Kurang optimalnya pengelolaan pendidikan di Kabupaten Banyumas ditandai dengan beberapa indikator yaitu kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, indeks kualitas pembelajaran, indeks refleksi guru.

Kesenjangan literasi SD tahun 2022 sebesar 2,67 dan kesenjangan literasi SMP sebesar 2,67 menunjukkan tidak ada kesenjangan literasi. Namun capaian ini masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih adanya peserta didik dengan kemampuan literasi yang perlu intervensi khusus sebesar 9,53% untuk SD dan 6,58% untuk SMP. Sedangkan kemampuan numerasi untuk SD pada tahun 2022 sebesar 1,6 dan SMP sebesar 1,75 menunjukkan kemampuan numerasi yang masih dibawah kompetensi minimum sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

Sementara itu, indeks kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan, terutama pada indikator aktivasi kognitif guru

yang masih pasif dan *mindset* guru tentang belajar tentang pembelajaran yang masih rendah.

b. Kurangnya akses pendidikan

Kurangnya akses pendidikan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS), pada tahun 2022 Angka Partisipasi Murni 3-6 tahun tercapai sebesar 61,01% dengan kategori capaian 'menengah', APS 7-12 tahun sebesar 90,05% dengan kategori capaian 'madya' dan usia 13-15 sebesar 80,56% dengan kategori capaian 'madya'.

2. Kesehatan

a. Kurangnya derajat kesehatan masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat mengacu pada Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 yakni 73,88. Jika dibandingkan dengan UHH tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 74,57 maka UHH di Kabupaten Banyumas masih harus ditingkatkan lagi.

b. Kurangnya kualitas pelayanan kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan diukur dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). AKI Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 105 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 22 kasus pada 20.977 kelahiran hidup yang mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu sebanyak 44 kasus pada 24.297 kelahiran hidup.

Kualitas pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis. Tahun 2022 rasio tenaga dokter umum di Kabupaten Banyumas sebesar 1 : 3.092 jiwa per satuan penduduk sedangkan idealnya sebesar 1 : 2.500 jiwa per satuan penduduk sehingga kebutuhan tenaga dokter umum belum tercukupi.

Tahun 2022 jumlah tenaga bidan di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.368 dan rasio bidan per satuan penduduk 1 : 1.346 atau 1 bidan melayani 1.346 jiwa, idealnya 1 : 1.000

sehingga Kabupaten Banyumas masih membutuhkan tenaga Bidan.

c. Kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Desa Siaga Aktif dimana pada tahun 2022 hanya 72 desa yang merupakan desa siaga aktif dari total 331 desa/kelurahan dengan persentase 21,75% di Kabupaten Banyumas.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

a. Kurang optimalnya layanan jaringan irigasi kewenangan kabupaten

Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 573 DI dengan luas 23.716 Ha, dan jaringan irigasi sepanjang 664.440 m. Jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 539.566 m (81,21%) sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi rusak sepanjang 124.874 m (18,79%). Masih adanya kerusakan pada jaringan irigasi menyebabkan layanan jaringan irigasi kurang optimal terutama pada wilayah hilir yang kurang mendapatkan air.

b. Kurang memadainya bangunan penampung air baku dalam kondisi baik

18 buah bangunan embung/situ/telaga dan bangunan penampung air baku di Kabupaten Banyumas, 3 bangunan dalam kondisi rusak. Sehingga tidak memadai untuk menampung air baku secara optimal.

c. Belum memadainya kondisi jalan kabupaten kabupaten

Kondisi mantap jalan Kabupaten Banyumas masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kondisi mantap jalan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi mantap jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas baru tercapai 81,25% atau 1.225,24 km dari total panjang jalan 1.508 km.

d. Belum memadainya infrastruktur pengendali banjir dan tanah longsor Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah

sungai kewenangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 baru terealisasi sebesar 52,31% sedangkan target sebesar 53%.

e. Kurangnya fasilitasi dan Pembinaan SDM Jasa Konstruksi

Capaian kinerja program pengembangan jasa konstruksi sudah terealisasi sebesar 36,56% dan sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 30,27% serta target akhir RPJMD sebesar 35,11%, namun demikian capaian ini baru menjangkau sebagian SDM jasa konstruksi yang menjadi target program, masih terdapat SDM jasa konstruksi yang belum mendapat fasilitasi dan pembinaan.

f. Kurangnya perencanaan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum mulai melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan yang sebagian besar didanai dengan menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan total luas kawasan yang dilakukan penataan mencapai 22.154 m². Namun demikian masih banyak bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis yang perlu ditangani.

g. Belum optimalnya penataan Bangunan gedung

Capaian kinerja bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola baru terealisasi sebesar 62% sehingga belum mencapai target tahun 2022 sebesar 72,7% serta target akhir RPJMD sebesar 75,7%. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah bangunan gedung Pemerintah Kabupaten Banyumas yang kewenangan pengelolaan gedungnya dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terinventarisir sebanyak 86 unit berupa gedung kelurahan sebanyak 30 unit, bangunan kecamatan sebanyak 27 unit, dan bangunan perangkat daerah sebanyak 27 unit, dengan rincian kondisi bangunan 60,47% kondisi baik, 26,74% kondisi rusak ringan, 10,47% rusak sedang, dan 2,33% rusak berat. Dari 86 unit bangunan yang dikelola, terdapat 39,53% atau 34 unit dalam kondisi rusak.

h. Kurangnya infrastruktur persampahan

Persentase peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah 187,6%. Meskipun target peningkatan telah tercapai, berdasarkan kajian evaluasi persampahan yang telah dilaksanakan, kebutuhan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih belum terpenuhi khususnya peralatan mesin pengolah sampah dan kendaraan pengangkut sampah. Kebutuhan peralatan mesin pengolah sampah dan kendaraan pengangkut sampah perlu ditambah untuk memaksimalkan pengelolaan sampah.

i. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas (Air Minum dan Air Limbah)

Meskipun persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten sudah mencapai target di tahun 2022 yaitu sebesar (76,99%), namun belum mencakup seluruh penduduk Kabupaten Banyumas. Selain itu perlu ke depan perlu diupayakan akses air minum yang aman.

Pada tahun 2022 persentase rumah tinggal berakses sanitasi mencapai 90%. Meskipun sudah mencapai target di tahun 2022 namun capaian tersebut belum mencakup seluruh penduduk sebagaimana ketentuan standar pelayanan minimal. Capaian tersebut juga masih terbatas akses layak, belum mencapai akses aman. Capaian akses sanitasi aman masih rendah karena belum optimalnya fungsi IPLT dan layanan lumpur tinja.

j. Permukiman

Hingga Tahun 2022 di Kabupaten Banyumas masih terdapat lingkungan permukiman kumuh perkotaan seluas 86,31 Ha.

a. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Hingga tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 sebagai dasar penyelenggaraan penataan ruang masih dalam proses revisi. Sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ditetapkan adalah RDTR Perkotaan Purwokerto 2019-2039, RDTR kawasan pusat kegiatan lokal lain seperti Sokaraja, Banyumas, Wangon, dan Ajibarang masih dalam proses penyusunan. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Banyumas belum dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

a. Kurangnya cakupan ketersediaan rumah layak huni

Hingga Tahun 2022 di Kabupaten Banyumas masih terdapat 94.038 unit rumah tidak layak huni yang belum ditangani atau dengan rasio rumah layak huni di Kabupaten Banyumas baru mencapai 79,39%.

b. Kurang tersedianya Sarana Prasarana Umum Pendukung Perumahan dan Permukiman

Meskipun persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik (11,66%) sudah melampaui target 2022 yaitu sebesar (11,58%) dan melampaui target akhir RPJMD (11,63%), namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan perumahan kebutuhan sarana prasarana umum pendukung perumahan dan permukiman akan semakin meningkat.

c. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah

Masalah yang kerap terjadi di Kabupaten Banyumas adalah masih adanya PSU yang belum diserahkan dari pihak ketiga (pengembang) kepada pemerintah.

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

a. Keterjangkauan pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban kebakaran

Tingkat waktu tanggap di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 24 menit, masih jauh dari ideal yaitu 15 menit.

b. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban belum

optimal

Persentase kasus kriminalitas tertangani di Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 93% dihitung berdasarkan jumlah kasus kriminalitas tertangani (sebesar 240 kasus) terhadap jumlah kriminalitas (258 kasus).

- c. Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyumas di tahun 2022 masuk kelas tinggi yaitu sebesar 164. Sebagai upaya penurunan risiko bencana daerah adalah dengan meningkatkan Kapasitas Daerah. Di tahun 2022 Nilai Kapasitas Daerah Kabupaten Banyumas sudah cukup tinggi sebesar 0,8 dan perlu ditingkatkan lagi.

6. Sosial

- a. Belum optimalnya ketersediaan layanan sosial

Penanganan PPKS di lapangan terdapat kendala yang dihadapi. Diantaranya terkait daya tampung rumah singgah yang terbatas. Saat ini karena permasalahan tersebut, dinsospermasdes masih belum optimal dalam penanganan terutama ODGJ karena memerlukan waktu terkait pencarian lokasi tempat tinggal dan tempat untuk rehabilitasi. Karena keterbatasan rumah singgah, penanganan ODGJ dan anak terlantar dicampur.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

- a. Kurangnya kesempatan kerja

Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi dunia kerja, diperlukan pengelolaan tenaga ketenagakerjaan yang baik. Pada tahun 2022, tercatat ada 10.510 lowongan yang diperebutkan oleh 14.894 pencari kerja yang tercatat. Perlu adanya perluasan kesempatan kerja dan pelaksanaan bursa kerja. Pada tahun 2022, pelaksanaan bursa kerja atau *job fair* terlaksana hanya dua kali saja. Faktor lain yang

menyebabkan pengelolaan tenaga kerja tidak optimal yaitu belum terlaksananya pemantauan tenaga kerja setelah ditempatkan.

b. Kurangnya kualitas dan daya saing tenaga kerja

Meski didukung banyak lembaga pendidikan formal dan informal, kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Banyumas masih rendah. Pada 2022, persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja hanya mencapai 59,83% saja. Dari total 13.921 lowongan kerja, hanya 8.239 lowongan yang berhasil terisi. Hal ini terjadi karena belum adanya kecocokan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Meski pada 2022, persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster mencapai 100%.

c. Rendahnya kualitas hubungan industrial

Hubungan Industrial merupakan salah satu faktor penting dalam menanggulangi pengangguran. Hubungan Industrial berperan menjaga hubungan antara tenaga kerja dan penyedia kerja. Namun dalam pelaksanaannya, kualitas Hubungan Industrial masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak. Pada 2022, baru tercapai 8,19% (98 dari 1.196) perusahaan di Banyumas yang menerapkan tata kelola yang layak. Penerapan tata kelola perusahaan yang layak meliputi PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila sebuah perusahaan belum menerapkan tata kelola yang layak, maka akan rentan terjadi konflik antara tenaga kerja dan penyedia kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : Kemitraan antara dunia usaha dengan Serikat Pekerja (SP) belum optimal; Kemitraan antara pemerintah, pekerja dan dunia usaha belum optimal; Kerjasama Kelembagaan Tripartit dan Bipartit belum optimal; dan Kelembagaan Hubungan Industrial belum berjalan optimal.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

a. Masih rendahnya kualitas pemberdayaan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas sebesar 70,10 masih di bawah IDG Provinsi Jawa Tengah 71,64 dan Nasional 76,26.

b. Masih kurangnya upaya perlindungan terhadap perempuan

Tren angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Banyumas tiap tahun cenderung meningkat. Jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 35 kasus dan di tahun 2022 menjadi sebesar 86 kasus.

c. Kurangnya kualitas data terkait gender

Kualitas data terkait gender di Kabupaten Banyumas masih menjadi suatu masalah dikarenakan hanya 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari total 29 OPD (34,48%) yang sudah memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan.

d. Masih rendahnya kemampuan dan daya saing keluarga

Belum optimalnya kemampuan dan daya saing keluarga ditandai dengan masih rendahnya persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yakni 7,41% dan persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga sebesar 3,6%.

e. Masih kurangnya kualitas perlindungan terhadap anak

Jumlah kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, tahun 2021 sebesar 72 kasus dan di tahun 2022 sebesar 86 kasus.

f. Masih kurangnya kualitas serta partisipasi kelompok/ Organisasi anak

Forum anak sudah dibentuk di seluruh kecamatan dan juga desa di Kabupaten Banyumas. namun belum maksimal pembinaan pada forum anak menyebabkan peran forum anak belum optimal sampai saat ini.

3. Pangan

a. Belum Optimalnya Sarpras Pendukung dan Pengelolaan Cadangan Pangan

Pengembangan sarana prasarana cadangan pangan pada tahun 2022 mencapai 4 unit. Sarana prasarana cadangan pangan yang dibangun tersebut berupa: pembangunan lumbung pangan kapasitas 60-100 ton, lantai jemur, *Rice Milling Unit* (RMU), dan *bed dryer* bahan bakar biomassa. Lokasi pengembangan sarpras cadangan pangan tersebut antara lain: Gapoktan Sri Lestari Desa Karanglo Kecamatan Cilongok, Gapoktan Margo Kencono Desa Margasana Kecamatan Jatilawang, Gapoktan Mugi Rahayu Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen dan Gapoktan Ngudi Tani Desa Karangpetir Kecamatan Tambak. Pembangunan sarpras tersebut dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022. Jumlah sarpras cadangan pangan tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Banyumas. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan cadangan pangan utamanya yaitu: keterbatasan jumlah sarana prasarana karena ketergantungan terhadap APBN, keterbatasan anggaran APBD untuk mengisi cadangan pangan serta operasional, dan keterbatasan SDM pengelola sarpras cadangan pangan.

b. Terbatasnya bantuan pangan di daerah rawan pangan

Tingkat penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2022 mencapai 91,67% atau 77 desa yang mendapatkan bantuan dibandingkan dengan total 84 desa rawan pangan di Kabupaten Banyumas. Penanganan desa rawan pangan belum optimal dikarenakan belum adanya koordinasi lintas sektor dan belum kuatnya analisis kebutuhan desa rawan pangan yang menjadi target penanganan.

c. Kurangnya Diversifikasi Konsumsi

Pada Tahun 2022 skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Banyumas sebesar 91,70 dan masih dibawah skor PPH ideal sebesar 100. Belum idealnya skor PPH disebabkan

oleh belum idealnya tingkat konsumsi umbi-umbian (38% dari konsumsi ideal), pangan hewani (91% dari konsumsi ideal), kacang-kacangan (68% dari konsumsi ideal), serta buah/biji berminyak (17% dari konsumsi ideal). Sementara itu untuk konsumsi padi-padian (102% dari konsumsi ideal), minyak dan lemak (125% dari konsumsi ideal) sudah memenuhi angka ideal. Selain itu jika melihat Angka Kecukupan Energi tingkat Kabupaten Banyumas masih dibawah angka ideal (2.100 kkal/kap/hari) yaitu sebesar 2.001 kkal/kap/hari. Selain itu, dari aspek konsumsi masyarakat masih mengalami permasalahan lainnya yaitu *food waste*, sehingga pangan yang tersedia tidak dikonsumsi optimal oleh masyarakat atau terbuang. Angka konsumsi ikan tahun 2022 sebesar 34,25 kg/kapita/tahun, angka konsumsi ikan tersebut masih dibawah tingkat provinsi Jawa Tengah 36,74 kg/kapita/tahun dan tingkat nasional yaitu sebesar 55,37 kg/kapita/tahun.

- d. Kurangnya Pengendalian dan Pengawasan Keamanan Pangan
Terkait pengendalian dan pengawasan keamanan pangan, data menunjukkan pada 2022 persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mencapai 98,01% atau terdapat 2 temuan sampel pangan yang tidak aman dari total sampel yang diambil adalah 101 sampel, jumlah sampel tersebut dinilai masih sangat rendah untuk menjamin keamanan pangan masyarakat Banyumas. Pada tahun 2021 jumlah sampel pangan yang diuji mencapai 130 sampel.

4. Pertanian

- a. Kurangnya fasilitasi pemanfaatan/penggunaan tanah

Luas wilayah Kabupaten Banyumas 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP Tahun 2019) bidang. Berdasarkan sumber data dari BPS Jawa Tengah 2022 dari jumlah bidang tanah tersebut yang terdaftar sampai tahun 2021 baru 532.651 bidang (49,46%), dan belum terdaftar sebanyak 544.294 bidang (50.54%).

5. Lingkungan hidup

a. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup

Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas salah satunya disebabkan karena belum adanya dokumen mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) yang seharusnya dipakai untuk penyusunan dokumen lingkungan lainnya seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada tahun 2022, persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup sudah mencapai target yaitu 100%. Dokumen RPPLH tahun 2022 memang sudah tersedia namun belum disusun berdasarkan dokumen D3TLH Kabupaten Banyumas.

b. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup

Pada tahun 2022, nilai IKA sementara Kabupaten Banyumas (48,89) tidak memenuhi target minimal IKA (53,85). Tidak tercapainya IKA menunjukkan bahwa pengendalian lingkungan hidup masih belum optimal.

c. Kurangnya ruang terbuka hijau publik

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah seluas 349.3 Ha atau sekitar 2% dari luas perkotaan, masih sangat jauh dibandingkan dengan target 20% RTH publik Kawasan Perkotaan.

d. Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah

Untuk mencapai target *zero waste*, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan, khususnya karena belum semua wilayah memiliki prasarana pengelolaan sampah (TPST/TPS3R). Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas pada TPST/TPS3R yang sudah ada, berupa peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusianya.

e. Belum disusunnya Rencana Induk dan Studi Kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten/Kota selain menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Belum optimalnya sistem layanan administrasi kependudukan Sistem layanan administrasi kependudukan tahun 2022 belum optimal dari 1.378.950 penduduk yang berusia di atas 17 tahun baru 1.370.739 penduduk yang ber-KTP.

- b. Belum optimalnya akses pelayanan dan informasi administrasi kependudukan

Persentase data bersih dari data ganda dan anomali yang tervalidasi pada tahun 2022 sejumlah 94,26%

7. Pemberdayaan masyarakat desa

- a. Belum Optimalnya Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Desa

Pada Tahun 2022 Desa-Desa di Kabupaten Banyumas yang berstatus Desa Mandiri berjumlah 15 Desa, Desa Maju berjumlah 124 Desa dan Desa Berkembang berjumlah 162 Desa. Hasil tersebut lebih baik dari tahun 2021 dengan rincian 5 Desa mandiri, 114 Desa Maju, dan 182 Desa Berkembang. Masih minimnya desa mandiri menunjukkan masih perlunya peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam ber KB

Jumlah peserta KB aktif tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 169.517 menjadi 205.720 peserta

- b. Kurangnya Pemanfaatan Fasilitas dan Akses ber KB

Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang tahun 2022 baru sebesar 45,15%,

c. Rendahnya keluarga sejahtera

Masih rendahnya pembinaan terhadap kelompok keluarga sejahtera mempengaruhi tingkat partisipasi dalam ber KB. hal ini dapat dilihat dari peserta KB yang berasal dari Penerima iuran PBI tahun 2021 masih rendah.

d. Kurangnya peran dan dukungan pemerintah dalam pengendalian penduduk

Sebagai rumusan perencanaan pembangunan kependudukan Pemerintah Kabupaten Banyumas selama 25 Tahun kedepan, sudah mulai menyusun Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pada tahun 2022. Tahapan yang sudah dilaksanakan dalam penyusunan ini yaitu Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar dan Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar. Masih ada 5 tahapan lagi yang harus dilalui untuk menyelesaikan Dokumen GDPK.

9. Perhubungan

a. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas

Sampai dengan Tahun 2022 empat kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Somagede, dan Kecamatan Kalibagor) masih terdapat wilayah yang belum dilayani trayek angkutan.

Terminal yang ada belum memenuhi kebutuhan di Kabupaten Banyumas. Terminal Sokaraja yang dibutuhkan untuk terminal aglomerasi belum terbangun. Secara eksisting Terminal Tipe C di Kabupaten banyumas yang telah terbangun dan telah ditetapkan dengan SK Bupati Banyumas sebagai Terminal Tipe C sebanyak 3 terminal antara lain yaitu Terminal Ajibarang, Terminal Wangon dan Terminal Karanglewas. Akan tetapi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas, Terminal Ajibarang dan Terminal Wangon direncanakan sebagai Terminal Tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun

2011-2031, Terminal Tipe C di Kabupaten Banyumas direncanakan 5 Terminal antara lain Terminal Sokaraja, Terminal Karanglewas, Terminal Banyumas, Terminal Patikraja, dan Terminal Purwojati. Berdasarkan hal tersebut, baru terbangun 1 Terminal Tipe C yaitu Terminal Karanglewas sampai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah kedua dalam indikasi program/kegiatan RTRW Kabupaten Banyumas.

b. Banyaknya titik rawan kecelakaan (*blackspot*)

Pada *blackspot* baik di ruas jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas.

c. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana konektivitas

Sarana dan prasarana Terminal Tipe C di Kabupaten Banyumas masih belum memenuhi standar pelayanan minimal terminal angkutan penumpang.

d. Belum disusunnya dan ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan diamanatkan penyusunannya oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dalam pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu.

10. Komunikasi dan informatika

a. Belum optimalnya Manajemen Tata Kelola SPBE

Indeks SPBE Kabupaten Banyumas, masih berada pada angka 2,73 (skala 1-4) atau hanya mencapai 85% dari target yang telah dibuat tahun 2022.

b. Belum Optimalnya Infrastruktur Digital

Belum semua OPD di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memanfaatkan TIK pada pengelolaan pemerintah daerah. Pemanfaatan TIK yang dimaksud meliputi penggunaan aplikasi, pusat data, dan sebagainya. Dari total 56 OPD, baru

50 OPD di Kabupaten Banyumas yang telah memanfaatkan TIK pada tata kelola pemerintah daerahnya dan baru sejumlah 30 OPD dari total 56 OPD yang telah memanfaatkan layanan internet *Fiber Optic* yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

c. Belum Optimalnya Tata Kelola Informasi Publik

Jumlah aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2022 hanya berjumlah 34 dari total 54 aplikasi layanan publik dengan persentase 63% yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

a. Kurangnya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan agar koperasi dan usaha mikro dapat terus bersaing. Namun, pada pelaksanaannya pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase koperasi yang mengikuti pelatihan yang baru mencapai 27,6% pada tahun 2022. Dari 547 koperasi yang terdata, baru 151 koperasi saja yang mengikuti pelatihan. Selain itu, jumlah koperasi yang mendapat dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha hanya 32 koperasi saja. Jika dibandingkan dengan koperasi yang ada, jumlah ini cukup rendah dengan persentase 5,85% saja. Selaras dengan koperasi, dukungan terhadap usaha mikro juga masih belum optimal. Unit usaha mikro yang telah diberikan fasilitasi pelatihan hanya 279 unit dari 84.497 unit yang terdaftar (0,33%).

b. Masih perlunya peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi

Untuk memastikan kualitas dan kesehatan koperasi, perlu adanya pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi.

Namun pada 2022, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi belum optimal. Lebih lanjut, jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi baru terlaksana 78 unit atau sekitar 14,46% saja. Selain itu, jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya hanya mencapai 53 saja atau 12,32%.

c. Belum optimalnya pelayanan izin usaha simpan pinjam

Kabupaten Banyumas memiliki jumlah koperasi simpan pinjam yang cukup banyak, namun hanya sedikit saja yang memiliki izin. Dari 297 koperasi simpan pinjam aktif yang tercatat pada 2022, hanya 22 koperasi yang memiliki izin simpan pinjam atau sebesar 0,07% saja. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan yang dilaksanakan.

d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber daya koperasi di Kabupaten Banyumas belum optimal. Setelah dilakukan penilaian koperasi sehat pada 2022, tercatat 150 sumber daya koperasi yang belum optimal pemahamannya tentang perkoperasian. Selain pemahaman tentang perkoperasian, manajemen keuangan koperasi juga masih belum optimal.

12. Penanaman Modal

- a. Ketepatan Waktu Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang Belum Sesuai dengan Waktu yang Ditetapkan
- Capaian penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP) sudah mencapai 100%. Namun, penyelesaiannya belum tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah atau teknis lain yang melebihi batas waktu sehingga memperlambat proses perizinan. Selain itu, pemenuhan persyaratan dari pemohon yang tidak kunjung dilengkapi juga menyebabkan terhambatnya proses perizinan. Sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan dan mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas dan peningkatan SDM pelayanan publik.

b. Masih adanya Pengaduan Berulang

Pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan mutu dan produktivitas, pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Capaian sistem pelayanan publik sudah 100% akan tetapi pada pelaksanaannya terjadi pengaduan masyarakat yang berulang. Tahun 2022 jumlah pengaduan sebanyak 298 aduan, nilai ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 188 pengaduan. Untuk mengurangi kenaikan aduan yang berulang perlu ditingkatkan kegiatan monitoring terhadap program pelayanan sehingga pengaduan berulang dapat di minimalisir.

c. Investasi yang ditawarkan belum menarik minat investor

Tahun 2022 tenaga kerja yang terserap baru 1,24% dari jumlah investasi. Kecilnya penyerapan tenaga kerja ini dikarenakan investor atau proyek yang ada terbagi dalam investasi yang rata rata nilainya tidak besar. Untuk itu perlu didorong adanya investor yang menanamkan modal di Kabupaten Banyumas agar penyerapan tenaga kerja lebih besar sehingga dapat menurunkan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

13. Kepemudaan dan olahraga

a. Belum optimalnya pertumbuhan Wirausaha Muda

Pada 2022, pertumbuhan wirausaha muda mencapai 30,4%. Meski angka pertumbuhan tergolong baik, jika melihat jumlah wirausaha muda hanya 23 orang pada tahun 2021, dan 30 orang pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan jumlah pemuda Banyumas, angka tersebut tergolong kecil sehingga perlu ada perhatian lebih untuk meningkatkan wirausaha muda Kabupaten Banyumas. Adapun faktor yang berpengaruh adalah belum optimalnya pengembangan kompetensi wirausaha muda maupun pemuda pelopor. Pelatihan yang dilaksanakan tidak dilanjutkan dengan pendampingan yang konsisten sehingga banyak peserta pelatihan yang tidak melanjutkan usahanya.

b. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga

Prestasi olahraga pemuda Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif. Data 2022 menyatakan prestasi Kabupaten Banyumas di level Kabupaten mencapai 119 medali, di level Provinsi mencapai 84 medali, dan tidak mendapatkan medali di tingkat Nasional maupun Internasional. Angka capaian di berbagai level tersebut masih lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Selain keterbatasan dana untuk memfasilitasi pemuda berpartisipasi dalam perlombaan/ kejuaraan, belum optimalnya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia keolahragaan menjadi penyebab belum maksimalnya prestasi olahraga pemuda. Faktor berikutnya adalah belum optimalnya pemaksimalan potensi olahraga rekreasi seperti E-Sport, olahraga air, olahraga dirgantara, dan olahraga rekreasi lainnya.

- c. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Perkembangan jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Jumlah organisasi pemuda pada 2018 berjumlah 119 unit, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 173 dan 2020 sebesar 200, kemudian terjadi penurunan menjadi 193 organisasi di tahun 2021. Pada tahun 2022, organisasi pemuda kembali mengalami peningkatan menjadi 196 unit. Terdapat 47.760 anggota aktif yang berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Meskipun jumlah organisasi sudah cukup banyak, masih ada permasalahan seperti belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

14. Statistik

- a. Penyediaan data belum sinkron dengan kebutuhan data perencanaan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengamanatkan agar pemerintah daerah dapat menyediakan data yang sinkron dengan kebutuhan data perencanaan. Namun di Kabupaten Banyumas belum

dapat memenuhi hal tersebut. Hal ini menyebabkan pemanfaatan data menjadi kurang optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya metadata dan interoperabilitas data belum semua terpenuhi karena keterbatasan SDM dan ketergantungan pada pihak di luar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan.

- b. Pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial belum optimal. Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan data geospasial. Namun di Kabupaten Banyumas belum dapat memenuhi hal tersebut. Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD (Jaringan Informasi Geospasial Daerah).

15. Persandian

Hanya sebagian OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (36 OPD) dari total 56 OPD pada tahun 2022 yang telah menggunakan layanan keamanan informasi, misalnya penggunaan *Secure Shell* pada website/aplikasi, layanan *cyber patrol*, audit pusat data, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut didasari diantaranya karena kurangnya SDM Persandian (JF Sandiman & JF Manggala Informatika), minimnya anggaran persandian (tidak adanya anggaran untuk Literasi Keamanan Informasi, sertifikasi kompetensi SDM, *tools pentest*), tidak adanya infrastruktur pendukung (ruang *Security Operation Center*, laboratorium keamanan informasi), dan belum adanya regulasi persandian di Kabupaten Banyumas.

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan

Banyumas memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Mulai dari kesenian tradisional, masyarakat adat, hingga cagar budaya. Namun keberagaman tersebut belum termanfaatkan

dengan optimal. Pada tahun 2022, jumlah kebudayaan daerah yang diselenggarakan hanya 17 kegiatan. Pada tahun yang sama, lembaga adat yang aktif berjumlah 8 lembaga, sedangkan untuk kesenian tradisional yang aktif mencapai 22 kesenian. Meskipun capaian tersebut sudah cukup baik, kesenian yang dilestarikan masih monoton. Kesenian yang dipilih untuk dilestarikan kebanyakan sudah lestari, sedangkan masih banyak kesenian tradisional yang belum terlestarikan. Lebih lanjut, karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi baru mencapai 73,1% saja. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah belum optimalnya pembinaan kesenian. Pembinaan ditujukan agar pelaku kesenian tradisional meningkat kapasitasnya dan memiliki nilai tambah secara ekonomi. Dari segi pemasaran, belum adanya festival kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata dan belum adanya inovasi promosi kebudayaan membuat pemanfaatan kebudayaan menjadi tidak maksimal.

b. Belum maksimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Banyumas masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada 2022, tercatat ada 1.220 objek diduga cagar budaya. Dari jumlah tersebut baru 63 objek cagar budaya yang memiliki SK. Lebih lanjut, cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baru mencapai 20 objek atau sekitar 31,74% saja. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Banyumas, terutama cagar budaya yang bukan merupakan aset Pemerintah Daerah membuat pengelolaan cagar budaya tidak optimal.

c. Belum optimalnya pengelolaan permuseuman

Pada tahun 2022, persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mencapai 98%. Terdiri dari 17 buah koleksi arkeologi, 36 koleksi historika, 862 koleksi seni rupa, dan 96 koleksi teknologika. Meskipun sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan terutama pemeliharaan

koleksi museum. Jika dilihat dari nilai tambahnya, museum di Banyumas masih memerlukan adanya inovasi agar dapat menjadi daya tarik wisata khususnya wisata edukasi. Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi, pengembangan museum berbasis teknologi perlu dilakukan agar dapat menarik minat masyarakat terutama kelompok umur pemuda dan anak-anak.

d. Belum optimalnya pembinaan sejarah

Untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal, perlu dioptimalkan juga pembinaan sejarah. Pada 2022, pelaksanaan pembinaan sejarah lokal baru dilaksanakan satu kali saja. Adapun materi yang dibawakan adalah seminar peranan sejarah Babad Banyumas. Jumlah pelaksanaan ini tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembinaan sejarah lokal yang direncanakan. Persentase pembinaan sejarah lokal baru terlaksana 16,67% saja. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan sejarah lokal lewat pembinaan sejarah, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Banyumas.

17. Perpustakaan

a. Kurangnya Kegemaran Membaca Masyarakat pada perpustakaan

Berdasarkan survei kepada masyarakat, nilai indeks kegemaran membaca Kabupaten Banyumas sebesar 64,4 dan tergolong sedang.

b. Kurangnya Akses Literasi Perpustakaan

Akses literasi perpustakaan bisa dilihat dari rasio perpustakaan per satuan penduduk dimana di Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 0,56. Idealnya rasio perpustakaan per satuan penduduk bernilai 1.

18. Kearsipan

a. Pengelolaan arsip belum sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria

Jumlah OPD di Kabupaten Banyumas yang sudah mengelola

arsip sesuai standar baru 33 OPD dari 56 OPD (58,93%)

b. Kurangnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Penyelenggaraan kearsipan hingga saat ini belum menyentuh sampai ke wilayah Unit Kearsipan yang terdampak bencana utamanya bencana alam dengan kegiatannya berupa evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana serta pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana. Bencana dapat berdampak pada rusak bahkan hilangnya dokumen pemerintahan, kelembagaan organisasi dan dokumen masyarakat sehingga memerlukan upaya perlindungan dan penyelamatan arsip seperti arsip dinamis, arsip terjaga, arsip vital dan arsip statis.

Kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip telah mulai dilaksanakan pada tahun 2022, namun jumlahnya masih sangat kecil yaitu 1,04% (meliputi Daftar Arsip Covid Banyumas 2020-2022)

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Belum Optimalnya Intensifikasi Budidaya Perikanan

Di Kabupaten Banyumas pengembangan intensifikasi budidaya perikanan belum optimal. Faktor yang mempengaruhi yaitu banyaknya budidaya perikanan dalam skala kecil dan terpecah sehingga sulit untuk dilakukan pendataan dan penghimpunan. Tahun 2022 produksi budidaya perikanan sebesar 11.599,97 ton. Nilai ini meningkat sebesar 479,67 ton atau 4,32%, akan tetapi peningkatannya tidak signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah Kawasan budidaya perikanan yang stagnan. Total Kawasan Budidaya Perikanan di Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 434 hektar. Jumlah Kawasan tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh pembudidaya budidaya perikanan yaitu ketersediaan air yang harus berbagi dengan persawahan. Sehingga untuk dapat mengoptimalkan intensifikasi

budidaya perikanan perlu dilakukan penguatan, pendampingan dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan sehingga mampu produksi budidaya perikanan serta pembuatan kolam portable untuk mendukung peningkatan produksi.

b. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap

Pengelolaan perikanan tangkap meliputi pengelolaan perairan umum terbatas dan pengawasan perairan umum terbatas. Pengelolaan perairan umum berkaitan dengan *re-stocking* ikan. Tahun 2022 Jumlah perairan umum yang *re-stocking* sebanyak 20 buah sedangkan jumlah perairan umum yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 145 buah. Sedikitnya jumlah *re-stocking* salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya kegiatan survei untuk memastikan jumlah ikan yang harus di *stocking* di setiap kawasan. Sedangkan untuk pengawasan perairan umum berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kawasan agar terhindar dari *Illegal Fishing* dan penggunaan alat tangkap yang berbahaya. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan perikanan tangkap, dilakukan pembinaan kepada para nelayan dengan tujuan dapat menjaga Kawasan perikanan tangkap.

c. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan belum optimal

Produksi pengolahan hasil perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian besar dilakukan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Di kabupaten banyumas sendiri pengolahan dan pemasaran belum optimal, penyebabnya yaitu data informasi tentang usaha olahan hasil perikanan masih rendah. Tahun 2022 data menunjukkan dari total 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas hanya 16 kecamatan yang melakukan pengolahan ikan. Hal ini juga didukung jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang terdata sebanyak 100 pelaku usaha, sedangkan jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang mengajukan ijin hanya 10 pelaku usaha. Nilai ini sangat rendah jika dibandingkan dengan banyaknya jenis olahan ikan yang ada. Sehingga untuk kedepannya perlu dibuat kegiatan

pemerataan pemberdayaan yang inovatif yang mampu meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Banyumas lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan produk lain.

2. Pariwisata

a. Belum Optimalnya Potensi Kebudayaan dan Kepariwisata

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif. Kunjungan wisatawan mengalami kenaikan pada 2018 dan 2019, menurun pada 2020 dan 2021, dan kembali mengalami peningkatan pada 2022. Tercatat pada 2022, kunjungan wisatawan mencapai 2.656.579 orang dan meningkat 77,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, daya tarik wisata di Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan sebesar 3,37% atau bertambah 3 daya tarik wisata dibanding tahun sebelumnya. Meski mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dan daya tarik wisata, masih banyak potensi kepariwisataan yang belum optimal. Potensi yang pertama adalah belum maksimalnya pelayanan pariwisata. SDM kepariwisataan yang bersertifikasi baru mencapai 34,76% atau 452 orang dari total 1.300 SDM kepariwisataan yang ada di Kabupaten Banyumas. Lebih lanjut, jika dilihat dari objek wisata yang memiliki pelayanan lengkap, tercatat hanya 6 objek saja di Kabupaten Banyumas yang memiliki pelayanan lengkap. Potensi lain yang belum dimaksimalkan adalah paket wisata terintegrasi antar objek wisata maupun antar kawasan wisata. Selain itu, perlu adanya inovasi/event wisata seperti wisata berbasis olahraga seperti *trail marathon* atau sepeda.

Sementara itu, belum bisa maksimalnya potensi pariwisata juga disebabkan karena pemasaran wisata belum optimal. Pada tahun 2022, pelaksanaan promosi pariwisata sudah dilaksanakan sebanyak 481 kali. Promosi pariwisata dilaksanakan secara langsung dengan mengikuti expo, media cetak, dan platform media sosial. Meski persentase pelaksanaan promosi meningkat, namun tidak sebanding

dengan kunjungan wisatawan. Bisa diartikan pemasaran wisata yang sudah dilaksanakan masih belum efektif. Melihat kemajuan teknologi yang sangat pesat, perlu adanya inovasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi. Selain itu, perlu adanya inovasi metode pemasaran dan promosi yang disesuaikan dengan segmen pasar agar pemasaran yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Selain itu, masalah lainnya adalah masih belum diterapkannya kolaborasi *hexahelix* (Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, Komunitas, Media, dan Target Pasar) dalam pemasaran pariwisata.

b. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif merupakan sektor ekonomi baru yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Adapun subsektor Ekonomi Kreatif unggulan Kabupaten Banyumas adalah Seni Pertunjukan, didukung oleh tiga subsektor prioritas yaitu Film, Animasi, dan Video; Kuliner; dan Fotografi. Namun pada tahun 2022, pelaku ekonomi kreatif yang terdata adalah 52 orang dan hanya 20 orang saja yang aktif. Tidak optimalnya pengembangan potensi Ekonomi Kreatif dikarenakan belum tersedianya Sistem Informasi Ekonomi Kreatif. Ketersediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif diharapkan mampu menggambarkan sektor potensial Ekonomi Kreatif, terutama pada subsektor unggulan dan tiga subsektor prioritas, sehingga pemberdayaan dan pengembangan Ekraf di Kabupaten Banyumas lebih tepat sasaran. Selain itu, belum terlaksananya fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pelaku Ekonomi Kreatif juga memberikan andil. Belum berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif menyebabkan pengembangan ekonomi kreatif terhambat. Ekosistem yang dimaksud adalah ruang (bisa berupa bangunan fisik maupun kegiatan) yang dapat mengakomodasi, mempromosikan, dan memasarkan produk ekonomi kreatif.

3. Pertanian

a. Belum Optimalnya Intensifikasi Produksi Komoditas Pangan

Pertanian

Data menunjukkan produksi komoditas pertanian pada 2022 mengalami penurunan dibandingkan 2021 yaitu sebesar -0,39%. Lebih detail, produksi tanaman pangan mencapai 404 ribu ton, hortikultura 39 ribu ton dan tanaman perkebunan 72 ribu ton dengan total produksi pangan pertanian 2022 yaitu sebesar 516 ribu ton. Penurunan produksi pangan pertanian tersebut disebabkan oleh tingkat produktivitas padi yang stagnan dalam 5 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 5,4 ton/hektar, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian (bibit/benih, pupuk, pestisida, irigasi), adanya serangan OPT antara lain tikus, wereng, dan penggerek batang untuk tanaman pangan, terjadinya *food loss* produksi pangan dan tidak optimalnya produksi hortikultura dikarenakan kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang 2022. Sementara itu, untuk produksi peternakan 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,20% dibandingkan 2021. Meskipun produksi peternakan meningkat, subsektor ini masih mengalami beberapa permasalahan yaitu: harga pakan yang tinggi, kesehatan hewan (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK).

b. Kurangnya Penguatan SDM dan Kelembagaan Pengelola Komoditas Pangan Pertanian

Pengembangan pangan terkendala oleh aktor utama produksi pangan yang masih didominasi dengan pendidikan rendah, serta usia yang menua (SUTAS BPS 2018, 64,2% petani berusia diatas 45 tahun) sehingga menyebabkan sulitnya dalam introduksi teknologi produksi pangan pertanian yang lebih efektif dan efisien dengan dampak akhirnya yaitu kesejahteraan petani yang rendah. Selain itu, pengembangan kelembagaan petani masih hanya sebatas pada kelompok tani dengan jumlah sebanyak 1.849 kelompok tani di Kabupaten Banyumas. Belum ada pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk korporasi petani sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Penguatan aspek penyuluhan juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas baik petani maupun kelembagaannya.

c. Kurangnya Nilai Tambah Hasil Pertanian

Rendahnya nilai tambah hasil pertanian dapat dilihat dari jenis produk yang dijual oleh petani, sebagai contoh untuk komoditas padi masih dijual dengan gabah kering panen ataupun giling, kelompok tani belum mampu menjual dalam bentuk beras. Sementara untuk komoditas perkebunan sudah mulai terjadi hilirisasi terutama untuk komoditas kelapa yang diolah menjadi gula kelapa dan merupakan ekspor andalan Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 11.218 ton. Masih terdapat potensi hilirisasi subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan untuk dikembangkan sehingga jenis turunan olahan semakin beragam dan nilai tambah dapat dinikmati oleh petani dan masyarakat Kabupaten Banyumas. Lemahnya nilai tambah hasil pertanian tersebut disebabkan oleh terbatasnya sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil pertanian dan terbatasnya bimbingan teknis yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

d. Sistem Budidaya Peternakan Belum Efektif dan Efisien

Faktor yang mempengaruhi sistem budidaya peternakan belum efektif dan efisien adalah sarana prasarana peternakan masih terbatas, kesadaran peternak terkait perizinan masih rendah, keterbatasan akses terhadap pakan berkualitas, dan budidaya peternakan masih dilaksanakan secara terpisah dan skala kecil. Pada tahun 2022 jumlah jumlah Kawasan ternak sebanyak 5 kawasan sedangkan Kawasan yang dikelola hanya 1 kawasan atau 20%. Pengembangan peternakan berbasis kawasan sangat dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi dalam budidaya peternakan.

e. Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Belum Berjalan Optimal

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner adalah penanganan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner belum memadai serta penanggulangan dan pengendalian bencana

non alam belum optimal. Di tahun 2022 terdapat sebanyak 4.343 kasus dengan permasalahan utama yang terjadi yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Periode waktu 2019-2021 terjadi penurunan angka kasus penyakit hewan, namun pada tahun 2022 terjadi penyakit hewan yang berbahaya yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penyakit ini menyerang hewan ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba, rusa), babi, unta dan beberapa jenis hewan liar dimana tingkat penularannya sangat tinggi yang mencapai 90% dan berakibat kematian pada hewan ternak. Ketersediaan desinfektan dan obat-obatan untuk ternak menjadi hal yang penting untuk tersedia, sehingga kematian ternak dapat dicegah.

4. Perdagangan

a. Kurangnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan

Pasar merupakan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. Kabupaten Banyumas memiliki total 26 pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar-pasar tersebut dikoordinasi oleh 4 UPTD yaitu: UPTD Pasar Wilayah Purwokerto 1, UPTD Pasar Wilayah Purwokerto 2, UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur dan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat. Dari 26 pasar yang dikelola, masih terdapat 11 pasar (42%) yang masuk kedalam klasifikasi pasar kelas 3 sebanyak 8 pasar dan kelas 4 sebanyak 3 pasar (Pasar Karangtengah, Pasar Cikebrok dan Pasar Kober). Melihat dari kondisi pasar, hingga 2022 masih terdapat 9 pasar (35%) yang belum direvitalisasi atau dibangun, antara lain: Pasar Wage, Pasar Situmpur, Pasar Pon, Pasar Ajibarang, Pasar Kober, Pasar Wijahan, Pasar Sumpiuh, Pasar Sangkal Putung, Pasar Sarimulyo. Pasar harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa: kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang kesehatan, ruang peribadatan, sarana dan akses pemadam kebakaran, tempat parkir dan tempat penampungan sampah sementara (Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

Perdagangan).

b. Kurangnya Nilai Tambah Produk Potensial Daerah

Kabupaten Banyumas memiliki komoditas ekspor unggulan yaitu gula kelapa. Volume ekspor gula kelapa pada 2021 mencapai 12.648 ton dan mengalami penurunan pada 2022 yaitu sebesar 11.218 ton (-11%). Terkait dengan ekspor tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, antara lain: biaya ekspor yang mahal (ongkos kapal), kelangkaan kontainer, dan kesulitan pelaku dalam memenuhi persyaratan ekspor (standarisasi), keterbatasan diversifikasi produk ekspor.

Selain melalui ekspor, salah satu upaya dalam peningkatan nilai tambah yaitu melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

c. Kurang Terkendalinya Stabilisasi Harga Pangan

Sektor pangan menghadapi permasalahan yaitu peningkatan harga pangan (inflasi) sebagai dampak kebijakan peningkatan harga bahan bakar minyak pada bulan September 2022. Data dari BPS pada tahun 2022 Inflasi Kota Purwokerto mencapai 6,49% (YoY) dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau memberikan sumbangan tingkat inflasi sebesar 7,26% terbesar kedua setelah kelompok pengeluaran transportasi (17,29%). Lebih detail, komoditas pangan yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi pada bulan Desember 2022 yaitu beras, telur ayam ras, minyak goreng dan cabai rawit. Terkait dengan pengendalian inflasi, Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan terkait dengan keterbatasan produksi komoditas pangan

dengan harga yang *volatile* antara lain: Cabai dan Bawang Merah.

5. Perindustrian

a. Belum Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Industri

Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri tidak optimal dikarenakan belum optimalnya pengendalian dan izin penerbitan izin usaha industri. Pada tahun 2022, jumlah izin yang dipantau dan dianalisis hanya 17 industri. sementara itu pada 2021 hanya ada 12 industri yang izinnya dipantau dan dianalisis. Dari sisi pelaku industri, kesadaran untuk mengurus perizinan juga masih kurang. Selain itu, Banyumas juga belum memiliki sistem informasi industri yang terintegrasi.

b. Kurangnya Pengembangan Industri

Kurang berkembangnya industri di Kabupaten Banyumas disebabkan oleh 2 hal utama, yaitu: kurang tersedianya sarana dan prasarana produksi serta kurangnya perencanaan dan pembangunan industri. pengembangan industri di Kabupaten Banyumas diarahkan untuk menuju ke Industri Hijau yang berwawasan lingkungan dengan fokus utama yaitu hilirisasi sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sumber daya alam lainnya.

6. Transmigrasi

Kurangnya Kegiatan Transmigrasi

Pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas mendapatkan kuota pemberangkatan calon transmigran sebanyak 2 (dua) KK ke Motihelumo, Gorontalo Utara. Meski sudah berhasil memberangkatkan calon transmigran, masih ada permasalahan diantaranya: belum optimalnya pendampingan calon transmigran, belum optimalnya penempatan transmigran (terkait uang saku, bantuan Kesehatan, sosialisasi transmigran, uang transport, dan uang penjajahan); dan belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pencapaian calon transmigran secara langsung. Jika dilihat dari peminatnya, tahun 2022 tercatat ada

24 Kepala Keluarga yang mendaftar untuk menjadi calon transmigran.

4.1.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan

a. Belum Optimalnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Capaian indikator Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah 81,71%. Capaian ini menunjukkan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah belum berjalan secara optimal.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi umum perangkat daerah diukur menggunakan 1 indikator yaitu persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Berdasarkan data tahun 2022, capaian indikator tersebut adalah 100%. Meskipun demikian, tetap diperlukan usaha dalam mengoptimalkan pelaksanaan penataan organisasi dan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan. Harapannya urusan administrasi dapat berjalan lebih optimal.

c. Belum optimalnya fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD salah satunya adalah kelancaran kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan. Salah satu Indikator yang digunakan adalah persentase layanan Sekretariat DPRD yang terealisasi dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD.

2. Pengawasan

a. Kurangnya Kepedulian Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Terhadap Tindak Lanjut Hasil Penjaminan Kualitas yang Dilakukan oleh APIP dan BPK RI

Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK belum semua ditindaklanjuti oleh OPD. 56 rekomendasi APIP belum ditindaklanjuti dan 16 rekomendasi dalam proses. Sedangkan 15 hasil temuan BPK hanya 1 rekomendasi masih dalam proses, 14 rekomendasi BPK lainnya sudah selesai

ditindaklanjuti.

- b. Kurangnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Terhadap Ketentuan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kepatuhan perangkat daerah dan pemerintah desa terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan jumlah pengaduan masyarakat (kasus). Jumlah pengaduan masyarakat di Kabupaten Banyumas meningkat, ditandai oleh jumlah pengaduan masyarakat di Tahun 2021 sebanyak 9 kasus sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 29 kasus.

- c. Belum optimalnya Kapabilitas APIP

Di tahun 2022, Kapabilitas APIP Kabupaten Banyumas berada di level 2 (*Infrastructure*). Level kapabilitas APIP sendiri dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

3. Perencanaan

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan perangkat daerah
Nilai SAKIP komponen perencanaan perangkat daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan kinerja baik berjumlah 53 dari total 29 OPD dan 27 kecamatan.

- b. Belum terwujudnya dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah dengan standar baik

Pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas tidak termasuk dalam peringkat sepuluh besar di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2021, Kabupaten Banyumas masuk pada peringkat sepuluh besar Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah.

- c. Belum optimalnya capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah

Dari 17 program prioritas pembangunan daerah, pada tahun 2022 baru terealisasi 10 program prioritas atau sebesar 58,82%.

4. Keuangan

- a. Belum optimalnya perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebesar

Rp.3.430.884.286.153 dari pagu anggaran sebesar Rp.3.863.994.130.518 atau terealisasi sebesar 90% dari total APBD.

b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah

Hasil pengamanan yang sudah dilakukan terhadap aset dimaksud yaitu 3.633 untuk aset berupa kendaraan yang dibuktikan dengan BPKB dan 2.417 sertifikat. Sehingga total aset telah dilakukan pengamanan sebanyak 6.050 dari total aset yang perlu dilakukan pengamanan sebanyak 7.108 unit/bidang dikali 100% tercapai persentase atas pengamanan aset daerah sebesar 85%.

c. Belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah

Berdasarkan sumber data LRA 2022, realisasi PAD sebesar Rp.697.496.236.093 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Rp.761.991.440.173 menurun 32,6%. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan terhadap seluruh komponen pendapatan.

5. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

a. Belum optimalnya penguatan kapasitas pegawai ASN

Jumlah PNS yang mengikuti diklat manajerial dan fungsional pada tahun 2022 adalah 296 ASN dan lulus serta memiliki sertifikasi. Hal ini menunjukkan baru 1,8% ASN telah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan tugas jabatan fungsional dan struktural di tahun 2022.

b. Belum optimalnya pengelolaan pegawai

Hal ini ditandai dengan persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan sebesar 95%. Pada tahun 2022 Kabupaten Banyumas mendapatkan predikat “Kurang” dari hasil penilaian penerapan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nilai 189,5. Penilaian ini meliputi 8 aspek yaitu aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan, aspek pengembangan karier, aspek promosi dan mutasi, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, aspek perlindungan dan pelayanan dan aspek sistem informasi.

- c. Belum optimalnya Sistem Penilaian Kinerja
 Pada tahun 2022 ASN yang menerima hukuman disiplin sejumlah 10 orang. Jumlah ini bertambah sejumlah 3 ASN dari Tahun 2021 sejumlah 7 ASN.
- 6. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kurangnya pemanfaatan inovasi daerah
 Pada tahun 2022, krenova yang dimanfaatkan sejumlah 3 krenova dari total 6 krenova atau sebesar 50%.
 - b. Kurangnya pemanfaatan hasil riset
 Pada tahun 2022, dari 19 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan ada 17 atau sebesar 89,47%.
- 7. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik
 Hal ini dapat dilihat dari persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu/pemilukada sebesar 78%.
 - b. Masih Kurangnya Peran LSM, Ormas dan Forum lainnya dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 Hal ini dapat dilihat dari persentase partisipasi dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan di tahun 2022 sebesar 65% yang disebabkan oleh kurang optimalnya pembinaan terhadap kelompok tersebut.
 - c. Belum optimalnya antisipasi potensi konflik
 Potensi konflik di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sebanyak 24 kasus. Meskipun sudah menurun dari tahun 2021, diperlukan adanya upaya pencegahan melalui forum kewaspadaan dini masyarakat.
- 8. Kewilayahan
 Meskipun rata-rata nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan tahun 2022 sudah tinggi yakni sebesar 85,63, namun masih harus perlu dipertahankan dan dioptimalkan.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Global

4.2.1.1. Krisis Pangan, Krisis Energi, dan Resesi Global

Dampak perang Rusia-Ukraina berimbas pada melemahnya suplai

pangan dan energi di seluruh dunia. Melemahnya suplai mengakibatkan kenaikan harga pangan dan energi memicu inflasi dan kenaikan harga produksi. Untuk meredam laju inflasi bank sentral berbagai negara menaikkan suku bunga acuan secara agresif, sehingga suku bunga kredit naik dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Resesi yang mengancam dunia merupakan dampak krisis pangan dan energi yang diikuti dengan kenaikan inflasi. Resesi akan mengganggu stabilitas ekonomi negara dan masyarakat sebagai individu. Resesi bisa mengganggu kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan resesi sebagai kondisi ekonomi sebuah negara yang sedang memburuk. Resesi ditandai dengan adanya penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Resesi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, penurunan penerimaan negara, perusahaan rentan bangkrut karena pendapatan perusahaan juga menurun sehingga mengancam terjadinya PHK dan peningkatan pengangguran, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong efisiensi pada sektor pangan dan energi, serta menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau. Kebijakan tersebut mampu mengendalikan inflasi sehingga ekonomi dapat tetap tumbuh.

4.2.1.2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global terutama disebabkan pemanasan global yang intensitasnya semakin tinggi, baik berupa kejadian cuaca dan iklim ekstrim maupun perubahan iklim dalam jangka panjang. Perubahan iklim membawa dampak yang luas pada banyak segi kehidupan manusia. Kenaikan suhu global ini diperkirakan mencapai puncak pada periode tahun 2030–2060. Kenaikan suhu global diatas 5 derajat memberi dampak yang fatal bagi kehidupan di bumi.

Proses pemanasan global berlangsung secara evolutif dengan dampak yang sudah dirasakan dari sekarang. Proses pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca dan iklim yang ekstrim. Kondisi ini meningkatkan ancaman kekeringan di beberapa kawasan, dan sebaliknya risiko banjir dan tanah longsor meningkat di kawasan lainnya. Perubahan kondisi atmosfer dan cuaca yang ekstrim juga akan meningkatkan potensi

ancaman badai dan angin kencang. Di samping itu penyakit endemik di wilayah tropis akan semakin sulit untuk dihapuskan (misalnya malaria dan demam berdarah). Potensi kemunculan kembali penyakit lama dan potensi jenis penyakit baru juga akan semakin tinggi pada seluruh kawasan, terutama di wilayah tropis.

Fenomena pencairan es di kutub juga menaikkan tinggi muka air laut dan menjadi ancaman bagi penduduk di kota-kota pesisir dan meningkatkan ancaman abrasi pantai. Meski dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi bahan pangan belum dirasakan signifikan pada saat ini, potensi masalah tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

4.2.1.3. Teknologi

Perkembangan teknologi akan mempercepat proses globalisasi dan pertukaran informasi antar negara. Teknologi juga meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta usia harapan hidup seiring dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan dan rekayasa genetik. Perkembangan teknologi digital dan informasi akan semakin cepat seiring dengan perkembangan sektor jasa dan transaksi online. Teknologi digital juga menjadi faktor utama terjadinya revolusi di sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.

Perubahan teknologi yang berlangsung cepat berdampak langsung pada industri manufaktur. Revolusi industri mendorong transformasi ekonomi dunia secara cepat. Revolusi industri abad 18 (industri 1.0) mengawali proses mekanisasi industri. Berlanjut revolusi industri pada abad 19 (industri 2.0) seiring dengan penggunaan listrik dan *division of labor* yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan sistem mass production. Pertengahan abad 20 mengawali tahap revolusi industri (industri 3.0) melalui pengembangan mesin elektronik dan otomasi di bidang produksi. Hingga abad 21 ditandai dengan industri berbasis *cyber* yang dikelola secara *virtual* dan otomatisasi proses produksi (industri 4.0).

4.2.2. Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

Pada tiap agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat isu strategis. Agenda pembangunan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Isu strategisnya adalah:

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA).

Ketersediaan SDA yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang, karena peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa.

- Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi.

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

- Transformasi struktural berjalan lambat

Transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, investasi rendah, dan peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

- Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan; (b) ketimpangan pendapatan pedesaan dan perkotaan; (c) konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

- Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila

tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan.

- **Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk**

Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran, program-program subsidi bagi kelompok miskin dan rentan, serta jaminan perlindungan sosial.

- **Pemenuhan Layanan Dasar**

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, dan stunting yang masih ditemukan di Indonesia. Di bidang pendidikan masih terdapat anak yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (Anak Tidak Sekolah/ATS). Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

- **Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda**

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu dibutuhkan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

- **Pengentasan kemiskinan**

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun

sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.

- Peningkatan Produktivitas dan daya saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia, (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64).

4. Revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan

- Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan dengan melemahnya ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945.

- Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia

Indonesia memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

- Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.

Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Namun, pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat terwujud dalam lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik.

- Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.

Dalam kerangka pembangunan nasional agama dapat menjadi

landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Namun, karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas keagamaan tersebut belum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- Belum kukuhnya Moderasi Beragama untuk kerukunan umat beragama.

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan diantara umat beragama yang berbeda.

- Belum optimalnya peran keluarga.

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Keluarga merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pembangunan keluarga dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain: (a) masih tingginya angka perkawinan anak; (b) meningkatnya angka perceraian; dan (c) masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan.

- Rendahnya budaya literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Pada era revolusi industri 4.0 wajah dunia akan banyak berubah dengan adanya proses otomatisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas antara manusia dan piranti lunak. Literasi sebagai bentuk kemampuan kognitif (*cognitive skills*) memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial, dan relasi sosial

yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah.

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur Pelayanan Dasar

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.

Dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman.

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36% atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61% rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah.

- Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi

beberapa tantangan: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T : *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

- Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Isu utama keselamatan moda transportasi jalan adalah tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ke-3 terbesar di Indonesia, setelah penyakit jantung dan stroke. Tingginya tingkat fatalitas mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan, mengingat sebagian besar korban (77%) berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang pada umumnya merupakan pencari nafkah.

Tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai aspek, meliputi kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan. Koordinasi yang kurang optimal dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kendala terwujudnya sistem lalu lintas jalan yang lebih berkeselamatan.

- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun disisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana.

- Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan

belum optimal.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi.

Infrastruktur Ekonomi

- Konektivitas Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah.

- Konektivitas Darat

Isu penting dalam penyelenggaraan transportasi darat adalah masih tingginya angka pelanggaran muatan berlebih (overloading) di jalan.

Infrastruktur perkotaan

- Transportasi Perkotaan

Rendahnya pangsa angkutan umum berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Upaya pengembangan angkutan umum massal masih dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, sehingga sulit untuk mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi dan berdaya jangkau di luar batas administrasi kota/daerah. Di samping itu, kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai untuk membangun sistem angkutan umum massal perkotaan yang modern.

- Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan jika tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih menggunakan sumber energi fosil. Pemanfaatan energi bersih di sektor

transportasi masih belum berkembang.

- **Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan**

Pengembangan kota cerdas belum didukung pemanfaatan TIK yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Pemanfaatan akses nirkabel lebih banyak dipergunakan untuk interaksi dan media sosial dibanding untuk mengakses layanan pemerintah atau kegiatan yang produktif, sehingga manfaat dari layanan TIK yang telah disediakan pemerintah menjadi kurang maksimal.

- **Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan**

Penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan masih lemah. Permasalahan tersebut menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan stunting.

- **Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan**

Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal.

Energi dan Ketenagalistrikan

- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu: (i) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; (ii) akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; serta (iii) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

Transformasi Digital

- **Penuntasan Infrastruktur TIK**

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, untuk mendorong

pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat.

- Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Pemanfaatan TIK diterapkan untuk perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas layanan pada sektor pemerintahan, industri, jasa, maupun sosial. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyaknya data yang belum terintegrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Dalam pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan TIK dapat memperluas layanan dan pemerataan kualitas layanan.

- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan barang dan jasa hasil TIK seperti Mahadata (*Big Data*), perlu ditingkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi. Luasnya pemanfaatan TIK membutuhkan berbagai keahlian dalam mengelola perangkat TIK maupun memanfaatkan informasi.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Depleksi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, kelangkaan air dan penurunan kualitas air, serta berkurangnya luasan habitat ideal satwa langka yang terancam punah.
- Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyebabkan tingginya kerusakan lingkungan hidup. kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- Tingginya risiko bencana di Indonesia menurut *World Risk Report* (2016), disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.
- Risiko bencana terkait karakteristik geologi wilayah Indonesia yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona *megathrust*-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif.
- Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Hal ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim ekstrim jangka pendek dan pengaruh perubahan iklim. Dalam jangka pendek, dapat dirasakan bahwa peristiwa iklim ekstrim semakin sering terjadi, sementara dalam jangka panjang temperatur permukaan bumi akan mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini.
- Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah. Penguatan kerjasama dan tata kelola bencana di daerah merupakan *mandatory* dari UU Nomor 23 Tahun 2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Dengan terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengamanatkan pembenahan mekanisme kerjasama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pasca bencana.

Pembangunan Rendah Karbon:

- Penurunan emisi dan intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon memerlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target-target pembangunan.
- Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon lintas sektor dan multi pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

- Konsolidasi demokrasi, terdapat empat isu yang perlu diperhatikan: 1) kualitas representasi partai politik; 2) biaya politik tinggi yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3) masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi; 4) pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.
- Optimalisasi Kebijakan Luar, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan: 1) aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara; 2) belum optimalnya penanganan pasar non tradisional yang sebagian besar negara Selatan-Selatan; 3) perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya; 4) perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global.
- Penegakan Hukum Nasional berdasarkan indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013- 2018) menunjukkan penurunan. Dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi.
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Isu strategis terkait: 1) profesionalitas ASN; 2) dari aspek kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat; 3) banyaknya pengaduan terkait pelayanan publik; 4) dari sisi akuntabilitas menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan praktik korupsi.
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
Isu terkait stabilitas keamanan nasional adalah 1) Dinamika

Ancaman Pertahanan; 2) Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal; 3) Dinamika Ancaman Siber; 4) Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika; 5) Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan; 6) Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat; 7) Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut; 8) Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam. Pentingnya menjaga stabilitas keamanan juga menjadi tantangan besar pada tahun 2024 terkait tahun politik di Indonesia. Pada tahun tersebut dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia tersebut berpotensi menimbulkan kondisi wilayah yang tidak kondusif sehingga dapat mengganggu kinerja pembangunan.

4.2.3. Isu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah merumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 sebagai berikut:

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,36% (c to c), lebih baik dibandingkan triwulan III tahun 2021 yang sebesar 2,63% (c to c). Namun tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat *The Fed* dikarenakan inflasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia maupun Jawa Tengah yaitu potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global, serta turunnya nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada

triwulan III tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 33,94%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,97%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,54%. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2022 sebesar 5,57% menurun 0,38% poin dibandingkan periode Agustus 2021 yang sebesar 5,95%. Pengaruh lainnya adalah pada Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan November 2022 sebesar 105,26 tertinggi di Pulau Jawa namun menurun 0,38% dibandingkan dengan bulan Oktober 2022 yang sebesar 105,66%.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana mendorong upaya menuju pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu tuntutan akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kedepan.

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah sesuai dengan arah kebijakan 8 (delapan) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RTRW.

2. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi, dan globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (*new normal*). Pembangunan SDM Jawa Tengah kedepan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah di tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade, berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi), serta akses, mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia. Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari 59,12 di tahun 2020 menjadi 55,24 di tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukkan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 91,94 pada 2017 menjadi 92,48 pada 2021, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017

menjadi 8,97 pada 2021, serta angka pernikahan usia anak masih tinggi yaitu 13.595 perkawinan.

3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat. Namun disisi lain sumber daya alam yang dimiliki potensinya semakin terbatas, serta daya dukung daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di tahun 2021 sebesar 67,48, masuk dalam kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas kerentanan ketahanan iklim. Selain tekanan lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, Jawa Tengah juga menghadapi risiko bencana tingkat sedang hingga tinggi meskipun hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan tingkat risiko yang terus turun dari 157,73 pada tahun 2015 menjadi 125,73 pada tahun 2021.

4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan

inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

4.2.4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Adapun target pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera

- a. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang rendah dan memiliki angka harapan hidup yang lebih baik, serta kualitas pelayanan sosial yang semakin baik yang tercermin pada peningkatan produktivitas penduduk.
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- c. Terbentuknya karakter masyarakat yang berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Terwujudnya target penanganan kemiskinan yang sejalan dengan kebijakan PBB yang telah mencanangkan target pengurangan kemiskinan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015.
- e. Mengecilnya kesenjangan kondisi masyarakat antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
- f. Terlayaninya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
 - 1) Kabupaten Banyumas mampu membangun sarana prasarana

dan mampu menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;

- 2) Kabupaten Banyumas mampu meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan sosial yang adil, terjangkau seluruh masyarakat;
- 3) Kabupaten Banyumas mampu terjaga ketentraman dan ketertiban seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan.

2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri

- a. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, pemerataan pendapatan perkapita dengan dibarengi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan jumlah penduduk miskin sehingga masyarakat memiliki ketahanan ekonomi.
- b. Berkembangnya perekonomian dalam bentuk keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang handal.
- c. Berkembangnya perekonomian yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika global.
- d. Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik.
- e. Berkembangnya kelembagaan koperasi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan pengelolaan koperasi yang efisien, efektif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi anggota koperasi dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).
- f. Perkembangan sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan, pariwisata dan pertanian sebagai basis perekonomian wilayah dan sebagai sektor-sektor pembangunan strategis yang mampu menempatkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat

pelayanan perdagangan, pariwisata dan pertanian dalam wilayah regional maupun nasional.

- g. Terwujudnya pembangunan pertambangan dan energi yang ramah lingkungan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
 - h. Terwujudnya Kabupaten Banyumas sebagai pusat pelayanan pendidikan regional, nasional menuju pelayanan pendidikan yang mampu bersaing dalam standar pendidikan internasional, yang dapat memberikan dampak kepada perkembangan ekonomi lokal dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
 - i. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh dan kompetitif, dalam menghadapi persaingan global dengan berbagai tantangan pembangunan menuju tingkat kemandirian daerah.
 - j. Terwujudnya kemandirian aparaturnya pemerintah dan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
 - k. Terwujudnya pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang makin kokoh sehingga terjadi penurunan ketergantungan kepada sumber pembiayaan pemerintah pusat.
 - l. Terwujudnya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - 1) Penekanan pada peran serta/keterlibatan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
 - 2) Terciptanya *Good Local Governance* mencakup: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas dan Profesionalisme dalam setiap aspek pembangunan daerah.
3. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing
- a. Terwujudnya kualitas SDM yang mampu menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai pola pikir yang inovatif, produktif, kompetitif.
 - b. Terwujudnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal dan dapat

meningkatkan daya tarik investasi lokal, nasional maupun internasional dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Terwujudnya Kabupaten Banyumas dengan kearifan lokalnya sebagai obyek dan atraksi beserta fasilitas pendukung dan pelayanannya sehingga dapat menjadi daerah tujuan wisata unggulan, baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional
 - d. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang pembangunan dengan kabupaten/kota lain yang di masa lalu mempunyai ikatan kultural maupun emosional dengan Kabupaten Banyumas, baik dalam skala nasional maupun internasional.
 - e. Terwujudnya sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang berfungsi berdasarkan konstitusi yang ditetapkan, disertai peningkatan peran serta masyarakat yang efektif dalam sistem politik.
 - f. Kesiapan akan terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi wilayah Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto.
 - g. Terwujudnya karakter pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, kreatif, berkualitas dan partisipatif dalam pembangunan.
 - h. Terwujudnya masyarakat yang sehat fisik dan psikis dan berprestasi olahraga dalam bidang olahraga tertentu.
4. Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Lestari
- a. Terwujudnya tahapan pembangunan jangka panjang yang memberikan landasan kokoh kepada kebijakan pembangunan tahap berikutnya.
 - b. Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan terjaganya kualitas sumber daya alam sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
 - c. Terbentuknya karakter masyarakat yang memiliki kesadaran, sikap mental dan perilaku yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Terwujudnya kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang ada

- dan bersama dengan semua pelaku pembangunan menciptakan kawasan perkotaan dan perdesaan yang manusiawi, kompetitif dan berkelanjutan;
- e. Terciptanya pelayanan terhadap masyarakat harus dapat menjaga kelangsungan dan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang ada;
- f. Terciptanya pendapatan daerah didukung oleh kegiatan *basic economy* perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan;
- g. Keberlanjutan dalam managerial (administrator), penyediaan kepentingan masyarakat dan peran pemerintah kabupaten sebagai fasilitator.

4.2.5. Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Penataan ruang di Kabupaten Banyumas bertujuan mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.

Gambar 4.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
dalam RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama Kabupaten.	a. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. b. Mengembangkan kawasan pertanian. c. Mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. d. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis. e. Mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian. f. Mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan.
2	Pengembangan pariwisata berwawasan	a. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata. b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.

No	Kebijakan	Strategi
	lingkungan dan berbasis kerakyatan.	c. Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata. d. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
3	Pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional.	a. Mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, lokal, dan lingkungan. b. Mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional. c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa.
4	Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu.	a. Mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional. b. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa. c. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa. d. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
5	Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah.	a. Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan. b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi terminal penumpang dan terminal barang. c. Mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif d. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah. e. Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air. f. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu. g. Mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata. h. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api. i. Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase. j. Mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

No	Kebijakan	Strategi
6	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung.	a. Menetapkan kawasan lindung sesuai fungsinya. b. Mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan. c. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung. d. Mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air. e. Mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku. f. Melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. g. Membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan pada kawasan perlindungan setempat. h. Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau. i. Meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian. j. Mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah longsor. k. Mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.
7	Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.	a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. b. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup. c. Mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial. d. Mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan. e. Mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan. f. Mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan. g. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi regional dan nasional. h. Mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang. i. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu.
8	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan. b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan. c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan budidaya terbangun. d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

No	Kebijakan	Strategi
9	Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan penetapannya.	a. Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya. b. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. c. Mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian. d. Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian. e. Menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan minapolitan. f. Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan. g. Memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan. h. Mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan. i. Memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup. j. Mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung. k. Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas juga terdiri menetapkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program untuk mewujudkan struktur dan pola ruang. Indikasi program yang berkesesuaian dengan RPD adalah indikasi program pada pembangunan jangka menengah ketiga. Untuk penyelarasan indikasi program RTRW dengan RPD dilaksanakan identifikasi indikasi program RTRW dengan kewenangan, perkembangan situasi dan kondisi, serta peluang pelaksanaan indikasi program. Program untuk penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berdasarkan indikasi program RTRW adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Indikasi Program Perwujudan Struktur dan Pola Ruang

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang			
	1. Pengembangan Pusat Kegiatan			

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	a. Pusat Kegiatan Wilayah			
	pengembangan fasilitas pendidikan tinggi	Perkotaan Purwokerto	Kewenangan Pemerintah. Fasilitas pendidikan tinggi di Perkotaan Purwokerto telah berkembang pesat	-
	pengoptimalan fasilitas kesehatan Tipe B pendidikan	Perkotaan Purwokerto	RS Margono Sukarjo milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjadi RS pendidikan. Disamping itu telah berdiri RS Khusus Gigi dan Mulut Univ. Jenderal Soedirman	-
	pengembangan kawasan wisata buatan dan wisata budaya	Perkotaan Purwokerto	Dilaksanakan dengan dana PEN telah, namun belum berfungsi optimal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata/ Dinporabudpar
	pengembangan fasilitas perdagangan berskala regional	Perkotaan Purwokerto	Mengikuti mekanisme pasar, pengembangan fasilitas perdagangan berskala regional di perkotaan Purwokerto oleh Pemerintah Kabupaten akan sulit dilakukan dengan keterbatasan lahan	-
	peningkatan pelayanan jasa pemerintahan	Perkotaan Purwokerto	Peningkatan pelayanan publik, serta sarana dan prasarana pemerintahan terus dilakukan sesuai prioritas dan kebutuhan	Program Penunjang Urusan pada semua PD, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (SETDA), Program Perekonomian Dan Pembangunan (SETDA), Program Penataan Bangunan Gedung/DPU
	b. Pusat Kegiatan Lokal			
	pengembangan fasilitas pendidikan;	Banyumas, Ajibarang, Sokaraja dan Wangon	Fasilitas pendidikan di 4 kecamatan sudah mencukupi.	-
	peningkatan pelayanan jasa pemerintahan	Banyumas, Ajibarang, Sokaraja dan Wangon	Peningkatan pelayanan publik, serta sarana dan prasarana pemerintahan terus dilakukan sesuai prioritas dan kebutuhan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
				Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Kecamatan, Program Penataan Bangunan Gedung DPU
	pengembangan pusat perbelanjaan skala kabupaten;	Banyumas, Ajibarang, Sokaraja dan Wangon	Telah dilaksanakan rehabilitasi/pemba ngunan kembali Pasar Banyumas, Pasar Sokaraja. Dalam kajian pengembangan Pasar Ajibarang	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Dinperindag
	Pengoptimalan rumah sakit Tipe B pendidikan	Banyumas	Bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten	-
	peningkatan rumah sakit tipe C menjadi tipe B	Ajibarang, Sokaraja dan Wangon	RS Ajibarang dalam proses peningkatan kelas menjadi Tipe B	-
	c. Pusat Pelayanan Kawasan			
	pengembangan fasilitas pendidikan;	Wilayah PPK	Secara umum fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah mencukupi, hanya di beberapa wilayah masih kekurangan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan, Dindik
	peningkatan pelayanan jasa pemerintahan skala kecamatan;	Wilayah PPK	Peningkatan pelayanan publik, serta sarana dan prasarana pemerintahan terus dilakukan sesuai prioritas dan kebutuhan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Kecamatan, Program Penataan Bangunan Gedung DPU

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	pengembangan pusat perbelanjaan skala kecamatan	Wilayah PPK	Sesuai mekanisme pasar	-
	pengembangan puskesmas rawat inap	Sumpiuh, Lumbir, Gumelar, Sumbang, Kalibagor, dan Karanglewas.	Sudah dilaksanakan dilaksanakan Lumbir, Wangon I, Jatilawang,, Rawalo, Kebasen, Kemranjen I & II, Sumpiuh I, Tambak I & II, Banyumas, Purwojati, Gumelar, Pekuncen I, Cilongok I, dan Sokaraja I	Dinas Kesehatan
	d. Pusat Pelayanan Lingkungan			
	pengembangan fasilitas pendidikan;	Wilayah PPL	Secara umum fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah mencukupi, hanya di beberapa wilayah masih kekurangan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan
	peningkatan pelayanan jasa pemerintahan desa;	Wilayah PPL	Kewenangan desa	-
	pengembangan puskesmas pembantu.	Wilayah PPL	Sampai dengan tahun 2021 terdapat 39 pustu yang terdaftar di Pusdatin Kemenkes. Pengembangan baru tidak direncanakan	-
	2. Pengembangan Jaringan Prasarana Wilayah			
	a. Sistem Jaringan Transportasi Darat			
	Peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten			
	Pengembangan jalan lingkaran utara dan jalan lingkaran selatan Sokaraja;	Sokaraja	Jalan lingkaran selatan sudah dilaksanakan, lingkaran utara masih belum menjadi prioritas	-
	Peningkatan jalur jalan lingkaran Tambak – Sumpiuh;	Tambak, Sumpiuh	Sudah dilaksanakan	-
	Pengembangan jalan Pegalangan – Gunung Tugel – Purwokerto Selatan;	Purwokerto	Sudah dilaksanakan, jalan dimaksud telah menjadi kewenangan	-

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
			Provinsi Jawa Tengah	
	Peningkatan jalan penghubung jalan Jenderal Sudirman – jalan Gerilya;	Purwokerto	Sudah dilaksanakan	-
	Peningkatan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan Panas Bumi Baturaden	Baturaden	Dilaksanakan oleh swasta yang melaksanakan penambangan panas bumi	-
	Pengembangan jalan Dukuhwaluh – Kembaran – Sumbang – Purbalingga.	Purwokerto	Sudah dilaksanakan	-
	Pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Ajibarang dan Kecamatan Wangon	Ajibarang dan Wangon	Terminal Ajibarang dan Wangon berubah status menjadi Terminal Tipe C, kondisi terminal masih belum memenuhi standar pelayanan terminal penumpang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Dinhub
	Pengembangan terminal penumpang Tipe C	Sokaraja, Patikraja Karanglewas, dan Purwojati	Terminal Sokaraja perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menjadi terminal aglomerasi. Terminal Karanglewas telah dibangun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 551.22/394/2022 namun kondisinya perlu ditingkatkan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Dinhub
	Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Banyumas	Banyumas	Terminal penumpang di Kecamatan Banyumas masih terkendala status lahan, direncanakan menjadi terminal Tipe C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Dinhub
	b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian			
	Pengembangan jalur ganda kereta api Cirebon – Kroya		Sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	-

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	Pengembangan jalur ganda kereta api Kroya – Kutoarjo		Sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	-
	c. Sistem jaringan prasarana energi			
	Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan oleh BUMN	-
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Kecamatan Baturaden, Cilongok, Pekuncen, Karanglewas	Dilaksanakan oleh swasta	-
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	Kecamatan Cilongok, Karanglewas, Kebasen, Kedungbanteng, Baturaden, Pekuncen.	Dilaksanakan oleh swasta	-
	Pemeliharaan gardu induk	Kecamatan Rawalo, Purwokerto Selatan	Dilaksanakan oleh BUMN	-
	d. Sistem jaringan sumber daya air			
	Konversi lahan tidak produktif	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Belum menjadi prioritas	-
	Konservasi situ	Kecamatan Cilongok, Jatilawang, Wangon, dan Kemranjen	Sudah dilaksanakan di beberapa lokasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air, DPU
	Penyediaan instalasi pengolahan air permukaan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan oleh Perumdam Air Minum, BPSPAM, Desa, Dinperkim	Program Pengelolaan & Pengembangan SPAM, Dinperkim
	Pemanfaatan sumur air dalam sesuai kapasitas terpasang	Sumur dalam I, II Kalibagor, Sumur dalam I Kutasari, Sumur dalam III Kedungmalang, Sumur dalam Sokajati, Pasir Muncang, Sumur dalam Purwokerto Lor, Sumur dalam Rempoah.	Dilaksanakan oleh Perumdam Air Minum, Dinperkim	Program Pengelolaan & Pengembangan SPAM, Dinperkim
	Pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan oleh pengelola SPAM	-
	Pemeliharaan kawasan di sekitar sumber	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan oleh pengelola SPAM	-

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	air baku dari pencemaran air			
	Pembangunan jaringan pipa distribusi dan transmisi air minum dalam perluasan jangkauan pelayanan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Terus dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan penyediaan air minum. Dilaksanakan oleh Perumdam Air Minum, BPSPAM, Desa, Dinperkim	Program Pengelolaan & Pengembangan SPAM, Dinperkim
	Pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi air minum	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Terus dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan penyediaan air minum. Dilaksanakan oleh Perumdam Air Minum, BPSPAM, Desa, Dinperkim	Program Pengelolaan & Pengembangan SPAM, Dinperkim
	Pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan oleh pengelola SPAM	-
	Penyediaan hidran umum dan kran umum pada wilayah yang belum terlayani air minum	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	Program Pengelolaan & Pengembangan SPAM, Dinperkim
	Rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air, DPU - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinpertan KP
	Peningkatan fungsi jaringan irigasi dari irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis dan dari irigasi non-teknis menjadi irigasi setengah teknis	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air, DPU - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinpertan KP
	Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi, pertanian, dan kelembagaan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan secara rutin	Program Pengelolaan Sumber Daya Air, DPU
	e. Sistem prasarana lainnya			

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	Penyediaan sistem pengolahan limbah mandiri dan komunal	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Terus dilaksanakan untuk memenuhi target pelayanan dasar, dan mendukung pencapaian SDGs	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Dinperkim
	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu <i>Reduce</i> (mengurangi), <i>Reuse</i> (menggunakan kembali), dan <i>Recycle</i> (mendaur ulang).	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan dan menjadi prioritas	Program Pengelolaan Sampah, DLH
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem <i>Sanitary Landfill</i>	Kalibagor, dan Ajibarang	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas c.q. DLH. Terdapat perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang tidak lagi menggunakan TPA	-
	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis	Setiap kecamatan	Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun fasilitas pengelolaan sampah, baik dengan dana APBD, APBN	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, DLH
	Penambahan fasilitas persampahan di setiap wilayah meliputi tempat sampah di perkotaan, gerobak sampah, kontainer, dan truk sampah	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Sejalan dengan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, sarana pengelolaan sampah juga ditambah.	Program Pengelolaan Sampah, DLH
	Pembuatan saluran drainase perkotaan	Perkotaan Purwokerto	Terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan dan menjaga kualitas jalan kabupaten di perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Dinperkim & DPU
	Pembuatan sumur resapan air hujan dan biopori	Perkotaan Purwokerto	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, DLH
	Pembuatan saluran	Perkotaan Purwokerto	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	drainase perkotaan			Sistem Drainase Dinperkim & DPU
	Pemeliharaan jalur dan ruang evakuasi bencana alam.	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Sudah dan terus diperbaiki sesuai kebutuhan khususnya jalur evakuasi yang merupakan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan, DPU
	Perwujudan Rencana Struktur Ruang			
	1. Kawasan Lindung			
	a. Kawasan perlindungan setempat			
	Mempertahankan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), DLH
	b. Kawasan suaka alam			
	Pelestarian fungsi kawasan Kebun Raya Baturaden	Kawasan Gunung Slamet	Kewenangan Provinsi Jawa Tengah.	-
	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang berfungsi wisata	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai prioritas & kebutuhan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, DPU
	c. Kawasan lindung lainnya			
	Pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung plasma Nutfah	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Hanya dilaksanakan pada Taman Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), DLH
	Penetapan batas kawasan lindung yang dikelola masyarakat	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Belum menjadi prioritas	-
	2. Kawasan Budidaya			
	a. Kawasan peruntukan pertanian			
	Pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air, DPU - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinpertan KP
	Perluasan areal tanam dan pengolahan lahan dengan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	Program Penyediaan Dan Pengembangan

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	menggunakan teknologi yang sesuai.			Prasarana Pertanian, Dinperten KP
	Peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP).	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Dinperten KP
	Mencegah konversi lahan pertanian lahan basah untuk penggunaan di luar pertanian	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Sudah dilaksanakan identifikasi lahan pertanian pangan dilindungi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinperten KP
	b. Kawasan peruntukan pertambangan			
	pengembangan komoditas hasil tambang yang bernilai ekonomi	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Tidak ada kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan komoditas pertambangan	-
	Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Tidak ada kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan kawasan pertambangan, perizinan oleh Pemerintah Provinsi	-
	pengembangan panas bumi Baturaden	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan oleh swasta	-
	c. Kawasan peruntukan pariwisata			
	Penyediaan sarana dan prasarana berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan pada obyek wisata milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu diprioritaskan untuk mendukung sarpras obyek wisata yang dibangun dengan dana PEN yang belum berfungsi optimal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Dinporabudpar
	d. Kawasan peruntukan industri			
	Pembinaan dan pembentukan kelompok industri menengah dan industri kecil.	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten	-
	e. Kawasan peruntukan permukiman			

No	Program Utama	Lokasi	Kewenangan & Status Pelaksanaan	Program RPD/OPD pelaksana
	Pengembangan sarana lingkungan perkotaan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Dilaksanakan untuk menjaga/meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Program Pengembangan Permukiman, Dinperkim
	Pengembangan rumah sehat huni	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Bagian dari penanggulangan kemiskinan, jumlah RTLH masih tinggi	Program Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan, Dinperkim
	Pengembangan IPAL Komunal	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Merupakan pelayanan dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh penduduk, baru menjangkau 88,81% penduduk	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Dinperkim
	f. Kawasan peruntukan lainnya			
	Penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Kewenangan Pemerintah, dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan	-
	Pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas	Kewenangan Pemerintah, dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas 2018, diolah

4.2.6. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari *business as usual* pada tahun 2030. Saat ini sedang dilakukan perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2011 dengan melakukan kaji ulang *BAU Baseline*, menyusun rencana aksi mitigasi perubahan iklim serta melakukan penyebutan baru dari penurunan emisi gas rumah kaca menjadi pembangunan rendah karbon. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembangunan rendah karbon mulai dimunculkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Lima program prioritas tersebut terdiri dari pembangunan fasilitas energi berkelanjutan, pengolahan limbah, pengembangan industri hijau, program rendah karbon

daerah pesisir dan laut, dan pemulihan lahan berkelanjutan lewat restorasi gambut dan peningkatan tutupan lahan.

Dalam RAN-GRK disebutkan bahwa masing-masing provinsi harus Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk menurunkan emisi GRK. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun RAD-GRK melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Target penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 dihitung berdasarkan *baseline* dari masing-masing bidang. Dalam perhitungan *baseline* emisi GRK, bidang yang paling banyak menghasilkan emisi adalah bidang energi (29.970.000 Ton CO₂) dan bidang transportasi (25.078.000 Ton CO₂). Namun, untuk target penurunan, bidang pengelolaan limbah merupakan bidang yang direncanakan memiliki target penurunan yang paling tinggi. Target penurunan emisi Provinsi Jawa Tengah adalah 4,37% untuk bidang pertanian, 15,60% untuk bidang kehutanan, 13,12% untuk bidang energi, 12,50% untuk bidang transportasi, 9,40% untuk bidang industri, dan 22,27% untuk bidang pengelolaan limbah. Selanjutnya Pemerintah daerah diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Rendah Karbon (RAD PRK). Namun demikian kondisi saat ini menunggu arahan dan terbitnya regulasi RAN PRK dari pusat.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kabupaten Banyumas. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Hasil inventarisasi GRK di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa sektor yang paling banyak menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca adalah sektor pengadaan dan penggunaan energi. Hasil Inventarisasi GRK pada Tahun 2016-2021 ini menghasilkan rekomendasi untuk rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang disajikan pada tabel berikut:

Gambar 4.3

Rekomendasi Inventarisasi GRK Kabupaten Banyumas

KATEGORI	TUJUAN UTAMA MITIGASI	RENCANA AKSI
1A3 Transportasi	Mengurangi peningkatan konsumsi BBM oleh kendaraan, meningkatkan kelancaran lalu lintas dan menyediakan sistem transportasi yang ramah lingkungan	- Penggunaan kendaraan ramah lingkungan - Penataan Sistem Angkutan Umum - Pelatihan <i>Smart Driving</i> - Penataan Ruang Parkir - Pengembangan <i>Intelligent Transport System</i>
3C7 Agriculture (Budidaya Padi)	Mengurangi penggunaan pupuk kimia pada masa tanam, dan mengurangi kegiatan pembakaran jerami sisa panen yang sering dilakukan oleh petani	- Penggunaan pupuk organik - Sosialisasi kepada petani terkait akibat kegiatan pembakaran jerami sisa panen dan manfaat jika membiarkan jerami tersebut untuk kesuburan tanah
2A4d IPPU (Industri Mineral – Proses Penggunaan Karbonat Lainnya)	Mendorong efisiensi dalam proses industri	- Penerapan Produksi Bersih - Penerapan Proper
2A1 IPPU (Industri Mineral – Produksi Semen)	Mendorong efisiensi dalam proses industri, terutama penggunaan kapur dan klinker	- Penerapan Produksi Bersih - Penerapan Proper
1A2 Industri Manufaktur dan Konstruksi	Mendorong industri untuk efisien menggunakan bahan bakar dan atau menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.	- Audit energi - Efisiensi energi - Penerapan Produksi Bersih - Penerapan Proper
3B1a Kehutanan – Sisa Mineral Biomassa pada Lahan Hutan	Meningkatkan kemampuan penyerapan (rosot) pada tutupan lahan, Mengurangi aktivitas pemanfaatan maupun pembakaran biomassa	- Pemantauan tutupan lahan secara reguler - Pengendalian perizinan alih fungsi lahan - Meningkatkan tutupan lahan melalui penanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan kerusakan hutan
1A4B Energi – Perumahan / Rumah Tangga	Mengurangi penggunaan LPG pada skala rumah tangga	Penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk skala rumah tangga, sebagai contoh: biogas
4D1 CH4 Air Limbah Domestik	Meningkatnya jumlah KK yang memiliki dan menggunakan sistem pembuangan yang sesuai standar yang berlaku	- Penggunaan <i>Septic tank plus</i> - Perbanyak pembangunan IPAL komunal
3B2a Kehutanan – Sisa Mineral Biomassa pada Lahan Pertanian	- Meningkatkan kemampuan penyerapan (rosot) pada tutupan lahan	Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

KATEGORI	TUJUAN UTAMA MITIGASI	RENCANA AKSI
	- Mengurangi aktivitas pemanfaatan maupun pembakaran biomassa	

Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2021

4.2.7. Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim, sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 (lima) prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* dalam 3 (tiga) dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras.

Keberadaan 5 prinsip yang wajib ditangani dalam *SDGs* itu, selain merupakan lanjutan dari agenda *MDGs* yang belum tuntas juga tak lepas dari pengaruh kehendak pemimpin dunia yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni 2012 di Rio de Janeiro (KTT Rio+20). Sebagaimana diketahui, dalam KTT Rio+20 itu disepakati arti pentingnya penerapan “*green economy*” dalam setiap pembangunan untuk mewujudkan misi keberkelanjutan.

Secara konseptual esensi dari *green economy* tertuang dalam dokumen “*The Future We Want*” yang hakekatnya menandakan arti pentingnya kecintaan pada sesama (dimensi spiritual) dan kecintaan pada alam semesta (dimensi *nature*). Untuk itu pembangunan dipersyaratkan wajib mensenyawakan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi dalam suatu tata kelola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam tata kelola seperti itu, pengintegrasian pembangunan ekonomi/lingkungan, sosial/lingkungan, serta ekonomi/sosial dimaksudkan agar proses pembangunan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kesejahteraan dan

kedamaian hidup, serta aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi secara simultan.

Dalam konteks itu, apa yang kita inginkan di masa depan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yang terdiri-dari 17 Tujuan, 169 Target dan 241 indikator yang terklasifikasi dalam 4 (empat) pilar: pembangunan sosial (goal-1, goal-2, goal-3, goal-4, goal-5); pembangunan ekonomi (goal-7, goal-8, goal-9, goal-10, goal-17); pembangunan lingkungan (goal-6, goal-11, goal-12,goal-13, goal-14, goal-15); serta pembangunan hukum dan tata kelola (goal-16) secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar berikut.



Sumber: Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019

Gambar 4.1

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

4.3. Isu Strategis Kabupaten Banyumas

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan melakukan penelaahan terhadap permasalahan daerah, isu

global, isu nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, isu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, kebijakan dan strategi RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031, dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dan SDGs, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka isu strategis RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang terus mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 71,12 kategori BB pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,08 pada tahun 2022.

Prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kabupaten Banyumas telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain itu pemerintah Banyumas juga dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut juga menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas yang terus membaik, dengan transparansi anggaran melalui informasi APBD secara online yang dapat diakses oleh publik. Pencapaian ini harus terus dipertahankan agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyumas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai SAKIP, dimana nilai Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah 76,47 dan meningkat menjadi 78,46 pada tahun 2022 dengan predikat BB. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Untuk mencapai predikat “A” masih dibutuhkan perbaikan terhadap 4 (empat)

komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Kinerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di Kabupaten Banyumas masih terkendala pada domain tata kelola dan manajemen SPBE. Perbaikan tata kelola dan manajemen SPBE antara lain diupayakan dengan penyusunan arsitektur SPBE, dan pelatihan manajemen risiko SPBE. Perbaikan ini akan dapat mendukung keterbukaan dan transparansi informasi serta pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT. Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai kabupaten dengan kategori informatif dengan nilai keterbukaan informasi publik 93,21%.

Untuk dapat bekerja secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif, maka ASN sebagai aparatur pemerintahan semakin dituntut profesionalitasnya dengan terus meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja serta mampu mengimplementasikan *core value* ASN BERAKHLAK dalam meningkatkan pelayanan publik.

Peran stakeholders dalam pembangunan dalam hal ini perlu terus dikembangkan, karena pemerintah daerah dituntut untuk dapat bekerja semakin efektif dan memberikan ruang bagi kolaborasi antar pihak menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 ditunjukkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai 3,225 dengan kategori tinggi. Capaian ini diharapkan dapat mendorong investasi daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek penilaian IDSD sebagai penguat/*enabling* adalah penyediaan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kondisi keuangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Penyediaan infrastruktur diupayakan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan memberikan dukungan kegiatan ekonomi. Peningkatan jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan air minum, permukiman perkotaan yang berkelanjutan didukung sistem transportasi yang menghubungkan wilayah diharapkan dapat menarik

investasi di Kabupaten Banyumas.

Stabilitas keamanan wilayah melalui pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga diperlukan agar menciptakan wilayah yang kondusif bagi investasi. Komitmen bersama serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah perlu terus ditingkatkan, demikian juga pengendalian terhadap potensi konflik politik di masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pembentukan modal dan daya beli masyarakat. Selain juga pertumbuhan ekonomi daerah juga akan dapat membuka peluang pasar bagi investasi.

Untuk mendukung investasi, maka kepastian penggunaan lahan memerlukan rencana tata ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan perijinan. Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten rawan bencana, maka RTRW harus berbasis risiko bencana. di samping itu diperlukan peningkatan mitigasi melalui perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi serta pembangunan infrastruktur yang tanggap risiko bencana.

Keberadaan dan fungsi kelitbangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai fasilitasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan riset dan inovasi daerah. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan inovasi daerah diharapkan dapat menjadi faktor pendorong daya saing daerah.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas antara lain disebabkan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Banyumas terus dilakukan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 sebesar 73,17 menunjukkan peningkatan namun masih terdapat permasalahan pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, serta penurunan daya beli masyarakat.

Kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 sebesar 7,63 menjadi 7,78 pada tahun 2022, meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah dari 13,03 tahun pada

tahun 2021 menjadi 13,21 tahun pada tahun 2022, namun masih perlu dioptimalkan karena kurangnya budaya baca masyarakat dan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi tersebut memberi gambaran kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas dari aspek pendidikannya.

Komponen kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH Kabupaten Banyumas tahun 2021 tercapai sebesar 73,80 meningkat menjadi 73,88 pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan namun masih lebih rendah dibanding dengan AHH Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar. Beberapa layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum optimal memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio puskesmas per satuan penduduk. Adanya kasus kematian ibu, gizi buruk, dan stunting menjadi perhatian dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan sehingga generasi baru memiliki peluang kehidupan yang lebih baik.

Pengendalian pertumbuhan penduduk diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena merupakan bagian dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta peningkatan kapabilitas dan daya saing pemuda.

Belum tertangani Pengangguran secara optimal menyebabkan meningkatkan kemiskinan. Upaya pemulihan ekonomi daerah ternyata belum sepenuhnya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya kesempatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022 stagnan sebesar 6,05. Tantangan pengurangan pengangguran adalah dengan meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk, agar mendukung pencapaian bonus demografi pada tahun 2030, dimana penduduk Kabupaten Banyumas didominasi oleh penduduk usia produktif yang dipersiapkan sejak

sekarang untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, serta selanjutnya dapat diserap oleh dunia kerja. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja dan atau memperluas kesempatan berusaha, maka peluang bonus demografi tidak akan dapat dicapai bahkan akan dapat melahirkan kemiskinan baru.

4. Penguatan Ketahanan Pangan

Perang Rusia-Ukraina yang berakibat terhadap terhambatnya suplai bahan pangan serta menyebabkan kenaikan harga pangan merupakan pelajaran berharga akan pentingnya ketahanan pangan. Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP kabupaten Banyumas mengalami penurunan nilai komposit pada tahun 2022 menjadi sebesar 79,02 dengan nilai ketersediaan pangan sebesar 80,98, nilai keterjangkauan pangan sebesar 79,48 dan nilai pemanfaatan pangan sebesar 77,20.

Belum optimal pemanfaatan pangan disebabkan masih kurangnya keamanan pangan dan belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat. Kurangnya keterjangkauan pangan disebabkan kurang meratanya distribusi pangan dan keterjangkauan harga pangan. Serta belum terpenuhi ketersediaan pangan secara mandiri di kabupaten Banyumas disebabkan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan serta kurangnya produksi dan produktivitas komoditas pangan.

Kondisi geografis menyebabkan tidak semua bahan pangan dapat dipenuhi secara mandiri oleh suatu wilayah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dalam memproduksi bahan pangan.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, sehingga terus berupaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas. Dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian terus diupayakan untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi faktor penting untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan sehingga memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan. Sedangkan untuk mendorong keterjangkauan

pangan diupayakan melalui keterjangkauan harga pangan. Dengan didukung sistem produksi yang efisien maka harga bahan pangan hasil produksi pertanian pun diharapkan dapat bersaing dan dijangkau masyarakat.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah: BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI

Banyumas adalah salah satu wilayah kabupaten di antara 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2025 adalah angka tahun terakhir dari masa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sejahtera (kesejahteraan) adalah suatu kondisi dengan semua kebutuhan hidup minimal secara wajar dapat terpenuhi. Menurut teori Maslow, kebutuhan hidup manusia terdiri atas selain kebutuhan fisik yang berupa: sandang, pangan, papan dan kesehatan, juga kebutuhan psikhis/emosional, seperti: rasa aman, hubungan sosial, penghargaan diri, aktualitas diri, yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.

Menurut para ahli Hukum Adat Indonesia bahwa kebutuhan hidup masyarakat adat (Indonesia) adalah terjadinya harmonisasi (selaras, serasi dan seimbang) hubungan antara manusia (individu) dengan: (a) Tuhan-nya, (b) lingkungan alam, (c) sesama manusia di lingkungannya.

Banyumas yang sejahtera mempunyai arti bahwa di Wilayah Kabupaten Banyumas di Tahun 2025 akan terealisasi harmonisasi

hubungan antara manusia – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing) untuk terpenuhinya segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis) masyarakat secara wajar.

Mandiri berarti bahwa semua urusan ditangani sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang bersangkutan mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri atau rumah tangganya sendiri, atau mempunyai otonomi. Namun disadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Melalui daya analisisnya masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangan. Karenanya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah akan berhubungan dengan orang lain untuk saling memberi dan menerima guna menutup kekurangan dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya.

Sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.

Di dalam huruf b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hal-hal sebagaimana terurai diatas jelas bahwa kemandirian selain bukan berarti menutup diri dari pihak luar, juga kemandirian itu tidak hanya dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Banyumas, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Maju dan berdaya Saing merupakan satu ungkapan yang tidak terpisahkan. Secara harafiah *maju* berarti berwawasan ke depan, sedangkan *berdaya saing* berarti mempunyai kualitas yang kompetitif. Dengan demikian maju dan berdaya saing adalah suatu kondisi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif.

1. Sifat pola pikir yang inovatif adalah sifat pola pikir yang dinamis, senantiasa berusaha untuk berkembang baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini.
2. Sifat pola pikir yang prediktif adalah sifat pola pikir yang dapat memperkirakan kondisi (kuantitas dan kualitas) masa depan sebagai arahan atas daya inovasi yang ada/dimiliki. Pengalaman dan informasi kondisi luar merupakan suatu hal yang sangat menunjang dalam memprediksi sesuatu.
3. Sifat pola pikir yang kompetitif adalah sifat pola pikir yang senantiasa berusaha menciptakan kekhasan (spesifikasi dan spesialisasi), keunikan dan keunggulan produk untuk menutup kekurangan/kelemahan produk pihak luar. Untuk ini diperlukan keahlian dalam analisis SWOT.

Sifat pola pikir yang inovatif, prediktif dan kompetitif diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk kegiatan-kegiatan memenuhi kebutuhan hidup.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyebutkan bahwa: Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu

prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas maka kondisi maju dan berdaya saing bagi Kabupaten Banyumas tidak hanya berlaku bagi warga masyarakat, tetapi juga bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta seluruh unsur yang terkait di dalamnya.

Lestari adalah suatu kondisi yang tidak berubah, bertahan, kekal, seperti keadaan semula. Namun di sisi lain *lestari* juga mengandung arti suatu dinamika yang tidak pernah berhenti atau dihentikan kecuali Tuhan yang menghendakinya.

Dalam hukum alam ciptaan Tuhan YME. perputaran bumi dan matahari dalam fungsinya sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, aliran air dari atas/tinggi ke bawah/rendah, aliran udara dari daerah dingin ke daerah panas dan lain sebagainya akan terus berjalan sampai akhir jaman. Hukum alam yang demikian ini didasarkan pada adanya harmonisasi (selaras, serasi, seimbang) antar unsur yang ada di dalamnya sebagai suatu hubungan sistemik. Harmonisasi hubungan antar unsur yang terkait antar unsur itulah yang diupayakan untuk *lestari*.

Pada hakikatnya, kegiatan membangun merupakan suatu proses yang berusaha merubah suatu kondisi (sebagai kondisi awal) dengan segala hambatan dan tantangan, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh suatu kondisi, yang mempunyai nilai guna atau suatu kondisi yang lebih dalam memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan manusia sebagai tujuan atau produknya. Di sisi lain hidup dan kehidupan adalah suatu dinamika yang terus berkembang sejalan perkembangan hidup itu sendiri.

Bagi suatu lembaga, Negara yang salah satu unsurnya adalah kumpulan orang-orang yang bersatu sebagai suatu bangsa senantiasa akan terus hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan

kuantitas dan kualitas penduduk. Karenanya pembangunan pembangunan sebagai suatu proses dilaksanakan terus berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa henti sepanjang jaman atau dapat dikatakan bahwa pembangunan yang lestari.

Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas maka pelestarian pembangunan mengandung arti bahwa:

1. Nilai-nilai harmonisasi hubungan antara manusia – masyarakat – alam sekitar – Tuhan YME tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan alami;
2. Pembangunan dilaksanakan terus menerus tanpa henti secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
3. Hasil pembangunan yang mempunyai nilai-nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat dipertahankan keberadaannya.

5.2. Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.2.1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).

5.2.2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri

Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.

5.2.3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan

Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.

5.2.4. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

5.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap IV Tahun 2020-2024

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dibagi dalam 4 (empat) tahapan atau periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yakni: Tahap I tahun 2005–2009, Tahap II tahun 2010–2014, Tahap III tahun 2015–2019, dan Tahap IV tahun 2020–2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas didasarkan pada Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Tahap IV Tahun 2020-2024), dengan prioritas program sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

a. Kependudukan

- 1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kependudukan;
- 2) Peningkatan pengaturan distribusi (insentif dan disinsentif) penduduk sesuai Perda Tata Ruang Wilayah;
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi program Keluarga Berencana.

b. Pendidikan

- 1) Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- 3) Pengembangan kurikulum;
- 4) Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pembangunan kualitas SDM.

c. Kesehatan

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit

- menular;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan Poliklinik Perdesaan;
- 3) Peningkatan pelayanan bidan dan bidan desa secara menyeluruh;
- 4) Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
- d. Ketenagakerjaan dan Pengangguran
 - 1) Peningkatan kualitas balai pelatihan kerja industri, jasa dan pertanian;
 - 2) Pengurangan pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri;
 - 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja.
- e. Penanggulangan Kemiskinan
 - 1) Melanjutkan pelaksanaan program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan;
 - 2) Melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
 - 3) Melanjutkan pengembangan jaringan kemitraan penanggulangan kemiskinan.
- f. Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Melanjutkan peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam segala kegiatan pembangunan.
- 2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
 - a. Ekonomi
 - 1) Melanjutkan perkuatan operasional ekonomi kerakyatan
 - 2) Melanjutkan perkuatan manajemen lembaga ekonomi kerakyatan
 - b. Perdagangan
 - 1) Melanjutkan pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional;
 - 2) Melanjutkan pengembangan jaringan distribusi wilayah;
 - 3) Melanjutkan peningkatan pelayanan pengembangan usaha distribusi baik lokal maupun regional.
 - c. Pariwisata
 - 1) Peningkatan pelayanan angkutan wisata ke obyek-obyek wisata;
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan obyek dan atraksi wisata;
 - 3) Pengembangan pengelolaan kawasan wisata Banyumas Selatan secara terpadu (wisata alam dan wisata budaya);

- 4) Melanjutkan pengembangan Paket Wisata Regional;
 - 5) Melanjutkan peningkatan publikasi dan promosi wisata tingkat regional, nasional maupun internasional.
- d. Pertanian
- 1) Peningkatan produktivitas perluasan daerah irigasi teknis;
 - 2) Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian lahan basah;
 - 3) Melanjutkan pengembangan kualitas produk agropolitan;
 - 4) Melanjutkan pengembangan manajemen agrowisata;
 - 5) Melanjutkan pengembangan agroindustri.
- e. Industri
- 1) Melanjutkan pengembangan industri pengolahan produk pertanian;
 - 2) Melanjutkan pengembangan kuantitas dan kualitas produk industri rumah tangga.
- f. Koperasi
- 1) Melanjutkan pengembangan koperasi produksi industri rumah tangga.
- g. Pertambangan dan Energi
- 1) Melanjutkan pelayanan mekanisasi penambangan galian gol. C;
 - 2) Melanjutkan pengembangan listrik mikro hidro;
 - 3) Melanjutkan pengembangan bioenergi.
3. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing
- a. Kependudukan
- 1) Melanjutkan pengembangan Manajemen Sistem Informasi kependudukan
- b. Kualitas SDM
- 1) Melanjutkan peningkatan pelayanan dalam peningkatan pendidikan ke luar negeri;
 - 2) Melanjutkan penguasaan teknologi informatika.
- c. Politik, hukum dan pemerintahan
- 1) Mempertahankan situasi politik yang kondusif;
 - 2) Peningkatan kualitas, fungsi dan peran Legislatif;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan *good governance*;
- d. Sarana dan Prasarana Wilayah
- 1) Peningkatan kondisi jalur prasarana dan sarana transportasi ke

- pusat-pusat kegiatan masyarakat;
- 2) Pembangunan jaringan prasarana dan sarana irigasi;
- 3) Pengembangan pembangunan mikro hidro;
- 4) Melanjutkan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi.
- e. Olahraga dan kebudayaan
 - 1) Melanjutkan peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - 2) Melanjutkan peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya khas Banyumas;
 - 3) Peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam perlindungan benda cagar budaya.
- 4. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari
 - a. Keberlanjutan pembangunan
 - 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 2) Penyusunan Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 3) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya;
 - 4) Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya.
 - b. Lingkungan hidup
 - 1) Melanjutkan antisipasi bencana alam di kawasan rawan bencana;
 - 2) Melanjutkan peningkatan pelayanan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan terasering di area belum terbangun;
 - 4) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam penanaman pohon di area konservasi.
 - c. Penataan ruang wilayah
 - 1) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
 - 2) Melanjutkan evaluasi dan revisi perda tentang RDTR Kawasan Perkotaan secara periodik;
 - 3) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam penyusunan *Neighbourhood Development*.

5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya saing yang merupakan bagian dari perubahan paradigma dari Reformasi Birokrasi menjadi tujuan yang pertama karena Reformasi Birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, dan merupakan upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Pada akhir periode *Grand Design* RB, yaitu Tahun 2025 diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan: tidak ada korupsi; APBN/APBD efektif efisien baik; semua program selesai dengan baik; semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik; penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; hasil pembangunan nyata (pro-

pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan).

Berdasarkan capaian tahun 2021, peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi di daerah ternyata belum signifikan dan berkorelasi kuat dengan peningkatan capaian indikator pembangunan yang ada dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD, yaitu capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terhadap kualitas pelayanan birokrasi Masih adanya beberapa keluhan masyarakat, terkait dengan: (a) Pelayanan publik dasar yang tidak sesuai dengan standar; (b) Perizinan masih menyulitkan dan lambat; (c) Transparansi dan komunikasi pemerintah kepada publik masih kurang; (d) Praktek KKN dalam penyelenggaraan negara masih terjadi.

Permasalahan belum optimalnya capaian indikator tujuan pembangunan dikarenakan Reformasi Birokrasi hanya fokus pada :

- tata kelola pemerintahan (*governance*) yang bersifat umum dan instansional, sementara banyak isu strategis tata kelola pemerintahan (*governance*) yang terjadi bersifat lintas sektoral atau lintas instansi pemerintah (*crosscutting issue*).
- Kebijakan penilaian Reformasi Birokrasi lebih banyak berorientasi pada pemenuhan atau administratif sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kualitas RB yang berdampak nyata bagi masyarakat.
- Kolaborasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi belum optimal.

Untuk itu telah dilakukan perubahan road map Reformasi Birokrasi yaitu terhadap :

- Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan Reformasi Birokrasi General yaitu memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.
- Tujuan Reformasi Birokrasi yaitu Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik
- Sasaran Reformasi Birokrasi General yaitu 1.Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; 2.Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

- Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik yaitu Reformasi Birokrasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas Presiden.

Berdasarkan perubahan road map Reformasi Birokrasi ini maka Kabupaten Banyumas menentukan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing” dengan sasaran

1. Mewujudkan ASN yang profesional,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif,

Hal ini merupakan upaya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas untuk pencapaian tujuan kedua “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”, tujuan ketiga “Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” tujuan keempat “Memperkuat Ketahanan Pangan”

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing maka Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah” dengan sasaran:

1. Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah
2. Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
3. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
4. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan Risiko bencana
5. Meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Banyumas memanfaatkan potensi dan kualitas sumber daya alam maupun

sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat berdaya saing sehingga dapat membuka luas peluang kerja dan usaha untuk mewujudkan tujuan ketiga yaitu menangani pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM.

Tujuan 3 : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terwujudnya tujuan pertama dan kedua diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan ketiga yaitu penanganan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan SDM dengan mengkolaborasikan program dan keterlibatan *stakeholders* serta memanfaatkan SDA dan SDM yang telah ditingkatkan kualitasnya dan berefek pula terhadap peningkatan SDM selanjutnya di masa datang sehingga tercapai pula bonus demografi yang berkualitas.

Tujuan 3 yaitu menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwujudkan dengan sasaran :

1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan derajat Pendidikan
6. Meningkatkan literasi masyarakat
7. Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
9. Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda

Tujuan 4 : Memperkuat Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan menjadi tujuan terakhir dikarenakan pada dasarnya ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas dapat tercukupi secara mandiri oleh produksi pangan yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun tetap perlunya penguatan ketahanan pangan dengan meningkatkan pengelolaan pangan baik terhadap ketersediaan, keterjangkauan maupun dalam pemanfaatan pangan sehingga dapat berjalan secara optimal untuk dapat mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat Banyumas dan mengantisipasi adanya krisis pangan global.

Dengan demikian upaya mewujudkan tujuan 4 yaitu memperkuat ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan sasaran :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya sampai akhir periode RPD Tahun 2024-2026. Dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 ditetapkan 4 tujuan dengan 7 indikator tujuan dan 20 sasaran dengan 30 indikator sasaran sebagaimana berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran					Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
										2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing				1		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,08	75	73,5	74	75	75
		1	1.1	Mewujudkan ASN yang Profesional		1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	37,33	71	71	72	73	73
		2	1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	4,54	3,85	4,57	4,60	4,65	4,65
		3	1.3	Mewujudkan Tata Kelola		3	Nilai Komponen Hasil Indek	Nilai	32,90	N/A	33,05	33,10	33,15	33,15

Tujuan	Sasaran					Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
									2023	2024	2025	2026	Akhir
			Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif			Reformasi Birokrasi							
					4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	78,46	80	79	79,5	80	80
					5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,029	3	3,050	3,075	3,100	3,100
					6	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100

Tujuan		Sasaran					Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
										2023	2024	2025	2026	Akhir
						7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,6	3,30	3,3	3,5	3,7	3,7
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah				2		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,86	5,0	5,90 - 6,40	6,00 - 6,45	6,10 - 6,50	6,10 - 6,50
		4	2.1	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah		8	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Milyar Rupiah	43.069,5	N/A	45.595	48.330	51.351	51.351
					3		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,255	N/A	3,5	3,6	3.7	3.7
		5	2.2	Meningkatkan stabilitas		9	Angka Kriminalitas	Angka	1,57	1,516	1,48	1,46	1,44	1,44

Tujuan		Sasaran					Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
										2023	2024	2025	2026	Akhir
				keamanan wilayah										
		6	2.3	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah		10	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	3,583	3,50	3,42	3,42	3,42	3,42
		7	2.4	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan Risiko bencana		11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,81	64,15	64,20	64,22	64,25	64,25
						12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	164	N/A	152	148	144	144
		8	2.5	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi		13	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi pada IDSD	Indeks	2,93	N/A	2,95	2,96	2,97	2,97
3	Menangani Kemiskinan dan				4		Angka Kemiskinan	%	12,84	11,00	10,90-9,96	10,87-9,93	10,84-9,90	10,84-9,90

Tujuan		Sasaran				Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
									2023	2024	2025	2026	Akhir
Pengangguran serta Meningkatkan SDM	9	3.1	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin		14	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	N/A	N/A	1,35	1,15	0,86	0,86
				5		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,05	4,5	5,61 - 6,00	5,56 - 5,95	5,51 - 5,90	5,51 - 5,90
	10	3.2	Meningkatkan kesempatan kerja		15	Tingkat Kesempatan Kerja	%	93,95	N/A	94,15	94,25	94,35	94,35
	11	3.3	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja		16	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang	%	93,51	N/A	93,53	93,54	93,55	93,55

Tujuan		Sasaran				Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
									2023	2024	2025	2026	Akhir
						ditamatkan minimal SLTA							
					6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,17	72,58	75,5	76,0	76,5	76,5
		12	3.4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		17	Tahun	73,88	73,93	73,96	74,04	74,12	74,12
		13	3.5	Meningkatkan derajat pendidikan		18	Tahun	13,21	12,91	13,40	13,50	13,60	13,60
		14	3.6	Meningkatkan Literasi Masyarakat		19	Indeks	32,61	N/A	38,0	38,5	39,0	39,0
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)							

Tujuan		Sasaran					Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
										2023	2024	2025	2026	Akhir
		15	3.7	Mengoptimalkar pengendalian pertumbuhan penduduk		20	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,36	-2,95	1,36	1,35	1,34	1,34
		16	3.8	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,54	87,67	89,45	89,75	90,05	90,05
						22	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	595	650	600	610	620	620
		17	3.9	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda		23	Tingkat daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	%	0,46	N/A	0,55	0,58	0,63	0,63
4	Memperkuat Ketahanan Pangan				7		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,02	74,04	81,13	82,07	83,01	83,01
		18	4.1	Meningkatkan ketersediaan		24	Nilai aspek ketersediaan	Nilai	80,98	N/A	83,43	84,68	85,95	85,95

Tujuan	Sasaran					Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				
									2023	2024	2025	2026	Akhir
			pangan secara mandiri			pangan dalam IKP							
	19	4.2	Meningkatkan keterjangkauan pangan		25	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Nilai	79,48	N/A	81,48	82,29	83,12	83,12
	20	4.3	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan		26	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Nilai	77,20	N/A	79,14	79,93	80,73	80,73

Sumber : diolah dari Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan strategi dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan ASN profesional	1	Meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN
		2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik
		3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif	3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah yang berbasis pada Reformasi Birokrasi tematik dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan produk potensi ekonomi daerah
		5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	5	Mengoptimalkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
				6	Menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	7	Meningkatkan kualitas permukiman dan cakupan infrastruktur pelayanan dasar
				8	Merencanakan penataan kawasan strategis, pengembangan dan konektivitas wilayah untuk persiapan pemekaran wilayah
		7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	9	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengoptimalkan pengelolaan risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang
		8	Meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi	10	Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	11	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin
				12	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin
				13	Meningkatkan layanan PPKS
		10	Meningkatkan Kesempatan kerja	13	Meningkatkan iklim investasi dan usaha
		11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	14	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	15	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
		13	Meningkatkan derajat pendidikan	16	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
		14	Meningkatnya literasi masyarakat	17	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui literasi digital
		15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk	18	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana
		16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	19	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan Anak

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
		17	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda	20	Meningkatkan peran aktif pemuda serta prestasi pemuda dan olahraga
4.	Memperkuat ketahanan pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri.	21	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan
		19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	22	Meningkatkan keterjangkauan harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan
		20	Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan	23	Meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal

Sumber : diolah Bappedalitbang, 2022

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI” dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran tersebut dalam pencapaiannya ditetapkan alternatif upaya strategi pembangunan daerah. Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan agar fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan tahunan pembangunan daerah akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2024-2026. Gambaran arah kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN 2024	NO	ARAH KEBIJAKAN 2025	NO	ARAH KEBIJAKAN 2026
							Tema : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah		Tema : Peningkatan Daya Saing SDM dan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah		Tema : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menuju Banyumas berdaya saing sejahtera maju serta lestari
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan ASN profesional	1	Meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN	1	Penempatan pegawai sesuai kompetensi, peningkatan kapasitas ASN dan implementasi ASN Ber-AKHLAK	1	Penerapan reward dan punishment serta penguatan kapasitas ASN dan implementasi ASN Ber-AKHLAK	1	Penguatan budaya birokrasi ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional
		2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik	2	Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik dan mengoptimalkan sistem pelayanan publik sesuai standar	2	Perluasan akses layanan publik	2	Penguatan pelayanan publik terintegrasi
		3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif	3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah yang berbasis pada Reformasi Birokrasi tematik dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	3	Peningkatan kualitas Perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian dan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	3	Peningkatan kualitas Perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian dan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	3	Peningkatan kualitas Perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian dan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
						4	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah seta mengoptimalkan sistem pengelolaan pendapatan	4	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah seta mengoptimalkan sistem pengelolaan pendapatan	4	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah seta mengoptimalkan sistem pengelolaan pendapatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN 2024	NO	ARAH KEBIJAKAN 2025	NO	ARAH KEBIJAKAN 2026
							daerah		daerah		daerah
						5	Peningkatan Tata Kelola dan manajemen SPBE	5	Optimalisasi tata kelola dan manajemen SPBE serta peningkatan Infrastruktur Digital	5	Peningkatan efektivitas tata kelola dan manajemen SPBE serta infrastruktur digital
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan produk potensi ekonomi daerah	6	Peningkatan pemberdayaan SDM pelaku pengembangan ekonomi daerah	6	Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya dalam pengembangan potensi ekonomi daerah	6	Peningkatan nilai tambah produk potensial ekonomi daerah
		5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	5	Mengoptimalkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	7	Peningkatan pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan ketentraman dan ketertiban	7	Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterjangkauan pelayanan penanganan penanggulangan ketentraman dan ketertiban	7	Peningkatan efektivitas layanan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterjangkauan pelayanan pencegahan dan penanganan penanggulangan ketentraman dan ketertiban

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN 2024	NO	ARAH KEBIJAKAN 2025	NO	ARAH KEBIJAKAN 2026
				6	Menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat	8	Peningkatan pendidikan politik masyarakat serta peran serta parpol dalam pendidikan politik mendukung PEMILU/PILKADA serentak	8	Peningkatan peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan yang berwawasan nusantara dan upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	8	Optimalisasi pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	7	Meningkatkan kualitas permukiman dan cakupan infrastruktur pelayanan dasar	9	Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	9	Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	9	Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar
				8	Merencanakan penataan kawasan strategis, pengembangan dan konektivitas wilayah untuk persiapan pemekaran wilayah	10	Optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	10	Optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	10	Optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah
		7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan	9	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan	11	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau	11	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau	11	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN 2024	NO	ARAH KEBIJAKAN 2025	NO	ARAH KEBIJAKAN 2026
			resiko bencana		pengelolaan risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang						terbuka hijau
						12	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	12	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	12	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
		8	Meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi	10	Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna	13	Penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah	13	Penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah	13	Penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	11	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	14	Peningkatan pemberian bantuan sosial dengan meminimalisir <i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i> serta Percepatan penurunan kemiskinan eskstrem	14	Perluasan akses bantuan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin	14	Peningkatan pemberian bantuan untuk mengurangi biaya pelayanan dasar masyarakat miskin
				12	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin	15	Meningkatkan Pendataan dan perencanaan inklusif	15	Meningkatkan Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat inklusif	15	Meningkatkan ekonomi inklusif
				13	Meningkatkan layanan PPKS	16	Peningkatan jumlah layanan rumah singgah	16	Peningkatan kualitas layanan rumah singgah	16	Pemenuhan layanan SPM di Rumah Singgah
		10	Meningkatkan Kesempatan kerja	14	Meningkatkan iklim investasi dan usaha	16	Peningkatan kemudahan investasi dan berusaha	16	Peningkatan kemudahan investasi dan pendampingan usaha	16	Perluasan investasi dan kesempatan berusaha

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN 2024	NO	ARAH KEBIJAKAN 2025	NO	ARAH KEBIJAKAN 2026
		11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	15	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	17	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri	17	Peningkatan kemitraan kerja	17	Penguatan kemitraan kerja
		12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	16	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	18	Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat serta pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan SDM kesehatan	18	Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan	18	Perluasan akses layanan kesehatan berbasis digital
		13	Meningkatkan derajat pendidikan	17	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	19	Peningkatan pengelolaan pendidikan serta perluasan akses layanan pendidikan terutama untuk siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi	19	Penguatan kualitas layanan pendidikan dasar khususnya pendidikan inklusi	19	Penguatan perluasan akses dan mutu layanan pendidikan inklusi berbasis kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan
		14	Meningkatkan literasi masyarakat	18	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui literasi digital	20	Peningkatan kualitas sarana prasarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan	20	Peningkatan dan perluasan akses layanan literasi	20	Peningkatan sarana prasarana literasi digital
		15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk	19	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana	21	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB	21	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB	21	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB
		16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	20	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan Anak	22	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta pemenuhan hak anak	21	Peningkatan peran serta perempuan dalam kegiatan ekonomi serta pemenuhan hak anak	22	Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan serta pemenuhan hak anak
		17	Meningkatkan kapasitas dan daya saing	21	Meningkatkan peran aktif pemuda serta prestasi	23	Pengembangan potensi pemuda serta peningkatan peran aktif pemuda dalam	22	Fasilitasi kegiatan pengembangan prestasi pemuda serta penguatan	23	Penguatan kapasitas pemuda dan kelembagaan pemuda

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN 2024	NO	ARAH KEBIJAKAN 2025	NO	ARAH KEBIJAKAN 2026
			pemuda		pemuda dan olahraga		organisasi kepemudaan		organisasi kepemudaan		
4	Memperkuat ketahanan pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri.	22	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan	24	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan	24	Penguatan SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan	14	Optimalisasi intensifikasi produksi komoditas pangan
		19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	23	Meningkatkan keterjangkauan harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan	25	Peningkatan ketersediaan stok pangan	25	Peningkatan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan	25	Peningkatan upaya stabilisasi harga pangan serta meningkatkan akses distribusi pangan khususnya bagi daerah rawan pangan
		20	Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan	24	Meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal	26	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan komoditas pangan dan keamanan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan	26	Penguatan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan komoditas pangan dan keamanan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan	26	Peningkatan diversifikasi konsumsi serta pengendalian dan pengawasan keamanan pangan

Sumber : diolah Bappedalitbang, 2022

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang merupakan program prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program mendasari pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing

Program Prioritas yang akan dilaksanakan :

BKPSDM

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

DINKOMINFO

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Aplikasi Informatika
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

KECAMATAN

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

DINDUKCAPIL

7. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan

SETDA

8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Program Perekonomian dan Pembangunan

SETWAN

10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

INSPEKTORAT

11. Program Penyelenggaraan Pengawasan

12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

BKAD

13. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAPENDA

15. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAPPEDALITBANG

16. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

17. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

DINARPUSDA

18. Program Pengelolaan Arsip

DPMPTSP

19. Program Pelayanan Penanaman Modal

DINSOSPERMASDES

20. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Program Prioritas yang akan dilaksanakan :

DINPORABUDPAR

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Program Pengembangan Kebudayaan

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

DINPERINDAG

5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
7. Program Pengembangan Ekspor
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

DINAKERKOPUKM

10. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
12. Program Pengembangan UMKM
13. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

DINKANNAK

14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

DINPERTANKP

15. Program Penyuluhan Pertanian

BAKESBANGPOL

16. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
17. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
18. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

SATPOL PP

20. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
21. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

DINPERKIM

22. Program Pengembangan Perumahan
23. Program Kawasan Permukiman
24. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum
25. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
26. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
27. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

28. Program Penatagunaan Tanah

DPU

29. Program Penyelenggaraan Jalan

DINHUB

30. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

DLH

31. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

32. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

33. Program Pengelolaan Persampahan

34. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

BPBD

35. Program Penanggulangan Bencana

BAPPEDALITBANG

36. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

DINARPUSDA

37. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

KECAMATAN

38. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan 3 : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Prioritas yang akan dilaksanakan :

DINSOSPERMASDES

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana

DINPERKIM

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

DPMPTSP

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
7. Program Promosi Penanaman Modal

DINAKERKOPUKM

8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Penempatan Tenaga Kerja
10. Program Hubungan Industrial

DINKES

11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan

DINDIK

14. Program Pengelolaan Pendidikan
15. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DINARPUSDA

16. Program Pembinaan Perpustakaan

DPPKBP3A

17. Program Pengendalian Penduduk
18. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
19. Program Perlindungan Perempuan
20. Program Perlindungan Khusus Anak
21. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

DINPORABUDPAR

22. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
23. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tujuan 4 : Memperkuat Ketahanan Pangan

Program Prioritas yang akan dilaksanakan :

DINPERTAN KP

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

DPU

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

DINKANNAK

5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Program Penanganan Kerawanan Pangan
9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
10. Program Pengawasan Keamanan Pangan
11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
12. Program Perizinan Usaha Pertanian

DINPERINDAG

13. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

6.5. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah Tahun 2024-2026 dilaksanakan dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan Isu Strategis Daerah dengan slogan PADU GEMUYU yang artinya **mempadukan** program-program dengan melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan melalui **Gerakan Mencapai Upaya Yang dituju** (Padu dalam bahasa jawa berarti berselisih dalam berdiskusi/bermusyawarah karena memiliki keinginan yang kuat, dan dalam bahasa indonesia memiliki arti kompak bersatu, sedangkan gemuyu dalam bahasa jawa berarti tertawa yang menandakan bahagia karena telah tercapai apa yang menjadi tujuannya).

Rencana Inovasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 4 (empat) disesuaikan dengan tema arah kebijakan

pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan daerah Tahun 2024 sampai dengan 2026, yaitu :

1. TERAP REBO (Penerapan Reformasi Birokrasi)

Terap Rebo merupakan upaya Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB-Tematik) yang berfokus pada mendorong digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi untuk meningkatkan investasi dan menanggulangi kemiskinan, sehingga Tata kelola Pemerintah menjadi efektif dan kolaboratif dalam menyelesaikan Isu strategis dan dapat langsung berdampak bagi percepatan pembangunan serta bagi kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas manajemen internal pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas, meliputi peningkatan kualitas tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen, yang berpedoman pada peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Tata kelola Pemerintah yang mengintegrasikan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan ini telah dilaksanakan oleh Pemkab Banyumas dan dirasakan sangat bermanfaat untuk manajemen internal Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masih tetap diterapkan dan dikembangkan pada tahun 2024-2026 dengan selalu mengalami pembaharuan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada, dapat dilihat dari semakin banyaknya aplikasi yang diintegrasikan antara lain: MRI (Sistem Informasi Manajemen Resiko), RPD (Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah), eMonev (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan), Dimas Satria (Sistem Informasi Satu Data), SPIP (Sistem Informasi Pengendalian Intern Pemerintah), JeGOS (Project Management Online System), eSAKIP (Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Pemerintah), dan Simpatik Terintegrasi (Sistem Informasi Penilaian Target Kinerja), serta aplikasi lain yang potensial untuk dapat diintegrasikan antara lain Pena Mas (Pemetaan Aset Tanah

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya optimalisasi dalam membentuk Ekosistem Inovasi yang komprehensif, berdampak, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

Upaya Kabupaten Banyumas untuk menuntaskan isu strategis RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang kedua yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah melalui pengembangan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mengarahkan inovasi pada upaya-upaya untuk mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan hilirisasi segala bentuk invensi dan inovasi menjadi bernilai guna dan bernilai jual untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang disebut dengan KEMBANG EKSIMAS (Pengembangan Ekosistem Inovasi di Kabupaten Banyumas)

KEMBANG EKSIMAS yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi program terintegrasi dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat/Komunitas, dan Media. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah beberapa Perangkat Daerah yang memiliki peranan dalam menjamin terbentuknya suatu Ekosistem Inovasi dan berjalannya siklus dalam ekosistem tersebut. Bappedalitbang sebagai pemrakarsa inovasi Kembang Eksimas, bersama dengan DINPERINDAG, DINAKERKOP-UKM, DINPORABUDPAR, DINPERTAN-KP, DPMPTSP, dan DINSOSPERMASDES bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan penguatan ekosistem inovasi melalui Sentra KI, Inkubator Bisnis, dan Technopark yang akan dibentuk di Kabupaten Banyumas. Seluruh program dan kegiatan inovasi KEMBANG EKSIMAS dipantau dan dievaluasi secara berkala dan tersistem.

3. BALANG KEMIS (Banyumas Menanggulangi Kemiskinan)

Balang Kemis merupakan upaya untuk menyelesaikan isu strategis ketiga yaitu menanggulangi kemiskinan melalui penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, peningkatan kapabilitas dan daya saing pemuda, serta peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kerja.

Sektor Pendidikan di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sektor yang diharapkan paling banyak melahirkan inovasi. Tercatat berdasarkan SK Bupati Banyumas No. 070/1134 Tahun 2022, inovasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas termasuk inovasi di unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) mencapai 22 inovasi pada Tahun 2022. Salah satu inovasi untuk meningkatkan kapasitas para pendidik di Kabupaten Banyumas yaitu Banyumas Calakan Teacher Training Center (BCT2C). Diharapkan pada tahun 2024-2026 inovasi ini dapat dikembangkan dan diterapkan untuk menunjukkan komitmen Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan khususnya untuk penanganan Anak Tidak Sekolah.

Sektor Kesehatan di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sektor yang paling banyak juga melahirkan inovasi dan menorehkan beberapa prestasi. Tercatat berdasarkan SK Bupati Banyumas No. 070/1134 Tahun 2022, inovasi di bidang Kesehatan pada Tahun 2022 mencapai 46 inovasi. Beberapa inovasi bidang kesehatan yang diharapkan dapat diterapkan dan dikembangkan pada tahun 2024-2026 dalam rangka peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan kualitas perempuan (Ibu) dan Anak serta penanganan Stunting adalah Inovasi Siap Ceria, Komunitas Asem Pecel (Ayo Semangat Berprilaku Cerdik LanPatuh), dan Denmas Slamet (Deteksi Nang Masyarakat Ben Slamet).

4. KAMANDALU (Keterjangkauan, Ketersediaan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan serta ketersediaan Cadangan Pangan melalui Lumbung Pangan)

Kabupaten Banyumas masih menghadapi permasalahan di bidang Pangan yaitu masih adanya desa rawan pangan. data yang diperoleh dari Badan Pangan Nasional, hingga 2022 masih terdapat 21 desa rawan pangan dengan kondisi sangat rawan 0 desa, rentan rawan pangan 3 desa dan agak rentan rawan pangan 18 desa. Kondisi rawan pangan tersebut disebabkan: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak

terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024-2026 merencanakan menerapkan dan mengembangkan inovasi KAMANDALU dalam bidang ketahanan pangan melalui sistem terpadu upaya mengentaskan desa rawan pangan di Kab. Banyumas.

Pada masyarakat Indonesia khususnya Jawa, penggambaran Dewi Sri tidak terlepas dari konsep Dewi Padi yang sangat erat kaitannya dengan kesuburan dan memegang peranan penting dalam pertanian, serta memiliki atribut yang khas yaitu tangan kanan memegang kamandalu dan tangan kiri memegang setangkai padi.

Sehingga penamaan KAMANDALU menggambarkan upaya inovasi berupa sistem terpadu untuk menyelesaikan isu strategis ketiga yaitu penguatan ketahanan pangan yang ditopang oleh 3 aspek utama yaitu: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Sementara itu, secara lebih detail yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan ketahanan pangan berdasarkan subsektor antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang meliputi sistem produksi, peningkatan kualitas SDM, pengolahan pasca-panen, akses terhadap modal dan pemasaran, serta pola konsumsi masyarakat.

Pengentasan desa rawan pangan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang terintegrasi, holistik dan melibatkan pemangku kepentingan serta fokus pada sasaran berdasarkan pemetaan atau data spasial desa rawan pangan. Intervensi pemangku kepentingan terkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain: Gerakan pangan murah, bantuan pangan, pekarangan pangan lestari, pengembangan pasar desa, pemberdayaan, sosialisasi konsumsi pangan, pembangunan sarana prasarana jalan dan irigasi, penyediaan air bersih dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Secara kelembagaan akan ditingkatkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang mendukung ketahanan pangan dengan melibatkan Pemangku kepentingan antara lain dari unsur perangkat daerah seperti DinpertanKP, Dinkannak, Dinperindag, Dinsospermasdes, DPU, Dinperkim, dan Dinkes, unsur Non Pemerintah seperti swasta dan

BUMN/BUMD, Lembaga Kemasyarakatan, serta Desa dan Masyarakat sendiri.

Selanjutnya secara berkala akan dilakukan dimonitoring dan dievaluasi terhadap implementasi dari KAMANDALU dalam penguatan ketahanan pangan khususnya penanganan desa rawan pangan yang berdampak pada peningkatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
											Tema : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah		Tema : Peningkatan Daya Saing SDM dan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah		Tema : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menuju Banyumas berdaya saing sejahtera maju serta lestari										
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan ASN yang Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN	1	Meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN	1	Penempatan pegawai sesuai kompetensi, peningkatan kapasitas ASN dan implementasi ASN Ber-AKHLAK	1	Penerapan reward dan punishment serta penguatan kapasitas ASN dan implementasi ASN Ber-AKHLAK	1	Penguatan budaya birokrasi ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional	1	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
																2	BKPSDM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
																3	BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
				2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	2	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik	2	Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik dan mengoptimalkan sistem pelayanan publik sesuai standar	2	Perluasan akses layanan publik	2	Penguatan pelayanan publik terintegrasi	4	DINDUKAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik	%	99.4	99.6	99.8	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target											
																						2024	2025	2026	Akhir								
																	5	DINDUKCAPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100							
																	6	DINDUKCAPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data SIAK berjalan dengan baik	%	100	100	100	100	100							
																								7	DINDUKCAPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	94.69	96	97	98	98
																								8	DPMPTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	1. %	1. 96	1. 96	1. 96.5	1. 97	1. 97
																								9	DINKOMINFO	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	100	100	100	100
																								10	DINDUKCAPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																								11	SETWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	N/A	90	91	92	92

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
				3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	3	Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi	3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah dengan mengoptimalkan sistem pemerintah berbasis elektronik	3	Peningkatan kualitas Perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian dan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	3	Peningkatan kualitas Perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian dan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	12	SETWAN	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase capaian fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu 2. Persentase capaian fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 3. Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD 4. Persentase capaian fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5. Persentase capaian fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Persentase capaian fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 7. Persentase capaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1. % 2. % 3. % 4. % 5. % 6. % 7. %	1. N/A 2. N/A 3. N/A 4. N/A 5. N/A 6. N/A 7. N/A	1. 90 2. 90 3. 90 4. 90 5. 90 6. 90 7. 90	1. 91 2. 91 3. 91 4. 91 5. 91 6. 91 7. 91	1. 92 2. 92 3. 92 4. 92 5. 92 6. 92 7. 92			
														13	DINARPUSDA	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	50	48	53	58	58		
														14	DINARPUSDA	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	100	100	100	100	100		
														15	DINARPUSDA	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Arsip Tertutup yang Diizinkan untuk	%	0.108	33	66	100	100		

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																			Digunakan						
																16	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	100	100	100	100	100
																17	DINSOSPERMASDES	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Administrasi Baik	%	30	100	100	100	100
																18	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	6.64	1	1.5	1.5	1.5
																19	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa mandiri	%	200	11	14	19	19
																20	27 Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100
																21	27 Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
																22	27 Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	100	100	100
																23	27 Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target				
																						2024	2025	2026	Akhir	
																	24	27 Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	93,75	97,562092	97,764706	97,941176	97,941176
						4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)										25	SETDA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase BUMD yang sehat dan profitable 2. Persentase jumlah paket tender pengadaan barang jasa yang berhasil 3. Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian kinerjanya 4. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. % 2. % 3. % 4. %	1. 100 2. 100 3. N/A 4.100	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	
						26	SETDA										PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi 2. Persentase kerjasama daerah dan pengembangan potensi daerah yang terfasilitasi 3. Persentase permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi 4. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPPD	1. % 2. % 3. % 4. Nilai	1. 100 2. 100 3. 100 4. 3.44	1. 100 2. 100 3. 100 4. 3.5	1. 100 2. 100 3. 100 4. 3.6	1. 100 2. 100 3. 100 4. 3.7	1. 100 2. 100 3. 100 4. 3.7		

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
						5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)									27	BAPPEDA LITBANG	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik	%	94.64	100	100	100	100
																28	BAPPEDA LITBANG	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur	1. % 2. %	1. 70.59 2. 0	1. 30 2. 100	1. 60 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100
																29	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Level Kapabilitas APIP 2. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B 3. Persentase desa berisiko tinggi	1. level 2. % 3. %	1. 2 2. 45 3. 10	1. 2 2. 50 3. 10	1. 2 2. 51 3. 7	1. 3 2. 52 3. 5	1. 3 2. 52 3. 5

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																						2024	2025	2026	Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa 2. Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan 4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	1. % 2. % 3. % 4. %	1. 1 2. 30 3. 53 4. 94	1. 1 2. 30 3. 55 4. 94	1. 1 2. 30 3. 55 4. 94.5	1. 1 2. 30 3. 57 4. 95	1. 1 2. 30 3. 57 4. 95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						6	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah																			31	BKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	%	100	95	95	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																										32	BKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase ketepatan waktu penetapan APBD 2. Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	1. % 2. %	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																										33	BAPENDA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	%	60	56	57	59	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																										34	DINKOMINFO	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase sistem elektronik yang diamankan	%	100	100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
							Elektronik (SPBE											PENGAMANAN INFORMASI							
																35	DINKOMINFO	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	100	100	100	100
																36	DINKOMINFO	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang disediakan Pemda	%	100	100	100	100	100
																37	DINARPUSDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
																38	27 Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																39	SETDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	N/A	100	100	100	100
																40	BAPPEDA LITBANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																41	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																42	BKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	N/A	100	100	100	100
																43	BAPENDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																44	DINKOMINFO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	N/A	100	100	100	100
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	8	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4	Mengoptimalkan pengembangan produk potensi ekonomi daerah	4	Peningkatan pemberdayaan SDM pelaku pengembangan ekonomi daerah	4	Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya dalam pengembangan potensi ekonomi daerah	4	Peningkatan nilai tambah produk potensial ekonomi daerah	45	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang dikelola Pemda	%	0	2	3	4	4
																46	DINPORABUDPAR	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	100	1.67	3.00	4.00	4.00
																47	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Persentase Peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI	%	N/A	60	80	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																		KEKAYAAN INTELEKTUAL							
																48	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Persentase Peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif 2. Persentase SDM Kepariwisataa yang bersertifikat	1. % 2. %	1. 0 2. 0	1. 22.73 2. 32.31	1. 29.63 2. 35.38	1. 31.43 2. 38.46	1. 31.43 2. 38.46
																49	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata	%	0	12.50	16.67	33.33	33.33
																50	DINPORABUDPAR	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	16.67	16.67	16.67	33.33	33.33
																51	DINPORABUDPAR	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah	%	48.33	42.50	44.32	46.32	46.32
																52	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	98	39.18	63.66	100	100
																53	DINPERTAN KP	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	%	7.19	0.10	0.15	0.16	0.16

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																54	DINPERINDAG	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	85.00	85.00	85.50	86.00	86.00
																55	DINPERINDAG	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi	%	92.31	92.31	96.15	100	100
																56	DINPERINDAG	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	\$ USD	450000 00	45000 000	47000 000	50000 000	500000 00
																57	DINPERINDAG	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTP yang ditera tera ulang	%	71	71	72	73	73
																58	DINPERINDAG	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	1.00	1.00	1.10	1.20	1.20
																59	DINPERINDAG	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	92	92	93	94	94

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																60	DINPERINDAG	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI IPUI Kecil dan Menengah IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	81.25	81.25	82.35	83.33	83.33
																61	DINPERINDAG	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	40	40	40	40
																62	DINAKERKOP UKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam	%	100	100	100	100	100
																63	DINAKERKOP UKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	%	14.26	35.71	36.11	41.09	41.09
																64	DINAKERKOP UKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	%	12.56	28.57	29.17	34.25	34.25
																65	DINAKERKOP UKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	%	27.60	28.57	29.17	35.62	35.62
																66	DINAKERKOP UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pemberdayaan dan perlindungan	%	8,96	22.86	23.06	24.66	24.66
																67	DINAKERKOP UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	%	N/A	0.50	0.56	0.61	0.61

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																		MIKRO (UMKM)							
																68	DINAHERKOP UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang dikembangkan	%	N/A	0.17	0.18	0.20	0.20
																69	DINKANNAK	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi Olahan Hasil Perikanan 2. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	1. Ton 2. kg/ kapita/ tahun	1. 200 2. 0.1	1. 500 2. 2	1. 520 2. 2	1. 540.8 2. 2	1. 540.8 2. 2
																70	DINPERINDAG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																71	DINAHERKOP UKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																72	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
		3	Indeks Daya Saing Daerah	5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	9	Angka Kriminalitas	5	Menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat	5	Peningkatan pendidikan politik masyarakat serta peran serta parpol dalam pendidikan	5	Peningkatan peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan yang berwawasan nusantara dan	5	Optimalisasi pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta penguatan	73	KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	%	N/A	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
										politik mendukung PEMILU/PILKA DA serentak		upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba		ideologi pancasila dan karakter bangsa	74	KESBANGPOL	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	%	90	100	100	100	100	
															75	KESBANGPOL	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	%	N/A	100	100	100	100	
															76	KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	
															77	KESBANGPOL	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	
															78	KESBANGPOL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	N/A	100	100	100	100	
															79	SATPOL PP	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	
						6	Mengoptimalkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	6	Peningkatan pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta	6	Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta	6	Peningkatan efektivitas layanan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan												

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target					
																						2024	2025	2026	Akhir		
											keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulanga n ketentraman dan ketertiban		keterjangkauan pelayanan penanganan penanggulangan ketentraman dan ketertiban		perlindungan masyarakat serta keterjangkauan pelayanan pencegahan dan penanganan penanggulanga n ketentraman dan ketertiban	80	SATPOL PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah 2. Persentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya 3. Cakupan patroli di wilayah	1. % 2. % 3. %	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100			
																81	SATPOL PP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100		
																82	DINPERKIM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana 2. Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	1. % 2. %	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100			
				6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	10	Indeks Daya Saing Infrastruktur	7	Meningkatkan kualitas permukiman dan cakupan infrastruktur pelayanan dasar	7	Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	7	Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	7	Pengurangan permukiman kumuh dan RTLH serta peningkatan ketersediaan Prasarana Sarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur pelayanan dasar	83	DINPERKIM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%	30.19	43.15	56.11	69.08	69.08		
																		84	DINPERKIM	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	33	40	47	53	53

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																			Rasio Permukiman Layak Huni	%	80.10	80.21	80.34	80.47	80.47
																85	DINPERKIM	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	N/A	100	100	100	100
																86	DINPERKIM	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	N/A	100	100	100	100
																87	DINPERKIM	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase tanah yang tertata	%	100	100	100	100	100
																88	DINPERKIM	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan RTLH yang diperbaiki	%	0.27	11.90	11.90	11.90	11.90
																89	DINPERKIM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota	%	77.08	78.58	80.08	81.58	81.58
																90	DINPERKIM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	92	94	96	98	98
																91	DINPERKIM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																			yang diterbitkan						
																92	DINPERKIM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik	%	-0.25	0.92	0.77	0.77	0.77
																93	DPU	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%	74.77	76.10	76.76	77.43	77.43
																94	DPU	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	%	61,90	87.21	88.37	89.53	89.53
																95	DPU	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luas kawasan strategis yang tertata	%	82,975	77.18	80.51	83.85	83.85
																96	DPU	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan sebagai jalur evakuasi dalam kondisi baik	1. % 2. %	1. 57,596 2. 68,45	1. 59.25 2. 50.69	1. 60.083 2. 52.25	1. 60.91 2. 2. 53.8	1. 60.912 2. 53.8
																97	DPU	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang dibina	%	68.81	75.56	78.94	82.32	82.32
																98	DPU	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik 2. Persentase pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor 3. Persentase panjang irigasi dalam kondisi	1. % 2. % 3. %	1. 50 2. 54.3 3. 81.21	1. 55.56 2. 55.31 3. 82.11	1. 61.11 2. 56.32 3. 82.56	1. 66.67 2. 57.34 3. 83.01	1. 66.67 2. 57.34 3. 83.01

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																			baik						
																99	DINHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas terminal yang beroperasi sesuai ketentuan 2. Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 3. Persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan 4. Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	1. % 2. % 4. % 5. %	1. 100 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0	1. 100 2. 75 3. 2.29 4. 85.2 5. 92	1. 100 2. 87.5 3. 2.33 4. 92.6 5. 94	1. 100 2. 87.5 3. 2.37 4. 100 5. 96	1. 100 2. 87.5 3. 2.37 4. 100 5. 96
																100	DINHUB	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. Persentase prasarana angkutan sungai 2. Persentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	1. % 2. %	1. 0 2. 0	1. 60 2. 50	1. 60 2. 50	1. 60 2. 50	1. 60 2. 50
																101	DINPERKIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																102	DINHUB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																103	DPU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																			penunjang urusan perangkat daerah						
				7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengoptimalkan pengelolaan risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang	8	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau	8	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau	8	Optimalisasi tata kelola dan pengendalian lingkungan hidup serta meningkatkan ruang terbuka hijau	104	DLH	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	%	100	100	100	100	100
																105	DLH	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan area layanan persampahan	%	85.11	86	87	88	88
																106	DLH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
																107	DLH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik	%	9.50	10.30	10.32	10.34	10.34
																108	DLH	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	100
																109	DLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH	%	40	40	50	60	60

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																110	DLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH	%	100	100	100	100	100
																111	DLH	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100
																112	DLH	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100	100	100
																113	DLH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani terkelola	%	99.31	99	100	100	100
						12	Indeks Resiko Bencana (IRB)									114	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan 2. Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana 3. Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1. % 2. % 3. %	1.100 2.100 3.100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100
																115	DLH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target								
																						2024	2025	2026	Akhir					
																116	BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100					
				8	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi	13	Nilai Kapabilitas Inovasi pada IDSD	9	Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna	9	Penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah	9	Penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah	9	Penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah	117	BAPPEDA LITBANG	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan 2. Indeks Inovasi Daerah	1. % 2. Nilai	1. 100 2. 59.10	1. 100 2. 62	1. 100 2. 65	1. 100 2. 69	1. 100 2. 69					
3	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	4	Angka Kemiskinan	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	14	Indeks Kedalaman Kemiskinan	10	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	10	Peningkatan pemberian bantuan sosial dengan meminimalisir inclusion error dan exclusion error dalam	10	Perluasan akses bantuan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin	10	Peningkatan pemberian bantuan untuk mengurangi biaya pelayanan dasar masyarakat miskin	118	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan	%	N/A	100	100	100	100					
																119	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam pahlawan yang dikelola	%	100	100	100	100	100					
																120	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100					
	121				DINSOSPERMASDES																		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target									
																						2024	2025	2026	Akhir						
								11	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin	11	Meningkatkan Pendataan dan perencanaan inklusif	11	Meningkatkan Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat inklusif	11	Meningkatkan ekonomi inklusif	122	DINSOSPERMASDES	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	58	58	58	58	58						
																															109
								5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10	Meningkatkan kesempatan kerja	15	Tingkat Kesempatan Kerja	13	Meningkatkan iklim investasi dan usaha	13	Peningkatan kemudahan investasi dan berusaha	13	Peningkatan kemudahan investasi dan pendampingan kegiatan usaha	13	Perluasan investasi dan kesempatan berusaha	111	DPMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	50	50	100	100	100
		112	DPMPTSP	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	%	95															95	96	97	97						
		113	DPMPTSP	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol	%	50															50	60	70	70						
		114	DPMPTSP	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentase Data dan Informasi yang ter update	%	100															100	100	100	100						

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
										pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan SDM kesehatan						123	RSUD BANYUMAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Fasyankes sesuai standar	Unit Kerja	1	1	1	1	1
																124	RSUD AJIBARANG	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang sesuai standar	%	85	86	86.5	87	87
																125	DINKES	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	ratio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.7	0.8	1	1.2	1.2
																126	DINKES	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% sarana farmasi alkes makmin yang memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100
																127	DINKES	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
																128	RSUD BANYUMAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	85	90	95	97.5	97.5
																129	RSUD AJIBARANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
				13	Meningkatkan derajat pendidikan	18	Harapan Lama Sekolah	16	Meningkatkan kualitas dan pemerataan	16	Peningkatan pengelolaan pendidikan	16	Penguatan kualitas layanan pendidikan	16	Penguatan perluasan akses dan	130	DINDIK	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru	Nilai	4	0.25	0.50	0.75	0.75

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
						19	Rata rata lama sekolah		layanan pendidikan		serta perluasan akses layanan pendidikan terutama untuk siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi		dasar khususnya pendidikan inklusi		mutu layanan pendidikan inklusi berbasis kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan	131	DINDIK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. APS Usia 5-6 tahun 2. APS Usia 7-15 tahun 3. APS Usia 7-18 tahun kesetaraan	1. % 2. % 3. %	1.68.72 2. 99.72 3.N/A	1.100 2.100 3.100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100
																132	DINDIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
				14	Meningkatkan Literasi Masyarakat	20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	18	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui literasi digital	17	Peningkatan kualitas sarana prasarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan	17	Peningkatan dan perluasan akses layanan literasi	17	Peningkatan sarana prasarana literasi digital	133	DINARPUSDA	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dialih Mediakan	%	20	60	80	100	100
																134	DINARPUSDA	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 2. Rata rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	1. Rasio 2. Orang	1. 0.1 2. 1.144	1. 0.56 2. 1.000	1. 0.56 2. 1.050	1. 0.56 2. 1.100	1. 0.56 2. 1.100
				15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk	21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	19	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana	19	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB	19	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB	19	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB	135	DPPKBP3A	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total atau TFR	Angka	1.83	2.00	1.95	1.90	1.90
																136	DPPKBP3A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1. % 2. % 3. %	1. 45.15 2. 65.2 3. 81.76	1. 43.58 2. 65.2 3. 81	1. 43.60 2. 65.2 3. 82	1. 43.70 2. 65.2 3. 83	1. 43.70 2. 65.2 3. 83

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																			2. Persentase Kampung KB yang terfasilitasi 3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK						
																137	DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	%	73.1	73	73.10	73.30	73.30
				16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	20	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan Anak	20	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta pemenuhan hak anak	20	Peningkatan peran serta perempuan dalam kegiatan ekonomi serta pemenuhan hak anak	20	Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan serta pemenuhan hak anak	138	DPPKBP3A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 2. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	1. % 2. %	1. 22 2. 100	1. 22 2. 100	1. 24 2. 100	1. 24 2. 100	1. 24 2. 100
																139	DPPKBP3A	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100
																140	DPPKBP3A	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0.04	0.03	0.033	0.035	0.035
						23	Nilai Kota Layak Anak									141	DPPKBP3A	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	34.48	41.37	44.82	48.27	48.27

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
																142	DPPKBP3A	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	%	80	85	90	95	95
																143	DPPKBP3A	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100
																144	DPPKBP3A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
				17	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda	24	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	21	Meningkatkan prestasi dan peran aktif pemuda	21	Meningkatkan pembinaan prestasi dan organisasi pemuda	21	Meningkatkan pembinaan prestasi dan organisasi pemuda	21	Meningkatkan pembinaan prestasi dan organisasi pemuda	145	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten	%	N/A	1.72	3.39	6.56	6.56
																146	DINPORABUDPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 2. Persentase Peningkatan Wirausaha Muda	1. % 2. %	1. 11.46 2. 87.5	1. 23.27 2. 17.50	1. 26.53 2. 27.66	1. 30.24 2. 34.33	1. 30.24 2. 34.33
																								147	DINPORABUDPAR
4	Memperkuat Ketahanan Pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	25	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	22	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan	22	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan	22	Penguatan SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan	22	Optimalisasi intensifikasi produksi komoditas pangan	148	DINKANNAK	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum yang diawasi	%	10	10	10	10	10
																149	DINKANNAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak	%	3	2	2	2	2

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target					
																						2024	2025	2026	Akhir		
											Arah Kebijakan 2024		Arah Kebijakan 2025		Arah Kebijakan 2026												
																	150	DINPERTAN KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produktivitas komoditas Padi 2. Produktivitas komoditas Jagung 3. Produktivitas komoditas Kedelai	1. Ton / Ha 2. Ton / Ha 3. Ton / Ha	1. 5.77 2. 6.28 3. 1.59	1. 5.88 2. 6.40 3. 1.70	1. 5.92 2. 6.45 3. 1.75	1. 5.95 2. 6.50 3. 1.80	1. 5.95 2. 6.50 3. 1.80	
																	151	DINKANNAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah jenis infrastruktur peternakan yang disediakan	Jenis	2	2	2	2	2	
																	152	DINPERTAN KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	-51,65	5	6	7	7	
																	153	DINKANNAK	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase penurunan angka kejadian penyakit 2. Persentase Peningkatan Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	1. % 2. %	1. 10 2. 0	1. 8 2. 2	1. 9 2. 2	1. 10 2. 2	1. 10 2. 2	
																	154	DINPERTAN KP	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	%	37	75	76	77	77	
																	156	DINKANNAK	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase peningkatan usaha peternakan yang berizin	%	1	1	1	1	1	
																	157	DPU	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik 2. Persentase pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan	1. % 2. % 3. %	1. 50 2. 54.3 3. 81.21	1. 55.5 2. 55.3 3. 82.11	1. 61.11 2. 56.32 3. 82.56	1. 66.67 2. 57.34 3. 83.01	1. 66.67 2. 57.34 3. 83.01	

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target													
																						2024	2025	2026	Akhir										
																			longsor 3. Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik																
																										158	DINPERTAN KP	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan	%	N/A	1.00	1.50	2.00	2.00
				159	DINKANNAK	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	956	986.83	1001.63	1016.65	1016.65																						
				160	DINKANNAK	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11889	12186	12490.65	12802.92	12802.92																						
161	DINKANNAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah 2. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	1. % 2. %	1. 100 2. 0	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100	1. 100 2. 100																											
19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	26	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	23	Meningkatkan keterjangkauan harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan	23	Peningkatan ketersediaan stok pangan	23	Peningkatan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan	23	Peningkatan upaya stabilisasi harga pangan serta meningkatkan akses distribusi pangan khususnya bagi daerah rawan pangan	162	DINPERTAN KP	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan	Desa	16	5	6	7	7														
																						163	DINPERINDAG	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang	%	15	15	14	13	13				
20	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	27	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	24	Meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal	24	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan	24	Penguatan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan komoditas	24	Peningkatan diversifikasi konsumsi serta pengendalian dan pengawasan	164	DINPERTAN KP	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Angka kecukupan energi 2. Angka kecukupan protein	1. kkal/kapita/hari 2. gram/kapita/hari	1.2001,3 2. 57,60	1. 2100 2. 57	1. 2100 2. 57	1. 2100 2. 57	1. 2100 2. 57														

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan 2024	No	Arah Kebijakan 2025	No	Arah Kebijakan 2026	No	OPD	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target			
																						2024	2025	2026	Akhir
											komoditas pangan dan keamanan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan		pangan dan keamanan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan		keamanan pangan	165	DINPERTAN KP	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan	%	4.61	10	15	20	20
																166	DINPERTAN KP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	96.78	95	95	95	95
																167									

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini perlu dipastikan agar target-target yang telah ditetapkan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2024-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 meliputi :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Guna pencapaian target PAD tahun 2024-2026 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024–2026 diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta ketahanan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
4. Memenuhi alokasi Persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangan diantaranya untuk fungsi pendidikan; fungsi kesehatan; dan infrastruktur.

Struktur belanja daerah pada RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diperlukan dalam rangka penyiapan dana cadangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ataupun untuk penyertaan (investasi) daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah pada RPD Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun berkenaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dikeluarkan juga untuk Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah dan pemberian pinjaman daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 yang digunakan untuk dasar kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026

No.	URAIAN	RPD 2024 Proyeksi (Rp.)	RPD 2025 Proyeksi (Rp.)	RPD 2026 Proyeksi (Rp.)
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.549.629.665.700,00	3.578.640.800.800,00	3.607.032.873.200,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	903.195.672.500,00	932.206.807.600,00	960.598.880.000,00
1.1.1.	Pajak Daerah	367.146.432.000,00	375.994.259.000,00	394.842.088.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	25.724.804.600,00	26.021.139.600,00	25.740.023.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.952.435.900,00	30.819.409.000,00	33.644.769.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	486.372.000.000,00	499.372.000.000,00	506.372.000.000,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.633.079.222.200,00	2.633.079.222.200,00	2.633.079.222.200,00
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.375.840.193.200,00	2.375.840.193.200,00	2.375.840.193.200,00
1.2.1.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.029.247.211.200,00	2.029.247.211.200,00	2.029.247.211.200,00
1.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00
1.2.1.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00
1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)/Dana Penyesuaian	-	-	-
1.2.1.2.2	Dana Desa	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Provinsi	257.239.029.000,00	257.239.029.000,00	257.239.029.000,00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00
1.2.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00	13.354.771.000,00
2.	BELANJA	2.937.553.191.700,00	2.932.121.302.800,00	2.969.090.659.200,00
2.1.	BELANJA OPERASI	2.564.417.562.700,00	2.530.525.956.800,00	2.548.798.404.200,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.514.581.335.000,00	1.532.391.588.000,00	1.547.745.362.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.701.452.700,00	866.387.275.700,00	875.373.866.200,00
2.1.3.	Belanja Bunga	10.906.120.000,00	8.401.410.000,00	4.715.304.000,00
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	152.525.839.000,00	104.525.839.100,00	102.025.830.000,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	21.702.816.000,00	18.819.844.000,00	18.938.042.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	353.135.629.000,00	381.595.346.000,00	400.292.255.000,00
2.2.1.	Belanja Tanah	15.000.000.000,00	16.500.000.000,00	20.000.000.000,00

No.	URAIAN	RPD 2024 Proyeksi (Rp.)	RPD 2025 Proyeksi (Rp.)	RPD 2026 Proyeksi (Rp.)
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	104.248.064.000,00	112.216.487.000,00	106.855.696.000,00
2.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	123.587.708.000,00	130.580.000.000,00	139.087.700.000,00
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.550.998.000,00	93.550.000.000,00	104.500.000.000,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.848.859.000,00	17.848.859.000,00	18.948.859.000,00
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.	BELANJA TRANSFER	631.786.458.000,00	638.229.482.000,00	645.099.716.000,00
3.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	40.553.188.000,00	43.996.482.000,00	47.599.716.000,00
3.1.1.	Bagi Hasil Pajak	38.084.208.000,00	41.422.868.000,00	45.054.213.000,00
3.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	2.468.980.000,00	2.573.614.000,00	2.545.503.000,00
3.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
3.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	591.233.270.000,00	594.233.000.000,00	597.500.000.000,00
3.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	591.233.270.000,00	594.233.000.000,00	597.500.000.000,00
3.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.569.339.649.700,00	3.570.350.784.800,00	3.614.190.375.200,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(19.709.984.000,00)	8.290.016.000,00	(7.157.502.000,00)
4.	PEMBIAYAAN			
4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00
4.1.1.	Penggunaan SILPA	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00
4.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	-	-
4.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	88.290.016.000,00	88.290.016.000,00	72.842.498.000,00
4.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
4.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	61.790.016.000,00	61.790.016.000,00	46.342.498.000,00
4.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		19.709.984.000,00	(8.290.016.000,00)	7.157.502.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-	-	-

7.2. Program Perangkat Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam akses dan mutu pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator APS 5 - 7 tahun, APS 7 - 15 tahun, dan APS 7 - 18 tahun kesetaraan.

b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pemerataan pendidikan yang bermutu. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam kualitas pelayanan kesehatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator penurunan angka kematian ibu.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam kapasitas sumberdaya manusia kesehatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator ratio dokter per satuan penduduk.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator

persentase sarana farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi syarat.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase kemandirian Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder kewenangan Kabupaten Banyumas serta pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai. Pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk penyediaan air irigasi untuk mendukung produksi pangan. Pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai terutama untuk pengendalian dan perlindungan/pengamanan infrastruktur dan permukiman sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana banjir dan tanah longsor.
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk peningkatan akses air minum bagi rumah tangga di Kabupaten Banyumas, terutama air minum perpipaan baik pedesaan maupun perkotaan guna pemenuhan layanan dasar air minum.
- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan pada pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan persampahan.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (SPALD) untuk peningkatan akses air limbah bagi rumah tangga di Kabupaten Banyumas, terutama pelayanan air limbah (individu dan komunal) dan pelayanan lumpur tinja, sebagai upaya pemenuhan layanan dasar air limbah.

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota untuk penyehatan lingkungan, pencegahan timbulnya genangan dan atau banjir, serta pengamanan infrastruktur jalan. Pengelolaan dan pengembangan sistem dilaksanakan melalui perencanaan, pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan dan lingkungan.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan antara lain melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan, serta rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung milik pemerintah untuk meningkatkan keandalan dan kelayakan bangunan, dan mendukung pelayanan publik.

h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten/Kota, melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, terutama jalan dan jembatan penghubung pusat kegiatan masyarakat, penghubung obyek wisata, penghubung pada fasilitas sosial/fasilitas umum, serta penghubung antar wilayah.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan SDM jasa konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang.

4. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal perumahan, meliputi antara lain pendataan, sosialisasi dan persiapan, pembangunan dan rehabilitasi, serta distribusi dan serah terima penyediaan dan rehabilitas rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten/kota.

- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini diarahkan pada pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh.

- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan PSU perumahan, melalui perencanaan penyediaan PSU perumahan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman.

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan patroli di wilayah, Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah, dan Persentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya.

- b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan Pencegahan Mitigasi Bencana, Penanganan Bencana dan pengoptimalan Sistem Penanggulangan Bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan, Persentase penanganan korban bencana yang tertangani dan Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam pengelolaan dan fasilitasi pemberdayaan sosial. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang aktif.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam penanganan rehabilitasi sosial untuk PPKS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi perlindungan jaminan sosial untuk PPKS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PPKS yang menerima jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada optimalisasi penanganan Korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan makam pahlawan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase makam pahlawan yang dikelola.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilakukan untuk mendukung tersedianya informasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Program ini dilakukan untuk mendukung peningkatan SDM tenaga kerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase lowongan kerja yang terpenuhi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada optimalnya kerjasama kelembagaan Tripartit dan Bipartit. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan OPD, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terutamanya penanganan korban kekerasan pada perempuan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengelolaan data pilah gender disetiap OPD, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak agar menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Kabupaten Layak Anak

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak terutama penanganan anak yang menjadi korban kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan jumlah sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai dua indikator kinerja yaitu Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya untuk lancarnya akses pangan bagi daerah rawan pangan di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pengawasan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh

masyarakat. program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase peningkatan jumlah sampel pangan.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada penggunaan tanah, melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

b. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee melalui koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Dilaksanakan melalui penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, dilaksanakan melalui pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat, serta koordinasi dan inventarisasi terkait gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan dan pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banyumas untuk mencapai indikator persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan yang telah ditentukan.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan fasilitasi perizinan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh pelaku usaha serta pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diterbitkan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada upaya fasilitasi pemenuhan kewajiban izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang membutuhkan serta pengawasan terhadap izin-izin tersebut yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat hukum adat untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas.

- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas.

- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada upaya penanganan dan penyelesaian sengketa dan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas.

- i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik.

- b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan pencatatan sipil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data SIAK berjalan dengan baik

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil data kependudukan dan inovasi pelayanan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase desa mandiri.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam pemberdayaan ekonomi desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola pemerintah desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa administrasi baik.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Kelahiran Total atau TFR.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada peningkatan kepesertaan KB di Kabupaten Banyumas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan untuk pengembangan angkutan transportasi sungai melalui kegiatan-kegiatan ; Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha, Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, serta Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.

10. Komunikasi Dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan diseminasi informasi publik dan pelaksanaan komunikasi publik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan layanan publik secara on line dan terintegrasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi dan Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda.

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada meningkatnya penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam.

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan meningkatnya penilaian kesehatan koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi yang dinilai kesehatannya.

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada optimalnya pemanfaatan sumber daya koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi yang mendapat pemberdayaan dan perlindungan.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada meningkatnya pemberdayaan usaha mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha mikro yang diberdayakan.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada meningkatnya pengembangan usaha mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan UMKM yang dikembangkan.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada meningkatkan kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan dalam penanaman modal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan promosi investasi di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase calon investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada untuk meningkatkan kesesuaian SOP perizinan berusaha dan non berusaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase SOP perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada meningkatkan pengendalian terhadap realisasi penanaman modal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase realisasi investasi.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan data perizinan berusaha dan LKPM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase data dan informasi yang terupdate secara periodik.

13. Kepemudaan Dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan prestasi olahraga pemuda di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan prestasi olahraga pemuda.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan kepramukaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Banyumas.

14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data informasi dan statistik daerah sebagai data statistik sektoral. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk mengamankan informasi digital yang dimiliki oleh pemerintah baik yang ada di aplikasi maupun yang ada di pusat data. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah.

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan aspek kebudayaan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan sejarah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pembinaan sejarah lokal.

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah daerah.

d. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan untuk perbaikan pengelolaan permuseuman di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koleksi museum yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam akses literasi dan kegemaran membaca masyarakat pada perpustakaan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator rasio perpustakaan per satuan penduduk dan rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelestarian naskah kuno Kabupaten Banyumas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase naskah kuno milik masyarakat yang dialih mediakan.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pengelolaan arsip sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam perlindungan dan penyelamatan arsip. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan izin penggunaan arsip tertutup. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Banyumas yang merupakan sentra perikanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perairan umum yang diawasi.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya produksi olahan hasil perikanan Program ini dilaksanakan untuk mencapai dua indikator kinerja yaitu peningkatan angka konsumsi ikan dan produksi olahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada meningkatkan pemasaran pariwisata. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata.

- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar HKI. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI.

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada meningkatnya pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penguatan intensifikasi produksi komoditas pangan pertanian untuk peningkatan produktivitas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai tiga indikator kinerja yaitu produktivitas komoditas padi, produktivitas komoditas jagung, dan produktivitas komoditas kedelai.

- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengembangan prasarana utama dalam produksi pertanian di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan ketersediaan prasarana pertanian di Kabupaten Banyumas.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pemantauan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjamin menurunnya angka kejadian penyakit hewan dan keamanan produk hasil hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai dua indikator kinerja yaitu persentase peningkatan bahan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH dan persentase penurunan angka kejadian penyakit.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada upaya pengoptimalan penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dalam proses produksi pertanian. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penanganan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan perizinan usaha peternakan sehingga dapat terpantau dan terdata dengan baik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan usaha peternakan yang berizin.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelompok tani. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kelas kelompok.

4. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini difokuskan pada fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Banyumas sehingga masyarakat dapat berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini berfokus pada upaya mengoptimalkan dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan terutama pasar yang berada di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini difokuskan untuk terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Banyumas melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu koefisien variasi harga barang.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pengembangan ekspor unggulan di Kabupaten Banyumas, terutama komoditas gula kelapa dan diharapkan mampu dikembangkan dengan komoditas-komoditas potensial lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu nilai ekspor bersih perdagangan.

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini mendukung terwujudnya standardisasi produk dan perlindungan konsumen terutama terkait dengan alat ukur takar timbang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTTP yang ditera-tera ulang.

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada promosi dan upaya penggunaan produk dalam negeri dan sebagai salah satu upaya pelaksanaan Instruksi Presiden terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan

Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pelaku usaha yang dipromosikan.

5. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian izin usaha industri sehingga perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI IPUI Kecil dan Menengah IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi terkait

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional sehingga dapat diperoleh data industri yang handal dan berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase data informasi industri yang tersedia.

6. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini berfokus pada upaya pelaksanaan kegiatan transmigrasi dari Kabupaten Banyumas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase calon transmigran yang akan ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan kebijakan pelaksanaan Otonomi Daerah salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan kelancaran pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan kewilayahan, kerjasama daerah dan keagamaan

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas dan menyelesaikan permasalahan perekonomian dan pembangunan

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD salah satunya adalah kelancaran kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan analisis data dan informasi dalam mendukung perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pelaporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur dan Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar tercipta perencanaan yang sinergis dan harmonis. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik.

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase ketepatan waktu penetapan APBD dan persentase penyampaian LKPD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah yang tertib administrasi barang milik daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada pencapaian pendapatan asli daerah dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemasangan APM dan Update NJOP.

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam kualitas manajemen ASN. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian.

4. Pendidikan Dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pengembangan sumberdaya manusia. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

5. Penelitian Dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah yang secara efektif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, Persentase Peningkatan Temuan Ketidapatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD, Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan dan

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan pada peningkatan Efektivitas Pembinaan dan Asistensi serta Kapabilitas APIP. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Level Kapabilitas APIP, Persentase desa berisiko tinggi dan Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada upaya memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kenyamanan, toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada upaya menumbuhkan kembangkan etika dan budaya politik serta kesadaran berdemokrasi masyarakat melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran para stakeholder. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase pelaksanaan pendidikan politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan peran ormas dalam menopang kegiatan pembangunan yang berwawasan nusantara. Program ini dilakukan untuk

mencapai indikator Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya guna mendukung kerukunan dan stabilitas di tengah masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan kewaspadaan nasional melalui upaya deteksi dini, pengawasan orang asing dan penanganan konflik sosial yang komprehensif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing.

Berdasarkan kerangka pendanaan dan uraian program-program di atas selanjutnya dijabarkan program dan indikator serta pagu indikatif program di perangkat daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10102	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APS 5-6 Tahun	1. %	1. 68.72	1. N/A	1. 100	244.738.094.068	1. 100	251.031.467.168	1. 100	253.295.631.558	1. 100	DINDIK
		2. APS 7-15 Tahun	2. %	2. 99.72	2. N/A	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
		3. APS 7-18 Tahun Kesetaraan	3. %	3. N/A	3. N/A	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100	
10104	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	%	85	85	90	32.650.800.000	91	32.650.800.000	92	32.650.800.000	92	DINDIK
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	932.356.077.632	100	932.356.077.632	100	932.356.077.642	100	DINDIK
10202	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 Kelahiran Hidup	105	N/A	95	156.186.822.785	90	161.480.844.494	85	152.462.573.807	85	DINKES

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10203	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.7	N/A	0.8	2.473.541.000	1	2.518.205.500	1.2	2.518.205.500	1.2	DINKES
10204	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	% sarana farmasi alkes makmin yang memenuhi syarat	%	100	100	100	643.514.000	100	707.302.500	100	707.302.500	100	DINKES
10205	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kemandirian Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	%	87	N/A	87	2.135.516.629	90	2.181.131.627	93	2.240.757.347	93	DINKES
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	207.131.850.586	100	210.202.568.879	100	220.251.032.846	100	DINKES
10202	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasyankes sesuai standar	Unit Kerja	1	N/A	1	5.000.000.000	1	5.500.000.000	1	7.000.000.000	1	RSUD BANYUMAS

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	85	100	90	257.710.224.000	95	263.282.260.000	97.5	262.733.766.000	97.5	RSUD BANYUMAS
10202	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang sesuai standar	%	85	N/A	86	1.800.000.000	86.5	2.150.000.000	87	2.053.125.000	87	RSUD AJIBARANG
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	94.090.000.000	100	96.096.000.000	100	98.059.000.000	100	RSUD AJIBARANG
10302	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik	1. %	1. 50	1. N/A	1. 55.56	13.690.117.549	1. 61.11	14.006.537.973	1. 66.67	14.671.032.890	1. 66.67	DPU
		2. Persentase pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor	2. %	2. 54.3	2. N/A	2. 55.31		2. 56.32		2. 57.34		2. 57.34	
		3. Persentase panjang irigasi	3. %	3. 81.21	3. N/A	3. 82.11		3. 82.56		3. 83.01		3. 83.01	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		dalam kondisi baik											
10306	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%	74.77	N/A	76.10	1.758.254.666	76.76	1.798.893.301	77.43	1.884.235.979	77.43	DPU
10308	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	%	61.90	N/A	87.21	23.919.618.496	88.37	24.472.473.929	89.53	25.633.491.343	89.53	DPU
10309	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase luas kawasan strategis yang tertata	%	82.975	N/A	82.980	2.476.266.610	82.982	2.533.500.694	82.983	2.653.694.444	82.983	DPU
10310	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	1. %	1. 57.596	1. N/A	1. 59.254	61.968.835.343	1. 60.083	63.401.124.379	1. 60.912	61.108.985.768	1. 60.912	DPU
		2. Persentase panjang jalan sebagai jalur evakuasi dalam kondisi baik	2. %	2. 68.45	2. N/A	2. 70.53		2. 71.57		2. 72.61		2. 72.61	
10311	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang dibina	%	68.81	35	75.56	52.686.524	78.94	53.904.270	82.32	56.461.584	82.32	DPU
XXX01	Program Penunjang	Persentase pemenuhan	%	100	100	100	20.952.602.812	100	21.436.881.454	100	22.453.884.992	100	DPU

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	layanan penunjang urusan perangkat daerah											
10303	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota	%	77.08	77	78.58	10.455.000.000	80.08	10.660.000.000	81.58	10.815.000.000	81.58	DINPERKIM
10305	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	92	92	94	16.131.275.527	96	16.247.401.031	98	16.419.413.965	98	DINPERKIM
10306	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik	%	-0.25	N/A	0.92	3.000.000.000	0.77	3.000.000.000	0.77	3.200.000.000	0.77	DINPERKIM

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10312	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan	%	100	N/A	100	775.000.000	100	1.125.000.000	100	850.000.000	100	DINPERKIM
10402	Program Pengembangan Perumahan	1. Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	1. %	1. 33	1. 100	1. 100	4.755.000.000	1. 100	4.800.000.000	1. 100	4.845.000.000	1. 100	DINPERKIM
		2. Presentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	2. %	2. N/A	2. 100	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
10403	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%	30.19	N/A	43.15	1.315.000.000	56.11	1.315.000.000	69.08	1.315.000.000	69.08	DINPERKIM
10404	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan RTLH yang diperbaiki	%	0	N/A	11.90	4.000.000.000	11.90	4.000.000.000	11.90	4.000.000.000	11.90	DINPERKIM
10405	Program Peningkatan	1. Prosentase PSU	1. %	1. 33	1. 33	1. 40	5.499.075.000	1. 47	5.847.719.500	1. 53	6.215.782.670	1. 53	DINPERKIM

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah 2. Rasio Permukiman Layak Huni	2. %	2. N/A	2. 80.10	2. 80.21		2. 80.34		2. 80.47		2. 80.47	
21005	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	N/A	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	DINPERKIM
21006	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	N/A	N/A	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	DINPERKIM
21010	Program Penatagunaan Tanah	persentase tanah yang tertata	%	100	N/A	100	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	DINPERKIM
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	9.383.018.473	100	9.555.954.469	100	9.995.109.365	100	DINPERKIM

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10503	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan	1. %	1. 100	1. 100	1. 100	1.961.076.400	1. 100	1.974.992.640	1. 100	2.075.000.000	1. 100	BPBD
		2. Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana	2. %	2. N/A	2. N/A	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
		3. Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3. %	3. 100	3. N/A	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100	
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	6.349.999.600	100	6.528.177.360	100	6.831.575.000	100	BPBD
10502	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	1. %	1. 100	1. N/A	1. 100	2.270.000.000	1. 100	2.450.000.000	1. 100	2.990.000.000	1. 100	SATPOL PP
		2. Persentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya	2. %	2. 100	2. N/A	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
		3. Cakupan patroli di wilayah	3. %	3. 100	3. N/A	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100	
10504	Program Pencegahan,	Cakupan pelayanan	%	N/A	N/A	100	430.330.000	100	628.008.000	100	796.153.000	100	SATPOL PP

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penanggulan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	pencegahan penanggulan dan penyelamatan korban kebakaran											
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	20.130.000.000	100	20.280.000.000	100	20.680.000.000	100	SATPOL PP
10602	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	58	40	58	940.000.000	58	985.000.000	58	997.000.000	58	DINSOP ERMASDES
10603	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan	%	N/A	N/A	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	DINSOP ERMASDES
10604	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	1.123.000.000	100	1.277.000.000	100	1.346.000.000	100	DINSOP ERMASDES

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		dasarnya di luar panti											
10605	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	%	100	100	100	1.380.000.000	100	1.403.972.000	100	1.425.000.000	100	DINSOSP ERMASDES
10606	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	545.000.000	100	550.000.000	100	555.000.000	100	DINSOSP ERMASDES
10607	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang dikelola	%	100	N/A	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	DINSOSP ERMASDES
21302	Program Penataan Desa	Persentase desa mandiri	%	200	N/A	11	775.000.000	14	775.000.000	19	840.000.000	19	DINSOSP ERMASDES
21303	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	6.64	2	1	160.000.000	1.5	160.000.000	1.5	160.000.000	1.5	DINSOSP ERMASDES

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
21304	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Administrasi Baik	%	30	40	100	5.645.000.000	100	5.725.000.000	100	5.849.622.000	100	DINSOSP ERMASD ES
21305	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	100	100	100	1.235.000.000	100	1.250.000.000	100	1.317.000.000	100	DINSOSP ERMASD ES
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	10.834.434.000	100	11.017.000.000	100	11.715.000.000	100	DINSOSP ERMASD ES
20702	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia	%	100	100	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	DINA KER KOP UKM
20703	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	N/A	N/A	100	575.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	DINA KER KOP UKM
20704	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase lowongan kerja yang terpenuhi	%	N/A	N/A	90	525.000.000	90	525.000.000	90	550.840.000	90	DINA KER KOP UKM
20705	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang	%	9.2	9	10.45	400.000.000	12.54	400.000.000	14.63	407.609.600	14.63	DINA KER KOP UKM

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		menerapkan tata kelola yang layak											
21702	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam	%	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	DINA KER KOP UKM
21703	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	%	14.26	9	35.71	150.000.000	36.11	150.000.000	41.09	200.000.000	41.09	DINA KER KOP UKM
21704	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	%	12.56	9	28.57	150.000.000	29.17	150.000.000	34.25	200.000.000	34.25	DINA KER KOP UKM
21705	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	%	27.60	13	28.57	270.000.000	29.17	270.000.000	35.62	355.000.000	35.62	DINA KER KOP UKM
21706	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat pemberdayaan dan perlindungan	%	8.96	N/A	22.86	30.000.000	23.06	30.000.000	24.66	45.000.000	24.66	DINA KER KOP UKM
21707	Program Pemberdayaan Usaha	Persentase Usaha Mikro	%	N/A	N/A	0.50	550.000.000	0.56	550.000.000	0.61	580.000.000	0.61	DINA KER KOP UKM

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	yang diberdayakan											
21708	Program Pengembangan Umkm	Persentase peningkatan UMKM yang dikembangkan	%	N/A	N/A	0.17	550.000.000	0.18	550.000.000	0.20	580.000.000	0.20	DINA KER KOP UKM
33203	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Calon Transmigran Yang Akan Ditempatkan	%	50	100	10	100.000.000	10	125.000.000	10	150.000.000	10	DINA KER KOP UKM
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	10.847.084.000	100	11.118.920.000	100	11.437.338.400	100	DINA KER KOP UKM
10304	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan area layanan persampahan	%	85.11	N/A	86	7.030.000.000	87	7.267.700.000	88	7.328.417.000	88	DLH
21102	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	%	100	N/A	100	600.000.000	100	614.950.000	100	646.202.000	100	DLH
21103	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan	%	100	100	100	600.000.000	100	611.500.000	100	635.540.000	100	DLH

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Lingkungan Hidup	kerusakan lingkungan hidup											
21104	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH publik	%	9.50	8	10.30	6.224.000.000	10.32	6.349.802.000	10.34	6.438.660.324	10.34	DLH
21105	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	300.000.000	100	306.900.000	100	321.324.000	100	DLH
21106	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH	%	40	80	40	400.000.000	50	406.900.000	60	421.324.000	60	DLH
21107	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),	Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH	%	100	N/A	100	150.000.000	100	153.450.000	100	160.662.000	100	DLH

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh												
21108	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	100	350.000.000	100	358.050.000	100	374.878.000	100	DLH
21110	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100	150.000.000	100	153.450.000	100	160.662.000	100	DLH
21111	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani terkelola	%	99.31	N/A	99	800.000.000	100	821.850.000	100	867.526.000	100	DLH
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	37.533.388.000	100	38.436.568.000	100	38.947.813.676	100	DLH
21202	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik	%	99.4	N/A	99.6	210.000.000	99.8	229.000.000	100	227.325.000	100	DINDUKC APIL

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
21203	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	97.3	N/A	99	160.000.000	99.5	182.000.000	100	176.215.000	100	DINDUKC APIL
21204	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data SIAK berjalan dengan baik	%	100	N/A	100	595.000.000	100	627.000.000	100	652.000.000	100	DINDUKC APIL
21205	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	85.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	DINDUKC APIL
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	9.464.510.000	100	9.624.532.000	100	10.117.348.000	100	DINDUKC APIL
20802	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	1. %	1. 22	1. 22	1. 22	280.000.000	1. 24	295.000.000	1. 24	310.000.000	1. 24	DPPKBP3 A
		2. Persentase perangkat daerah yang	2. %	2. 100	2. 100	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		melaksanakan PPRG											
20803	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	N/A	100	250.000.000	100	259.500.000	100	270.000.000	100	DPPKBP3A
20804	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0.04	N/A	0.03	30.000.000	0.033	33.500.000	0.035	35.000.000	0.035	DPPKBP3A
20805	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	34.48	43	41.37	20.000.000	44.82	25.000.000	48.27	30.000.000	48.27	DPPKBP3A
20806	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	%	80	N/A	85	75.000.000	90	82.000.000	95	90.000.000	95	DPPKBP3A
20807	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	N/A	100	364.600.000	100	364.600.000	100	364.600.000	100	DPPKBP3A

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
21402	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total atau TFR	Angka	1.83	N/A	2.00	400.000.000	1.95	424.000.000	1.90	443.000.000	1.90	DPPKBP3 A
21403	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1. %	1. 45.15	1. 42	1. 43.50	12.741.100.000	1. 43.60	12.966.100.000	1. 43.70	13.576.027.000	1. 43.70	DPPKBP3 A
		2. Persentase Kampung KB yang terfasilitasi	2. %	2. 65	2. 80	2. 85		2. 90		2. 95		2. 95	
		3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	3. %	3. 81.76	3. N/A	3. 81		3. 82		3. 83		3. 83	
21404	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	%	73.1	N/A	73	8.579.000.000	73.10	8.590.000.000	73.30	8.902.000.000	73.30	DPPKBP3 A
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan	%	100	100	100	8.847.651.000	100	9.277.731.000	100	9.830.000.000	100	DPPKBP3 A

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kabupaten/Kota	perangkat daerah											
21502	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	1. %	1. 100	1. 100	1. 100	8.768.750.000	1. 100	7.817.110.000	1. 100	8.125.705.484	1. 100	DINHUB
		2. Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	2. %	2. 0	2. 100	2. 75		2. 87.5		2. 87.5		2. 87.5	
		3. Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	3. %	3. 0	3. 59	3. 2.29		3. 2.33		3. 2.37		3. 2.37	
		4. Persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	4. %	4. 0	4. N/A	4. 85.2		4. 92.6		4. 100		4. 100	
		5. Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	5. %	5. 0	5. N/A	5. 92		5. 94		5. 96		5. 96	
21503	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Persentase prasarana angkutan sungai	1. %	1. 0	1. N/A	1. 60	1.032.000.000	1. 60	1.045.000.000	1. 60	1.050.500.000	1. 60	DINHUB
		2. Persentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	2. %	2. 0	2. 57	2. 50		2. 50		2. 50		2. 50	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	17.653.621.000	100	19.226.815.000	100	20.245.307.516	100	DINHUB
21602	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	100	100	535.233.555	100	547.604.423	100	573.583.747	100	DINKOMINFO
21603	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang disediakan Pemda	%	100	55	100	1.965.150.679	100	2.010.571.263	100	2.105.956.319	100	DINKOMINFO
22002	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	100	100	64.614.566	100	66.108.004	100	69.244.285	100	DINKOMINFO
22102	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang diamankan	%	100	N/A	100	179.469.694	100	183.617.783	100	192.328.936	100	DINKOMINFO
XXX01	Program Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan layanan	%	0	100	100	10.774.919.506	100	11.023.960.527	100	11.546.956.713	100	DINKOMINFO

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang urusan perangkat daerah											
21802	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	50	80	50	112.500.000	100	80.000.000	100	65.000.000	100	DPMPTSP
21803	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol	%	50	N/A	50	157.000.000	60	117.000.000	70	102.000.000	70	DPMPTSP
21804	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	96	90	96	224.500.000	96.5	224.500.000	97	224.500.000	97	DPMPTSP
21805	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	%	95	N/A	95	393.000.000	96	393.000.000	97	393.000.000	97	DPMPTSP
21806	Program Pengelolaan	Persentase Data dan	%	100	N/A	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	DPMPTSP

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Informasi yang ter <i>update</i> secara periodik											
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	96	100	96	7.408.252.000	97	7.672.942.000	98	8.106.550.000	98	DPMPSTP
21902	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. %	1. 11.46	1. N/A	1. 23.27	443.500.000	1. 26.53	455.450.000	1. 30.24	482.195.000	1. 30.24	DINPORA BUDPAR
		2. Persentase Peningkatan Wirausaha Muda	2. %	2. 87.5	2. 60	2. 17.50		2. 27.66		2. 34.33		2. 34.33	
21903	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga pemuda	%	0	N/A	7.62	8.296.400.000	8.33	8.312.040.000	15.77	8.380.894.000	15.77	DINPORA BUDPAR
21904	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten	%	0	N/A	1.72	1.835.000.000	3.39	1.836.500.000	6.56	1.845.000.000	6.56	DINPORA BUDPAR

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
22202	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata	%	0	N/A	12.50	1.580.000.000	16.67	1.584.000.000	33.33	1.637.000.000	33.33	DINPORA BUDPAR
22204	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	16.67	100	16.67	35.558.500	16.67	36.114.350	33.33	40.925.785	33.33	DINPORA BUDPAR
22205	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah	%	48.33	40	42.50	445.500.000	44.32	450.650.000	46.32	470.715.000	46.32	DINPORA BUDPAR
22206	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	98	100	39.18	881.002.000	63.66	882.300.000	100	908.745.433	100	DINPORA BUDPAR
32602	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	0	N/A	2	685.847.302	3	692.059.033	4	706.164.000	4	DINPORA BUDPAR
32603	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran	%	100	97	1.67	154.000.000	3.00	156.400.000	4.00	164.340.000	4.00	DINPORA BUDPAR

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		dan Promosi Pariwisata											
32604	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI	%	0	N/A	60	50.000.000	80	51.000.000	100	60.000.000	100	DINPORA BUDPAR
32605	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase Peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif	1. %	1. 0	1. 33	1. 22.73	364.900.000	1. 29.63	369.890.000	1. 31.43	395.079.000	1. 31.43	DINPORA BUDPAR
		2. Persentase SDM Kepariwisataan yang bersertifikat	2. %	2. 0	2. 100	2. 32.31		2. 35.38		2. 38.46		2. 38.46	
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	77.908.172.198	100	77.995.591.617	100	78.229.459.782	100	DINPORA BUDPAR
22302	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 2. Rata rata Jumlah	1. Rasio 2. Orang	1. 0.56 2. 1144	1. N/A 2. 250	1. 0.56 2. 1000	380.000.000	1. 0.56 2. 1050	380.000.000	1. 0.56 2. 1100	422.000.000	1. 0.56 2. 1100	DINARPU SDA

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengunjung Perpustakaan Tahunan											
22303	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dialih Mediakan	%	20	40	60	15.000.000	80	15.060.000	100	16.000.000	100	DINARPU SDA
22402	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	50	N/A	48	255.000.000	53	260.000.000	58	300.000.000	58	DINARPU SDA
22403	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	100	1	100	30.000.000	100	30.000.000	100	55.000.000	100	DINARPU SDA
22404	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Arsip Tertutup yang Diizinkan untuk Digunakan	%	0.108	N/A	33	10.000.000	66	10.000.000	100	15.000.000	100	DINARPU SDA
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	6.328.814.000	100	6.485.980.000	100	6.713.721.000	100	DINARPU SDA

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
32503	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	956	956	986.83	65.000.000	1001.63	65.000.000	1016.65	65.000.000	1016.65	DINKANN AK
32504	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11889	11600	12186	460.000.000	12490.65	460.000.000	12802.92	580.000.000	12802.92	DINKANN AK
32505	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase perairan umum yang diawasi	%	10	N/A	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	DINKANN AK
32506	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Produksi Olahan Hasil Perikanan	1. Ton	1. 200	1. 200	1. 500	115.000.000	1. 520	149.164.000	1. 540.8	190.000.000	1. 540.8	DINKANN AK
		2. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	2. kg/kapita/tahun	2. 0.1	2. 0	2. 2		2. 2		2. 2		2. 2	
32702	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	3	3	2	305.000.000	2	305.000.000	2	305.000.000	2	DINKANN AK
32703	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Jumlah jenis infrastruktur peternakan yang disediakan	Jenis	2	N/A	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	DINKANN AK

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Prasarana Pertanian												
32704	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase penurunan angka kejadian penyakit	1. %	1. 10	1. N/A	1. 8	405.000.000	1. 9	405.000.000	1. 10	430.000.000	1. 10	DINKANN AK
		2. Persentase Peningkatan Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	2. %	2. 0	2. N/A	2. 2		2. 2		2. 2		2. 2	
32706	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase peningkatan usaha peternakan yang berizin	%	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	DINKANN AK
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	1. %	1. 0	1. 100	1. 100	11.774.640.000	1. 100	12.057.000.000	1. 100	12.535.878.000	1. 100	DINKANN AK
		2. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	2. %	2. 100	2. 100	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
20902	Program Pengelolaan	Peningkatan jumlah	%	0	N/A	1. 00	4.550.000.000	1.50	4.605.000.000	2.00	4.605.500.000	2.00	DINPERTAN KP

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan											
20903	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Angka kecukupan energi 2. Angka kecukupan protein	1. kkal/kapita/hari 2. gram/kapita/hari	1. 2001.3 2. 57.60	1. N/A 2. N/A	1. 2100 2. 57	1.390.000.000 	1. 2100 2. 57	1.529.000.000 	1. 2100 2. 57	1.641.900.000 	1. 2100 2. 57	DINPERTAN KP
20904	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan	Desa	16	N/A	5	575.000.000	6	632.500.000	7	636.750.000	7	DINPERTAN KP
20905	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan	%	4.61	N/A	10	425.000.000	15	467.500.000	20	476.250.000	20	DINPERTAN KP
32702	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produktivitas komoditas Padi 2. Produktivitas komoditas Jagung	1. Ton / Ha 2. Ton / Ha	1. 5.77 2. 6.28	1. N/A 2. N/A	1. 5.88 2. 6.40	1.566.000.000 	1. 5.92 2. 6.45	1.702.600.000 	1. 5.95 2. 6.50	1.732.860.000 	1. 5.95 2. 6.50	DINPERTAN KP

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3. Produktivitas komoditas Kedelai	3. Ton / Ha	3. 1.59	3. N/A	3. 1.70		3. 1.75		3. 1.80		3. 1.80	
32703	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	0	50	5	2.800.000.000	6	2.870.000.000	7	2.881.000.000	7	DINPERTAN KP
32705	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	%	37	N/A	75	400.000.000	76	440.000.000	77	471.000.000	77	DINPERTAN KP
32707	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok	%	7.19	N/A	4	1.715.000.000	5	1.783.892.135	6	1.822.150.000	6	DINPERTAN KP
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	96.78	100	95	30.376.262.000	95	30.779.057.865	95	31.167.984.000	95	DINPERTAN KP
33002	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	85.00	85	85.00	65.271.633	85.50	66.780.260	86.00	69.948.433	86.00	DINPERINDAG
33003	Program Peningkatan	Persentase pasar rakyat	%	92.31	N/A	92.31	6.555.000.000	96.15	6.706.968.330	100	5.526.107.491	100	DINPERINDAG

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Sarana Distribusi Perdagangan	yang dipelihara dan direvitalisasi											
33004	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang	%	15	15	15	2.868.626.031	14	2.934.928.740	13	3.074.166.898	13	DINPERI NDAG
33005	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	\$ USD	N/A	35000000	45000000	637.620.183	47000000	652.357.533	50000000	683.306.517	50000000	DINPERI NDAG
33006	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTP yang ditera tera ulang	%	86,97	100	71	400.766.826	72	410.029.771	73	429.482.301	73	DINPERI NDAG
33007	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	1.00	0	1.00	170.000.000	1.10	173.466.958	1.20	180.747.699	1.20	DINPERI NDAG
33102	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang dibina	%	0,11	N/A	0,2	628.793.679	0,3	643.327.021	0,4	673.847.582	0,4	DINPERI NDAG
33103	Program Pengendalian Izin Usaha	Persentase jumlah hasil pemantauan	%	100	125	81.25	50.919.126	82.35	52.096.023	83.33	54.567.549	83.33	DINPERI NDAG

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Industri Kabupaten/Kota	dan pengawasan dengan jumlah IUI IPUI Kecil dan Menengah IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi terkait											
33104	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	40	40	20.360.577	40	20.831.172	40	21.819.439	40	DINPERINDAG
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	35.941.344.945	100	36.772.059.192	100	38.516.590.091	100	DINPERINDAG
40102	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi	1. %	1. 100	1. N/A	1. 100	10.322.814.060	1. 100	10.553.048.660	1. 100	10.555.102.660	1. 100	SETDA
		2. Persentase kerjasama daerah dan pengembangan potensi daerah yang terfasilitasi	2. %	2. 100	2. N/A	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3. Persentase permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi	3. %	3. 100	3. N/A	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100	
		4. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPPD	4. Nilai	4. 3.44	4. 4	4. 3.5		4. 3.6		4. 3.7		4. 3.7	
40103	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Persentase BUMD yang sehat dan profitable	1. %	1. 100	1. 100	1. 100	2.233.535.000	1. 100	2.454.259.500	1. 100	2.591.784.500	1. 100	SETDA
		2. Persentase jumlah paket tender pengadaan barang jasa yang berhasil	2. %	2. 100	2. 100	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
		3. Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian kinerjanya	3. %	3. N/A	3. N/A	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100	
		4. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	4. %	4. 100	4. N/A	4. 100		4. 100		4. 100		4. 100	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kinerja Perangkat Daerah											
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	39.181.862.940	100	39.926.731.840	100	40.298.436.840	100	SETDA
40202	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	1. Persentase capaian fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	1. %	1. N/A	1. N/A	1. 90	17.525.000.000	1. 91	18.185.108.989	1. 92	18.536.600.029	1. 92	SETWAN
		2. Persentase capaian fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	2. %	2. N/A	2. 100	2. 90		2. 91		2. 92		2. 92	
		3. Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	3. %	3. N/A	3. N/A	3. 90		3. 91		3. 92		3. 92	
		4. Persentase capaian fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4. %	4. N/A	4. N/A	4. 90		4. 91		4. 92		4. 92	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5. Persentase capaian fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5. %	5. N/A	5. N/A	5. 90		5. 91		5. 92		5. 92	
		6. Persentase capaian fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6. %	6. N/A	6. N/A	6. 90		6. 91		6. 92		6. 92	
		7. Persentase capaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	7. %	7. N/A	7. N/A	7. 90		7. 91		7. 92		7. 92	
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	0	100	90	50.697.532.000	91	51.614.254.011	92	52.074.167.971	92	SETWAN
50102	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase capaian kinerja program prioritas	1. %	1. 70.59	1. N/A	1. 30	570.000.000	1. 60	704.000.000	1. 100	725.000.000	1. 100	BAPPEDA LITBANG

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		pembangunan daerah 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur	2. %	2. 0	2. N/A	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
50103	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik	%	94.64	N/A	100	711.000.000	100	749.000.000	100	879.000.000	100	BAPPEDA LITBANG
50502	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	1. %	1. 100	1. N/A	1. 100	1.160.000.000	1. 100	1.235.000.000	1. 100	1.380.000.000	1. 100	BAPPEDA LITBANG
		2. Indeks Inovasi Daerah	2. Nilai	2. 59.10	2. N/A	2. 62		2. 65		2. 69		2. 69	
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	10.427.778.000	100	10.478.214.000	100	10.806.842.000	100	BAPPEDA LITBANG
50202	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase ketepatan waktu	1. %	1.	1. 100	1. 100	648.859.701.297	1. 100	646.354.314.550	1. 100	637.444.800.580	1. 100	BKAD

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		penetapan APBD 2. Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	2. %	2.	2. 100	2. 100		2. 100		2. 100		2. 100	
50203	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	%	100	100	100	11.295.000.000	100	12.393.950.000	100	14.862.948.000	100	BKAD
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	0	100	100	38.378.162.703	100	41.507.655.450	100	49.067.221.420	100	BKAD
50204	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	%	60	56	56	2.487.000.000	57	2.497.000.000	59	2.528.000.000	59	BAPEND A
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	23.528.683.000	100	24.119.984.000	100	25.351.740.000	100	BAPEND A

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Pelaksana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
50302	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian	%	100	N/A	100	5.890.000.000	100	6.840.000.000	100	7.750.000.000	100	BKPSDM
50402	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	0.8	1	0.8	5.000.000.000	0.8	5.500.000.000	0.8	6.000.000.000	0.8	BKPSDM
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	70.697.251.000	100	71.595.242.000	100	71.116.113.000	100	BKPSDM
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. %	1. 1	1. N/A	1. 1	1.108.840.509	1. 1	1.134.469.136	1. 1	1.188.290.323	1. 1	INSPEKTORAT
		2. Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD	2. %	2. 30	2. N/A	2. 30		2. 30		2. 30		2. 30	
		3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP	3. %	3. 53	3. 55	3. 55		3. 55		3. 57		3. 57	

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		yang diselesaikan 4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	4. %	4. 94	4. 96	4. 94		4. 94.5		4. 95		4. 95	
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Level Kapabilitas APIP	1. level	1. 2	1. N/A	1. 2	678.089.421	1. 2	693.762.098	1. 3	726.675.377	1. 3	INSPEKTORAT
		2. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B	2. %	2. 45	2. N/A	2. 50		2. 51		2. 52		2. 52	
		3. Persentase desa berisiko tinggi	3. %	3. 10	3. N/A	3. 10		3. 7		3. 5		3. 5	
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	12.496.030.070	100	12.784.850.766	100	13.391.386.300	100	INSPEKTORAT
70102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	86	87	1.031.002.350	88	1.068429..750	89	1.188.655.950	89	27 KECAMATAN

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Dan Pelayanan Publik												
70103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	N/A	100	7.417.715.539	100	7.453.641.040	100	7.612.841.527	100	27 KECAMATAN
70104	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	N/A	100	883.675.750	100	901.080.250	100	977.645.975	100	27 KECAMATAN
70105	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	N/A	100	886.755.000	100	914.705.000	100	1.017.238.500	100	27 KECAMATAN
70106	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	N/A	100	481.651.324	100	1.011.874.640	100	700.816.327	100	27 KECAMATAN
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	98.875.445.037	100	100.759.144.320	100	105.930.305.721	100	27 KECAMATAN
80102	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan	%	100	90	100	1.152.967.000	100	1.268.263.700	100	1.386.600.897	100	BAKESBANGPOL

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Karakter Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan											
80103	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	100	75	100	51.924.417.556	100	6.476.602.712	100	3.424.417.555	100	BAKESBA NGPOL
80104	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	%	N/A	N/A	100	300.000.000	100	330.000.000	100	336.600.000	100	BAKESBA NGPOL
80105	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	%	90	100	100	385.200.000	100	423.720.000	100	423.720.000	100	BAKESBA NGPOL
80106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	%	N/A	N/A	100	1.005.000.000	100	1.105.500.000	100	1.105.500.000	100	BAKESBA NGPOL

Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penanganan Konflik Sosial												
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	4.160.881.444	100	4.576.969.588	100	5.034.666.548	100	BAKESBANGPOL
	JUMLAH TOTAL						3.657.629.665.700		3.658.640.800.800		3.687.032.873.200		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan Tujuan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan pembangunan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/RKPD	Target RPD			Target Akhir
			2021	2022		2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,12	73,08	75,0	73,50	74	75	75
2	Angka kemiskinan	%	13,66	12,84	11,00	10,90 - 9,96	10,87 - 9,93	10,84 - 9,90	10,84 - 9,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,05	6,05	6,05	5,61 - 6,00	5,56 - 5,95	5,51 - 5,90	5,51 - 5,90
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,44	73,17	7,58	75,50	75,75	76,00	76,00
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00	5,86	5,86	5,90 - 6,40	6,00 - 6,45	6,10 - 6,50	6,10 - 6,50
6	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,543	3,255	NA	3,50	3,60	3,70	3,7 0
7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,97	79,02	74,04	81,13	82,07	83,01	83,01

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2023. diolah

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel 8.2 merupakan indikator tujuan perangkat daerah pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Banyumas yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	No	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/R KPD	Target RPD			Target Akhir
				2021	2022		2024	2025	2026	
1		DINAS PENDIDIKAN								
	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	13,21	12,91	13,40	13,50	13,60	13,60
2		DINAS KESEHATAN								
	2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,80	73,88	73,93	73,96	74,04	74,12	74,12
3		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS								

No	No	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/R KPD	Target RPD			Target Akhir
				2021	2022		2024	2025	2026	
	3	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit	Indeks	87,16	86,87	85	87	87,5	88	88
4		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG								
	4	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit	Indeks	85,09	91,25	85	86	86,5	87	87
5		DINAS PEKERJAAN UMUM								
	5	Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	%	76,4095	78,232	N/A	79,782	80,601	81,419	81,419
6		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	%	0,06	1,48	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	7	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	%	0,38	1,17	2	2	2	2	2
	8	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	0,099	0,112	0,115	0,144	0,157	0,170	0,17
	9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99,983	99,984	99,985	100	100	100	100
7		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
	10	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,64	0,80	N/A	0,84	0,87	0,90	0,90
8		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	11	Standar deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	N/A	N/A	N/A	6,5	6,4	6,3	6,3
9		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
	12	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	N/A	N/A	N/A	5	5	5	15
10		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	13	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
	14	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7033	0,7163	0,694	0,72	0,73	0,74	0,74
11		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH								

No	No	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/R KPD	Target RPD			Target Akhir
				2021	2022		2024	2025	2026	
	15	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	1,127	1,730	1,42	1,96	2,08	2,19	2,19
	16	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	17	Persentase koperasi sehat	%	28,44	36,33	31,11	40	40,28	41,09	41,09
	18	Persentase pembinaan kepada Serikat Pekerja / Organisasi pekerja	%	N/A	N/A	N/A	35,95	57,95	71,94	71,94
	19	Persentase lowongan kerja terdaftar terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	54,12	70,56	50	66	66	66	66
12		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,83	63,81	64,15	64,2	64,22	64,25	64,25
13		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	21	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan	Indeks	90,25	89	89	89,05	89,10	89,15	89,15
14		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA								
	22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,74	70,10	71,94	71,00	71,10	71,20	71,20
	23	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,36	-2,95	1,77	1,36	1,35	1,34	1,34
	24	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	528	595	650	600	610	620	620
15		DINAS PERHUBUNGAN								
	25	Rasio konektivitas wilayah	Rasio	0,6865*)	0,7025*)	0,89*)	0,635	0,635	0,635	0,635
16		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,73	2,60	3,30	3,3	3,5	3,7	3,7
	27	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai	93	90,5	97	91,50	92,0	92,50	92,50
17		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	28	IKM pelayanan terpadu satu pintu	Indeks	92,75	87,33	90	90,5	90,75	91	91
	29	Nilai Investasi Daerah	Milyar	1021	1662	600	800	1600	2400	2400
18		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								

No	No	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/R KPD	Target RPD			Target Akhir
				2021	2022		2024	2025	2026	
	30	Persentase peningkatan kunjungan daya tarik wisata dan event	%	N/A	3,52	N/A	2	3	4	4
	31	Tingkat daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	%	0,43	0,46	NA	0,55	0,58	0,63	0,63
19		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN								
	32	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	32,61	N/A	33	33,25	33,5	33,5
	33	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	62,92	64,35	62	65	66	67	67
20		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN								
	34	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,76	4,11	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75
	35	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	5,2	3,2	N/A	4	4	4	4
	36	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	2,94	3,2	3	2	2	2	2
21		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								
	37	Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan	%	N/A	N/A	N/A	6,66	13,33	20	20
	38	Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan	%	N/A	N/A	N/A	13,33	20	26,67	26,67
	39	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras	%	N/A	N/A	N/A	110	115,50	121,28	121,28
22		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
	40	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	%	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2
	41	Persentase peningkatan omzet penjualan pelaku usaha perdagangan	%	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5
23		SEKRETARIAT DAERAH								
	42	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	74,96	78,46	80	79	79,5	80	80
	43	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,994	3,029	3,000	3,050	3,075	3,100	3,100
24		SEKRETARIAT DPRD								
	44	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks	100	100	100	85	86	87	87
25		INSPEKTORAT DAERAH								
	45	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	N/A	0,16	3	0,17	0,17	0,17	0,17

No	No	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/R KPD	Target RPD			Target Akhir
				2021	2022		2024	2025	2026	
26		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
	46	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	%	24	25,2	N/A	25,5	25,75	26	26
	47	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	%	66,67	50	70	70,5	76	83	83
	48	Nilai Manajemen Risiko (MRI)	Nilai	3,013	3,000	3,000	3,025	3,050	3,075	3,075
27		BADAN PENDAPATAN DAERAH								
	49	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	16,73	22,36	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9
28		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	50	Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
29		BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
	51	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	37,33	71	71	71	72	73	73
30		KECAMATAN								
	52	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2023. diolah

Keterangan :

*) Kondisi awal dan target tahun 2023 berbeda perhitungan dengan target 2024-2026

8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

A. Aspek kesejahteraan masyarakat

Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

B. Aspek daya saing daerah

Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

C. Aspek pelayanan umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banyumas dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.3.

Tabel 8.3
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.			Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
	1	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,44	73,17	72,58	75,50	75,75	76,00	76,00
	2	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	13,21	12,91	13,40	13,50	13,60	13,60
	3	3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,63	7,78	7,55	7,94	8,00	8,08	8,08
	4	4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,80	73,88	73,93	73,96	74,04	74,12	74,12
	5	5	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,97	79,02	74,04	81,13	82,07	83,01	83,01
	6	6	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	Nilai	81,68	80,98	N/A	83,43	84,68	85,95	85,95
	7	7	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Nilai	80,53	79,48	N/A	81,48	82,29	83,12	83,12
	8	8	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Nilai	78,27	77,20	N/A	79,14	79,93	80,73	80,73
	9	9	Angka Kemiskinan	%	13,66	12,84	11,00	10,90 - 9,96	10,87 - 9,93	10,84 - 9,90	10,84 - 9,90
	10	10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,349	1,75	N/A	1,35	1,15	0,86	0,86
	11	11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,36	-2,95	1,77	1,36	1,35	1,34	1,34
	12	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,54	89,15	87,67	89,45	89,75	90,05	90,05
	13	13	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	528	595	650	600	610	620	620
	14	14	Tingkat daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	%	N/A	N/A	N/A	0,60	0,65	0,70	0,70
	15	15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	N/A	32,61	N/A	33,0	33,25	33,5	33,5
	16	16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00	5,86	5,86	5,90 - 6,40	6,00 - 6,45	6,10 - 6,50	6,10 - 6,50
	17	17	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Milyar Rupiah	40.686,81	43.069,50	N/A	46.630	49,124	51,924	51,924
	18	18	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	164,25	164	160	152	148	144	144
	19	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,05	6,05	6,05	5,61 - 6,00	5,56 - 5,95	5,51 - 5,90	5,51 - 5,90

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	20	20	Tingkat Kesempatan Kerja	%	93,95	N/A	N/A	94,15	94.25	94.35	94.35
	21	21	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA	%	92,81	93,51	N/A	93,53	93,54	93,55	93,55
B.			Aspek Daya Saing								
	1	22	Angka Kriminalitas	per 10,000 penduduk	1,48	1,57	1,516	1,48	1,46	1,44	1,44
	2	23	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	71,12	73,08	75,0	73,5	74,0	75,0	75,0
	3	24	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	37,33	71	71	71	72	73	73
	4	25	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	N/A	4,54	3,85	4,57	4,60	4,65	4,65
	5	26	Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	34,12	32,90	N/A	33,05	33,10	33,15	33,15
	6	27	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	74,96	78,46	80	79	79,5	80	80
	7	28	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	8	29	Persentase atas pengamanan aset daerah	%	85	86,08	N/A	91	93	95	95
	9	30	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,994	3,029	3,000	3,050	3,075	3,100	3,100
	10	31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,73	2,60	3,30	3,3	3,5	3,7	3,7
	11	32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,83	63,81	64,15	64,2	64,22	64,25	64,25
	12	33	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,543	3,255	NA	3,5	3,6	3,7	3,7
	13	34	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	3,583	3,5	N/A	3,42	3,42	3,42	3,42
	14	35	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi pada IDSD	Indeks	N/A	2,93	N/A	2,95	2,96	2,97	2,97
C.			Aspek Pelayanan Umum								
1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	1	36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	13,21	12,91	13,40	13,50	13,60	13,60
	2	37	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	7,63	7,78	7,55	7,94	8,00	8,08	8,08
	3	38	APM PAUD	%	75,15	75,15	75,15	70,5	70,6	70,7	70,7

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	2026
	4	39	APM SD/MI	%	98,15	98,15	98,15	90,08	91,02	91,04	91,04
	5	40	APM SMP/MTs	%	81,65	81,65	81,86	82,6	86,7	90,7	90,7
	6	41	APK PAUD	%	78,2	78,2	N/A	63,15	63,4	63,9	63,9
	7	42	APK SMP	%	96	102	N/A	105,71	104,2	103,3	103,3
	8	43	APK SD	%	102,92	96	N/A	99,49	99,53	99,55	99,55
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1	44	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,15	0,16	0,32	0,36	0,40	0,44	0,44
	2	45	Persentase Desa Siaga	%	19,34	21,75	N/A	23	24	25	25
	3	46	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,80	73,88	73,93	73,96	74,04	74,12	74,12
	4	47	Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Banyumas)	Indeks	87,16	86,87	85	87	87,5	88	88
	5	48	Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Ajibarang)	Indeks	85,09	91,25	85	86	86,5	87	87
	6	49	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Banyumas)	%	98	98	85	90	95	97,5	97,5
	7	50	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Ajibarang)	%	86,80	90	85	86	86,5	87	87
3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	1	51	Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	%	76,4095	78,232	N/A	79,782	80,601	81,419	81,419
	2	52	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	%	66,217	73,109	N/A	77,603	79,85	82,097	82,097
	3	53	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	79,766	81,249	N/A	84,167	85,626	87,085	87,085
	4	54	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap	%	96,375	97,885	N/A	98,187	98,489	98,792	98,792
	5	55	Kinerja pelayanan irigasi	%	80,44	81,21	N/A	82,82	83,82	84,82	84,82
	6	56	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	%	0,5050	0,5048	0,513	0,520	0,528	0,536	0,536
	7	57	Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	%	50,758	51,682	N/A	53,425	54,297	55,168	55,168

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	2026
	8	58	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	%	82,975	82,979	N/A	83,043	83,106	83,169	83,169
	9	59	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	100	N/A	100	100	100	100
4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	1	60	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	%	0,06	1,48	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	2	61	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	%	0,38	1,17	2	2	2	2	2
	3	62	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	0,099	0,112	0,115	0,144	0,157	0,170	0,170
	4	63	Rasio Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Rasio	N/A	N/A	N/A	0,1190	0,2381	0,3571	0,3571
5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	1	64	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,70	0,80	N/A	0,84	0,87	0,90	0,90
	2	65	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	164,25	164	160	152	148	144	144
	3	66	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	N/A	N/A	N/A	5	5	5	15
	4	67	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	N/A	100	100	100	100
	5	68	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	menit	N/A	N/A	N/A	30	25	20	20
6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	1	69	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
	2	70	Persentase PPKS yang terlindungi	%	100	100	100	100	100	100	100
	3	71	Persentase PPKS yang terehabilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	1	72	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten kota	%	54,12	59,83	50	60	60	60	60
	2	73	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	3	74	Persentase Lowongan Kerja terdaftar terhadap Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	%	N/A	N/A	N/A	66	66	66	66
	4	75	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	5	76	Persentase pembinaan kepada Organisasi Pengusaha/Asosiasi Perusahaan	%	N/A	N/A	N/A	40	60	80	80
	6	77	Persentase pembinaan kepada Serikat Pekerja/Organisasi pekerja	%	N/A	N/A	N/A	35,95	57,95	71,94	71,94
8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	1	78	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,74	70,10	N/A	71,00	71,10	71,20	71,20
	2	79	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	528	595	650	600	610	620	620
9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	1	80	Produksi Perkebunan	Ton	71.505	72.947,19	N/A	73.678,49	74034,21	74417,11	222129,81
	2	81	Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan di desa Rawan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	1,0	1,5	2,0	2,0
	3	82	Persentase penguatan cadangan pangan	%	107,32	84	86	86	87	88	88
	4	83	Persentase desa rawan pangan yang diberi bantuan	%	N/A	19,04	10	6	7	8	8
	5	84	Skor pola pangan harapan	skor	88,5	91,7	92,16	92,62	93,08	93,55	93,55
	6	85	Produksi Hortikultura	Ton	40.409	47.744,16	40.152	47.982,88	48.222,80	48.463,91	144.669,59
	7	86	Produksi tanaman pangan	Ton	405.607,4	422.160	400.480	424.700	426.700	428.400	1279800
	8	87	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	2,94	3	3	2	2	2	2
	9	88	Produksi Peternakan	Ton	45.550	47.985	N/A	48.556	49527	50518	148601
	10	89	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras	%	N/A	97	N/A	110	115,50	121,28	121,28

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	11	90	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,82	-0,39	1,0	0,50	0,55	0,60	0,60
10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	1	91	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	1	92	Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik	%	9,5	10,26	8,28	10,3	10,32	10,34	10,34
	2	93	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68	51,74	53,92	54	54,01	54,05	54,05
	3	94	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	85,43	86,04	85,30	85,30	85,32	85,35	85,35
	4	95	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	67	43,44	42,60	42,70	42,72	42,75	42,75
	5	96	Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	6	97	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	63,17	75,11	N/A	75	76	77	77
	7	98	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Indeks	72,83	63,81	64,15	64,20	64,22	64,25	64,25
12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	1	99	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	Tingkat akurasi Data Kependudukan dari Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	N/A	96,97	95,5	97,2	97,5	97,8	97,8
	3	101	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan	Indeks	90,25	89	89	89,05	89,10	89,15	89,15
13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	1	102	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7033	0,7163	0,694	0,72	0,73	0,74	0,74
	2	103	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	200	N/A	26	26	29	29
14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	1	104	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,36	-2,95	1,77	1,36	1,35	1,34	1,34

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	2	105	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,36	4,32	0,01	0,41	0,01	0,01	0,01
15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	1	106	Rasio Konektivitas	Rasio	0,6865*)	0,7025*)	0,89*)	63,5	63,5	63,5	63,5
	2	107	Indeks konektivitas angkutan jalan	Indeks	0,78	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	3	108	Indeks konektivitas angkutan sungai	Indeks	0,125	0,125	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25
	4	109	V/C Ratio di jalan Kabupaten	Rasio	0,74	0,6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	1	110	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,73	2,60	3,30	3,3	3,5	3,7	3,7
	2	111	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai	93	90,5	97	91,50	92,0	92,50	92,50
	3	112	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	%	80	90	100	91	93	95	95
17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	1	113	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	1,127	1,730	1,42	1,96	2,08	2,19	2,19
	2	114	Persentase koperasi sehat	%	28,44	36,33	31,11	40,00	40,28	41,09	41,09
	3	115	Persentase peningkatan UMKM yang berdaya dan berkembang	%	N/A	N/A	N/A	6,36	6,84	8,00	8,00
	4	116	Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha <u>simpan pinjam</u>	%	N/A	N/A	N/A	14,58	28,69	46,37	46,37
	5	117	Persentase Koperasi Aktif	%	57,27	54,30	82,07	58,04	58,73	59,06	59,06
	6	118	Persentase koperasi yang mematuhi perundang undangan	%	N/A	N/A	N/A	21,43	22,22	27,40	27,40
18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	1	119	Nilai investasi Daerah	Milyar	1021	1662	600	800	1600	2400	2400
	2	120	IKM pelayanan terpadu satu pintu	Indeks	92,75	87,33	90	90,5	90,75	91	91
	4	121	Persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	%	N/A	N/A	N/A	96	96,5	97	97

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	5	122	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	N/A	N/A	N/A	76	77	78	78
19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	1	123	Tingkat daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	%	N/A	0,46	N/A	0,55	0,58	0,63	0,63
	2	124	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	N/A	N/A	N/A	0,06	0,07	0,10	0,10
	3	125	Persentase peningkatan prestasi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi Dinporabudpar	%	N/A	15,74	N/A	6,47	7,43	13,84	13,84
20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	1	126	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	%	90	100	100	100	100	100	100
	2	127	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100
21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	1	128	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	64	64	100	67	70	73	73
22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	1	129	Persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata	%	N/A	NA	N/A	12,5	16,67	33,33	33,33
23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	1	130	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	62,9*)	64,4*)	55	56	57	58	58
	2	131	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	N/A	32,61	N/A	33,00	33,25	33,50	33,50
24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	1	132	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Nilai	N/A	N/A	N/A	37	38	39	39
	2	133	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	62,92	64,35	62	65	66	67	67
25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	1	134	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,76	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPd	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	2	135	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,73	4,31	1,5	2	2	2	2
	3	136	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2,01	1,69	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4	137	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	-45,9	2	N/A	4	4	4	4
26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	1	138	Persentase peningkatan kunjungan daya tarik wisata dan event	%	N/A	3,52	N/A	2	3	4	4
	2	139	Persentase Peningkatan PAD sektor Pariwisata	%	N/A	299.93	7	2	3	4	4
	3	140	persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	N/A	24,03	15	22,73	29,63	31,43	31,43
27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	1	141	Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan	%	N/A	N/A	N/A	6,66	13,33	20	20
	2	142	Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan	%	N/A	N/A	N/A	13,33	20	26,67	26,67
	3	143	Produksi olahan hasil pertanian	Ton	N/A	126	N/A	128	129	130	387
28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	1	144	Persentase peningkatan omzet penjualan pelaku usaha perdagangan	%	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5
	2	145	Persentase peningkatan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan produk potensial pertanian dan non pertanian	%	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4
	3	146	Persentase peningkatan pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi	%	N/A	N/A	N/A	3	7	10	10
	4	147	Indeks Keterjangkauan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	%	80,53	79,48	N/A	75	76	77	77
29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	1	148	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	%	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2
30			SEKRETARIAT DAERAH								

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
	1	149	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	74,96	78,46	80	79	79,5	80	80
	2	150	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,994	3,029	3,000	3,050	3,075	3,100	3,100
	3	151	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84,89	86	87	87,25	87,5	88	88
	4	152	Persentase capaian kinerja Sekretariat Daerah	%	NA	NA	100	100	100	100	100
	5	153	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP	%	51	51	51	50	50	50	50
31			SEKRETARIAT DPRD								
	1	154	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks	100*)	100*)	100	85	86	87	87
	2	155	Persentase layanan Sekretariat DPRD yang terealisasi dalam jadwal Bamus	%	N/A	N/A	N/A	90	91	92	92
32			PERENCANAAN								
	1	156	Nilai SAKIP komponen perencanaan pada pemerintah daerah	Nilai	24,00	25,20	N/A	25,5	25,75	26	26
	2	157	Nilai Manajemen Risiko (MRI)	Nilai	3,013	3,000	3,000	3,025	3,050	3,075	3,075
33			KEUANGAN								
	1	158	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	16,73	22,36	19,60	19,7	19,8	19,9	19,9
	2	159	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah PAD	%	14,03	-8	4,25	4,30	4,40	4,50	4,50
	3	160	Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
	4	161	Persentase Penyerapan APBD	%	90	91,02	95	92	93	95	95
34			KEPEGAWAIAN								
	1	162	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	37,33	71	71	71	72	73	73
	2	163	Persentase kinerja ASN Kategori BAIK	%	100	100	100	100	100	100	100
35			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	1	164	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100

No	No	No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target RPJMD/ RKPD	Target RPD			Target Akhir
					2021	2022		2023	2024	2025	
36			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	1	165	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	%	66,67	50	70	70,5	76	83	83
37			INSPEKTORAT DAERAH								
	1	166	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	N/A	0,16	N/A	0,17	0,17	0,17	0,17
	2	167	Nilai IEPK	Nilai	2,793	2,91	3,00	2,915	2,920	2,925	2,925
38			KECAMATAN								
	1	168	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	2	169	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	N/A	N/A	N/A	100	1000	100	100
	3	170	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A	83,02	83,09	83,15	83,15
39			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	1	171	Standar deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	N/A	N/A	N/A	6,5	6,4	6,3	6,3
	2	172	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	N/A	N/A	N/A	0,015	0,015	0,015	0,045
	3	173	Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam	%	N/A	N/A	N/A	80	80	80	80

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2023. diolah

BAB IX

PENUTUP

Dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan indikator kinerja daerah.

RPD menjadi pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPD Tahun 2024-2026 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2024-2026.

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPD 2024-2026 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama RPJMD periode selanjutnya belum tersusun. Program prioritas daerah tahun transisi mengacu pada tujuan, sasaran, maupun program prioritas tahun terakhir pada RPD ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai capaian terakhir tahun sebelumnya.

Pedoman ini perlu disusun untuk membantu, Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada ataupun Penjabat Bupati yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkada dalam menyusun RKPD maupun APBD.

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Banyumas periode selanjutnya. Dokumen RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Banyumas periode selanjutnya. RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2027.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi serta efektivitas pendanaan maupun waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPD sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD ini;

3. Penjabaran lebih lanjut RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Banyumas;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD, maka Bappeda Kabupaten Banyumas wajib menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;
5. RPD Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

REGISTER RISIKO SASARAN STRATEGIS PEMKAB BANYUMAS TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran			Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Risiko			Sebab			Dampak		Tindak Pengendalian yang sudah dilakukan	Rencana Tindak Pengendalian	SKPD TERKAIT
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing				Indek Reformasi Birokrasi											
	1	1.1	Mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Internal	C	Belum optimalnya pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan efisien, kurang profesionalnya birokrasi pelayanan, dan menghambatnya pencapaian perencanaan pembangunan daerah yang strategis	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Mengimplementasikan Kebijakan - PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS - Permenpan RP No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	BKPSDM
	2	1.2	Mengoptimalkan Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal		Kepala Daerah	Kebijakan pelayanan publik belum sepenuhnya mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Mengimplementasikan Kebijakan Perbup No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik belum sepenuhnya mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	DINDUKCAPIL
	3	1.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab		Kepala Daerah	Belum memiliki kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Internal	C	Sistem informasi belum efektif memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pemerintahan	1.Kepala Daerah 2.OPD Terkait 3. Masyarakat	Mengimplementasikan Permenpan RB no 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	DINKOMINFO
					Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan	Internal	C	Munculnya permasalahan berupa risiko negatif yang tidak teridentifikasi dengan baik	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait		Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	DINKOMINFO
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP	Perencanaan, pengukuran, evaluasi internal dan pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab		Kepala Daerah	Masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan Pemkab terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda;	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	BKPSDM
				Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab		Kepala Daerah	Kebijakan yang ada belum efektif dalam pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan Pemkab	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda;	1.Kepala Daerah 2.OPD Terkait	Telah tersusun Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Perubahan Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan aturan terbaru	INSPEKTORAT
				Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel		Kepala Daerah	Belum efektifnya implementasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah	Internal	C	Menurunnya akuntabilitas laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Telah disusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 60 Tahun 2020. Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Pemantauan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	BKAD

Tujuan		Sasaran			Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Risiko			Sebab			Dampak		Tindak Pengendalian yang sudah dilakukan	Rencana Tindak Pengendalian	SKPD TERKAIT
						Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
														Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa		
					Nilai Komponen Hasil Inde Reformasi Birokrasi	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi			Kurangnya komitmen dan pemahaman semua Pimpinan OPD untuk mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi			Menurunnya kinerja Reformasi Birokrasi			Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah				Laju Pertumbuhan Ekonomi											
		4	2.1	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	Angka Kriminalitas	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat		Kepala Daerah	Kurangnya penegakan Perda	Internal	C	Munculnya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Pemantauan penegakan Perda	SATPOL PP
					Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)											
		5	2.2	Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah	Indek Daya Saing Infrastruktur	Menurunnya ketahanan infrastruktur		Kepala Daerah	Adanya perubahan iklim dan bencana alam	Eksternal	C	Terhambatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Mitigasi ketahanan Infrastruktur	DINPERKIM
						Kualitas infrastruktur tidak sesuai standar				Internal	C	Terhambatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Pengendalian mutu infrastuktur	DINPERKIM
						Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah		Kepala Daerah	Belum ada Rencana Induk Jaringan Jalan	Internal	C	Masih adanya wilayah yang belum terlayani transportasi	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	DINPERKIM
		6	2.3	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Masih rendahnya kualitas air		Kepala Daerah	Belum efektifnya kelembagaan yang menangani SDA	Internal	C	Kerusakan lingkungan hidup	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang menangani SDA	DLH
					Indeks Risiko Bencana (IRB)	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana		Kepala Daerah	Belum semua jenis bencana memiliki Dokumen rencana kontijensi	Internal		Potensi kerugian akibat bencana bertambah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	BPBD
		7	2.4	Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi pada IDSD	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)		Kepala Daerah	Belum terbentuk Klinik Kekayaan Intelektual	Internal		Tidak terlayannya Kekayaan intelektual masyarakat	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	BAPPEDA LITBANG
						Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah		Kepala Daerah	Belum tersusunnya roadmap SIDA	Internal		Kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan roadmap SIDA	BAPPEDA LITBANG
		8	2.5	Optimalnya Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan		Kepala Daerah	Belum efektifnya kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	Internal	C	Tidak meningkatnya nilai pdrb	Pemda dan industri kecil		Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	DINPERINDAG
3	Menangani kemiskinan dan Pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM				Angka Kemiskinan											
		9	3.1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin		Kepala Daerah	Bantuan untuk masyarakat miskin belum tepat sasaran	Internal	C	Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin	1. Kepala Daerah 2. Masyarakak 3. OPD Terkait	Telah disusun Perbup no 21 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	DINSOSPERMASDES, DINPERKIM
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)											
		10	3.2	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia		Kepala Daerah	Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dalam peninjaringan tenaga kerja	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	Kerjasama Tripartit	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	DINAKERKOP UKM

Tujuan		Sasaran			Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Risiko			Sebab			Dampak		Tindak Pengendalian yang sudah dilakukan	Rencana Tindak Pengendalian	SKPD TERKAIT
						Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri		Kepala Daerah	belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan usaha	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	Telah disusun Perda Kabupaten Banyumas no 3 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro	DINA KERKOP UKM
		11	3.3	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Persentase Daya Serap Tenaga Kerja	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong pendidikan sekolah menengah dan sarjana memberikan pendidikan atau keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2.Â Masyarakat 3. OPD Terkait	Penyelenggaraan Pelatihan di BLK	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	DINA KERKOP UKM
					Indek Pembangunan Manusia (IPM)											
		12	3.4	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak	Internal	C	Menurunnya Kualitas kesehatan masyarakat serta Tingginya AKI dan AKB	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	DINKES
		13	3.5	Meningkatkan derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Adanya Penikahan usia dini		Kepala Daerah	Implementasi kebijakan Wajar Dikdas belum optimal dan belum adanya kebijakan yang mendorong penanganan Anak Tidak Sekolah	Internal	C	Meningkatnya Anak Putus Sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	DINDIK
				Rata rata Lama sekolah (RLS)	Adanya peluang kerja untuk anak usia sekolah											
		14	3.6	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong budaya literasi masyarakat	Internal	C	Menurunnya daya saing anak	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	DINARPUSDA
		15	3.7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Indek Pembangunan Gender IPG	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan		Kepala Daerah	Kurangnya sinergitas lintas sektoral untuk mendukung Program pemberdayaan perempuan	Internal	C	Menurunnya daya saing perempuan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Telah disusun Perbup no 35 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan PUG	Pemantauan pelaksanaan kebijakan PUG	DPPKBP3A
				Nilai Kota Layak Anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	Kepala Daerah			Belum tersusunnya RAD terkait Kabupaten Layak Anak							
		16	3.8	Terkendalnya pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk		Kepala Daerah	belum adanya GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Menindaklanjuti amanat Perpres No,153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	DPPKBP3A
		17	3.9	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing pemuda	Tingkat Daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Belum sinerginya pembangunan pemuda		Kepala Daerah	Belum adanya RAD Pelayanan Kepemudaan	Internal	C	Kurangnya kapabilitas dan daya saing pemuda	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	DINPORABUDPAR
		4	Memperkuat Ketahanan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)									
18	4.1			Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi		Kepala Daerah	Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan dan Pertanian berkelanjutan belum ditetapkan	Internal	C	Berkurangnya ketersediaan pangan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	Penetapan Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan dan Pertanian berkelanjutan	DINPERTAN KP, DINKANNAK	
						Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah		Kepala Daerah	Belum adanya dokumen rencana pangan	Internal	C	tidak terpenuhinya cadangan pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	Penyusunan dokumen rencana pangan	DINPERTAN KP, DINKANNAK	

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	Risiko			Sebab			Dampak		Tindak Pengendalian yang sudah dilakukan	Rencana Tindak Pengendalian	SKPD TERKAIT
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
		19	4.2	Meningkatkan keterjangkauan pangan	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Masih adanya daerah rawan pangan	Kepala Daerah	Kurangnya sinkronisasi program dan kebijakan yang mengintervensi stakeholder terkait keterjangkauan pangan sesuai dengan kewenangan	Internal	C	tidak meratanya pangan dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	Mengimplementasikan Surat Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 379/KS.02.02/B/10/2022	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	DISPERINDAG
		20	4.3	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Internal	C	belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	Telah disusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	DINPERTANKP

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN